



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

**Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah**

Pemerintah Kota Bontang

“ Terwujudnya Kota Bontang
Sebagai Kota Industri dan
Jasa Yang Maju, Sejahtera
dan Berkelanjutan Sebagai
Daerah Mitra IKN ”

**2025
2029**





SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KERANGKA RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;

- d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

NENI MOERNIAENI

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/35/1/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025-2029

SALINAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang pada Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi kedudukan RPJMD, sistematisasi RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan Perubahan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Prinsip RPJMD meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025-2029;
- c. sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 termasuk dalam menentukan program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan Pembangunan Daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa bakti tahun 2025-2030. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) masing-masing, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berpartisipasi aktif pada proses pembangunan di Kota Bontang.

Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunannya telah melalui serangkaian tahapan yang partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya bersifat *top-down*, namun juga mengakomodir aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, RPJMD ini dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis, seperti pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas infrastruktur perkotaan, tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan Kota Bontang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan dokumen RPJMD ini. Dukungan, masukan, dan pemikiran konstruktif dari berbagai pihak sangat berarti dalam penyusunan dokumen ini.

Kami berharap, dengan adanya RPJMD ini, seluruh elemen di Kota Bontang dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam membangun Kota Bontang yang lebih.

Bontang, 20 Agustus 2025
Wali Kota Bontang



NENI MOERNIAENI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	3
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	7
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	7
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	7
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	57
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	85
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	141
2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024	142
2.2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	157
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	164
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	164
2.3.2. Isu Strategis Daerah	185
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	201
3.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.....	201
3.1.1. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045	201
3.1.2. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Bagian Integral Pencapaian Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	207
3.1.3. Visi Pembangunan Daerah.....	213
3.1.4. Misi Pembangunan Daerah	214
3.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	220
3.1.6. Penyelarasan Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kaltim serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	225
3.1.7. Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025 - 2045	228
3.1.8. Penyelarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	229
3.2. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	230
3.2.1. Strategi Prioritas Pembangunan	230
3.2.2. Arah Kebijakan.....	231
3.2.3. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan	242
3.2.4. Strategi Penahapan Pembangunan.....	247
3.2.5. Program Prioritas.....	249
3.2.6. Program Unggulan	264
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	290
4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	290
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	314

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah 314

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) 316

BAB V PENUTUP 336

5.1. Pedoman Transisi 336

5.2. Kaidah Pelaksanaan 337

LAMPIRAN 338

Lampiran I (Pohon Kinerja Kota Bontang) 338

Lampiran II (Metadata Indikator Kinerja Daerah (IKD) 339

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Batas Wilayah Kota Bontang 7

Tabel 2.2. Luas Kota Bontang Menurut Kecamatan..... 8

Tabel 2.3. Luas Kota Bontang Menurut Kelerengan..... 9

Tabel 2.4. Perkembangan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2020-2024.....12

Tabel 2.5. Produksi Sektor Perikanan Tahun 2020-2024.....13

Tabel 2.6. Produksi dan Produktivitas per Sub Sektor Pertanian 14

Tabel 2.7. Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Bontang 15

Tabel 2.8. Luas Ekoregion Kota Bontang.....16

Tabel 2.9. Daya Dukung Pangan Kota Bontang Tahun 2023 16

Tabel 2.10. Daya Dukung Air Kota Bontang Tahun 2023 17

Tabel 2.11. Jumlah Pelanggan Gas Rumah Tangga Tahun 2020-2024.....19

Tabel 2.12. Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2020-2024.....19

Tabel 2.13. Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2024.....19

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Bidang Pangan Tahun 2020-2024. 22

Tabel 2.15. Target dan Capaian Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021-2024.....24

Tabel 2.16. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024.....26

Tabel 2.17. Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 26

Tabel 2.18. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana 27

Tabel 2.19. Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024 28

Tabel 2.20. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim 28

Tabel 2.21. Total Emisi Gas Rumah Kaca 29

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Tahun 2020 - 2024 30

Tabel 2.23. Pertumbuhan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Datang, Pindah, Lahir dan Meninggal 30

Tabel 2.24. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2030 31

Tabel 2.25. Komposisi Penduduk Tahun 2024 31

Tabel 2.26. Tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024 32

Tabel 2.27. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 32

Tabel 2.28. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Tahun 2020 – 2024 34

Tabel 2.29. Nilai Investasi.....34

Tabel 2.30. Statistik Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2020-2024 35

Tabel 2.31. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 35

Tabel 2.32. Perbandingan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2024 36

Tabel 2.33. Indeks Gini di Kota Bontang 38

Tabel 2.34. Capaian IPM Tahun 2020-2024 38

Tabel 2.35. Data Pencari Kerja, Lowongan, dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024.39

Tabel 2.36. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.....40

Tabel 2.37. Indikator Kesempatan Kerja di Kota Bontang (2020-2024).....40

Tabel 2.38. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bontang 41

Tabel 2.39. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Bontang.....41

Tabel 2.40. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024.....42

Tabel 2.41. Capaian Aspek Kesehatan Tahun 2024.....43

Tabel 2.42. Indeks Kesehatan 2020-2024 43

Tabel 2.43. Kinerja Kesehatan Tahun 2020-2024.....43

Tabel 2.44. Indikator pada Jenjang TK/RA Tahun 2021-2024 44

Tabel 2.45. Indikator Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024.....45

Tabel 2.46. SDG’s Urusan Pendidikan Kota Bontang Tahun 2019-2023 47

Tabel 2.47. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi 48

Tabel 2.48. Rekapitulasi Nilai IPLM dan TGM Kota Bontang.....49

Tabel 2.49. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 50

Tabel 2.50. Angka Perlindungan Sosial Kota Bontang Tahun 2020-2024 50

Tabel 2.51. Pencapaian Indikator TPB 51

Tabel 2.52. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.....52

Tabel 2.53. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2024 53

Tabel 2.54. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Tahun 2024 54

Tabel 2. 55. Tabel 2.58. Indeks Kerukunan Umat Beragama 54

Tabel 2.56. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Menurut Gender Tahun 2020-2024 55

Tabel 2.57. Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020-2024 56

Tabel 2.58. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 56

Tabel 2.59. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024 57

Tabel 2.60. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024 57

Tabel 2.61. Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2020-2024 57

Tabel 2.62. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia 58

Tabel 2.63. Besaran Pendapatan Pelaku Usaha di Bidang Ekonomi Kreatif Kota Bontang Tahun 2024 60

Tabel 2.64. Program Inisiatif EBT di Kota Bontang 62

Tabel 2.65. Rantai Pasokan Kota Bontang secara Global 63

Tabel 2.66. Data Kontribusi PDRB PMTB Tahun 2020-2024 64

Tabel 2.67. Rasio Ekspor Neto terhadap PMTB Tahun 2020-2024 65

Tabel 2.68. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2024 65

Tabel 2.69. Prasarana Persampahan Kota Bontang 67

Tabel 2.70. Prasarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal 68

Tabel 2.71. Luas Wilayah Kebanjiran Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2020-2024.72

Tabel 2.72. Persentase Kondisi Jalan Kota Bontang Tahun 2022-2024.....73

Tabel 2.73. Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Menurut Kawasan Kumuh Tahun 2024 76

Tabel 2.74. Backlog Penghunian Tahun 2024 77

Tabel 2.75. Jenis Pelabuhan dan Fungsi Utamanya di Kota Bontang.....78

Tabel 2.76. Pelabuhan Pengumpan Lokal Kota Bontang 79

Tabel 2.77. Penyediaan Prasarana dan Sarana Perlengkapan Jalan Tahun 2024 80

Tabel 2.78. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2024 81

Tabel 2.79. Tingkat Keselamatan Pengguna Jalan Tahun 2020-2024 81

Tabel 2.80. Data Ekonomi Kota Bontang.....83

Tabel 2.81. Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Inflasi di Kota Bontang 84

Tabel 2.82. Capaian Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan 85

Tabel 2.83. Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....90

Tabel 2. 84. Penilaian Peduli HAM Kota Bontang 90

Tabel 2.85. Data Proporsi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih 91

Tabel 2.86. Indeks Daya Saing Daerah 92

Tabel 2.87. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang 2021-2026 94

Tabel 2.88. Capaian IKK 2021-2024 97

Tabel 2.89. Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang.....142

Tabel 2.90. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024 144

Tabel 2.91. Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024 149

Tabel 2.92. Neraca Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024 155

Tabel 2.93. Analisis Rasio Keuangan Kota Bontang Tahun 2020-2024 156

Tabel 2.94. Proyeksi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2025-2029 159

Tabel 2.95. Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029.....161

Tabel 2.96. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 162

Tabel 2. 97. Proyeksi APBD Daerah Tahun 2026-2030 163

Tabel 2.98. Permasalahan Bidang Pendidikan.....164

Tabel 2.99. Permasalahan Bidang Kesehatan.....165

Tabel 2.100. Permasalahan Bidang Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga 166

Tabel 2.101. Permasalahan Tingginya Angka Pengangguran.....167

Tabel 2.102. Permasalahan Ketergantungan pada Sektor Migas dan Hilirisasi yang Belum Dikembangkan.....169

Tabel 2.103. Kesenjangan Pendapatan Masyarakat 170

Tabel 2.104. Permasalahan Belum Optimalnya Daya Saing Daerah.....171

Tabel 2.105. Permasalahan Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal 172

Tabel 2.106. Permasalahan penguatan implementasi SAKIP.....173

Tabel 2.107. Permasalahan peningkatan kualitas pelayanan publik 174

Tabel 2.108. Permasalahan implementasi SPBE.....175

Tabel 2.109. Permasalahan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa 176

Tabel 2.110. Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkualitas Belum Merata 177

Tabel 2.111. Permasalahan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Wilayah Belum Menyeluruh.....178

Tabel 2.112. Permasalahan Penataan Ruang Kota Belum Optimal.....178

Tabel 2.113. Permasalahan Banjir Perkotaan dan Banjir Rob 179

Tabel 2.114. Permasalahan Pengelolaan Sampah Belum Berkelanjutan.....179

Tabel 2.115. Permasalahan Bangunan Gedung Pemerintah Belum Seluruhnya Berkondisi Baik dan Memenuhi Persyaratan Teknis 180

Tabel 2.116. Permasalahan Pencemaran Air 180

Tabel 2.117. Permasalahan Pencemaran Udara 182

Tabel 2.118. Permasalahan Degradasi Lahan.....183

Tabel 2.119. Permasalahan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).....184

Tabel 2.120. Analisis Isu Strategis Kewilayahan RPJMD ke dalam Visi dan Misi Walikota Bontang.....196

Tabel 3.1. Sasaran Visi RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 202

Tabel 3.2. Fokus Arah Kebijakan RPJPD Kota Bontang 2025-2045.....203

Tabel 3.3. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Tahap I 204

Tabel 3.4. Dukungan Pemerintah Kota Bontang Terhadap PHTC dan Program Strategis Nasional.....209

Tabel 3.5. Program Unggulan Gubernur dalam RPJMD Provinsi.....212

Tabel 3.6. Keselarasan Misi RPJMD Kota Bontang dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPD Kota Bontang 218

Tabel 3.7. Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 222

Tabel 3.8. Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD Kota Bontang terhadap Target Makro RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 226

Tabel 3.9. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals (SDGs) 227

Tabel 3.10. Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 228

Tabel 3.11. Keselarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025 - 2029 229

Tabel 3.12. Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan 234

Tabel 3.13. Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur dengan Arah Kebijakan/Strategi, Program unggulan/Prioritas dan Indikasi Program RTRW Kota Bontang 244

Tabel 3.14. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 250

Tabel 3.15. Rincian Program dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 268

Tabel 3.16. Penyelarasan Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur.....287

Tabel 4.1. Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 293

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Bontang Tahun 2025-2029.....314

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang 2025-2029 317

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kota Bontang.....	7
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Bontang.....	9
Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Bontang	10
Gambar 2.4. Peta Kawasan Hutan Lindung Bontang.....	11
Gambar 2.5. Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Kota Bontang.....	12
Gambar 2.6. Peta Kebutuhan Bahan Air dan Peta Ketersediaan Bahan Air Kota Bontang	18
Gambar 2.7. Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024.....	21
Gambar 2.9. Capaian IKLH Tahun 2021-2024	23
Gambar 2.10. Akses Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024	25
Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.12. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur	36
Gambar 2.13. Indeks Gini Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 2.14. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	59
Gambar 2.15. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	60
Gambar 2.16. Indeks Inovasi Kota Bontang	61
Gambar 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang	62
Gambar 2.18. Penyediaan Air Baku Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 2.19. Daya Tampung Waduk Kanaan Tahun 2020-2024	70
Gambar 2.20. Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2020-2024	71
Gambar 2.21. Peta Wilayah Kebanjiran Kota Bontang.....	73
Gambar 2.22. Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak Tahun 2020-2024...	74
Gambar 2.23. Luas Kumuh Berdasarkan Lokasi Kawasan Kumuh	75
Gambar 2.24. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2020-2024	76
Gambar 2.25. Jumlah Kecelakaan Pengguna Jalan Tahun 2020-2024	81
Gambar 2.26. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2020-2024	82
Gambar 2.27. Inflasi Tahun 2020-2024	84
Gambar 2.28. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bontang.....	139
Gambar 2.29. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang	145
Gambar 2.30. Realisasi Pendapatan Tansfer Kota Bontang Tahun 2020-2024	147
Gambar 2.31. Perkembangan Pendapatan yang Sah 2020-2024.....	147
Gambar 2.32. Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2020-2024.....	150
Gambar 2.33. Perkembangan Belanja Modal Per Jenis Belanja	151
Gambar 2.34. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2020-2024	152
Gambar 2.35. Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	153
Gambar 3.1. Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029.....	208
Gambar 3.2. Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kota Bontang dan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025 -2029	214
Gambar 3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD 1 Bontang Tahun 2025-2029	221
Gambar 3.4. Trisula Pembangunan Daerah	230
Gambar 3.5. Rencana Pola Ruang RTRW Kota Bontang 2019-2039	242
Gambar 3.6. Penahapan Pembangunan RPJMD 2025-2029	247

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dalam menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai guna menciptakan pertumbuhan daerah yang lebih baik. Perencanaan ini memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan suatu wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang harus diatasi. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan yang baik akan memastikan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional maupun regional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan. Dalam penyusunannya, rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih atas nama dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG. dan Agus Haris, SH menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang masa bakti Tahun 2025-2030. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, periodisasi RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 ditetapkan sesuai dengan masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang sampai dengan akhir masa bakti pada tahun 2030.

Dalam upaya menghadapi berbagai tren dinamika global yang dipicu oleh megatrend global seperti dinamika geopolitik dan geoekonomi, perubahan demografi, urbanisasi global, perubahan iklim, revolusi teknologi, dan beberapa tren dunia yang berdampak pada pembangunan di Kota Bontang, perencanaan yang disusun dituntut untuk mampu memitigasi dan beradaptasi dengan cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini memerlukan percepatan pembangunan dalam berbagai aspek namun tetap memperhatikan keberlanjutan dengan menyeimbangkan faktor ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.

Sejumlah tantangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, teknologi, budaya, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi di daerah juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang tepat dan akurat. Dalam proses penyusunannya, RPJMD juga memperhatikan arahan dan sinergi kebijakan yang mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu visi Indonesia Emas 2045.

Salah satu isu strategis di Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan Kota Bontang adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan penetapan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan mengalami transformasi besar dalam berbagai sektor, terutama ekonomi, infrastruktur, dan demografi. BPS Kalimantan Timur (2023) mencatat bahwa jumlah penduduk di sekitar kawasan IKN diperkirakan meningkat 20-30 persen dalam satu dekade, seiring dengan arus migrasi tenaga kerja dan pelaku usaha ke wilayah tersebut. Kota Bontang, sebagai salah satu pusat industri terbesar di Kalimantan Timur, berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku, tenaga kerja, dan layanan industri penunjang bagi proyek pembangunan IKN. Namun, lonjakan populasi dan aktivitas ekonomi ini juga membawa tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan akan perumahan, layanan publik, serta infrastruktur transportasi yang menghubungkan Bontang dengan pusat ekonomi baru di sekitar IKN. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Bontang harus mempertimbangkan sinergi dengan proyek IKN guna mengoptimalkan peluang ekonomi sekaligus mengantisipasi tantangan sosial dan lingkungan yang muncul.

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029 mencerminkan komitmen dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terhadap visi dan misi yang diusung selama masa kampanye. Tak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah pada 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029 juga menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan RPJPD Kota Bontang Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025–2029. Melalui keselarasan tersebut, diharapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029 dapat menjadi sarana efektif dalam mewujudkan visi Bontang Sentosa 2045, Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan jangka panjang daerah dan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kota Bontang tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

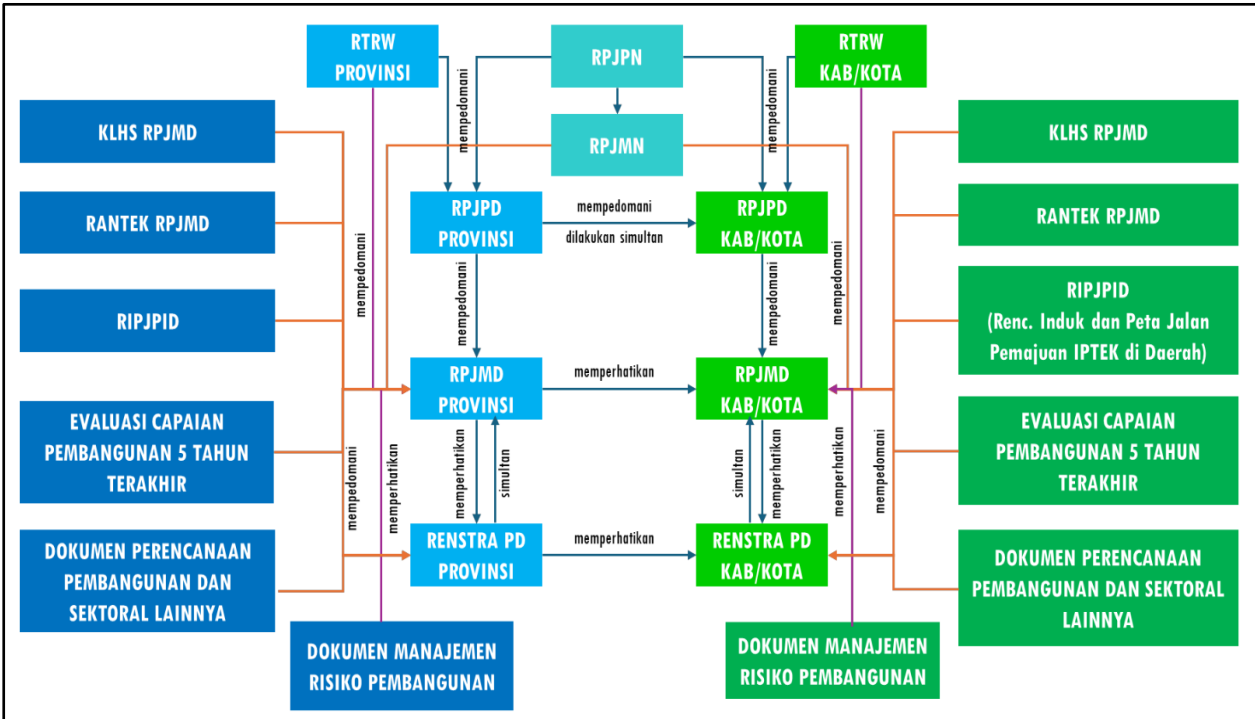
- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada lingkup Kota Bontang, provinsi maupun nasional.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama atas penjabaran kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Bontang tahun 2025-2045. Pada tahap ini, RPJMD tahun 2025-2029 diprioritaskan untuk mewujudkan visi Kota Bontang melalui akselerasi pembangunan di berbagai

bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun fokus kebijakannya yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Bontang yang berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dokumen RPJMD disusun simultan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh alur pembangunan di Kota Bontang.



Gambar 1.1. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Berkaitan dengan dokumen kewilayahan, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang pola pengembangan zonasi kewilayahan. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Bontang berdasarkan potensi wilayahnya serta menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Bontang. Selain itu, penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi serta kompensasi program dan kegiatan. Sehingga, rencana pembangunan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 telah berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kota Bontang. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029, terutama pada Agenda Pembangunan dan Arah Pembangunan Wilayah, sehingga dapat diselaraskan dengan target-target pembangunan RPJMD Kota Bontang. Selain itu, dalam penyusunannya, RPJMD ini juga memperhatikan dokumen-dokumen sektoral lainnya yang berkaitan dengan target-target pembangunan daerah. Keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Bontang pada periode tahun 2025-2029 dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya, dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang secara berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Bontang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah.
- 2) Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 4) Menjadi instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 5) Menyediakan instrumen kebijakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Bontang, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum daerah meliputi gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Gambaran keuangan daerah memuat penjelasan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah

Tahun Anggaran 2025-2029. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga masa periode pembangunan jangka menengah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini membahas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran menguraikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah menjelaskan strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Program perangkat daerah memuat indikasi program serta pagu indikatif program untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memuat target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

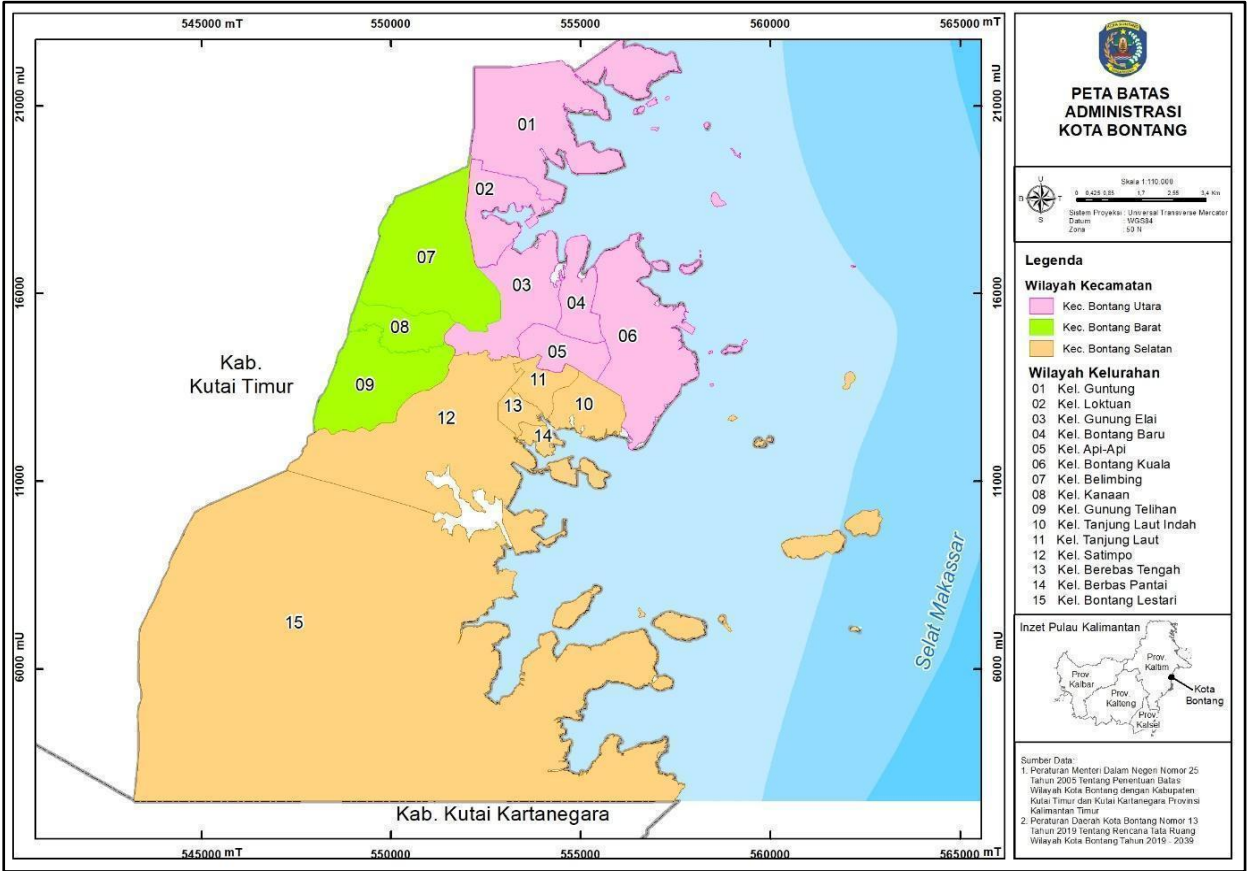
Bab ini memuat pedoman transisi yang diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Bontang terletak di pesisir timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan koordinat 0° 1' 57" hingga 0° 12' 5" Lintang Utara dan 117° 23' 36" hingga 117° 38' 32" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Bontang memiliki letak strategis karena berada di pesisir Selat Makassar, yang menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim nasional dan internasional. Kota ini juga menjadi salah satu pusat industri penting di Kalimantan Timur, dengan berbagai sektor unggulan, termasuk industri pengolahan dan perikanan

Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar 16.188 ha (161,88 km²). Adapun batas wilayah Kota Bontang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kota Bontang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Kota Bontang berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Batas wilayah Kota Bontang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Batas Wilayah Kota Bontang

No	Arah	Batas Wilayah
1	Utara	Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur
2	Selatan	Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
3	Timur	Berbatasan langsung dengan Selat Makassar
4	Barat	Berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Bontang Selatan memiliki kontribusi terbesar, yaitu 68,51 persen dari keseluruhan luas Kota Bontang. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kelurahan, jumlah Rukun Tetangga (RT), serta luas masing-masing kecamatan.

Tabel 2.2. Luas Kota Bontang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Bontang Selatan	6	201	110,91	68,51
Bontang Utara	6	205	33,03	20,41
Bontang Barat	3	93	17,94	11,08
Total	15	499	161,88	100

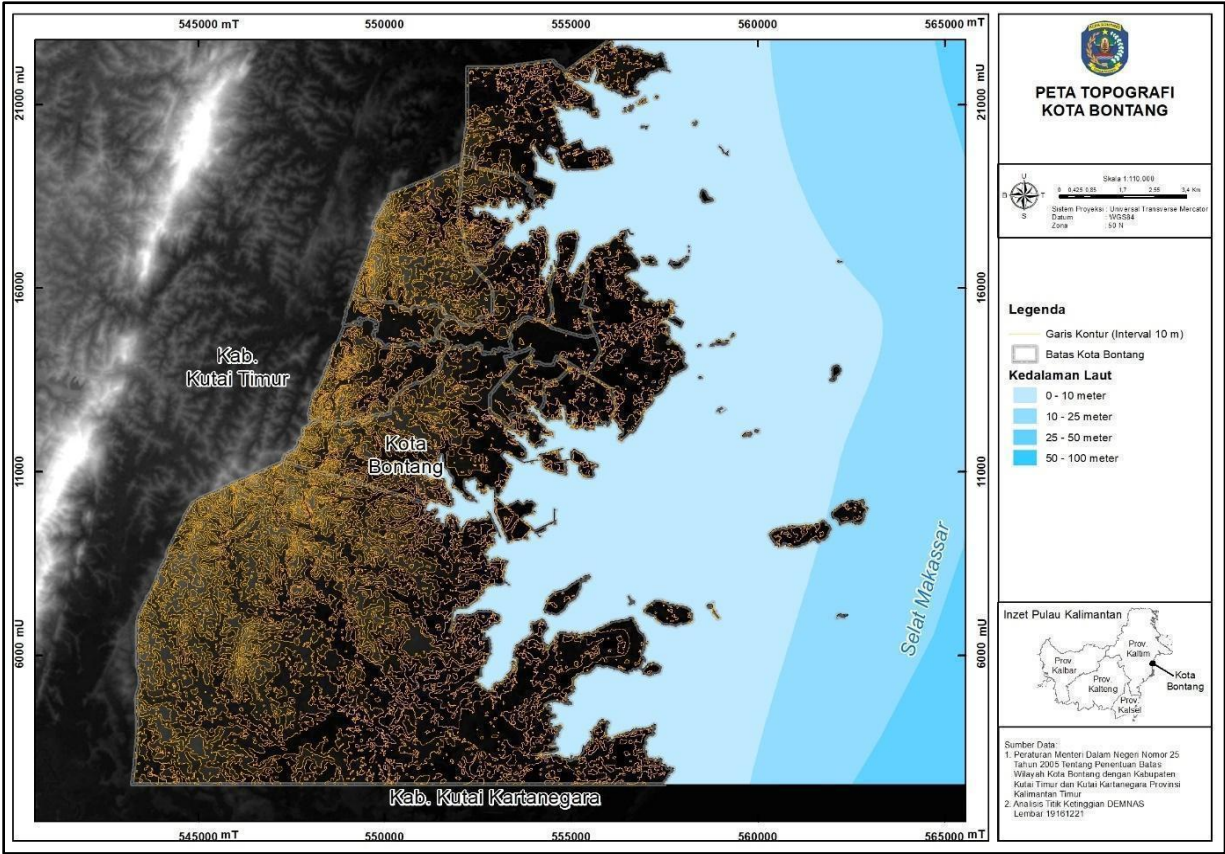
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Kota Bontang memiliki karakteristik geografis yang khas sebagai kota pesisir di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Keberadaan garis pantai yang panjang memberikan potensi besar dalam sektor perikanan, industri maritim, serta wisata bahari. Kota Bontang juga didominasi oleh dataran rendah dan daerah pesisir, dengan beberapa kawasan yang memiliki morfologi berbukit di bagian barat kota. Kombinasi antara wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta daratan yang cukup luas menjadikan Kota Bontang memiliki ekosistem yang beragam dan berpotensi dikembangkan untuk berbagai sektor ekonomi dan pariwisata.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau kecil yang menjadi bagian penting dalam struktur geografis dan ekonomi daerah. Pulau Beras Basah merupakan salah satu ikon wisata bahari yang terkenal dengan pasir putihnya dan menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, terdapat Pulau Gusung di Kelurahan Guntung, yang dihuni oleh masyarakat pesisir dan memiliki aktivitas perikanan serta perdagangan sebagai sektor utama ekonomi. Uniknya, Bontang juga memiliki permukiman di atas laut seperti Pulau Melahing di Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Pulau Tihi-Tihi di Kelurahan Bontang Lestari, yang mencerminkan budaya maritim masyarakat setempat. Permukiman ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri, sekaligus tantangan dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur perkotaan.

Kota Bontang memiliki posisi yang strategis yaitu berada dalam rangkaian jalur transportasi utama di Kalimantan Timur. Kota Bontang termasuk bagian dari Trans Kalimantan Timur yang menghubungkan berbagai kota penting di wilayah tersebut. Selain itu, letaknya yang berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadikan Kota Bontang memiliki peran dalam perdagangan maritim nasional dan internasional, terutama sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal yang menghindari kepadatan di jalur utama (ALKI I). Pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD provinsi Kalimantan Timur yang akan memberikan dampak pada aksesibilitas ke kota ini akan semakin meningkat. Meningkatnya aksesibilitas ini akan memperkuat posisinya sebagai kota industri dan pusat ekonomi regional. Selain itu, Kota Bontang juga berfungsi sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta pengembangan infrastruktur di masa depan.

Kota Bontang memiliki topografi dengan ketinggian antara 0 hingga 125 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lereng di wilayah ini bervariasi, mulai dari daerah pesisir di bagian timur dan selatan hingga ke wilayah barat yang lebih tinggi. Kawasan perbukitan di daerah barat juga memiliki kemiringan relatif curam, sehingga idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihijaukan. Daerah barat merupakan daerah penyangga bagi wilayah perkotaan.



Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Bontang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

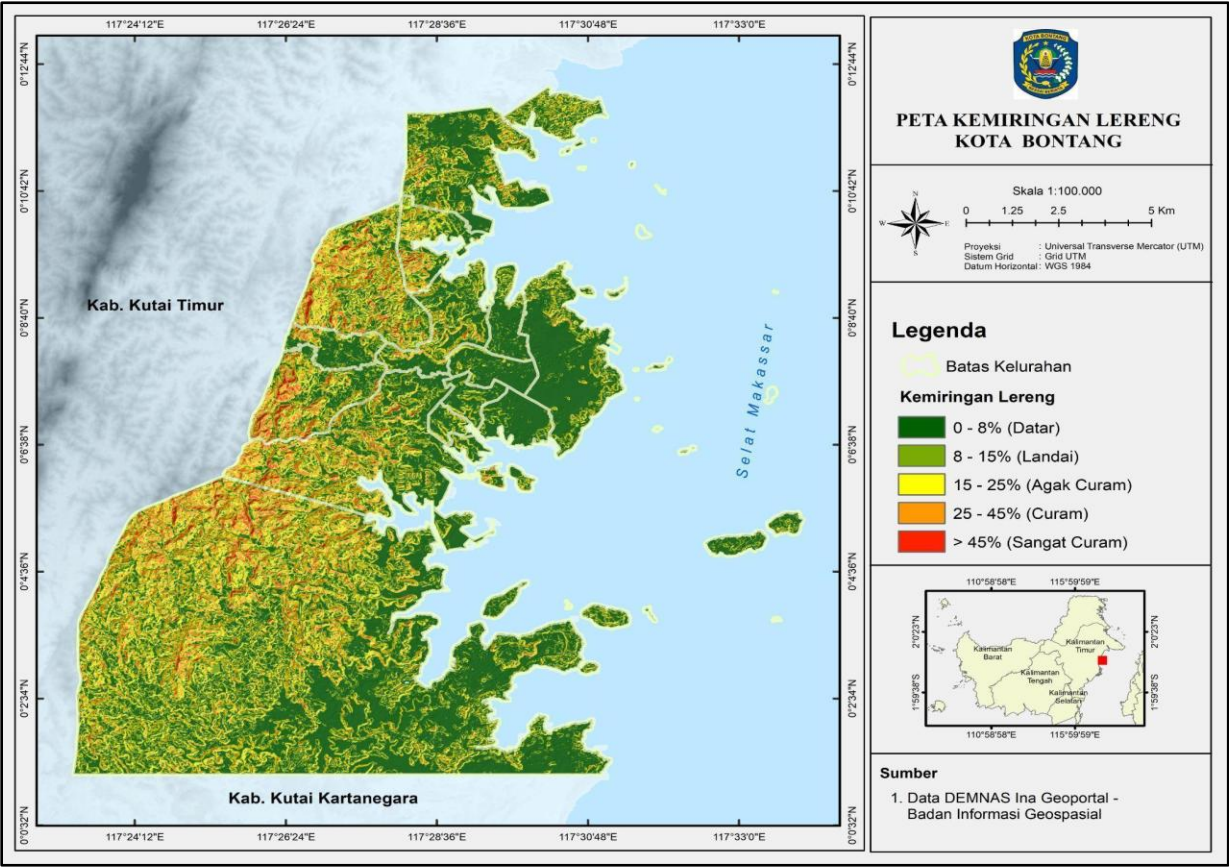
Bila dilihat dari kelerengannya, Kota Bontang didominasi oleh kelerengan datar dengan persentase mencapai 41.47 persen atau hampir setengah dari luas Kota Bontang. Daerah dengan kelerengan datar pada dasarnya sangat sesuai untuk pembangunan dan pengelolaan lahan, terutama untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur. Daerah dengan kemiringan seperti ini lebih mudah diakses, dikembangkan, dan digunakan.

Tabel 2.3. Luas Kota Bontang Menurut Kelerengan

Kemiringan (%)	Klasifikasi	Persentase (%)
0 - 8	Datar	41.47
8 - 15	Landai	25.32
15 - 25	Agak Curam	20.44
25 - 45	Curam	11.48
> 45	Sangat Curam	1.29

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Bagian barat Kota Bontang merupakan wilayah yang memiliki tingkat kelerengan cukup curam, sedangkan ke arah timur, kelerengan semakin menurun hingga mencapai wilayah pesisir. Oleh sebab itu, wilayah ini digunakan sebagai area pengembangan perkotaan. Sebaran kemiringan lereng di Kota Bontang dapat dilihat pada Peta Kemiringan Lereng berikut.



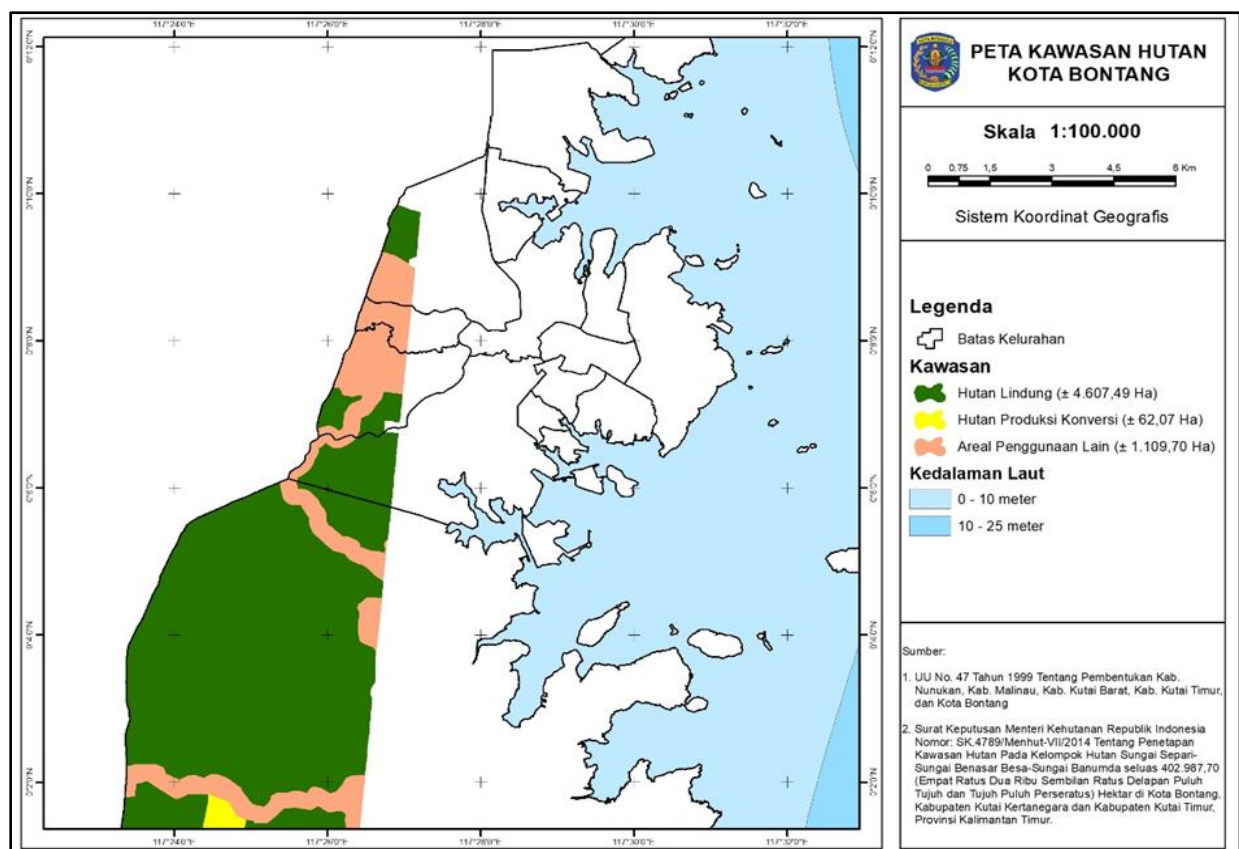
Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Bontang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Hutan Lindung Bontang adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, memelihara kesuburan tanah, serta menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan Lindung Bontang telah mengalami beberapa kali perubahan status dan luasnya, melalui alih fungsi Hutan Lindung (HL) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). APL adalah areal hutan yang dilepas menjadi bukan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Alih fungsi HL menjadi APL di Kota Bontang disebabkan oleh kebutuhan pengembangan kota untuk kawasan budidaya dan pembangunan infrastruktur. Perubahan fungsi HL menjadi APL diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4789/Menhut-VII/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Sungai Separi-Sungai Benasar Besa-Sungai Banumda seluas 402.987,70 Hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Kawasan Hutan Lindung Bontang menjadi seluas ± 4.607,49 Hektar, Hutan Produksi Konversi seluas ± 62,07 Hektar, dan alih fungsi Hutan Lindung menjadi Areal Penggunaan Lain seluas 1.109,70 Hektar.



Gambar 2.4. Peta Kawasan Hutan Lindung Bontang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

Perubahan tutupan lahan dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan, seperti ketersediaan air, kualitas tanah, keanekaragaman hayati, dan risiko bencana alam. Berdasarkan data Tutupan dan Penggunaan Lahan Tahun 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, terdapat 6 (enam) kategori utama Tutupan dan Penggunaan Lahan di Kota Bontang, yaitu: (a) Badan Air; (b) Hutan; (c) Pertanian dan Peternakan; (d) Area Terbuka; (e) Bangunan dan Fasilitas Umum; serta (f) Prasarana Transportasi.

Badan Air adalah tutupan lahan berupa danau, kolam, embung, dan sungai. Tutupan lahan Badan Air di Kota Bontang seluas ± 182,12 Hektar atau 1,13 persen dari total luas daratan Kota Bontang. Hutan adalah tutupan lahan berupa tanaman pohon di kawasan Hutan Lindung, Hutan Kota, maupun *mangrove* di kawasan pesisir Kota Bontang. Luas tutupan lahan Hutan Kota Bontang seluas ± 5.541,52 Hektar atau 34,37 persen dari total luas daratan Kota Bontang.

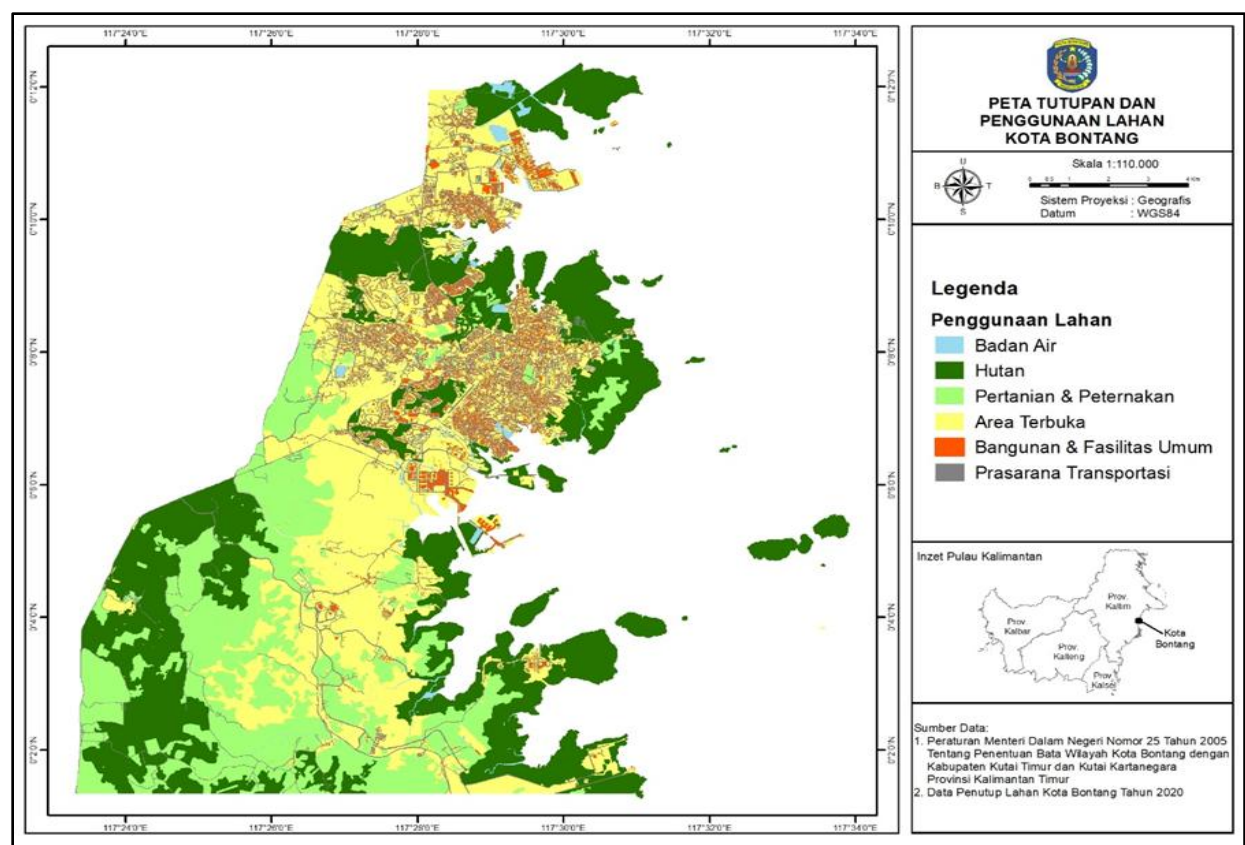
Luas penggunaan lahan Hutan tidak sama dengan total luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Konversi (± 4.669,56 Hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4789/Menhut-VII/2014 karena: (a) terdapat tutupan lahan Area Terbuka dan penggunaan lahan Pertanian dan Peternakan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Konversi; serta (b) kawasan *mangrove* tidak termasuk dalam kategori hutan menurut Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Pertanian dan peternakan di Kota Bontang adalah penggunaan lahan pertanian dan peternakan dalam arti luas, dimana terdapat pertanian lahan kering (pekarangan, kebun, tanaman campuran, dan tegalan/ladang) dan sebagian kecil sawah tadah hujan. Penggunaan lahan pertanian dan peternakan Kota Bontang meliputi area seluas ± 3.793,06 Hektar atau 23,52 persen dari total luas daratan Kota Bontang.

Area terbuka adalah tutupan lahan tidak terbangun yang didominasi oleh tanah kosong dan semak belukar. Tutupan lahan area terbuka Kota Bontang seluas ± 5.421,07 Hektar atau 33,62 persen dari total luas daratan. Bangunan dan fasilitas umum adalah penggunaan lahan berupa bangunan

rumah, kantor, pabrik, dan berbagai fasilitas umum yang tersedia. Penggunaan lahan bangunan dan fasilitas umum meliputi area seluas ± 780,41 Hektar atau 4,84 persen dari total luas daratan.

Prasarana transportasi dapat berupa jaringan jalan umum dan lingkungan serta pelabuhan di kawasan Industri dan Peruntukan Industri. Penggunaan lahan prasarana transportasi Kota Bontang meliputi area seluas ± 407,14 Hektar atau 2,52 persen dari total luas daratan Kota Bontang.



Gambar 2.5. Peta Tutupan dan Penggunaan Lahan Kota Bontang
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Pariwisata Alam

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangan di Kota Bontang, yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pariwisata di Kota Bontang pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisata	215.029	169.853	217.617	287.231	294.531
Jumlah Destinasi Pariwisata	56	61	57	57	61
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dengan Migas*	0,52	0,52	0,52	0,54	0,67
Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	4,55	4,8	6,9	9	11

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2024
*) dihitung berdasarkan kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bontang mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 karena pandemi COVID-19, namun terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan jumlah kunjungan ini merupakan salah satu dampak positif dari bertambahnya

4 jumlah destinasi pariwisata atau Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kota Bontang pada tahun 2023 yang juga berdampak pada meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan migas dan meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pariwisata di Kota Bontang yaitu penataan objek-objek pariwisata, penyelenggaraan 77 festival seni dan budaya, pengembangan kawasan seni dan budaya, peningkatan promosi pariwisata, serta peningkatan aksesibilitas pariwisata. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan pada sektor pariwisata di Kota Bontang, meliputi:

- a) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dan penambahan destinasi wisata baru.
- b) Terkendalanya pengelolaan wisata bahari karena pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Timur.
- c) Event pariwisata yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan daya tarik wisata secara signifikan dan pendapatan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
- d) Pengembangan sektor ekonomi kreatif belum maksimal dan distribusi pelaku ekonomi kreatif masih berfokus pada sub sektor kuliner

b. Sumber Daya Sektor Perikanan

Berdasarkan capaian selama 5 tahun terakhir, produksi perikanan tangkap Kota Bontang terus mengalami kenaikan secara fluktuatif. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap sempat mengalami penurunan yang tidak signifikan yaitu dari 21.916,00 ton menjadi 21.915,80 ton, namun kembali naik sebesar 1,03 persen yaitu menjadi 22.143,03 ton pada tahun 2024. Penurunan produksi perikanan tangkap di tahun 2023 disebabkan oleh faktor cuaca sehingga nelayan enggan untuk melaut. Selain faktor cuaca, keberadaan nelayan yang berasal dari luar Bontang seperti dari Sulawesi dan pulau Jawa juga mempengaruhi jumlah hasil tangkapan.

Di sisi lain, produksi perikanan budidaya dalam 3 tahun terakhir juga memiliki tren yang positif. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang signifikan, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan produksi perikanan budidaya perikanan budidaya disebabkan oleh terbatasnya potensi budidaya di darat dan penurunan jumlah pelaku pembudidaya pada tahun 2022 yang dampaknya terus berlanjut hingga 2023. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) telah melakukan inovasi dalam memaksimalkan lahan yang tersedia melalui program *urban farming*. Melalui program *urban farming* tersebut masyarakat dapat memaksimalkan pekarangan untuk ternak ikan. program tersebut merupakan langkah awal untuk pemenuhan konsumsi pangan khususnya protein. Pada tahun 2024 dinas terkait telah intens melakukan pendampingan kepada pelaku pembudidaya yang masih baru. Dalam proses pendampingan tersebut juga ditemukan adanya kebutuhan sarana dan prasarana budidaya yang tinggi bagi pelaku pembudidaya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan produksi sektor perikanan Kota Bontang tahun 2020-2024.

Tabel 2.5. Produksi Sektor Perikanan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Satuan Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan tangkap	20.336,00	21.711,30	21.916,00	21.915,80	22.143,30
Produksi perikanan budidaya	4.189,30	4.485,04	3.471,45	3.562,23	3.609,65
Produktivitas pengolahan usaha perikanan	N/A	N/A	483,3	433,95	450,67

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 2024

c. Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan sektor unggulan utama Kota Bontang dan menjadi salah satu pusat industri strategis nasional khususnya di sektor gas alam cair (LNG), pupuk, petrokimia dan oleokimia yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Infrastruktur industri seperti jaringan pipa, pembangkit listrik maupun fasilitas pembangunan merupakan aset penting bagi pengembangan sektor industri pengolahan di Kota Bontang. Keberlanjutan industri ini menjadi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan dampak lingkungan. Sejalan dengan potensi sektor perikanan, Bontang memiliki peluang untuk mengembangkan industri pengalengan dan pengolahan hasil laut.

d. Sumber Daya Sektor Pertanian

Keterbatasan merupakan kendala umum yang sampai saat ini menjadi tantangan utama pengembangan sektor pertanian di Kota Bontang. Secara umum, sektor pertanian Kota Bontang dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, dengan beberapa sektor mengalami peningkatan tajam maupun penurunan drastis. Berdasarkan data pertanian Kota Bontang dari tahun 2020 hingga 2024, dapat digambarkan bahwa sektor pertanian di kota ini menunjukkan fluktuasi tajam dan menghadapi sejumlah tantangan dalam stabilitas produksi dan produktivitas. Fluktuasi tajam dalam produktivitas dan produksi, baik di sub sektor tanaman pangan maupun hortikultura, mengindikasikan bahwa pertanian di Bontang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, ketersediaan lahan, infrastruktur pertanian, dan teknologi budidaya. Sektor perkebunan masih belum stabil dan tampaknya belum menjadi sektor andalan. Produksi naik-turun drastis dari 58 ton (2020) menjadi 330 ton (2021), kemudian nol produksi pada 2022, dan meningkat kembali hingga 343 ton di 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan di Bontang masih bersifat sporadis atau belum berkelanjutan. Sektor peternakan mengalami penurunan populasi ternak dari 4.395 ekor (2020) menjadi hanya 3.115 ekor di tahun 2024. Penurunan ini bisa mencerminkan beberapa hal seperti menurunnya minat peternak, kendala pakan atau sarana produksi hingga terkait permasalahan pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pertanian di Kota Bontang masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat. Diperlukan pemetaan potensi wilayah, penguatan kelembagaan petani, modernisasi alat dan praktik pertanian, serta peningkatan akses pasar untuk menciptakan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.

Tabel 2.6. Produksi dan Produktivitas per Sub Sektor Pertanian

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas tanaman pangan	Kuintal	542,71	509,13	626,19	473,19	417,01
Produksi tanaman pangan	ton	767	716	929	825	666
Perkebunan	ton	58	330	0	172	343
Peternakan	ekor	4.395	4.058	4.436	3.650	3.115
Produktivitas Holtikultura	kuintal	127,28	77,23	59,22	624,83	564,47
Produksi Holtikultura	ton	1.629	1.196	920	2.362	2.119

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 2024

e. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya alam dan daya tampung ekosistemnya dalam menopang aktivitas manusia. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029, Kota Bontang menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan industri, perkotaan, dan kelestarian lingkungan. Sumber daya utama seperti air, lahan, serta keanekaragaman hayati menjadi faktor utama dalam menentukan daya dukung lingkungan hidup.

Daya tampung lingkungan hidup Kota Bontang berhubungan erat dengan kemampuan ekosistem dalam menyerap limbah domestik, limbah industri, dan emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu keseimbangan ekologis. Dengan adanya industri besar di sektor minyak, gas, dan petrokimia, tekanan terhadap daya tampung lingkungan meningkat, terutama dalam hal pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, pemantauan kualitas lingkungan secara berkala menjadi kunci dalam menjaga daya tampung lingkungan yang berkelanjutan.

Analisis yang dilakukan dalam KLHS RPJMD 2025-2029 menunjukkan bahwa beberapa indikator lingkungan, seperti kualitas air sungai dan laut, kualitas udara, serta pengelolaan dan pemanfaatan ruang, mengalami tekanan yang signifikan. Kota Bontang masih perlu meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri dan perkotaan. Strategi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan teknologi ramah lingkungan, penerapan regulasi ketat dalam pengelolaan limbah, serta rehabilitasi kawasan ekosistem yang terdampak.

Untuk memastikan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan. Program pelestarian keanekaragaman hayati termasuk ekosistem *mangrove*, konservasi sumber daya air, serta pengurangan emisi gas buang menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan Kota Bontang. Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, Kota Bontang dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Berikut informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Bontang menurut hasil KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 2.7. Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Bontang

Aspek	Kondisi Saat Ini	Tantangan	Upaya dan Strategi
Daya Dukung	Sumber daya air, lahan, dan biodiversitas masih tersedia tetapi mengalami tekanan.	Pertumbuhan industri dan permukiman yang cepat meningkatkan eksploitasi sumber daya.	Pemantauan sumber daya alam, konservasi ekosistem, dan kebijakan pengelolaan lingkungan.
Daya Tampung	Peningkatan limbah industri dan domestik mengancam kualitas air dan udara.	Pencemaran air dan udara akibat aktivitas industri dan perkotaan.	Penerapan teknologi ramah lingkungan, regulasi ketat pengelolaan limbah, dan rehabilitasi lingkungan.
Indikator Kritis	Penurunan kualitas air sungai dan laut, peningkatan emisi gas rumah kaca, pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum optimal.	Perubahan iklim, urbanisasi, dan ketergantungan pada energi fosil.	Pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang lebih efektif, dan perlindungan kawasan hijau.
Kebijakan dan Program	Penguatan regulasi lingkungan dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.	Kurangnya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga	Pelestarian keanekaragaman hayati termasuk ekosistem <i>mangrove</i> , konservasi sumber daya air dan

Aspek	Kondisi Saat Ini	Tantangan	Upaya dan Strategi
		keseimbangan lingkungan.	udara serta partisipasi aktif masyarakat.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2025

Berdasarkan Ekoregion, Kota Bontang terbagi menjadi Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus dan Dataran Pantai Kalimantan dengan rincian luas menurut masing-masing kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.8. Luas Ekoregion Kota Bontang

Kecamatan	Kelurahan	Luas Ekoregion (Ha)	
		Dataran Pantai Kalimantan	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus
Bontang Barat	Belimbing	24,54	1.002,07
	Gunung Telihan	-	219,96
	Kanaan	-	551,28
Total		24,54	1.773,31
Bontang Selatan	Berbas Pantai	-	41,58
	Berbas Tengah	-	83,08
	Bontang Lestari	1.161,98	7.710,65
	Satimpo	-	1.631,47
	Tanjung Laut	-	141,39
	Tanjung Laut Indah	88,82	137,30
Total		1.250,80	9.745,47
Bontang Utara	Api-api	43,20	172,10
	Bontang Baru	87,27	126,47
	Bontang Kuala	843,82	33,72
	Guntung	674,41	470,36
	Gunung Elai	317,39	174,75
	Lok Tuan	53,64	270,61
Total		2.019,74	1.248,00
Kota Bontang		3.295,09	12.766,79

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa luas ekoregion yang paling dominan di Kota Bontang adalah Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus, dengan luas total 12.766,79 hektar. Kecamatan dengan luas perbukitan terbesar adalah Bontang Selatan, terutama di Kelurahan Bontang Lestari yang memiliki luas 7.710,65 hektar. Sementara itu, Dataran Pantai Kalimantan memiliki luas yang lebih kecil, dengan total 3.295,09 hektar, yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan luas ekoregion pantai terbesar adalah Bontang Utara, terutama di Kelurahan Bontang Kuala yang memiliki 843,82 hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki keberagaman ekoregion yang dapat berkontribusi terhadap berbagai potensi ekonomi, termasuk sektor perikanan di wilayah pantai dan sektor kehutanan serta konservasi di wilayah perbukitan.

Dalam mengkuantifikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dilakukan perhitungan terhadap daya dukung pangan. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan daya dukung pangan di Kota Bontang.

Tabel 2.9. Daya Dukung Pangan Kota Bontang Tahun 2023

Kategori	Bontang Barat	Bontang Selatan	Bontang Utara	Total
Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	30.100	67.870	85.200	183.170
Jumlah Penduduk Sistem Grid (Jiwa)	30.100	67.870	85.200	183.170
Jumlah Kebutuhan Bahan Pangan (Kg/Tahun)	2.087.434,20	4.706.781,95	5.908.623,44	12.702.839,59

Kategori	Bontang Barat	Bontang Selatan	Bontang Utara	Total
Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan (Padi Kg/Tahun)	1.400	1.140.000	0	1.141.400
Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	97.090	79.059.000	0	79.156.090
Nilai Ambang Batas Penduduk	66.990	78.991.130	-85.200	78.972.920
Nilai Status Kebutuhan Bahan Pangan	0,001	0,242	0,000	0,090
Status Kebutuhan Bahan Pangan	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2023

Tabel di atas menunjukkan kondisi daya dukung pangan Kota Bontang yang mengalami defisit bahan pangan di seluruh kecamatan. Jumlah kebutuhan bahan pangan mencapai 12,7 juta kg per tahun, sementara jumlah ketersediaan bahan pangan lokal hanya 1,14 juta kg per tahun, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Bontang Selatan. Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara tidak memiliki produksi padi sama sekali, sementara Bontang Barat memiliki produksi yang sangat rendah.

Dari aspek jumlah penduduk, populasi terbesar berada di Kecamatan Bontang Utara dengan total 85.200 jiwa, disusul Bontang Selatan dengan 67.870 jiwa, dan Bontang Barat dengan 30.100 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar dan keterbatasan produksi pangan, Kota Bontang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Selain itu, nilai ambang batas penduduk menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki daya tampung yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pangannya, dengan nilai status kebutuhan bahan pangan berkisar antara 0,001 hingga 0,242, yang mengindikasikan ketidakcukupan produksi pangan lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan kebijakan ketahanan pangan yang lebih optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan dari luar daerah.

Selain daya dukung pangan, dalam mengkuantifikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup juga menghitung daya dukung penyedia air. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 berikut ini hasil perhitungan daya dukung pangan di Kota Bontang.

Tabel 2.10. Daya Dukung Air Kota Bontang Tahun 2023

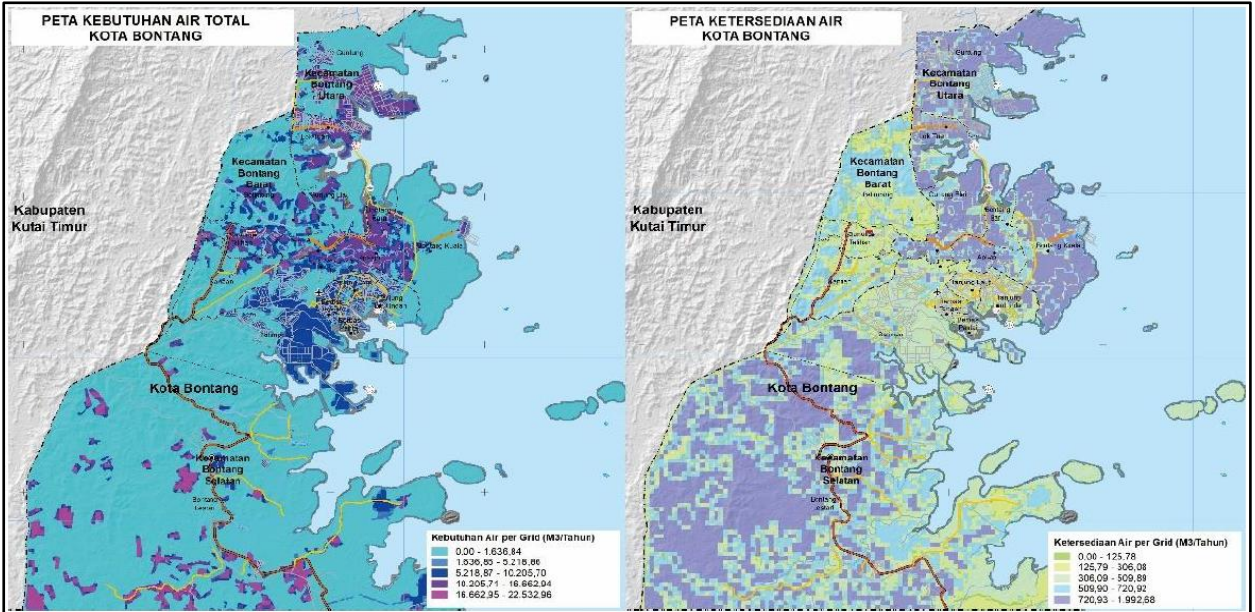
Kecamatan	Bontang Barat	Bontang Selatan	Bontang Utara	Total
Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	30.100	67.870	85.200	183.170
Jumlah Penduduk Sistem Grid (Jiwa)	30.100	67.870	85.200	183.170
Jumlah Ketersediaan Air (M3/tahun)	438.494,02	3.187.700,56	1.790.876,50	5.417.071,08
Jumlah Kebutuhan Air Domestik (M3/tahun)	2.600.639,99	5.863.967,68	7.361.279,39	15.825.887,06
Jumlah Kebutuhan Air untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan	490.329,80	6.627.245,96	705.012,93	7.822.588,69
Kebutuhan Air Total (M3/tahun)	3.090.969,86	12.491.213,61	8.066.292,40	23.648.475,87

Kecamatan	Bontang Barat	Bontang Selatan	Bontang Utara	Total
Ambang Batas Penduduk (jiwa)	26.784	56.241	77.356	160.381
Nilai Ambang Batas Penduduk (jiwa)	-3.316	-11.629	-7.844	-22.789
Nilai Status Kebutuhan Air	0,14	0,26	0,22	0,23
Status Kebutuhan Air	Defisit	Defisit	Defisit	Defisit

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2023

Informasi di atas menunjukkan status daya dukung air di Kota Bontang. Kebutuhan total air terbesar di Kota Bontang berada di Kecamatan Bontang Selatan. Hal tersebut terjadi karena Kecamatan Bontang Selatan memiliki luas terbesar dibandingkan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat. Sementara itu, berdasarkan nilai ambang batas penduduk, dapat diketahui bahwa ketiga kecamatan bernilai negatif, yang berarti bahwa jumlah penduduk Kota Bontang sudah melebihi ambang batas.

Apabila ditinjau berdasarkan nilai daya dukung air pada ketiga kecamatan, diperoleh hasil daya dukung air bernilai < 1 yang menandakan bahwa ketiga kecamatan di Kota Bontang defisit air, sehingga perlu upaya untuk memenuhi kebutuhan air. Adapun sebaran spasial kebutuhan dan status daya dukung air di Kota Bontang dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar 2.6. Peta Kebutuhan Bahan Air dan Peta Ketersediaan Bahan Air Kota Bontang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.1.1.3. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Jaringan Gas

Pembangunan dalam sektor energi ini terwujud melalui pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga. Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Program ini meliputi pemasangan pipa distribusi ke rumah-rumah warga dan merupakan bagian dari upaya dalam meningkatkan akses energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat serta mendukung pengelolaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga dengan menekan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan gas. Sampai dengan

tahun 2023, terdapat 17.741 Rumah Tangga di Kota Bontang yang telah mendapatkan fasilitas jaringan gas rumah tangga.

Tabel 2.11. Jumlah Pelanggan Gas Rumah Tangga Tahun 2020-2024

Jenis Konsumen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggan gas rumah tangga	18.253	18.253	18.304	18.333	18.333

Sumber: PT. Bontang Migas dan Energi Kota Bontang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pelanggan jaringan gas rumah tangga di Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari PT. Bontang Migas dan Energi Kota Bontang, pelanggan gas rumah tangga ini pada umumnya meliputi rumah sangat sederhana, rumah menengah, rumah mewah, maupun rumah susun. Rata-rata pertumbuhan pelanggan jaringan gas rumah tangga di Kota Bontang selama tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 3,64 persen. Pertumbuhan tersebut dipandang tidak begitu signifikan. Hal ini disebabkan oleh persoalan biaya pemasangan yang cukup mahal. Oleh karena itu, adanya pemasangan jaringan gas rumah tangga gratis menjadi pendorong besar dalam memperluas cakupan pelayanan gas di Kota Bontang.

b. Kelistrikan

Selain pembangunan sektor energi melalui pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, Kota Bontang juga mendorong perluasan pelayanan jaringan melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN PERSERO). Sampai dengan tahun 2024, jumlah pelanggan listrik di Kota Bontang telah mencapai 59.056 pelanggan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12. Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2020-2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bontang Selatan	19.249	19.801	20.304	21.064	21.672
Bontang Utara	24.252	25.022	25.785	26.461	27.250
Bontang Barat	9.024	9.319	9.577	9.839	10.134
Total	52.525	54.142	55.666	57.364	59.056

Sumber: PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kota Bontang, 2025

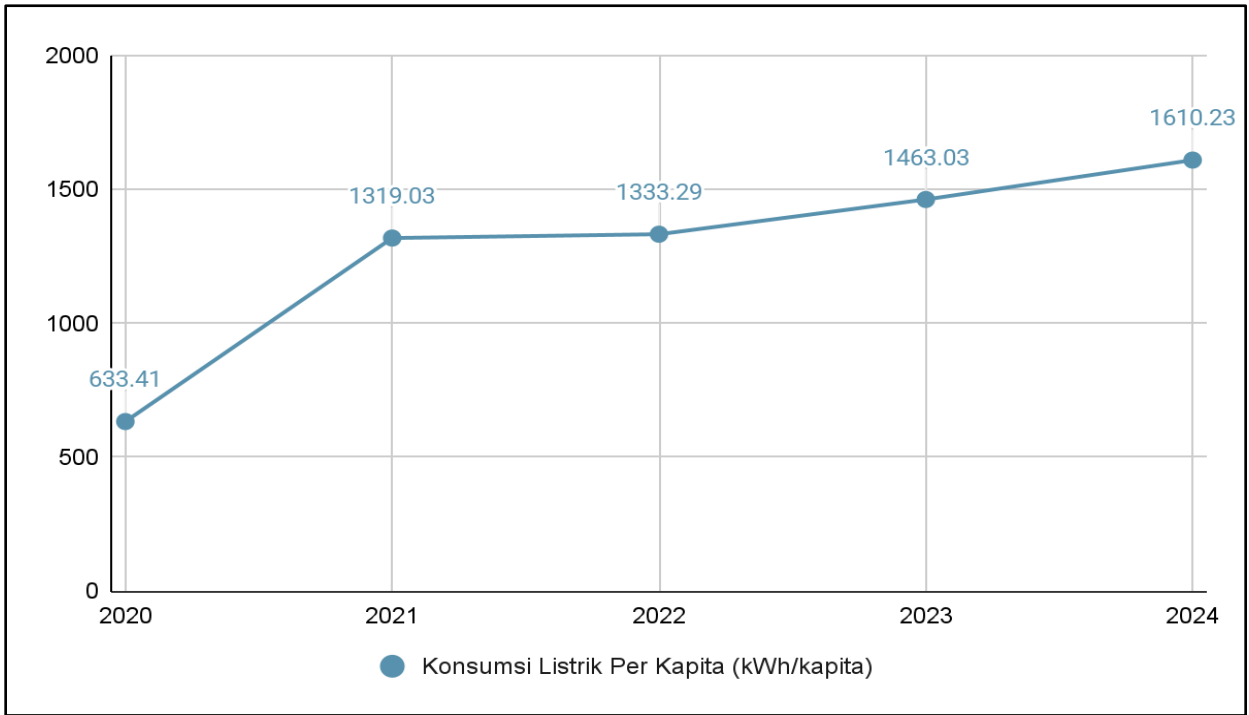
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Bontang terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,97 persen. Meskipun begitu, belum seluruh rumah tangga di Kota Bontang terlayani listrik. Hal ini didukung oleh rasio elektrifikasi yang menunjukkan persentase cakupan akses listrik terhadap seluruh rumah tangga di Kota Bontang, di mana pada tahun 2024, capaian rasio elektrifikasi Kota Bontang baru mencapai 94,43 persen.

Tabel 2.13. Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi (%)	88,85	90,16	92,27	94.04	94.43

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di Kota Bontang dalam jangka waktu satu tahun dapat diketahui melalui konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta tingkat pembangunan ekonomi di suatu daerah. Berikut ini merupakan besaran konsumsi listrik per kapita Kota Bontang.

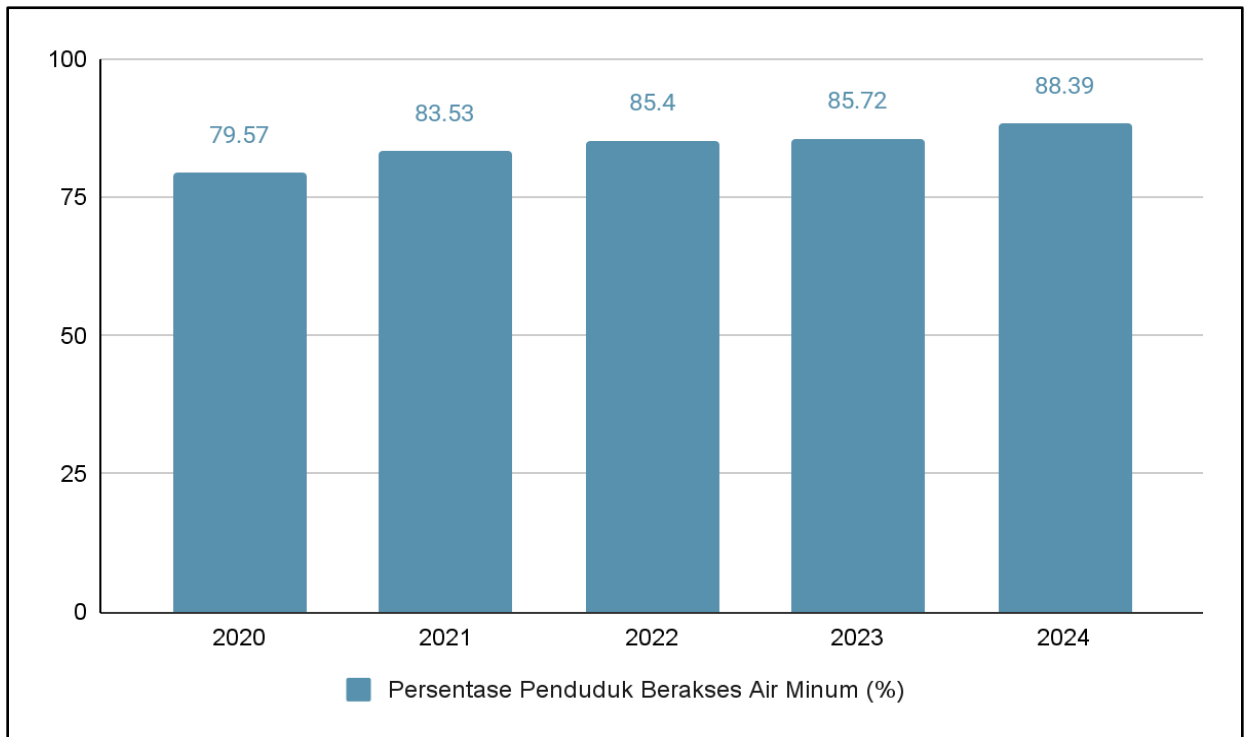


Gambar 2.7. Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2020-2024
Sumber: PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kota Bontang, 2025

Tren konsumsi listrik per kapita di Kota Bontang menunjukkan dinamika yang sejalan dengan perkembangan sektor industri, pertumbuhan penduduk, serta pola konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 633,41 kWh/kapita. Angka ini kemudian melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi 1.319,03 kWh/kapita, mencerminkan hampir dua kali lipat peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan berlanjut secara moderat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, konsumsi naik sedikit menjadi 1.333,29 kWh/kapita, lalu meningkat lagi menjadi 1.463,03 kWh/kapita di tahun 2023. Akhirnya, pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 1.610,23 kWh/kapita. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya pertumbuhan konsumsi listrik per kapita. Pada tahun 2023 sampai 2024 pertumbuhan konsumsi listrik mengalami kenaikan sebesar 10,06 persen. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan jumlah perangkat listrik di rumah tangga, dan perluasan akses listrik ke masyarakat.

c. Akses Air Minum

Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan pada sektor air minum, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan air minum dengan memperluas cakupan dalam penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau. Hal ini terlihat pada capaian kinerja sektor air minum selama 5 tahun terakhir di mana jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum di Kota Bontang terus bertambah setiap tahun sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini.



Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 169.545 jiwa penduduk di Kota Bontang telah mendapatkan layanan air minum perpipaan, baik yang dilakukan oleh PDAM maupun non-PDAM atau swasta. Secara kuantitas, penyediaan air minum telah terpenuhi namun secara kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum di Kota Bontang masih perlu diperbaiki.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Tahun 2025 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dijelaskan bahwa kualitas air minum belum memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh jaringan pipa distribusi yang belum memadai untuk memenuhi standar air minum. Selain itu, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Kota Bontang belum mampu memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) serta belum menerapkan *Smart Grid Water Management* (SGWM). Apabila ditinjau dari aspek kontinuitas, distribusi air bersih di Kota Bontang belum dapat dilakukan selama 24 jam. Saat ini, distribusi air bersih ke pelanggan hanya dapat dilakukan selama 23,50 jam/hari karena jumlah pelanggan dan jaringan distribusi masih terbatas di beberapa lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA), sehingga jam operasi menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing. Sedangkan, pemakaian rata-rata untuk pelanggan rumah tangga sebesar 25,09 m³/bulan telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yaitu kebutuhan rumah tangga sebanyak 10 m³/bulan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 sebanyak 60 liter/orang/hari.

d. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dan esensial bagi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan. Dalam pembangunan, pangan merupakan salah satu sektor yang harus diprioritaskan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberagaman pangan yang bergizi serta berkualitas. Kota Bontang merupakan daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap arus distribusi pangan dimana sebagian besar sumber pangan untuk kebutuhan diperoleh dari wilayah lain diluar Kota Bontang. Berdasarkan

hasil analisis dalam *Food Security Vulnerable Atlas* (FSVA) atau peta rawan pangan yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, bahwa dari 15 kelurahan di Kota Bontang tidak ada daerah rawan pangan di Kota Bontang, hal ini menunjukkan bahwa arus distribusi pangan di Kota Bontang sudah merata.

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Bidang Pangan Tahun 2020-2024.

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pola Pangan Harapan (PPH)		89,76	89,76	90,5	89,8	86,5
Cakupan Daerah Rentan Pangan (%)		0	0	5	0	0
Tingkat Keamanan Pangan (%)		65	100	100	100	100
Regulasi Ketahanan Pangan		1	1	1	2	2
Ketersediaan Pangan Utama (ton)		19.204	15.321	15.902	15.464	15.464
Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita		2.951,56	2.972,86	2.486,48	Energi: 2.486,48 Protein: 99,62	Energi: 2486,48 Protein: 99,62
Indeks Ketahanan Pangan		84,59	87,24	84,21	88,76	88,89
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (FSVA) (%)		5,21	9,84	11,72	6,95	7,73
Produksi dan Produktivitas per Sub Sektor Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan (kuintal/Ha)	542,71	509,13	626,19	473,19	417,01
	Produksi tanaman Pangan (ton)	767	716	929	825	666
	Produksi Perkebunan (ton)	58	330	70	172	343
	Produksi Peternakan (ekor)	4395	4058	4436	3650	3115
	Produktivitas hortikultura (kuintal/ha)	127,28	77,23	59,22	624,83	564,47
	Produksi hortikultura (ton)	1.629	1.196	920	2.362	2.119

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 2025

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode untuk melihat jumlah, komposisi atau ketersediaan pangan pada wilayah tertentu. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skor PPH Kota Bontang selama 5 tahun terakhir masih di bawah target nasional sebesar 92,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi kelompok pangan utama masih belum memenuhi kualitas makanan yang dikonsumsi.

Kota Bontang merupakan salah satu daerah dengan jumlah produksi perikanan yang cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu penghasil perikanan tangkap di Kalimantan Timur, namun di sisi lain pola konsumsi protein Kota Bontang masih rendah. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar hasil produksi perikanan didistribusikan ke daerah lain. Sementara dari sisi kecukupan gizi, nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kota Bontang masih di bawah standar yang ditetapkan sebesar 2.100, di mana pada tahun 2024, capaian AKG berada pada 1.885,40 poin. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang terus mendorong perbaikan pola konsumsi dengan rutin melakukan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) tidak hanya di

masyarakat secara umum tetapi mencakup di lingkungan tertentu seperti di sekolah. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah tidak hanya untuk peningkatan kualitas pola konsumsi pangan tetapi sebagai salah satu upaya percepatan dalam penurunan *stunting*.

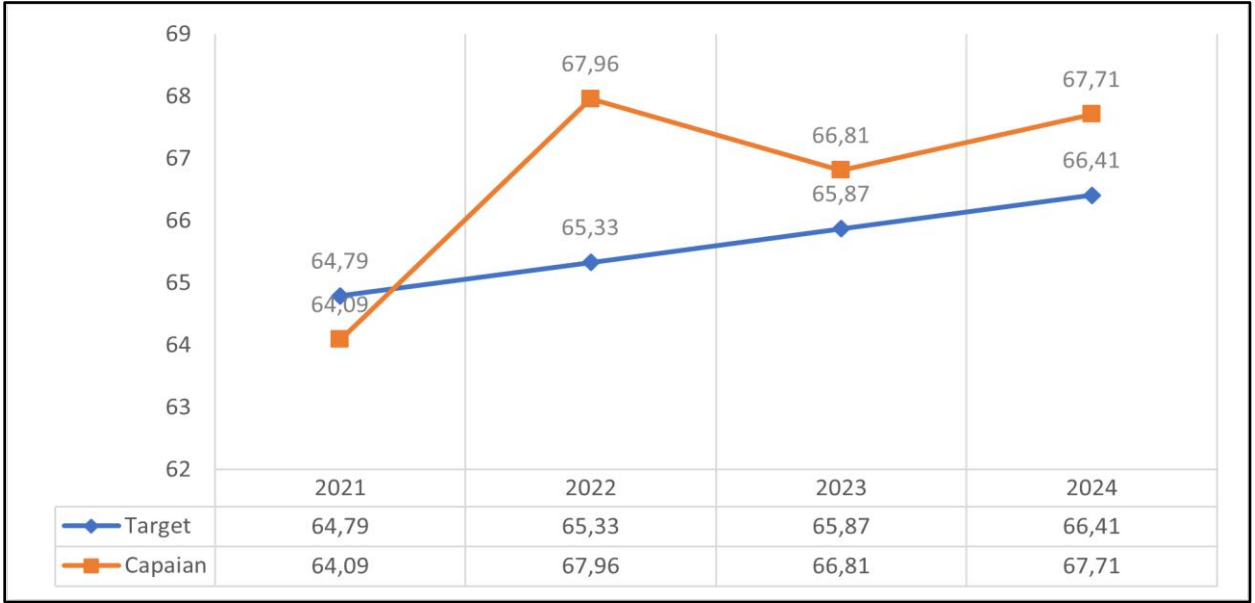
Prevalensi ketidakcukupan pangan Kota Bontang menggunakan angka pada Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan/ FSVA tahun 2023 yaitu peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerentanan terhadap kerawanan pangan. Kota Bontang melakukan perhitungan pada tahun 2022 dengan angka ketidakcukupan sebesar 40 persen, sedangkan pada tahun 2023 dengan angka 0 persen yang menunjukkan bahwa pangan di Kota Bontang tercukupi.

Produksi dan produktivitas pertanian adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur perkembangan sektor pertanian, termasuk hasil panen, luas lahan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pada tahun 2024 produksi dan produktivitas pertanian cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca, hama, gagal panen dan penyakit hewan ternak seperti penyakit mulut dan kuku (PMK).

2.1.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas manusia. Indikator utama dalam pengelolaan lingkungan hidup diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang diperoleh dari hasil agregasi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup, bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi lingkungan. Capaian IKLH Kota Bontang tahun 2021-2024 dapat dilihat pada diagram berikut.

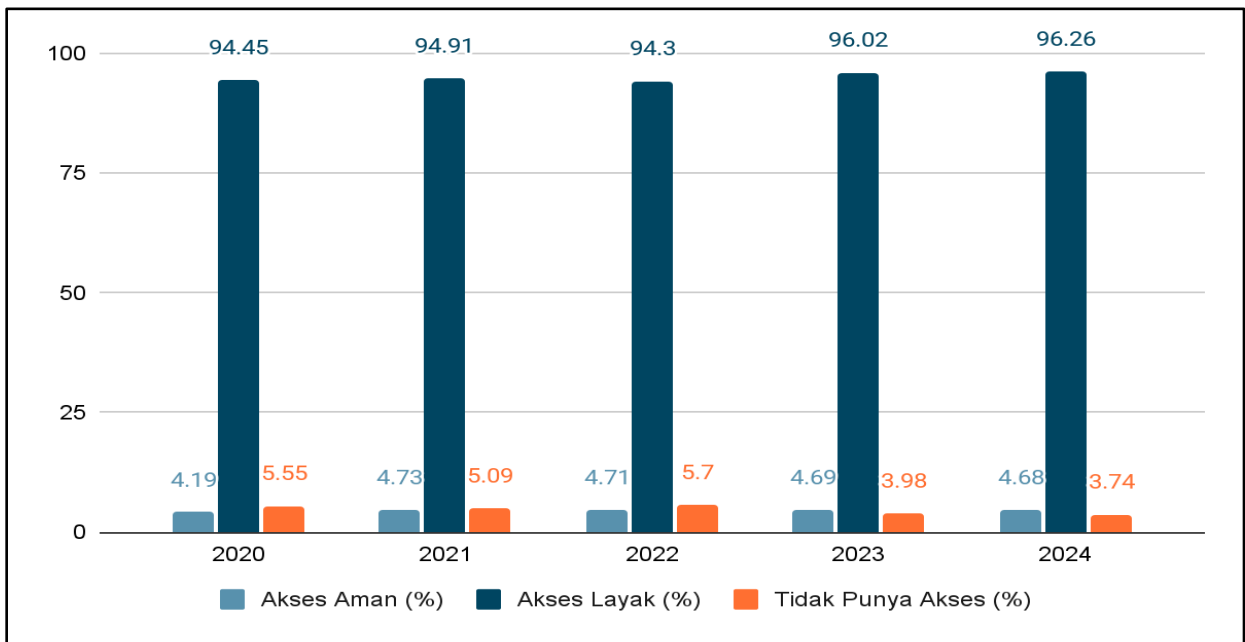


Gambar 2.9. Capaian IKLH Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2025

IKLH Kota Bontang pada tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi namun secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2024 capaian IKLH adalah 67,71 dan masuk dalam klasifikasi kategori sedang. Data menunjukkan bahwa meningkatnya nilai IKLH salah satunya dikarenakan upaya pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kerjasama Pemerintah dan

Diagram berikut menunjukkan capaian akses aman dan akses layak air limbah domestik di Kota Bontang.



Gambar 2.10. Akses Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

Akses air limbah domestik dikatakan layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang dilengkapi bangunan atas berupa kloset leher angsa dan bangunan bawah berupa tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Selama lima tahun terakhir, akses air limbah domestik layak Kota Bontang terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.10. Hal tersebut didukung oleh upaya Pemerintah Kota Bontang dalam penambahan sambungan rumah pada IPAL eksisting maupun pembangunan septik tank individual.

Sementara itu, akses air limbah domestik dikatakan aman apabila bangunan bawah yang berupa tangki septik disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir atau berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses aman Kota Bontang masih cukup rendah, artinya masih banyak rumah tangga yang fasilitas pengelolaan air limbah domestiknya belum memenuhi standar teknis ataupun belum melakukan penyedotan pada tangki septiknya dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya capaian aman terjadi karena belum seluruh penduduk memiliki kesadaran untuk menguras tangki septiknya. Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Limbah Domestik terus bekerja sama dalam meningkatkan capaian akses aman melalui sosialisasi dan promosi penyedotan tangki septik, optimalisasi dan pemeliharaan IPAL kawasan maupun IPAL komunal, serta pembangunan tangki septik individual di pulau-pulau.

Selain permasalahan pada akses aman, praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih terjadi di Kota Bontang. Pada tahun 2024, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang masih melakukan praktik BABS sebanyak 1.743 KK. Praktik BABS ini pada umumnya terjadi di daerah pesisir dan pulau-pulau di mana prasarana air limbah domestik masih belum tersedia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dalam rangka menangani hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang melaksanakan pembangunan septik tank individual yang dilakukan dengan Teknologi Tepat Guna Jamban Pesisir Sederhana (TTG-JPS) secara swakelola oleh kelurahan dan septik tank terapung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota. Pada praktiknya TTG JPS dilaksanakan di kawasan pesisir yang tidak begitu terpengaruh oleh tinggi

gelombang laut, sedangkan septik tank terapung dibangun di pulau-pulau untuk mengakomodir karakteristik daerah dengan perairan yang lebih dalam.

c. Pengelolaan Persampahan

Produksi timbulan sampah di Kota Bontang terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut selaras dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Pertambahan jumlah timbulan sampah juga mempengaruhi tingkat keterolahan sampah pada fasilitas pengolahan sampah di Kota Bontang sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024

Timbulan Sampah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah timbulan sampah (ton)	37.769,85	37.894,33	38.046,40	38.829,46	39.206,17
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton)	36.586,10	37.760,17	37.917,10	38.706,85	39.092,92
Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	96,87	99,65	99,66	99,68	99,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2025

Produksi timbulan sampah di Kota Bontang terus bertambah selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,78 persen terjadi peningkatan dari tahun ke tahun seiring peningkatan jumlah penduduk.

Dalam rangka mengelola timbulan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya menyediakan layanan pengelolaan sampah, termasuk layanan pengumpulan sampah. Hal tersebut dapat diukur dengan proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, yakni jumlah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu maupun yang memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 meter. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang mencatat bahwa sampai dengan 2024, jumlah rumah tangga yang telah menerima layanan pengumpulan sampah mencapai 45.054 rumah tangga atau sebesar 71,49 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan pengumpulan sampah di Kota Bontang sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan perluasan cakupan pelayanan pengumpulan sampah. Adapun kinerja pengelolaan sampah Kota Bontang juga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengurangan Sampah (%)	19,72	20,30	26,77	30,11	28,22
Pengurangan Sampah (Ton/tahun)	7.446,62	7.691,11	10.185,68	11.690,70	11.063,11
Penanganan Sampah (%)	77.15	79.35	72.89	69.58	71,49
Penanganan Sampah (Ton/tahun)	29.139,48	30.069,06	27.731,42	27.016,15	28.029,81
Sampah Terkelola (%)	96,87	99,65	99,66	99,68	99,71
Sampah Terkelola (Ton/tahun)	36.586,10	37.760,17	37.917,10	38.706,85	39.092,92
Sampah Tidak Terkelola (%)	3.13	0,35	0,34	0,32	0,29
Sampah Tidak Terkelola (Ton/tahun)	1.183,75	134,16	129,30	122,61	113,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2025

Capaian pengurangan sampah Kota Bontang pada tahun 2024 meningkat 1,83 persen dibanding tahun 2023. Capaian tersebut didukung dengan upaya pengurangan sampah melalui proses di Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS-3R) maupun bank sampah. Dengan memaksimalkan pengurangan sampah di fasilitas TPS-3R maupun bank sampah, maka penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dikurangi. Hal itu perlu dilakukan karena daya tampung *landfill* TPA Bontang Lestari semakin terbatas. Oleh karena itu, Kota Bontang perlu memaksimalkan pengolahan sampah melalui upaya pengurangan sampah dari sumber.

2.1.1.5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Resiliensi terhadap Bencana

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 menjelaskan bahwa ekosistem juga mengandung unsur pengaturan untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana, melalui Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian dan Pencegahan Bencana Alam. Adapun Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian dan Pencegahan Bencana Alam ini merupakan ukuran kemampuan suatu daerah untuk melindungi dan memberikan upaya perlindungan serta melindungi sekitarnya dari bencana erosi, longsor, abrasi, maupun tsunami. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029, luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kota Bontang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana

Kecamatan/ Kelurahan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)
Kecamatan Bontang Barat	508,30	59,90	694,47	519,63	30,76
Belimbing	288,15	24,28	273,58	428,98	17,81
Gunung Telihan	131,12	11,33	77,70	0,00	1,62
Kanaan	87,42	24,28	341,57	90,65	11,33
Kecamatan Bontang Selatan	1558,90	1079,74	4929,25	1968,46	1.545,95
Berbas Pantai	40,47	0,00	0,00	1,62	1,62
Berbas Tengah	80,94	0,00	0,00	0,00	1,62
Bontang Lestari	385,27	1021,46	4615,20	1487,68	1434,26
Satimpo	853,11	19,43	284,91	437,08	50,00
Tanjung Laut	118,17	3,24	19,43	0,00	0,00
Tanjung Laut Indah	82,56	35,61	8,09	43,71	58,28
Kecamatan Bontang Utara	794,83	450,03	234,73	558,49	1.256,19
Api-API	139,22	46,95	17,81	9,71	3,24
Bontang Baru	80,94	40,47	4,86	6,48	80,94
Bontang Kuala	1,62	87,42	14,57	191,02	589,24
Guntung	312,43	132,74	79,32	173,21	454,48
Gunung Elai	95,51	103,60	76,08	129,50	92,27
Loktuan	165,12	38,85	42,08	46,95	36,02
KOTA BONTANG	2.862,04	1.591,28	5.856,82	3.044,96	2.832,92

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Luas kategori jasa ekosistem tertinggi terdapat pada kelas "Sedang" yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Bontang memiliki kemampuan cukup namun perlu penguatan dalam pengaturan ekosistem untuk mitigasi bencana. Sementara itu, luas distribusi jasa ekosistem terbesar untuk kategori "Sangat Tinggi" ada pada Kecamatan Bontang Selatan dengan luas sebesar 1.545,95 hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa ekosistem di wilayah ini memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana. Meskipun

demikian, masih terdapat area dengan kategori "Sangat Rendah" di Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara maupun Kecamatan Bontang Barat yang menunjukkan lemahnya kapasitas ekosistem dalam mitigasi bencana. Hal ini menandakan perlunya upaya konservasi dan penguatan ekosistem, terutama di area dengan tingkat perlindungan bencana yang rendah, agar daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Dalam aspek kebencanaan, Pemerintah Kota Bontang selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui pengelolaan risiko bencana. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Bontang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.19. Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				Tingkat
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Risiko Bencana (skor)	135,89	122,77	127,85	116,57	Sedang
Indeks Ketahanan Daerah (nilai)	0,47	0,53	0,46	0,54	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang, 2025

IRB adalah ukuran penilaian tingkat risiko bencana, sedangkan IKD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana kota. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari IRB yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana.

Berdasarkan tabel di atas, kinerja risiko bencana Kota Bontang berada dalam kategori “Sedang” yang mengindikasikan bahwa Kota Bontang memiliki tingkat kerentanan dan ancaman bencana yang cukup tinggi, namun masih dapat dikelola dengan baik melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Sementara itu, nilai IKD Kota Bontang juga menunjukkan kategori “Sedang” yang mengindikasikan bahwa Kota Bontang memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang cukup. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui pengelolaan risiko bencana yang komprehensif.

b. Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim

Identifikasi kerentanan terhadap adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui pendekatan Jasa Ekosistem Pengatur Iklim. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim merupakan peran ekosistem dalam menjaga kestabilan kondisi iklim dan mencegah perubahan iklim yang ekstrem akibat pemanasan global. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029, luasan jasa ekosistem pengatur iklim di Kota Bontang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.20. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Kecamatan/ Kelurahan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)
Kecamatan Bontang Barat	508,30	4,86	734,94	55,04	509,92
Belimbing	288,15	4,86	275,20	19,43	445,17
Gunung Telihan	131,12	0,00	79,32	11,33	0,00
Kanaan	87,42	0,00	378,80	24,28	64,75
Kecamatan Bontang Selatan	1558,90	260,63	4966,48	993,94	3.303,97
Berbas Pantai	40,47	0,00	0,00	0,00	1,62
Berbas Tengah	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Bontang Lestari	385,27	225,01	4608,72	950,24	2773,00
Satimpo	853,11	0,00	288,15	19,43	484,02
Tanjung Laut	118,17	0,00	19,43	3,24	0,00

Kecamatan/ Kelurahan	Sangat Rendah (Ha)	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Sangat Tinggi (Ha)
Tanjung Laut Indah	82,56	35,61	48,56	19,43	42,09
Kecamatan Bontang Utara	794,83	396,61	205,59	530,97	1.364,65
Api-api	139,22	30,76	17,81	27,52	0,00
Bontang Baru	80,94	38,85	4,86	8,09	80,94
Bontang Kuala	1,62	87,42	9,71	213,68	571,48
Guntung	312,43	123,03	77,70	132,74	508,38
Gunung Elai	95,51	77,70	51,80	148,93	121,41
Loktuan	165,12	38,85	43,71	1,62	82,44
KOTA BONTANG	2.862,04	663,71	5.905,38	1.579,95	5.176,92

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa distribusi dan luas jasa ekosistem pengaturan iklim kategori "Sedang" memiliki luas terbesar diikuti oleh kategori "Sangat Tinggi". Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kota Bontang memiliki kapasitas yang cukup baik hingga sangat baik dalam pengaturan iklim. Pada kategori “Sangat Tinggi” Kecamatan Bontang Selatan memiliki kontribusi terbesar dalam jasa ekosistem pengaturan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem di wilayah ini memiliki peran dominan dalam menjaga keseimbangan iklim. Selain itu, masih terdapat area yang masuk dalam kategori "Sangat Rendah" yang tersebar di semua kecamatan, terutama di Kecamatan Bontang Selatan (1.558,90 hektar). Ini menunjukkan bahwa ada beberapa wilayah dengan ekosistem yang kurang optimal dalam pengaturan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas ekosistem di daerah tersebut agar dapat lebih berkontribusi dalam menjaga kestabilan iklim di Kota Bontang.

Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan beberapa langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim seperti program Kampung Iklim (ProKlim). Program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim. Melalui ProKlim, masyarakat didorong untuk terlibat dalam kegiatan ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah dan penghijauan. Selain itu, program ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim. Langkah ini sejalan dengan komitmen Kota Bontang dalam mendukung target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tabel 2.21. Total Emisi Gas Rumah Kaca

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Emisi Gas Rumah Kaca (Gg CO2)	12.846,43	11.657,55	11.050,56	10.377,74	10.377,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, 2025

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Kota Bontang telah menunjukkan hasil nyata dalam upaya penurunan emisi GRK. Pada tahun 2022, total emisi GRK tercatat sebesar 11.050,56 Gg CO2, dan berhasil turun menjadi 10.377,74 Gg CO2 pada tahun 2023 kemudian di tahun 2024 kembali turun menjadi 10.377,45 Gg CO2. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program mitigasi yang dilaksanakan di tingkat kota dan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi GRK sebagaimana tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia serta mendukung target-

target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam upaya penanganan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup.

2.1.1.6. Demografi

a. Jumlah Penduduk Kota Bontang

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bontang tercatat sebanyak 191.811 jiwa, yang terdiri dari 99.151 laki-laki dan 92.660 perempuan. Penduduk Kota Bontang tersebar di tiga kecamatan, dengan Kecamatan Bontang Utara sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak . Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penduduk Kota Bontang terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Tahun 2020 - 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bontang Utara	82.120	84.956	85.919	87.692	89.010
Bontang Selatan	70.297	70.210	69.967	71.040	71.167
Bontang Barat	30.277	30.227	30.251	31.236	31.634
Total	184.784	185.393	186.137	189.968	191.811

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Bontang juga bervariasi antar kelurahan. Kelurahan Berbas Tengah dan Berbas Pantai memiliki kepadatan lebih dari 150 jiwa per hektar, sedangkan Kelurahan Bontang Lestari hanya memiliki kepadatan 0,84 jiwa per hektar, menunjukkan perbedaan distribusi penduduk yang cukup ekstrem di Kota Bontang.

b. Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang

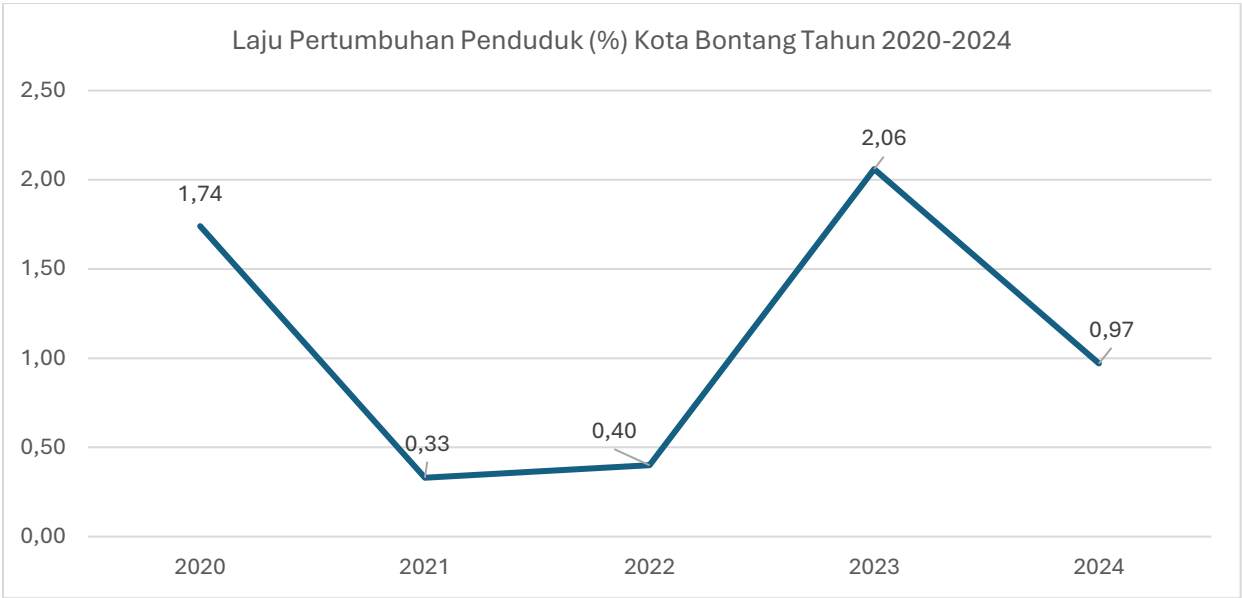
Dinamika pertumbuhan penduduk Kota Bontang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang masuk ke Kota Bontang sebanyak 5.925 jiwa, sementara penduduk yang pindah keluar sebanyak 5.768 jiwa. Selain itu, terdapat 1.736 kelahiran dan 655 kematian, yang menunjukkan bahwa angka kelahiran masih lebih tinggi dibanding angka kematian.

Tabel 2.23. Pertumbuhan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Datang, Pindah, Lahir dan Meninggal

Parameter	Jumlah (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Datang	4.200	4.304	4.821	5.504	5.925
Penduduk Pindah	5.948	6.799	6.892	6.221	5.768
Penduduk Lahir	2.641	2.396	2.141	2.058	1.736
Penduduk Meninggal	788	908	691	716	655

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bontang selama periode 2020-2024 mengalami fluktuatif. Kota Bontang mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2021 di mana laju pertumbuhan penduduk menurun dari 2.15 persen pada tahun sebelumnya menjadi 0.81 persen di tahun 2021, dan mengalami kenaikan menjadi 2.06 persen di tahun 2023, kemudian kembali mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024. Grafik berikut memperlihatkan dinamika laju pertumbuhan penduduk Kota Bontang tahun 2020-2024.



Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Meskipun mengalami laju pertumbuhan penduduk yang fluktuatif, akan tetapi pertumbuhan penduduk di Kota Bontang relatif stabil. Ini menunjukkan bahwa Kota Bontang masih menjadi daerah yang menarik bagi penduduk pendatang, terutama karena sektor industri dan jasa yang terus berkembang. Berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan, jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2030 adalah sebanyak 204.278 jiwa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2030

Proyeksi Penduduk Kota Bontang (jiwa)					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
194.080	195.984	197.880	199.881	201.907	204.278

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

c. Komposisi Penduduk

Penduduk Kota Bontang didominasi oleh penduduk laki-laki dengan persentase sebesar 52 persen lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.25. Komposisi Penduduk Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Bontang Selatan	36.782	34.385
Bontang Utara	46.043	42.967
Bontang Barat	16.326	15.308
Total	99.151	92.660

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Dengan total penduduk laki-laki sebanyak 99.151 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 92.660 jiwa, maka rasio jenis kelamin penduduk di Kota Bontang senilai 107,01. Berdasarkan nilai tersebut, terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki dan 100 penduduk perempuan di Kota Bontang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Kondisi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui PDRB, yang mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah. Pada tahun 2024, PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 68,8 triliun, mengalami peningkatan Rp 700 miliar (0,01 persen) dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 68,1 triliun. Namun, secara riil (atas dasar harga konstan/ADHK), pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mengalami kontraksi sebesar -2,51 persen, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap bertahan di angka 5 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan adanya penurunan produksi barang dan jasa, terutama di sektor industri pengolahan, sebagian besar disebabkan oleh fluktuasi produksi industri pengolahan migas dan petrokimia, yang masih menjadi sektor dominan di Kota Bontang. Tren PDRB Kota Bontang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Rp Miliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	LPE ADHK (%)
2020	55,664,04	39,320.23	-2,74
2021	57,948.13	39,949.08	1,60
2022	63,107.88	40,930.98	2,46
2023	68,105.67	42,633.63	4,16
2024	68,418.31	41,563.91	-2,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

b. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha

Struktur PDRB Kota Bontang tahun 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi. Sektor perdagangan, transportasi, serta jasa turut berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.27. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

No	Kategori/Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25	1,23	1,17	1,14	1,21
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,51	0,51	0,37	0,36
C	Industri Pengolahan	79,28	79,42	78,73	78,37	76,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,69	6,49	7,04	7,37	8,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40	3,30	3,32	3,39	3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,58	1,66	1,80	1,85	2,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	0,57	0,58	0,62	0,67
J	Informasi dan Komunikasi	0,86	0,87	0,85	0,86	1,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,84	0,92	0,98	1,01

No	Kategori/Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2019-2023 (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estate	0,50	0,50	0,47	0,46	0,49
M	Jasa Perusahaan	0,50	0,50	0,53	0,56	0,61
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,45	1,41	1,37	1,30	1,63
O	Jasa Pendidikan	1,21	1,21	1,23	1,23	1,32
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	1,03	1,01	1,01	1,05
Q	Jasa Lainnya	0,42	0,41	0,41	0,42	0,48
TOTAL DISTRIBUSI PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Industri pengolahan masih menjadi sektor utama dalam perekonomian Kota Bontang, dengan kontribusi mencapai 76,33 persen terhadap PDRB pada tahun 2024. Namun, dalam lima tahun terakhir, sektor ini mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas alam dari ladang-ladang di Muara Badak, yang selama ini menjadi sumber utama bagi industri pengolahan migas dan petrokimia di Kota Bontang. Dampaknya, kapasitas produksi industri mengalami penyusutan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini pun ikut menurun. Selain itu, fluktuasi harga komoditas energi global juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan di daerah ini.

Meskipun industri pengolahan masih mendominasi, terdapat beberapa lapangan usaha lain yang juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kota Bontang. Sektor konstruksi menempati posisi kedua dengan kontribusi 8,07 persen, didorong oleh pembangunan infrastruktur serta proyek perumahan yang terus berkembang. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor juga memiliki peran penting dengan kontribusi 3,70 persen, yang mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat dalam konsumsi barang dan jasa. Sektor transportasi dan pergudangan menyumbang 2 persen, mendukung distribusi barang dan logistik untuk mendukung kegiatan industri dan perdagangan di Kota Bontang. Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memiliki kontribusi sebesar 1,63 persen, yang mencerminkan peran penting pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan tren penurunan pada sektor industri pengolahan, Kota Bontang perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi lainnya agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada industri migas dan petrokimia. Penguatan sektor perdagangan dan jasa, optimalisasi sektor transportasi dan logistik, serta percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih beragam dan tangguh. Selain itu, investasi dalam energi baru terbarukan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Kota Bontang.

c. PDRB Per Kapita Kota Bontang

PDRB per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat Kota Bontang. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kota Bontang mencapai Rp 367,16 juta per tahun, yang berarti secara rata-rata setiap

penduduk di Kota Bontang mampu menghasilkan produk domestik sebesar jumlah tersebut.

Tabel 2.28. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Tahun 2020 – 2024

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Tahun)	Pertumbuhan (%)
2020	311,88	-4,64
2021	320,30	2,70
2022	344,14	7,44
2023	366,46	6,48
2024	367,16	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

PDRB per kapita Kota Bontang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari Rp 311,88 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 367,16 juta pada tahun 2024. Namun, meskipun secara nominal mengalami kenaikan, laju pertumbuhannya mengalami perlambatan yang signifikan. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 7,44 persen, tetapi turun menjadi 6,48 persen pada 2023, dan hanya 0,19 persen pada 2024. Perlambatan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tidak berjalan optimal, terutama akibat kontraksi sektor industri pengolahan yang masih menjadi kontributor utama PDRB. Jika tren ini terus berlanjut, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

d. Nilai Investasi

Nilai investasi adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar aset atau dana yang telah ditanamkan (diinvestasikan) pada suatu kegiatan, proyek, atau instrumen keuangan, dengan harapan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan. Nilai Investasi cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya secara signifikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Nilai Investasi

Tahun	Nilai Investasi (Rp)
2020	4.082.858.000.000
2021	5.716.531.384.885
2022	5.498.938.256.441
2023	8.900.110.180.203
2024	7.575.652.587.799

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2025

Dari data lima tahun terakhir nilai investasi mengalami peningkatan, khususnya pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022-2023 perekonomian mengalami pemulihan pasca pandemi covid, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka usaha melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Tingginya minat masyarakat tersebut salah satunya didorong oleh pemerintah yang memberikan bantuan bagi pelaku usaha. Selain itu adanya beberapa proyek besar berskala nasional yang masuk ke Kota Bontang yaitu industri kimia dasar Anorganik Klor dan Alkali di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate (KIE).

e. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, mencakup faktor penyebab dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan juga menjadi indikator utama yang diperhatikan oleh pemerintah, sejalan dengan tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan diukur berdasarkan

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, yang ditentukan melalui rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibandingkan dengan garis kemiskinan. Penduduk dikategorikan miskin apabila pengeluaran mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan di Kota Bontang adalah Rp763.611,- per kapita per bulan, sehingga diperoleh persentase penduduk miskin sebesar 4,11 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan pemerintah daerah.

Tabel 2.30. Statistik Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2020-2024					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	636.491	665.572	697.326	763.661	801.945
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	7,91	8,41	8,38	7,71	7,11
Tingkat Kemiskinan (%)	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,54	0,47	0,37	0,39	0,31
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,09	0,08	0,05	0,05	0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

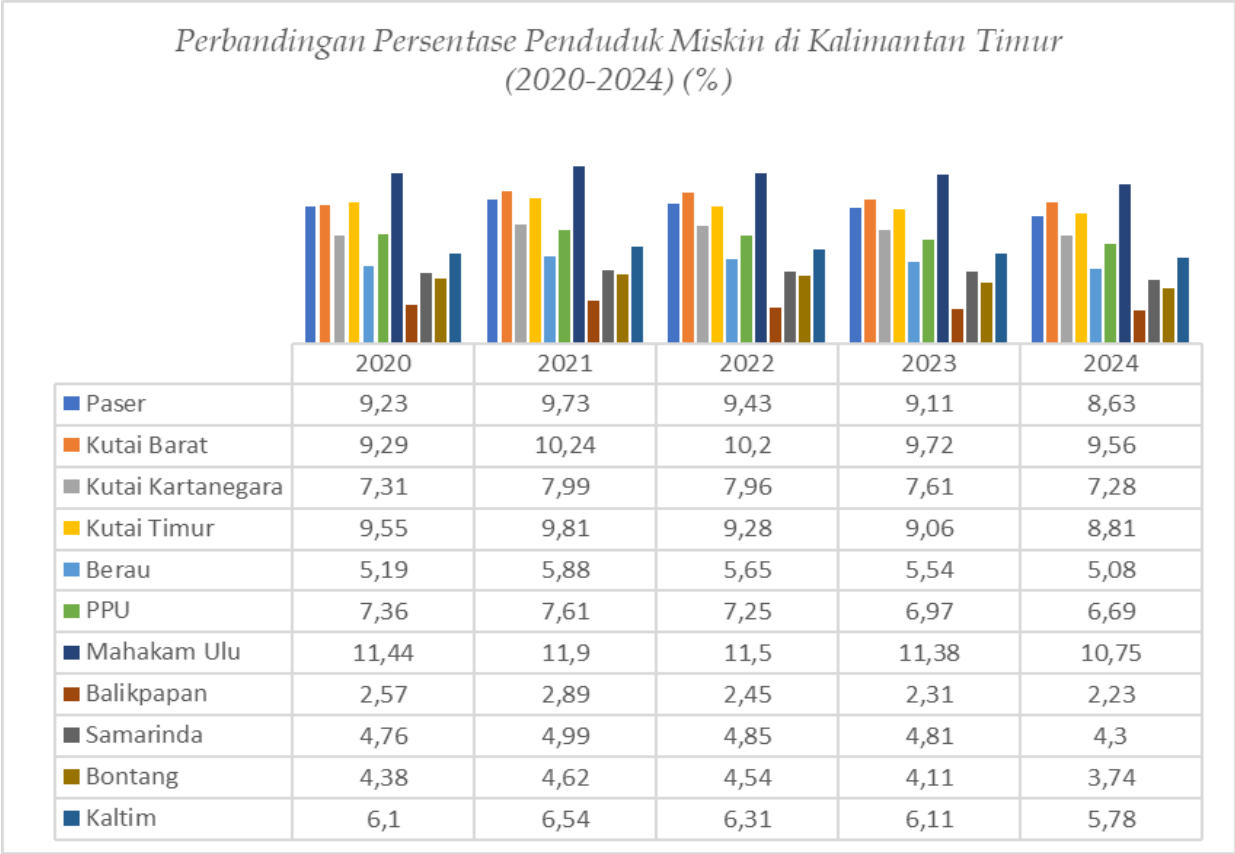
Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemiskinan di Kota Bontang mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dan para pemangku kepentingan lainnya.

1) Perbandingan Tingkat Kemiskinan dengan Wilayah Lain

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang memiliki tingkat kemiskinan **terendah kedua** setelah Kota Balikpapan pada tahun 2024. Berikut adalah perbandingan tingkat kemiskinan antara Kota Bontang dan daerah lainnya di Kalimantan Timur.

Tabel 2.31. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024					
Kabupaten/Kota	2020(%)	2021(%)	2022(%)	2023(%)	2024(%)
Paser	9,23	9,73	9,43	9,11	8,63
Kutai Barat	9,29	10,24	10,20	9,72	9,56
Kutai Kartanegara	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
Kutai Timur	9,55	9,81	9,28	9,06	8,81
Berau	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
Penajam Paser Utara	7,36	7,61	7,25	6,97	6,69
Mahakam Ulu	11,44	11,90	11,55	11,38	10,75
Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,30
Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
Kalimantan Timur (Provinsi)	6,10	6,54	6,31	6,11	5,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2024



Gambar 2.12. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Dari tabel tersebut, Kota Bontang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Timur, hanya kalah dari Balikpapan.

2) Kemiskinan Ekstrem di Kota Bontang

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta akses layanan sosial. Standar nasional menetapkan bahwa seseorang dikategorikan mengalami kemiskinan ekstrem jika hanya memiliki pengeluaran di bawah Rp10.739,- per hari atau Rp322.170,- per bulan.

Pada tahun 2024, Kota Bontang awalnya memiliki 149 jiwa atau 42 KK dalam kategori kemiskinan ekstrem. Namun, setelah intervensi dari Pemerintah Kota Bontang dan berbagai pemangku kepentingan, jumlah ini berhasil diturunkan menjadi 0 jiwa. Meskipun demikian, program lanjutan masih akan dilakukan pada tahun 2025 untuk memastikan keberlanjutan kemandirian sosial kelompok masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori ini.

Tabel 2.32. Perbandingan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Miskin (KK)	Individu Miskin
Paser	24.498	100.932
Kutai Kartanegara	77.339	321.642
Berau	13.136	55.811
Kutai Barat	16.204	64.458
Kutai Timur	29.106	121.258
Penajam Paser Utara	17.667	72.087
Mahakam Ulu	2.569	11.141
Balikpapan	27.801	115.440
Samarinda	71.692	286.619
Bontang	42	149

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024

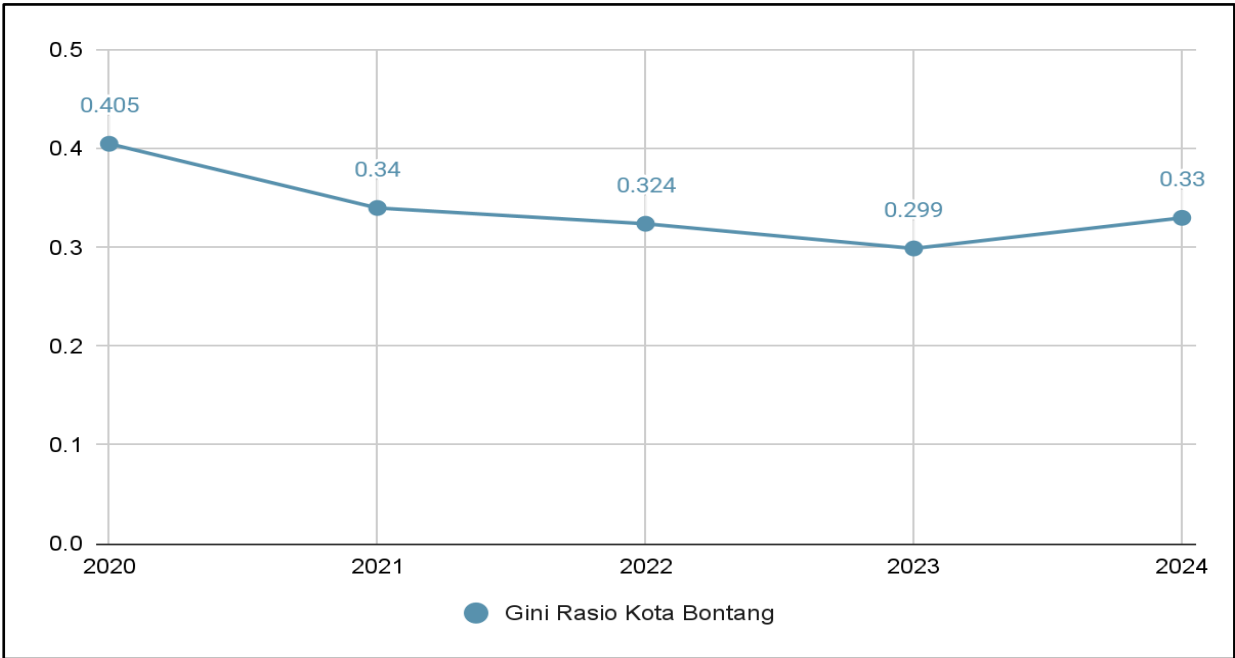
Data ini menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem **terendah** dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Tren kemiskinan di Kota Bontang menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat kemiskinan mencapai 3,74 persen pada tahun 2024, menunjukkan capaian yang lebih baik dari target RPJMD periode sebelumnya yaitu sebesar 3,90 persen.

Adapun pada tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/229/BAPPERIDA/2025 tentang Penetapan Kota Bontang Sebagai Kota Zero Miskin Ekstrem Tahun 2025, bahwa jumlah rumah tangga miskin dan individu miskin ekstrem di Kota Bontang menjadi 0 jiwa dan Kota Bontang telah mendeklarasikan menjadi Kota Zero Miskin Ekstrem Tahun 2025. Hal ini didukung oleh intervensi dari Pemerintah Kota Bontang dan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, program lanjutan masih akan dilakukan pada tahun 2025 untuk memastikan keberlanjutan kemandirian sosial kelompok masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori ini. Oleh karena itu, intervensi lanjutan sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan kesejahteraan, seperti peningkatan akses lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, serta penguatan sistem jaminan sosial agar masyarakat tetap mandiri dan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

f. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu wilayah. Rasio ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yang menggambarkan persentase kumulatif penduduk dibandingkan dengan distribusi pendapatan yang ideal. Semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu daerah, sedangkan semakin kecil nilainya, semakin merata distribusi pendapatan.

Pada tahun 2024, Kota Bontang mencatat Indeks Gini sebesar 0,330 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,031 poin dibandingkan tahun 2023. Angka 0,330 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Bontang termasuk dalam kategori rendah hingga sedang. Jika dibandingkan dengan target RKPD 2023 sebesar 0,32, capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bontang telah melampaui target, yang menandakan peningkatan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih baik.



Gambar 2.13. Indeks Gini Tahun 2020-2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Peningkatan Indeks Gini yang relatif kecil dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan ekonomi yang belum sepenuhnya merata di semua lapisan masyarakat, adanya perbedaan pertumbuhan pendapatan antar kelompok sosial, serta tingkat pengeluaran yang berbeda di setiap sektor ekonomi. Oleh karena itu, meskipun terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan, pemerintah Kota Bontang perlu terus mengupayakan kebijakan yang lebih inklusif, seperti program peningkatan kapasitas ekonomi kelompok rentan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.33. Indeks Gini di Kota Bontang

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Gini Kota Bontang	0,299	0,301
Indeks Gini Kalimantan Timur	> 0,301	> 0,301
Indeks Gini Nasional	> 0,301	> 0,301

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Meskipun Indeks Gini Kota Bontang mengalami sedikit peningkatan dari 0,299 pada 2023 menjadi 0,301 pada 2024, pencapaian ini tetap lebih baik dibandingkan target RKPD 2023 sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan masih berada dalam tren positif, meskipun terdapat tantangan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengawal kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, seperti pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja, serta penguatan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Dengan pendekatan inklusif dan strategi ekonomi yang merata, Kota Bontang dapat mempertahankan tren positif dalam distribusi pendapatan serta menciptakan kondisi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan informasi tentang seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai pembangunan manusia. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah mencapai kualitas hidup yang tinggi dalam hal umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Badan Pusat Statistik Kota Bontang merilis capaian IPM Kota Bontang tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.34. Capaian IPM Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,06	80,65	81,00	81,63	82,49
Pertumbuhan IPM	-0,04	0,74	0,43	0,78	1,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Indeks pembangunan manusia Kota Bontang selalu mengalami peningkatan 0,61 poin setiap tahunnya, dengan kenaikan 2,43 poin dari tahun 2020 sampai 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Bontang. Selama periode 2020-2024 IPM Kota Bontang rata-rata tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun.

h. Ketenagakerjaan

1) Tren Ketenagakerjaan di Kota Bontang

Kinerja sektor ketenagakerjaan di Kota Bontang menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa indikator utama. Salah satu capaian yang menonjol adalah penurunan jumlah perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja, dari 20 kasus pada tahun 2023 menjadi 16

kasus pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang dalam mengedukasi pekerja dan pengusaha mengenai hak serta kewajiban masing-masing.

Selain itu, jumlah pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, dari total 8.497 pencari kerja yang terdaftar, sebanyak 3.072 orang berhasil mendapatkan pekerjaan. Persentase penempatan pencari kerja meningkat dari 28,35 persen pada tahun 2023 menjadi 36,15 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, serta pengawasan terhadap perusahaan yang lebih optimal.

2) Perkembangan Lowongan dan Penempatan Kerja

Terdapat tren peningkatan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Pada tahun 2024, sebanyak 4.358 lowongan kerja tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, naik dari 3.181 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan lowongan pekerjaan mereka kepada pemerintah daerah, sejalan dengan kebijakan penerimaan lamaran kerja satu pintu dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018.

Tabel 2.35. Data Pencari Kerja, Lowongan, dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan
2020	6.699	1.442	1.245	18,58
2021	6.898	1.462	1.510	21,89
2022	8.407	2.921	2.232	26,55
2023	8.544	3.181	2.422	28,35
2024	8.497	4.358	3.072	36,15

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2024

3) Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja terus menjadi prioritas dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kota Bontang. Pada tahun 2024, sebanyak 1.237 tenaga kerja mengikuti pelatihan keterampilan, sedangkan tenaga kerja yang memperoleh sertifikat kompetensi mencapai 1.037 orang. Sertifikasi ini difokuskan pada bidang-bidang industri yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti barista dan moulding.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang juga terus memperkuat kerja sama dengan dunia industri dalam hal pemagangan dan program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja, guna meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan pelatihan.

4) Indikator Ketenagakerjaan Lainnya

Selain indikator penempatan kerja dan pelatihan, beberapa aspek lain yang menunjukkan perkembangan positif adalah:

- a) Persentase penyelesaian perselisihan tenaga kerja: 100 persen kasus perselisihan berhasil diselesaikan setiap tahunnya sejak 2020.
- b) Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: Persentase tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 88,79 persen pada tahun 2020 menjadi 98,7 persen pada tahun 2024.
- c) Penerapan tata kelola perusahaan yang layak: Pada tahun 2024, 18,99 persen perusahaan telah menerapkan tata kelola yang layak, meningkat dari 17,28 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.36. Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (orang)	201	195	441	1.254	1.237
Tenaga kerja bersertifikat kompetensi (orang)	-	-	128	630	1.037
Persentase perselisihan pengusaha & pekerja diselesaikan (%)	100	100	100	100	100
Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	88,79	89,67	92,72	95,11	98,47
Persentase perusahaan dengan tata kelola layak (%)	-	-	17,28	17,50	18,99

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2024

Meskipun peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak menunjukkan tren positif, persentasenya yang masih berada di angka 18,99 persen menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi standar ketenagakerjaan yang ideal. Tata kelola yang baik mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, pemberian hak-hak pekerja sesuai regulasi, serta penerapan sistem manajemen tenaga kerja yang berorientasi pada kesejahteraan karyawan. Rendahnya angka kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait.

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola yang layak, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Program sosialisasi dan pendampingan bagi perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah, dapat menjadi solusi dalam membantu mereka memahami dan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai. Selain itu, pemberian insentif bagi perusahaan yang berhasil menerapkan sistem tata kelola yang baik juga dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar ketenagakerjaan juga harus diperkuat agar menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan adil bagi tenaga kerja di Kota Bontang.

i. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja berkaitan erat dengan keseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kapasitas ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Di Kota Bontang, tren ketenagakerjaan menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir, yang ditandai dengan:

- Peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja
- Penurunan angka pengangguran (TPT)
- Peningkatan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Namun, tantangan utama masih ada, seperti kebutuhan peningkatan keterampilan tenaga kerja serta peran investasi dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Tabel 2.37. Indikator Kesempatan Kerja di Kota Bontang (2020-2024)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (orang)	91.932	90.071	99.150	94.923	93.930
Bekerja (orang)	83.232	81.136	91.408	87.575	87.299
Pengangguran (orang)	8.700	8.935	7.742	7.348	6.631
Bukan Angkatan Kerja (orang)	40.834	45.101	38.409	43.955	44.716
TPAK (%)	69,24	66,63	72,08	68,35	67,75
TPT (%)	9,46	9,92	7,81	7,74	7,06
TKK (%)	90,54	90,08	92,19	92,26	92,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami tren penurunan sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian, mengalami fluktuasi. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam partisipasi tenaga kerja, yang bisa dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keterampilan, serta peluang kerja yang tersedia.

1) Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

Mayoritas tenaga kerja di Kota Bontang berasal dari lulusan SMA/ sederajat, dengan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi.

Tabel 2.38. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Bontang

Pendidikan Tertinggi	2020	2021	2022	2023
SD	18.418	16.770	16.717	14.919
SMP/ Sederajat	10.128	8.518	9.234	7.670
SMA/ Sederajat	36.506	34.875	46.672	45.844
Diploma (D1-D3)	4.438	5.522	4.299	4.063
Sarjana (S1-S3)	13.742	15.451	14.486	15.079
Total	83.232	81.136	91.408	87.575

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih belum memiliki keterampilan atau pendidikan tinggi yang cukup untuk memasuki industri dengan kompetensi tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi hal yang penting.

Tabel 2.39. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Bontang

Status Pekerjaan	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	13.247	10.961	14.812	15.347	59.393
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	8.363	7.245	8.206	5.310	
Pekerja Bebas	824	1.336	1.914	650	
Pekerja Keluarga/ tak dibayar	9.179	8.220	7.133	5.941	
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	3.180	3.495	3.595	4.658	27.906
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	48.439	49.879	55.748	55.669	
Total	83.232	81.136	91.408	87.575	87.299

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Mayoritas tenaga kerja di Kota Bontang masih didominasi oleh buruh, karyawan, dan pegawai, sementara jumlah wirausahawan masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan di sektor formal, dengan keterbatasan peluang bagi mereka yang ingin berwirausaha. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan rendahnya akses terhadap modal usaha. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan berbasis industri menjadi sangat penting. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, terutama di sektor industri, jasa, dan teknologi, sehingga lulusan SMA dan tenaga kerja lainnya memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam dunia kerja. Selain itu,

sertifikasi profesi perlu diperluas agar tenaga kerja memiliki standar kompetensi yang diakui dan lebih mudah terserap oleh industri.

Salah satu kelompok tenaga kerja yang juga perlu mendapat perhatian adalah kelompok pekerja rentan. Tenaga kerja rentan merupakan kelompok pekerja yang berada dalam kondisi kerja yang tidak stabil, memiliki perlindungan sosial yang terbatas, serta rentan terhadap gejolak ekonomi dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata ekonomi dan sosial. Kelompok ini meliputi pekerja informal, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pekerja di sektor pertanian tradisional, pekerja rumah tangga, dan mereka yang bekerja tanpa jaminan sosial maupun perlindungan tenaga kerja yang memadai. Pemerintah Kota Bontang telah berupaya memberikan bantuan kepada kelompok pekerja rentan dengan memberikan bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan kepada 36.777 orang pekerja rentan.

Di sisi lain, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal, pertumbuhan sektor wirausaha harus didorong melalui berbagai program pendampingan dan akses permodalan. Pemerintah daerah dan sektor swasta dapat berkolaborasi dalam memberikan pelatihan kewirausahaan, mentoring bisnis, serta kemudahan akses ke sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Selain itu, investasi di sektor industri, jasa, dan teknologi perlu ditingkatkan guna menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya investasi yang lebih besar, baik dari dalam maupun luar daerah, akan tercipta peluang kerja yang lebih luas, sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Melalui strategi ini, keseimbangan antara tenaga kerja di sektor formal dan wirausaha dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Bontang.

2.1.2.2. Kesehatan untuk semua

Kesehatan masyarakat di Kota Bontang menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dalam berbagai indikator kesehatan utama, seperti angka harapan hidup, cakupan pelayanan kesehatan, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular. Berdasarkan data tahun 2024, angka harapan hidup di Kota Bontang mencapai 74,5 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Cakupan imunisasi dasar lengkap bagi balita juga mengalami peningkatan, dengan capaian 92,3 persen pada tahun 2024. Namun, tantangan masih ada dalam pengendalian penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan Diare, yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah padat penduduk.

Tabel 2.40. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102,93	467	119	0	122
Angka Kematian neo natal per 1.000/Kelahiran Hidup	1,03	1,44	8	11,8	12,2
Angka Kematian Bayi / 1.000 Kelahiran Hidup	13,6	14,39	11	13,48	15,9
Usia Harapan Hidup	74,37	74,55	74,57	74,73	75,03
Prevalensi balita gizi kurang	10,6	7,03	8,1	8,03	7,05
Prevalensi Balita Gizi Kurus (BB Kurang/Underweight)/(BB/U) (%)	<5	<5	15,13	15,67	15,92
Prevalensi Balita Stunting	20,5	19,65	22,8	19,65	21,21
Insiden Rate DBD / 100000 penduduk	13,6	321,7	316	244	154

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2024

Di sisi lain, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Bontang terus berkembang, dengan 3 rumah sakit, 8 puskesmas, dan 25 klinik kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan dengan menambah jumlah tenaga medis serta memperbaiki infrastruktur kesehatan. Namun, angka stunting masih menjadi perhatian, dengan prevalensi sebesar 17,2 persen pada tahun 2024, meskipun telah menurun dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil terus digalakkan, bersamaan dengan edukasi gizi kepada masyarakat. Selain itu, kepesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga meningkat, dengan 95,7 persen penduduk telah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjamin, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Bontang.

Tabel 2.41. Capaian Aspek Kesehatan Tahun 2024

Indikator Kesehatan	Capaian 2024	Tantangan & Catatan
Angka Harapan Hidup (tahun)	74,5	Perlu peningkatan layanan kesehatan lanjut usia
Cakupan Imunisasi Balita (%)	92,3	Perlu edukasi untuk meningkatkan cakupan ke daerah terpencil
Prevalensi Stunting (%)	21,21	Program gizi dan edukasi perlu diperkuat
Jumlah Rumah Sakit (unit)	3	Perlu peningkatan kapasitas rumah sakit
Jumlah Puskesmas (unit)	8	Perlu peningkatan fasilitas dan tenaga medis
Kepesertaan JKN (% penduduk)	95,7	Perlu monitoring pelayanan bagi peserta BPJS
Prevalensi Penyakit Menular	TBC & Diare masih cukup tinggi	Peningkatan sanitasi dan edukasi kesehatan masyarakat

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2025

Upaya peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan yang lebih merata, khususnya dalam pengendalian penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat, masih menjadi tantangan bagi Kota Bontang. Keberlanjutan program kesehatan dan peningkatan sinergi dengan sektor swasta serta komunitas lokal akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.42. Indeks Kesehatan 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kesehatan	0,835	0,839	0,840	0,841	0,847

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Indeks kesehatan Kota Bontang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam berbagai aspek salah satunya meningkatnya kualitas pelayanan medis.

Tabel 2.43. Kinerja Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keluarga Sehat (%)	0,86	0,88	**	**	**
2	Insidensi TB Per 100.000 Penduduk	296	240	385	496	489

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
3	Insidensi HIV Per 100.000 Penduduk	28,7	28,4	52,8	69	34
4	Prevalensi Hipertensi (%)	2,5	3,0	3,64	9,23	9,23
5	Insidensi DBD Per 100.000 Penduduk	148,4	321,6	317	244	154
6	Prevalensi Diabetes Melitus (%)	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
7	Jumlah Kasus Jiwa yg Ditangani	160	184	193	192	216

***data tidak ada karena indeks keluarga sehat mengalami perubahan indikator dari Kemenkes.
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2025*

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Pendidikan Usia Dini

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA di Kota Bontang mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah siswa mengalami penurunan dari 4.794 pada tahun 2021 menjadi 4.536 siswa. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah siswa meningkat menjadi 7.592, dan angka ini kembali naik menjadi 7.656 pada tahun 2024. Kenaikan signifikan pada tahun 2023 didorong oleh keberhasilan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang SD. Pemahaman yang lebih baik di kalangan orang tua tentang manfaat PAUD bagi perkembangan anak mendorong peningkatan partisipasi.

Tabel 2.44. Indikator pada Jenjang TK/RA Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024*
1	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA Kota Bontang	4794	4536	7592	7656
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	49,69	59,68	63,1	62,3
3	Jumlah Pendidik tingkat PAUD	350	298	316	302
4	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D - IV (%) Jenjang PAUD		85,24	66,46	66,46
5	Jumlah sekolah				
	- TK	55	55	55	55
	- RA	11	11	12	12
6	Data APK 4-6 tahun (%)	54	62	63	63

**) Data Sementara
 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, 2025*

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, APK PAUD tercatat sebesar 49,69 persen dan meningkat menjadi 59,68 persen pada tahun 2022. Kemudian, pada tahun 2023, angka ini kembali naik menjadi 63,1 persen dan sedikit turun menjadi 62,3 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa lebih banyak anak usia 3-6 tahun yang mengakses layanan PAUD. Namun, jumlah pendidik tingkat PAUD mengalami penurunan dari 350 orang pada tahun 2021 menjadi 302 orang pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena beberapa tenaga pendidik diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan berpindah ke instansi lain.

Dari sisi jumlah sekolah, data menunjukkan bahwa jumlah TK tetap stabil di angka 55-unit dari tahun 2021 hingga 2024, sementara jumlah RA mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2023, terdapat tambahan satu RA baru, yaitu RA Baitul Quran yang berlokasi di Kelurahan Satimpo, sehingga jumlah RA meningkat dari 11 menjadi 12 unit. Sementara itu, data APK untuk

anak usia 4-6 tahun menunjukkan pertumbuhan dari 54 persen pada tahun 2021 menjadi 63 persen pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap PAUD semakin membaik, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan tren positif dalam jumlah siswa dan tenaga pendidik yang tersedia.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pondasi utama dalam sistem pendidikan, mencakup jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dasar, berbagai indikator digunakan, seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data yang tersedia, HLS Kota Bontang mengalami peningkatan dari 12,98 tahun pada 2020 menjadi 13,43 tahun pada 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 13,42 tahun. Rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 10,79 tahun (2020) menjadi 10,95 tahun (2024), menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama.

Tabel 2.45. Indikator Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98	13,17	13,18	13,43	13,73
a	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,79	10,8	10,81	10,92	10,97
2	Angka partisipasi kasar					
a	SD/MI Paket A (persen)	103,41	103,45	102,3	89,31	105,20
b	SMP/MTs / Paket B (persen)	102,26	102,26	106,6	80,62	105,18
3	Angka pendidikan yang ditamatkan					
a	SD/MI Paket A (persen)	1,72	1,76	1,69	1,7	1,75
b	SMP/MTs / Paket B (persen)	1,67	1,63	1,57	1,61	1,70
c	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	-	89,44	100,35	99,97	103,75
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
a	SD/MI Paket A (persen)	93,02	93,03	95	83,1	89,08
b	SMP/MTs / Paket B (persen)	80,27	82,47	81,2	70,53	81,98
5	Angka Putus Sekolah (APS)					
a	SD/MI	0	0	2	0	0
b	SMP/MTs	0	0	0	0	0
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
a	7-12 tahun	99,85	99,55	99,74	99,85	99,12
b	13-15 tahun	99,7	99,36	98,96	99,71	99,23

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024*
c	16-18 tahun	83,67	83,47	82,91	83,67	83,25
d	19-23 tahun	-	-	-	-	-
7	Pendidikan Sekolah Dasar					
a	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	28,2	28,14	39,14	31,65	26,06
b	Rasio Guru terhadap murid	522	556,41	571,49	616,74	551,73
c	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata - rata	49,2	55,64	78,35	61,67	55,17
d	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) jenjang SD	N/A	93,04	98,32	89,41	91,12
8	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
a	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (persen)	34,35	33,28	32,71	27,60	34,52
b	Rasio guru terhadap murid	680,66	695,34	571,84	616,83	601,07
c	Rasio guru terhadap murid per kelas	64,44	69,53	57,18	61,68	60,11
d	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,36	99,36	98,94	99,18	99,18
e	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) jenjang SMP	N/A	96,88	96,27	90,55	90,56
9	Fasilitas Pendidikan					
a	Sekolah / Pendidikan SD / MI Kondisi Bangunan Baik	91,8	67,21	94,74	98,11	98,18
b	Sekolah / Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	84,85	78,79	92,59	98,44	94,59

*) Data Sementara dan Revisi
 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, 2025

Dari sisi partisipasi sekolah, APK SD/MI mengalami fluktuasi. Pada 2020-2022 angkanya stabil di atas 100 persen, namun mengalami penurunan pada 2023 (89,31 persen) sebelum meningkat kembali menjadi 105,20 persen pada 2024. Sementara itu, APK SMP/MTs juga mengalami perubahan signifikan, turun ke 80,62 persen pada 2023 sebelum meningkat kembali ke 105,18 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa, terutama di tingkat SMP. Namun, angka kelulusan tetap cukup stabil, dengan persentase siswa yang menamatkan pendidikan di jenjang SD/MI dan SMP/MTs berada di kisaran 1,57 persen hingga 1,76 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan dinamika yang menarik. APM SD/MI mengalami peningkatan dari 93,02 persen pada 2020

menjadi 95 persen pada 2022, sebelum turun signifikan ke 83,1 persen pada 2023 dan kembali naik ke 89,08 persen pada 2024. Sementara itu, APM SMP/MTs mengalami tren naik-turun, dengan angka terendah pada 2023 sebesar 70,53 persen, sebelum kembali naik menjadi 81,98 persen pada 2024. Menariknya, angka putus sekolah di Kota Bontang cukup rendah, dengan hampir tidak ada kasus putus sekolah di jenjang SMP/MTs selama lima tahun terakhir.

Dari segi kualitas pendidikan, ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah mengalami fluktuasi. Pada jenjang SD, rasio ini meningkat signifikan dari 28,2 persen (2020) menjadi 39,14 persen (2022), tetapi kembali turun ke 31,13 persen pada 2024. Rasio guru terhadap murid juga mengalami peningkatan, dengan puncaknya pada 2023 (616,74), sebelum menurun menjadi 551,73 pada 2024. Selain itu, persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV sempat mencapai 98,32 persen pada 2022, tetapi mengalami sedikit penurunan pada 2023 dan 2024 (91,12 persen). Untuk jenjang SMP, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah terus menurun dari 34,35 persen (2020) menjadi 27,60 persen (2023), menunjukkan bahwa pertumbuhan sekolah belum sejalan dengan pertumbuhan populasi.

Dari sisi infrastruktur, kondisi bangunan sekolah juga menunjukkan perbaikan signifikan. Sekolah dasar dengan kondisi bangunan baik meningkat dari 67,21 persen (2021) menjadi 98,18 persen pada 2024, sementara kondisi bangunan sekolah SMP/MTs juga meningkat dari 78,79 persen (2021) menjadi 94,59 persen (2024). Hal ini mencerminkan adanya investasi yang cukup besar dalam perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bontang dalam beberapa tahun terakhir.

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam rangka mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Bontang sudah mengembangkan kelembagaan PKBM yang terakreditasi minimal B (4 lembaga). Lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46. SDG's Urusan Pendidikan Kota Bontang Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4Target 1)	93,03	95	83,1	89,08
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	82,47	81,2	70,53	81,98
3	SD/MI terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	21,31	20,63	23,21	22,22
4	SD/MI terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	67,21	63,49	66,07	61,90
5	SMP/MTS terakreditasi B (Tujuan 4 Target 1)	48,48	45,45	41,38	37,84
6	SMP/MTS terakreditasi A (Tujuan 4 Target 1)	45,45	51,52	51,72	48,65
7	APK SD/MI (persen) (Tujuan 4 Target 1)	94,27	102,3	89,31	105,20
8	APK SMP/MTs (persen) (Tujuan 4 Target 1)	102,26	106,6	80,62	105,18
9	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,8	10,81	10,92	10,97
10	APK PAUD 3 – 6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	45,32	40	54,88	53,09
11	Rasio APM P/L SD/MI (persen)(Tujuan 4 Target 5)	N/A	95	83,1	-
12	Rasio APM P/L SMP/MTs Rasio APM P/L SMP / MTs Rasio (persen) (Tujuan 4 Target 5)	N/A	81,2	70,53	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024
13	Persentase Guru TK Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	43,22	29,38	51,6	25,43
14	Persentase Guru SD Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	49,82	51,96	89,45	50,30
15	Persentase Guru SMP Bersertifikasi (Tujuan 4 Target c)	48,77	59,77	92,05	59,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, 2024

c. Literasi dan Numerasi

Literasi dan Numerasi Kota Bontang merupakan dua aspek penting dalam mengukur kualitas pendidikan dan kemampuan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung. Kedua indikator ini berkontribusi signifikan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun program untuk mendukung peningkatan literasi dan numerasi di Kota Bontang adalah:

- Program Literasi dan Numerasi di Sekolah: Sekolah-sekolah di Kota Bontang melaksanakan program literasi dan numerasi yang terintegrasi dalam kurikulum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa secara menyeluruh.
- Pelatihan untuk Guru: Pemerintah Kota Bontang menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar literasi dan numerasi. Pelatihan ini mencakup metode pengajaran yang efektif dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar.

Berikut tersaji angka literasi dan numerasi Kota Bontang dalam 4 tahun terakhir:

Tabel 2.47. Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi

No	Indikator	2022	2023	2024
Kemampuan Literasi				
1	SD Umum	54,69	59,77	65,00
2	SMP Umum	70,15	73,84	77,93
Kemampuan Numerasi				
1	SD Umum	38,05	42,45	47,10
2	SMP Umum	70,15	73,84	66,02

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2025

Berdasarkan data tabel 2.47, Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi Kota Bontang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Meskipun mengalami peningkatan, Angka Kemampuan Literasi Kota Bontang masih berada pada urutan ke-3 setelah Balikpapan dan Samarinda untuk tingkat SD, sedangkan tingkat SMP berada di urutan kedua Setelah Kota Balikpapan. Capaian Angka Kemampuan Numerasi Kota Bontang juga masih berada di peringkat ke 3 setelah Kota Samarinda dan Balikpapan untuk tingkat SD. Sedangkan untuk tingkat SMP, capaian angka numerasi Kota Bontang berada di urutan kedua setelah Kota Balikpapan.

d. Pembangunan Literasi Masyarakat

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi masyarakat khususnya melalui peran perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang

hayat, digambarkan melalui nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Gemar Membaca Masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.48. Rekapitulasi Nilai IPLM dan TGM Kota Bontang

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	N/A	74.43	82.05	84.70
Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM)	N/A	53.73	71.40	75.83

Sumber: Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Data pada tabel ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan IPLM Kota Bontang sebesar 10,5 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024, yang menandakan adanya peningkatan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat dan sebaran perpustakaan yang di bina, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan yang cukup signifikan meningkat. Saat ini pemerintah Kota Bontang secara intens terus mengembangkan fasilitas perpustakaan dan kearsipan guna memberi layanan terbaik kepada masyarakat kota Bontang untuk mendapatkan literasi dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi lainnya.

Secara keseluruhan Kota Bontang telah berhasil mengembangkan ekosistem literasi masyarakat secara signifikan dalam 3 tahun terakhir, baik dari sisi infrastruktur (IPLM) maupun perilaku (TGM). Dengan mempertahankan momentum ini, Kota Bontang berpotensi menjadi model kota literasi di Indonesia Timur.

e. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital Kota Bontang secara spesifik belum tersedia dalam data publik resmi. Namun, berdasarkan informasi dari Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2022, Kalimantan Timur mencatatkan skor Indeks Literasi Digital (ILD) sebesar 3,62, menempatkannya pada peringkat ketiga nasional. Skor ini menunjukkan bahwa masyarakat di provinsi tersebut, termasuk Kota Bontang, memiliki tingkat literasi digital yang baik. Meskipun data spesifik mengenai Indeks Literasi Digital Kota Bontang belum tersedia, inisiatif dan program yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Bontang tetap menunjukkan komitmen Kota Bontang untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak, diharapkan literasi digital di Kota Bontang terus berkembang, seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan bermanfaat.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Penyelenggaraan pada urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat serta tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Tabel 2.49. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Jenis PPKS	Jumlah PPKS (JIWA)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	1,033	2,651	484	26	-
2	Anak Terlantar	829	812	3474	45	-
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	1	11	10	6	41
4	Anak Jalanan	2	2	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	238	208	185	24	185
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan (0-18) tahun	5	5	-	4	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	4	4	-	-	1
8	Lanjut Usia Terlantar	2,337	2,337	740	94	105
9	Penyandang Disabilitas	364	540	610	62	584
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	6	14	8	5	4
12	Pengemis	1	13	5	24	4
13	Pemulung	55	52	1	-	-
14	Kelompok minoritas	40	47	47	-	-
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	30	30	15	20	25
16	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	54	78	78	120	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	3	27	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	12	12	15	3	-
20	Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	737	299	17498	15,742	473
22	Korban Bencana Sosial	226	86	79	31	130
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2,185	2,185	147	150	95
24	Fakir Miskin	2,005	2,761	5621	1,940	3,086
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (Pesisir)	-	-	-	-	-
JUMLAH		10.164	12.147	29.020	18.323	4.733

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2025

Pada tahun 2024, indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 100 persen. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dari 2.313 PMKS yang ada di Kota Bontang terdapat 2.313 PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani mencapai 100 persen. Pada tahun 2024, ada 620 orang korban bencana alam/sosial dan semuanya terlayani dengan baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan peran Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan urusan sosial melalui peningkatan jaminan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat Kota Bontang. Berikut tabel angka perlindungan sosial masyarakat Kota Bontang:

Tabel 2.50. Angka Perlindungan Sosial Kota Bontang Tahun 2020-2024

No	Indikator kinerja	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	81,92	100	100	100	100
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemerlu Pelayanan	100	100	100	100	100

No	Indikator kinerja	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
	Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial					
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100
	Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100	100	100	100	100
6	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	88,79	89,67	92,72	95,11	98,47

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, 2024

Urusan Sosial memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diarahkan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Beberapa indikator TPB dalam Urusan Sosial, dapat dirincikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51. Pencapaian Indikator TPB

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74
2	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100	100	100	100	100
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4.864	4.295	2.557	1.972	2.498
4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	226	57	79	31	130
5	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	61	23	17	78	63

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang; Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Berdasarkan data BPS (Daerah Dalam Angka tahun, 2024) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan Kota Bontang pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,37 persen dari tahun sebelumnya menjadi 3,74 persen. Dari total 190.106 penduduk di Kota Bontang, terdapat 7.110 orang penduduk yang miskin. Beberapa hal yang menjadi permasalahan kemiskinan di Kota Bontang antara lain: penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dengan baik, ketidakmauan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk keluar dari garis kemiskinan serta adanya mindset warga Bontang yang menganggap mata pencaharian hanya dari sektor formal dan kurangnya kompetensi untuk berwirausaha.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) oleh satgas P3KE, data P3KE Kota Bontang tahun 2023 yaitu 14.307 KK. Selanjutnya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) melakukan pemadanan/penyandingan data P3KE dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan penyandingan tersebut ditemukan 8.090 KK yang tidak masuk dalam DTKS. Selanjutnya, dari 8.090 KK kemudian dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terdapat 5.450 KK yang masih aktif berdomisili di Kota Bontang. Kemudian DSPM melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan terhadap data 5.450 KK sehingga terdapat data dari desil 1-4 sejumlah 396 KK yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan pada desil I terdapat 47 KK (241 jiwa).

Salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program keluarga harapan menunjukkan dinamika peningkatan yang cukup, sesuai dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang, hal ini ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.52. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	2.478 KPM	2.086 KPM	2.494 KPM	2.458 KPM	3.129 KPM

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, 2024

Berdasarkan daftar tabel diatas, pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah KPM dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh proses pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta kelulusan mandiri dari sebagian keluarga yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah KPM kembali mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah keluarga rentan baru akibat dampak ekonomi pasca pandemi dan hasil dari pembaruan data secara berkala.

Adapun Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat miskin serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal serta meminimalkan praktik penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Khusus pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan jumlah KPM menjadi 3.129 keluarga. Peningkatan ini merupakan hasil dari proses perluasan cakupan penerima manfaat oleh pemerintah pusat, sebagai bagian dari kebijakan penguatan perlindungan sosial nasional, serta hasil dari pemadanan data DTKS dengan data kependudukan yang lebih akurat dan komprehensif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program PKH selama lima tahun ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam aspek pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta akses terhadap layanan sosial dasar lainnya.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyediaan bantuan pangan kepada masyarakat yang tergolong dalam kelompok keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk

meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat miskin serta mendukung perekonomian lokal melalui mekanisme non tunai yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Pada periode tahun 2023 hingga 2024, sebanyak 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah terdata dan menerima manfaat BPNT secara berkala setiap bulan. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan pokok, seperti beras, telur, tahu/tempe, dan buah-buahan, yang disalurkan melalui e-warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan bank penyalur.

2.1.2.5. Beragama dan Berkebudayaan Maju

Data penganut agama memiliki peran penting dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah, terutama dalam penyediaan layanan publik yang inklusif dan berbasis keberagaman. Dengan mengetahui jumlah penduduk berdasarkan agama, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan di berbagai sektor, seperti pendidikan, tempat ibadah, dan kegiatan sosial-keagamaan, guna memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapat fasilitas yang memadai. Selain itu, data ini juga bermanfaat dalam menjaga harmoni sosial serta mendorong toleransi antarumat beragama, sehingga pemerintah dapat mengantisipasi potensi konflik dan merancang program-program yang memperkuat kerukunan.

Dalam konteks Kota Bontang, pemahaman mengenai distribusi agama juga dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, termasuk integrasi nilai-nilai sosial ke dalam kebijakan kota yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.53. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2024

No	Agama	Bontang Selatan	Bontang Utara	Bontang Barat	Total
1	Islam	67.750	82.040	20.851	170.641
2	Protestan	2.725	4.139	8.707	15.571
3	Katolik	478	1233	1633	3344
4	Hindu	42	196	41	279
5	Buddha	45	84	4	133
6	Konghucu	-	-	-	-
7	Lainnya	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2023 berdasarkan agama yang dianut di setiap kecamatan. Mayoritas penduduk Kota Bontang beragama Islam, dengan jumlah total 170.641 jiwa. Jumlah ini tersebar di tiga kecamatan, dengan populasi Islam tertinggi di Bontang Utara sebanyak 82.040 jiwa. Sementara itu, penganut agama Protestan mencapai 15.571 jiwa, dengan jumlah tertinggi di Bontang Barat. Selain itu, jumlah penduduk beragama Katolik di Kota Bontang mencapai 3.344 jiwa, tersebar di seluruh kecamatan, dengan angka tertinggi di Bontang Barat sebanyak 1.633 jiwa. Penganut Hindu berjumlah 279 jiwa, dengan konsentrasi tertinggi di Bontang Utara, yaitu 196 jiwa. Penganut agama Budha sebanyak 133 jiwa, tersebar di tiga kecamatan, dengan jumlah terbesar juga berada di Bontang Utara.

Secara keseluruhan, Kota Bontang memiliki keberagaman agama, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak terdapat penganut agama Konghucu atau kategori "lainnya" dalam data ini. Hal ini mencerminkan

pola keberagaman masyarakat Bontang yang relatif homogen dalam beberapa aspek keagamaan, tetapi tetap memiliki komunitas minoritas yang signifikan.

Tabel 2.54. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Agama	Bontang Selatan	Bontang Utara	Bontang Barat	Total
1	Masjid (Mosque)	56	81	23	160
2	Mushola (Pray Room)	30	59	16	105
3	Gereja Protestan (Protestant Church)	11	19	29	59
4	Gereja Katolik (Catholic Church)	1	3	1	5
5	Pura (Temple)	-	1	-	1
6	Vihara	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2024

Kota Bontang memiliki total 160 masjid dan 105 mushola yang tersebar di tiga kecamatan, menunjukkan dominasi tempat ibadah umat Islam di wilayah ini. Kecamatan Bontang Utara memiliki jumlah masjid dan mushola terbanyak, masing-masing 81 masjid dan 59 mushola, diikuti oleh Bontang Selatan dan Bontang Barat. Hal ini mencerminkan tingginya populasi Muslim yang membutuhkan fasilitas ibadah yang memadai. Selain tempat ibadah umat Islam, terdapat 59 gereja Protestan yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Bontang Barat, yaitu 29 gereja. Sementara itu, gereja Katolik hanya berjumlah 5 unit, dengan persebaran di semua kecamatan. Keberadaan gereja ini mengindikasikan komunitas Kristen yang cukup signifikan di Kota Bontang. Adapun tempat ibadah untuk umat Hindu dan Buddha relatif sedikit. Hanya terdapat 1 pura di Bontang Utara dan tidak ada vihara yang tercatat dalam data ini. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemeluk agama Hindu dan Buddha di Bontang masih sangat terbatas dibandingkan dengan agama lainnya. Distribusi tempat ibadah ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah terkait pengembangan fasilitas keagamaan yang lebih merata dan inklusif.

Kerukunan umat beragama menjadi pondasi penting dalam menjaga persatuan nasional. Untuk mengukur dan memantau sejauh mana kehidupan beragama berlangsung harmonis di masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Agama menyusun sebuah alat ukur strategis bernama Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) terdiri dari 3 indikator yaitu kerjasama, toleransi dan kesetaraan. Data yang bersumber dari Kemenag Kota Bontang menunjukkan bahwa nilai KUB Kota Bontang pada tahun 2024 adalah 76,47 dengan nilai komponen kerjasama 77,15, toleransi 74,83, kesetaraan 77,42.

Tabel 2. 55. Tabel 2.58. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKUB	N/A	72,39	73,08	76,02	76,47

Sumber: Kementerian Agama Kota Bontang, 2025

Selain Indeks Kerukunan Umat beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan komponen penting dalam mengukur aspek sosial dan budaya. Instrumen ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh)

dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Data Indek Pembangunan Kebudayaan di Kota Bontang saat ini belum tersedia.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat yang Inklusif

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan gender merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dengan mempertimbangkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Pengukuran ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai sejauh mana perempuan dan laki-laki menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya data IPM gender, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran guna mengurangi kesenjangan gender serta meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan yang setara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Tabel 2.56. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Menurut Gender Tahun 2020-2024

Gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Gender (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	84,92	85,33	85,57	85,57	85,63
Perempuan	73,77	74,34	74,89	74,89	74,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang tahun 2023, terdapat perbedaan signifikan dalam pencapaian IPM antara laki-laki dan perempuan. IPM laki-laki tercatat sebesar 85,57, jauh lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan yang hanya mencapai 74,89. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Namun, tren peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang naik secara konsisten dari 86,87 pada tahun 2020 menjadi 87,89 pada tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender di Kota Bontang.

Jika melihat data dari tahun 2020 hingga 2024, IPM laki-laki mengalami peningkatan dari 84,92 pada tahun 2020 menjadi 85,63 pada tahun 2024, meskipun dengan kenaikan yang relatif kecil dari tahun ke tahun. Sementara itu, IPM perempuan juga menunjukkan tren peningkatan dari 73,77 pada tahun 2020 menjadi 74,91 pada tahun 2024. Meskipun terdapat kenaikan pada kedua kelompok, selisih antara IPM laki-laki dan perempuan masih cukup signifikan, menandakan bahwa tantangan dalam mencapai kesetaraan gender masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan pendidikan tinggi menjadi langkah strategis yang dapat diambil guna mempersempit kesenjangan ini.

Secara keseluruhan, tren peningkatan IPM gender di Kota Bontang merupakan perkembangan yang positif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Namun, agar disparitas gender semakin menurun, diperlukan kebijakan yang lebih progresif, seperti pemberian beasiswa bagi perempuan, peningkatan keterampilan kerja, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata. Dengan komitmen yang berkelanjutan, Kota Bontang dapat terus meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduknya tanpa adanya diskriminasi berbasis gender. Jika tren positif ini terus berlanjut, maka di masa depan, kesenjangan

gender dapat semakin diminimalkan, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Keluarga berkualitas adalah tujuan utama dari berbagai kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia. Untuk mengukur sejauh mana kualitas keluarga di suatu daerah, pemerintah menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Pengembangan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan dengan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Melalui iBangga gambaran akan peran dan fungsi keluarga dapat digambarkan. Nilai iBangga yang kurang baik (rentan) berada di bawah 40, cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70, dan baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bontang pada Tahun 2024 sebesar 64,62. Angka tersebut menunjukkan bahwa iBangga Kota Bontang cukup baik yaitu pada kategori berkembang.

Tabel 2.57. Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPK	N/A	55,2	57,01	65,31	64,62

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang, 2025

Anak adalah bagian dari keluarga yang merupakan aset bangsa paling berharga. Mereka adalah generasi penerus yang akan memimpin, mengelola, dan menjaga kelangsungan negeri ini di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat jasmani dan rohani, serta mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak. Salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana perlindungan terhadap anak dilaksanakan di suatu wilayah adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Indeks Perlindungan Anak baru mulai dihitung pada tahun 2021. Tren angka Indeks Perlindungan Anak cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Penurunan angka Indeks Perlindungan Anak disebabkan oleh beberapa indikator di antaranya persentase umur 10-17 tahun yang bekerja, Rasio anak umur 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet, Rasio anak umur 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah, Persentase anak umur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan Persentase anak umur 5-17 tahun yang terlantar.

Tabel 2.58. Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPA (Kota Bontang)	N/A	70,47	65,52	64,81	*
IPA (Provinsi Kalimantan Timur)	73,60	64,06	64,41	64,04	

(*) tahap penilaian

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bontang menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2020–2024, dari 86,87 pada tahun 2020 menjadi 88,35 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun pertumbuhannya relatif stabil dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,37 poin per tahun, pencapaian ini mengindikasikan bahwa perempuan semakin memperoleh akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam pembangunan. Namun demikian, tantangan seperti kualitas pekerjaan perempuan dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan

tetap perlu menjadi perhatian agar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud secara menyeluruh.

Tabel 2.59. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPG	86,87	87,12	87,53	87,89	88,35

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang, 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bontang tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan nilai terendah sebesar 0,235 pada tahun 2020 dan tertinggi 0,348 pada tahun 2021, sebelum mengalami penurunan dan stabil di kisaran 0,313–0,314 pada dua tahun terakhir. IKG mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi; semakin kecil nilainya, semakin rendah tingkat ketimpangannya. Kenaikan drastis pada tahun 2021 menunjukkan adanya lonjakan ketimpangan gender yang bisa disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi atau ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik pada masa pandemi, sementara penurunan setelahnya mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Meski begitu, nilai IKG yang masih di atas 0,3 menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius melalui kebijakan afirmatif, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Tabel 2.60. Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKG	0,235	0,348	0,253	0,314	0,313

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang, 2025

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas hidup pemuda di suatu wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah. IPP berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kondisi pemuda dan merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda yang telah dilakukan. IPP mengukur keberhasilan pembangunan pemuda melalui lima domain utama, yang masing-masing terdiri dari beberapa indikator yaitu pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Kota Bontang saat ini belum melakukan perhitungan IPP, sehingga menggunakan data Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024 data IPP sebesar 60,06 pada tabel di bawah ini masih menggunakan angka proyeksi 1,5 persen dikarenakan angka belum terbit.

Tabel 2.61. Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPP	54,83	52,50	56,67	59,17	60,06

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Penduduk Kota Bontang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 135.339 jiwa, sedangkan penduduk non-produktif (usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun) sebanyak 56.472 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan Kota Bontang adalah 41,72 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 42 penduduk usia non-produktif.

Tabel 2.62. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 14 tahun	25.943	24.340	50.283
15 - 64 tahun	69.649	65.690	135.339
65 tahun ke atas	3.559	2.630	6.189
Total	99.151	92.660	191.811

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Berdasarkan data ini, Kota Bontang memiliki jumlah penduduk muda lebih banyak dibandingkan penduduk tua. Artinya, di masa depan, Kota Bontang akan memiliki banyak tenaga kerja potensial. Namun, untuk menghindari lonjakan pengangguran, diperlukan peningkatan lapangan kerja dan kebijakan pengendalian penduduk yang efektif.

Apabila dilihat dari migrasi penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mencatat bahwa jumlah penduduk yang masuk ke Kota Bontang sebanyak 5.925 jiwa, sedangkan penduduk yang pindah keluar berjumlah 5.768 jiwa. Dengan selisih 157 jiwa, dapat dikatakan bahwa jumlah migrasi masuk dan keluar masih relatif seimbang, menunjukkan adanya mobilitas penduduk yang cukup dinamis. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang relatif stabil mengindikasikan bahwa Kota Bontang menjadi daerah yang menarik bagi para pendatang, terutama karena sektor industri dan jasa yang terus berkembang.

Sebagai salah satu kota industri di Kalimantan Timur, Bontang memiliki daya tarik ekonomi yang cukup tinggi, khususnya di bidang energi dan manufaktur. Selain itu, sektor jasa dan perdagangan juga semakin berkembang, menciptakan berbagai peluang kerja yang menarik bagi masyarakat dari luar daerah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong arus migrasi masuk ke Kota Bontang, meskipun di sisi lain juga terdapat penduduk yang memilih untuk pindah ke daerah lain karena faktor pekerjaan, pendidikan, atau alasan pribadi lainnya.

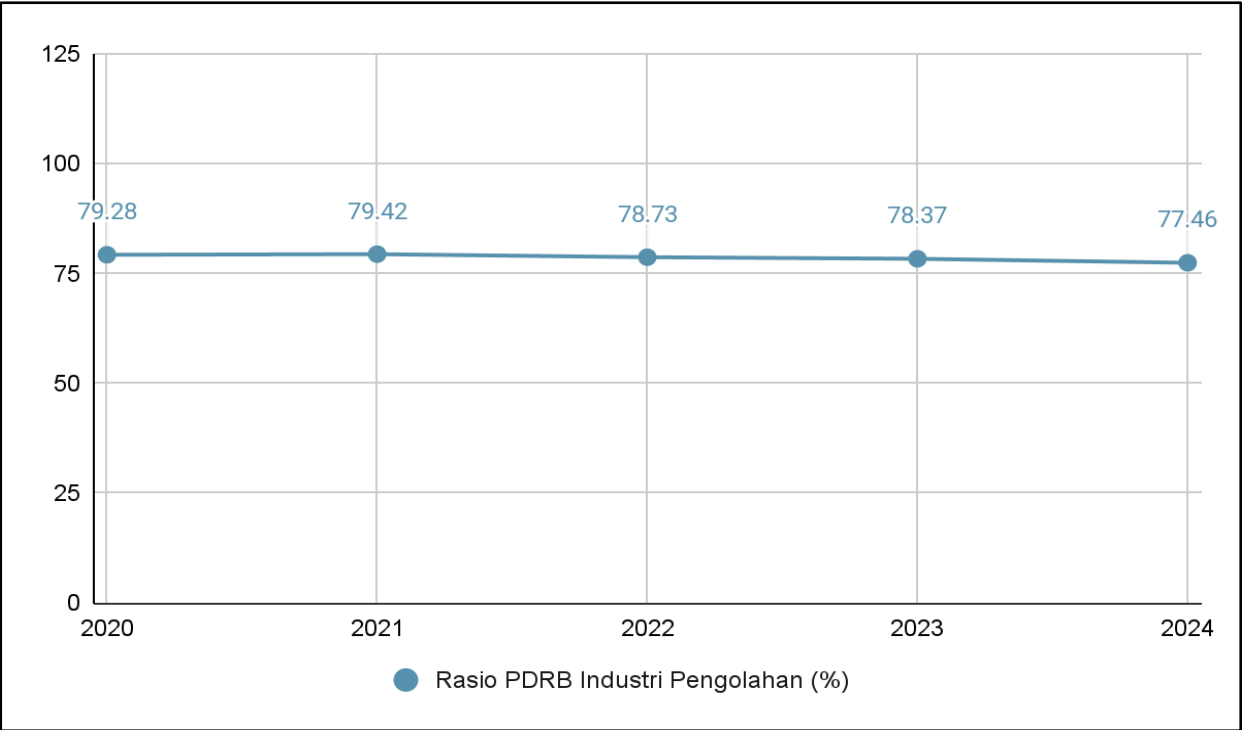
Selain itu, tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibanding angka kematian menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki kondisi kesehatan yang cukup baik. Fasilitas layanan kesehatan yang memadai serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat berperan penting dalam menjaga angka harapan hidup yang tinggi dan menekan angka kematian. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut adanya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang terjadi, pemerintah Kota Bontang perlu terus mengoptimalkan strategi pembangunan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Program perencanaan kota yang berkelanjutan, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan infrastruktur yang baik menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup masyarakat. Jika tren positif ini terus berlanjut, Kota Bontang dapat terus berkembang sebagai kota industri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB. Adapun rasio PDRB industri pengolahan Kota Bontang dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.14. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan

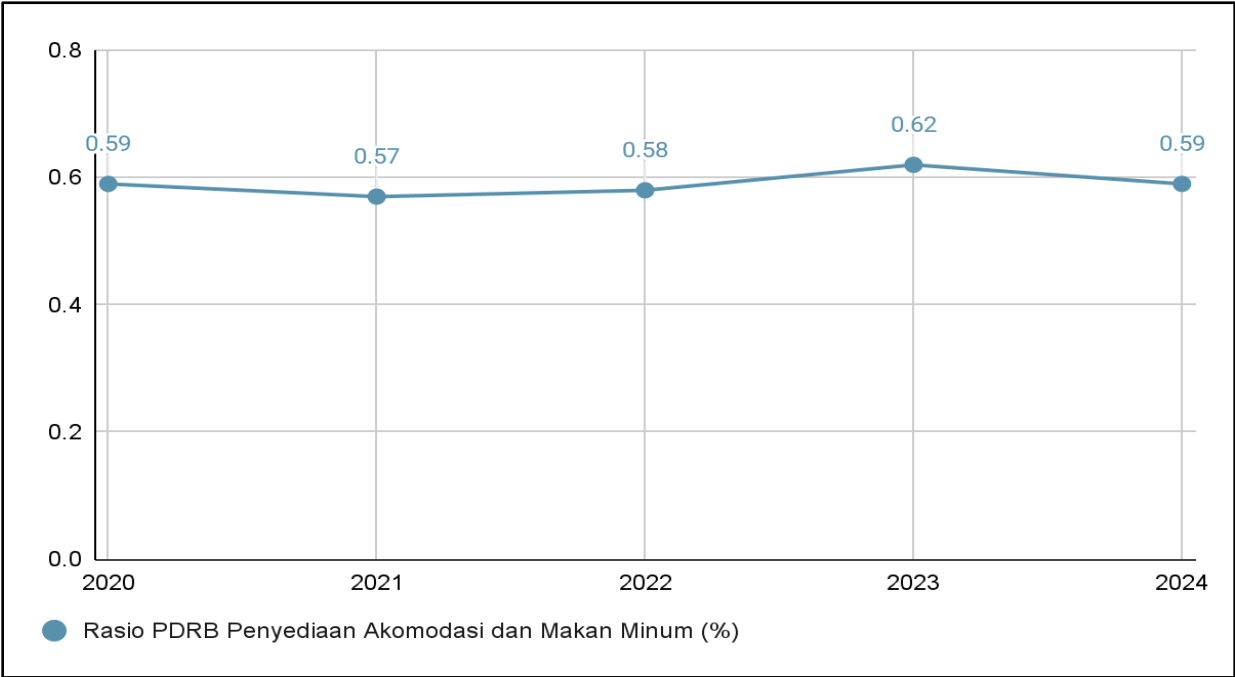
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Struktur PDRB Kota Bontang didominasi oleh sektor industri pengolahan. Industri pengolahan masih menjadi sektor utama dalam perekonomian Kota Bontang, dengan kontribusi mencapai 77,46 persen terhadap PDRB pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini mengalami tren penurunan yang cukup signifikan, terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas alam dari ladang-ladang di Muara Badak, yang selama ini menjadi sumber utama bagi industri pengolahan migas dan petrokimia di Kota Bontang. Dampaknya, kapasitas produksi industri mengalami penyusutan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini pun ikut menurun. Selain itu, fluktuasi harga komoditas energi global juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan di daerah ini.

b. Rasio PDRB Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.

Selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum cukup rendah apabila dibandingkan dengan sektor lain. Grafik berikut menunjukkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Bontang.



Gambar 2.15. Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Rendahnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengindikasikan bahwa sektor ini belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam kaitannya dengan pariwisata. Sektor ini belum termanfaatkan secara optimal juga karena lapangan kerja dan peluang usaha yang tercipta di bidang perhotelan di Kota Bontang masih belum cukup signifikan. Penurunan rasio PDRB pada tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh semakin beragamnya pilihan wisatawan untuk menginap di Kota Bontang, yang ditunjukkan oleh mulai banyaknya guest house di Kota Bontang. Namun saat ini banyak guest house yang belum terdata dan memberikan laporan operasionalnya kepada pemerintah.

c. Ekonomi Kreatif

Salah satu pilar perekonomian masa depan yang juga sedang ditingkatkan di Kota Bontang yaitu ekonomi kreatif atau ekraf. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2023 dari 17 subsektor ekonomi kreatif, subsektor kuliner adalah bidang yang paling banyak diminati yaitu sebesar 44 dari 144 ekraft, disusul dengan bidang musik sebesar 24 ekonomi kreatif dan fashion sebesar 9 ekraf. Sedangkan, terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) hanya terdapat 43 ekraft yang sudah terlindungi secara hukum. Adapun data terkait omzet ekonomi kreatif Kota Bontang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63. Besaran Pendapatan Pelaku Usaha di Bidang Ekonomi Kreatif Kota Bontang Tahun 2024

Rata-rata Omzet	2024	
	%	Jumlah
Dibawah 5 Jt Rupiah/bulan	59,44	85
5 – 10 Jt Rupiah	23,08	33
11 – 20 Jt Rupiah	9,09	13
21 – 30 Jt Rupiah	4,20	6
Diatas 30 Jt Rupiah	4,20	6
Jumlah Ekonomi Kreatif		143

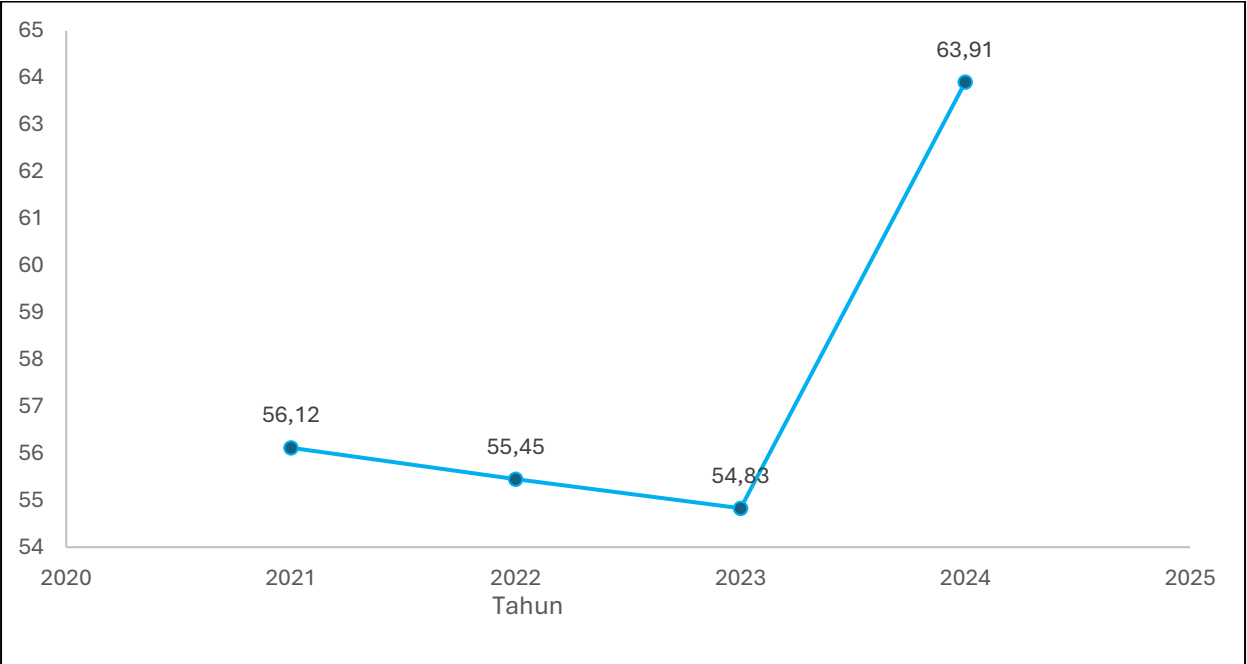
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan usaha ekonomi kreatif di Kota Bontang belum terlalu menggembirakan, baik dari sisi

omzet maupun jumlah pelaku ekraf yang ada. Hal ini disebabkan karena distribusi sektor ekraf masih berfokus pada sub sektor kuliner, sedangkan sektor lainnya belum ada atau belum berkembang dan kemampuan atau keterampilan masyarakat untuk mengembangkan sektor ekraf masih sangat terbatas.

d. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Bontang dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, IID Kota Bontang berada pada angka 56,12 dengan predikat Inovatif. Capaian ini kemudian sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 55,45 dan kembali turun di tahun 2023 menjadi 54,83. Namun keduanya tetap berada pada kategori Inovatif. Meskipun sempat mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, Pemerintah Kota Bontang berhasil melakukan lompatan besar pada tahun 2024 dengan perolehan nilai 63,91 sehingga memperoleh predikat Sangat Inovatif. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya serius dari seluruh perangkat daerah dalam memperkuat ekosistem inovasi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi.



Gambar 2.16. Indeks Inovasi Kota Bontang

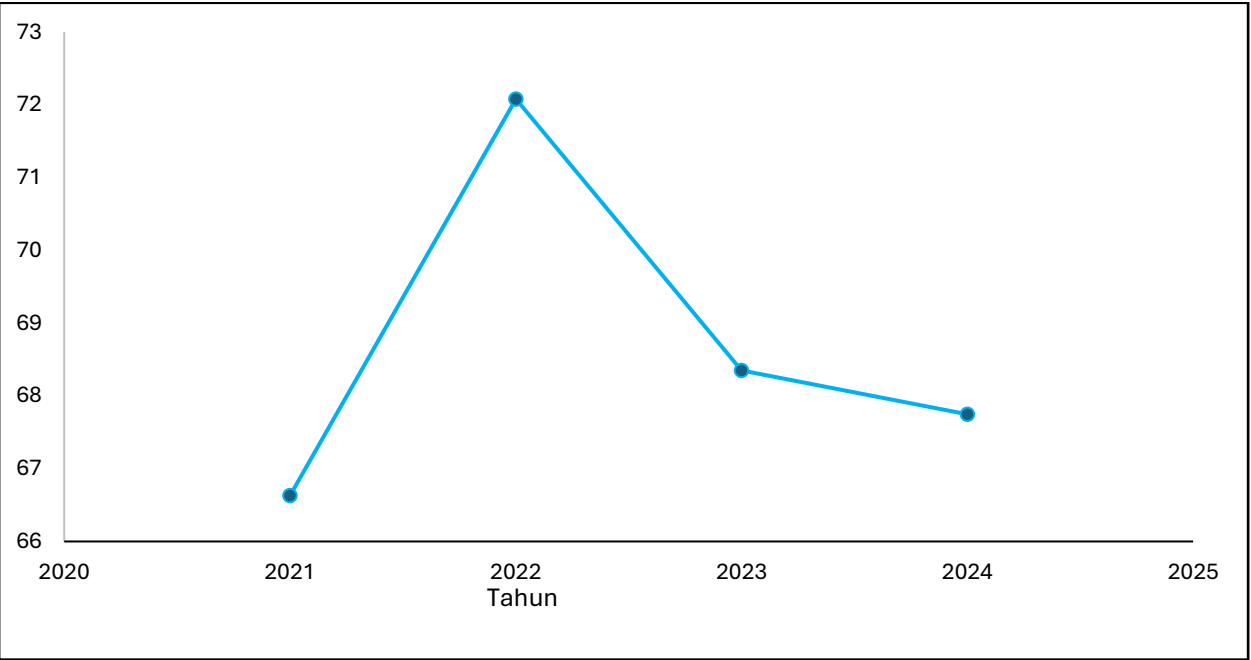
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Kota Bontang mampu bangkit dari tren penurunan dan menorehkan prestasi yang lebih tinggi. Keberhasilan meraih predikat Sangat Inovatif pada 2024 menjadi modal penting bagi Kota Bontang untuk terus mendorong lahirnya inovasi baru yang berkelanjutan, berdaya guna, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang dalam periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 66,63 persen. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 72,08 persen, menunjukkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Bontang mengalami penurunan menjadi 68,35 persen, dan kembali sedikit menurun pada tahun 2024 dengan capaian 67,75 persen.

Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika pasar kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta perubahan struktur tenaga kerja di sektor formal maupun informal.



Gambar 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Secara umum, meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang sempat mencapai titik tertinggi pada 2022, tren dua tahun terakhir menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta optimalisasi sektor ekonomi lokal agar mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari komitmen menuju kota yang lebih berkelanjutan. Salah satu inisiatif yang telah diterapkan adalah program Sekolah Energi Berdikari di SMPN 5 Bontang, di mana penggunaan panel surya telah berhasil menurunkan emisi CO2 hingga 3,8 ton per tahun serta menghemat biaya listrik sebesar Rp 6,8 juta per tahun. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana edukasi dan praktik keberlanjutan dapat diterapkan sejak dini dalam lingkungan sekolah, sehingga membentuk kesadaran generasi muda terhadap pentingnya energi hijau.

Tabel 2.64. Program Inisiatif EBT di Kota Bontang

Program/Inisiatif	Pihak yang Terlibat	Dampak Positif
Sekolah Energi Berdikari (SMPN 5 Bontang)	Pemkot Bontang, Sekolah	Reduksi emisi 3,8-ton CO2/tahun, penghematan Rp 6,8 juta/tahun
Penggunaan LNG di Industri	Badak LNG	Pengurangan emisi karbon, efisiensi energi
Badak LNG Energy Management System (BEST)	Badak LNG	Efisiensi energi 8.366.566 GJ, efisiensi air 2.477.740 m³, pengurangan emisi 403.743-ton CO2eq
Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Badak LNG	Reduksi limbah B3 (79 ton) dan non-B3 (258 ton)
Penghargaan Subroto 2023	Kementerian ESDM, Badak LNG	Pengakuan atas manajemen energi yang efisien dan ramah lingkungan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Dalam skala industri, Badak LNG telah berperan aktif dalam pengembangan EBT dengan mengoptimalkan penggunaan gas alam cair (LNG) sebagai sumber energi utama yang lebih ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Badak LNG Energy Management System (BEST) yang telah tersertifikasi ISO 50001:2018. Hasil dari sistem manajemen energi ini sangat signifikan, dengan efisiensi energi mencapai 8.366.566 GJ, penghematan air sebesar 2.477.740 m³, serta pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 403.743-ton CO₂eq. Selain itu, program 3R (reduce, reuse, recycle) yang diterapkan Badak LNG telah berhasil mengurangi limbah B3 sebesar 79-ton dan limbah non-B3 sebanyak 258 ton.

Atas kontribusi besarnya dalam efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, Badak LNG menerima penghargaan bergengsi Subroto 2023 untuk kategori Manajemen Energi di Bangunan Gedung dan Industri. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas penerapan strategi pengelolaan energi yang inovatif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan daya saing industri LNG, tetapi juga mendukung agenda pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta mendorong transisi menuju energi bersih.

Sinergi antara Pemerintah Kota Bontang dan Badak LNG dalam pengembangan EBT menjadi contoh kolaborasi strategis yang dapat ditiru oleh daerah lain. Pemerintah berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung serta memfasilitasi inisiatif keberlanjutan, sementara sektor industri seperti Badak LNG mengambil langkah konkret dalam implementasi teknologi ramah lingkungan. Dengan terus memperkuat kerja sama ini, Kota Bontang berpotensi menjadi percontohan dalam pengembangan energi hijau yang tidak hanya menguntungkan sektor industri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kota Bontang memiliki peran strategis dalam rantai pasokan global melalui sektor industri pengolahannya, khususnya dalam produksi gas alam cair (LNG) dan pupuk. PT Badak NGL, sebagai salah satu kilang LNG terbesar di Indonesia, berkontribusi besar dalam ekspor energi dengan kapasitas produksi mencapai 22,5 juta ton per tahun. Ekspor LNG dari Bontang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan kontrak jangka panjang, memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi global. Keberlanjutan ekspor LNG ini menunjukkan tingginya keterkaitan industri lokal dengan pasar internasional serta peran vitalnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi di berbagai negara.

Selain LNG, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) juga memiliki peran besar dalam ekspor pupuk, khususnya urea, amoniak, dan pupuk NPK. Pada tahun 2022, Australia menjadi tujuan utama ekspor pupuk dari Bontang, disusul oleh Filipina, Thailand, Vietnam, India, Bangladesh, dan beberapa negara di Amerika Latin. Ekspor pupuk ini tidak hanya memperkuat sektor industri nasional tetapi juga mendukung produktivitas sektor pertanian di negara-negara tujuan. Dengan meningkatnya permintaan global terhadap pupuk, Pupuk Kaltim terus memperluas jangkauan ekspornya dan berkontribusi dalam ketahanan pangan dunia.

Tabel 2.65. Rantai Pasokan Kota Bontang secara Global

Sektor	Perusahaan	Produk Ekspor	Tujuan Ekspor	Keterangan
Energi (LNG)	PT Badak NGL	LNG	Kontrak jangka panjang dengan berbagai negara	Kapasitas produksi 22,5 juta ton/tahun
Pupuk	Pupuk Kaltim	Urea, amoniak, NPK	Australia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Bangladesh, Amerika Latin	Australia sebagai tujuan utama ekspor 2022

Sektor	Perusahaan	Produk Ekspor	Tujuan Ekspor	Keterangan
UMKM	Abon Jaya Mandiri (binaan Pupuk Kaltim)	Abon Tuna	Filipina	Didukung melalui Trade Expo Indonesia

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Selain industri besar, integrasi ekonomi global juga didukung oleh sektor UMKM yang mendapatkan fasilitasi dari Pupuk Kaltim untuk menembus pasar internasional. Salah satu contohnya adalah UMKM "Abon Jaya Mandiri" yang berhasil mengekspor produk abon tuna ke Filipina. Pupuk Kaltim juga berperan dalam menghubungkan UMKM dengan potensi pasar ekspor melalui ajang seperti Trade Expo Indonesia (TEI). Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam mendukung keterlibatan usaha kecil dalam rantai pasokan global serta memperkuat ekonomi lokal dengan akses ke pasar yang lebih luas.

Dengan adanya industri berbasis ekspor ini, Kota Bontang menjadi bagian penting dalam ekosistem perdagangan global. Indikator ekonomi seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Bontang tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik tetapi juga berkontribusi pada dinamika ekonomi internasional. Ke depan, rencana reaktivasi salah satu train di kilang LNG Badak pada tahun 2028 diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Bontang sebagai pusat industri energi berorientasi ekspor di Indonesia.

Tabel 2.66. Data Kontribusi PDRB PMTB Tahun 2020-2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (miliar rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB	7.398,19	7.952,00	8.831,62	9.893,31	10.777,80
ADHK 2010	4.929,17	4.948,06	5.255,27	5.578,96	5.928,02
Proporsi terhadap PDRB ADHB %	13,29	23,72	14,00	14,53	15,75
Pertumbuhan (%)	0,02	0,38	6,21	6,16	6,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam PDRB yang mencakup investasi. Pada tabel kontribusi PDRB PMTB di atas menunjukkan bahwa nilai nominal PMTB ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menunjukkan investasi Kota Bontang mengalami peningkatan. Peningkatan nilai nominal PMTB yang cukup tinggi menambah peran posisi PMTB di dalam struktur perekonomian Kota Bontang.

Analisis rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB). Pada tabel di bawah ini menggunakan rasio ekspor neto (ekspor dikurangi impor) terhadap nilai PMTB. Sepanjang periode 2020–2024, nilai ekspor neto Kota Bontang jauh lebih tinggi dari pada nilai PMTB. Pada tahun 2020, rasio ekspor neto terhadap PMTB yang terbentuk adalah 5,52 dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 4,41. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (termasuk kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat terutama pada PMTB Bangunan apabila dibandingkan dengan kenaikan ekspor neto. Begitu pula sebaliknya, kenaikan ekspor neto yang lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB menyebabkan meningkatnya rasio ekspor neto terhadap PMTB.

Tabel 2.67. Rasio Ekspor Neto terhadap PMTB Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Neto ADHB (Miliar Rupiah)	40.808,59	42.363,42	46.163,37	49,161,70	47.568,51
Ekspor Neto ADHK (Miliar Rupiah)	39.320,23	39.949,08	40.930,98	42.533,63	41.563,91
Perbandingan ekspor Neto terhadap PMTB	5,52	5,33	5,23	4,97	4,41
Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	73,31	73,11	73,15	72,18	69,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

2.1.3.5. Perkotaan dan Wilayah Pinggiran sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Kualitas Layanan Infrastruktur Kota

Kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bontang diukur dengan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). IKLI terdiri atas 5 indeks komposit lainnya, meliputi Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Kinerja Persampahan, Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indeks Infrastruktur Perhubungan serta Indeks Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Bontang tahun 2024 beserta masing-masing sub indeksnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2024

No	Parameter	Indikator	Capaian (%)
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur			76,38
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		79,82
	a. Tingkat Pelayanan Air Minum	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	88,39
	b. Tingkat Pelayanan Air Limbah	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,26
	c. Tingkat Kapasitas Prasarana Persampahan	Persentase penyediaan TPA/TPST/TPS3R	41,18
	d. Tingkat Pelayanan Sumber Daya Air	Persentase wilayah perkotaan tidak tergenang banjir	99,02
	e. Tingkat Pelayanan Drainase Perkotaan	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	72,82
	f. Tingkat Pelayanan Jalan Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantap	89,23
	g. Tingkat Pelayanan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang memenuhi persyaratan teknis	61,64
	h. Kesesuaian Tata Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	73,78
	i. Tingkat Kapasitas Tenaga Kerja Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi	83,12
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		77,00
	Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	77,00
3	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		62,62
	a. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terkena relokasi Program Pemerintah Kota	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kota	7,63

No	Parameter	Indikator	Capaian (%)
	b. Tingkat Kualitas Permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,27
4	Indeks Infrastruktur Perhubungan		64,98
	a. Tingkat Pelayanan Transportasi Umum	Persentase layanan angkutan umum perkotaan	12,50
	b. Tingkat Keselamatan Transportasi	Persentase tingkat keselamatan pengguna jalan	99,975
5	Indeks Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan		100,00
	a. Tingkat Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Persentase pelayanan terhadap korban kebakaran	100,00
	b. Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kejadian Kebakaran dan Non-Kebakaran	Persentase pelayanan terhadap peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia	100,00

Keterangan dalam persen:
0 – 50 : Rendah
50,01 - 70 : Sedang
70,01 - 90 : Baik
90,01 – 100 : Sangat Baik
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Pada tahun 2024, capaian IKLI Kota Bontang adalah sebesar 76,38 persen dengan kategori Baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penyediaan dan keberfungsian infrastruktur di Kota Bontang cukup optimal, meskipun di beberapa sektor masih memerlukan peningkatan untuk perbaikan layanan.

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum senilai 79,82 persen. Beberapa sektor pada indeks ini memerlukan peningkatan, terutama pada sektor prasarana persampahan dan bangunan gedung. Pada sektor persampahan, Pemerintah Kota Bontang perlu mendorong pemenuhan TPS-3R untuk mendukung proses pengelolaan sampah di masing-masing kelurahan. Sementara itu, pada sektor bangunan gedung, Pemerintah Kota Bontang perlu meningkatkan pemenuhan persyaratan teknis pada bangunan gedung pemerintah karena jumlah bangunan gedung pemerintah yang telah memenuhi persyaratan teknis hanya 45 unit dari total 73 unit bangunan yang dimiliki. Adapun sektor lainnya, seperti sumber daya air dan drainase yang berkorelasi dengan penanggulangan banjir juga masih memerlukan pengoptimalan karena masih terdapat wilayah tergenang banjir di Kota Bontang. Adapun pada sektor penataan ruang, dengan tingkat kesesuaian sebesar 73,78 persen pada tahun 2024, realisasi pemanfaatan ruang Kota Bontang adalah 11.943,73 hektar dari rencana peruntukan ruang sebesar 16.188 hektar. Oleh sebab itu, pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan lebih komprehensif untuk menjamin realisasi pemanfaatan ruang di Kota Bontang sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, sektor air minum dan air limbah domestik masih memerlukan pengoptimalan karena pemenuhan air minum serta air limbah domestik bagi masyarakat merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menargetkan capaian 100 persen.

Kinerja Pengelolaan Sampah ditunjukkan oleh capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). IKPS merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah. Pada tahun 2024, nilai capaian IKPS Kota Bontang adalah 77,00 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar aspek pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir dan pengurangan sampah telah dilaksanakan dengan cukup efektif, meskipun masih dapat ditingkatkan terutama pada aspek

pengurangan sampah dari sumbernya, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R).

Pada Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, parameter tingkat fasilitasi pemenuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah masih cukup rendah. Hal tersebut terjadi karena penyediaan rumah bagi korban relokasi permukiman di bantaran Sungai Guntung belum dapat dituntaskan sepenuhnya. Sampai dengan tahun 2024, total rumah yang telah disediakan untuk korban relokasi permukiman di bantaran Sungai Guntung adalah 9 unit dari kebutuhan 23 unit rumah. Pada tahun 2023, pembangunan 4 unit rumah dibiayai oleh TJSL PT PKT, sementara pembangunan 5 unit rumah sisanya dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Capaian Indeks Infrastruktur Perhubungan pada tahun 2024 adalah 64,98 persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh penyediaan trayek angkutan umum perkotaan, dalam hal ini trayek angkutan umum gratis untuk anak sekolah. Sampai dengan tahun 2024, trayek angkutan umum gratis yang tersedia hanya 1 trayek bus untuk anak sekolah, dari target total penyediaan trayek sejumlah 8 trayek. Adapun 8 target trayek tersebut terdiri atas 5 trayek bus sekolah dan 3 trayek kapal laut untuk anak sekolah. Penyediaan trayek angkutan umum gratis ini juga perlu didukung dengan pengadaan bus dan kapal untuk mengakomodir trayek yang dibutuhkan.

Adapun capaian Indeks Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Hal ini juga didukung pemenuhan *response time* oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, baik untuk kegiatan penyelamatan dan evakuasi kejadian kebakaran maupun kejadian non kebakaran.

b. Infrastruktur Pekerjaan Umum

Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur pekerjaan umum menjadi penting, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun sekaligus mendorong kemajuan kota. Beberapa hal yang memerlukan perhatian dalam rangka mendukung kualitas pelayanan infrastruktur Kota Bontang antara lain dalam penyediaan prasarana persampahan, penyediaan air baku, penanggulangan banjir, kemantapan jalan dan pengelolaan sumber daya air.

1) Penyediaan Prasarana Persampahan

Sampai dengan tahun 2024, prasarana persampahan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota meliputi 5 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R), 1 unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.69. Prasarana Persampahan Kota Bontang

Jenis	Lokasi	Tahun Dibangun	Kapasitas (ton/hari)
TPS-3R			
1. TPS-3R Berbas Tengah	Kelurahan Berbas Tengah	2022	20
2. TPS-3R Guntung	Kelurahan Guntung	2022	10
3. TPS-3R Loktuan	Kelurahan Loktuan	2021	10
4. TPS-3R Kanaan	Kelurahan Kanaan	2017	10
5. TPS-3R Satimpo	Kelurahan Satimpo	2010	10
TPST Bessai Berinta	Kelurahan Bontang Kuala	2017	22
TPA Bontang Lestari	Kelurahan Bontang Lestari	2007	82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka timbunan sampah juga semakin meningkat. Selain itu, TPS-3R yang ada saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kota Bontang (Dokumen Strategi Sanitasi Kota Bontang Tahun 2023-2028). Oleh sebab itu, untuk mengakomodir pengelolaan sampah di Kota Bontang, terutama pada masing-masing kelurahan, Pemerintah Kota Bontang perlu menyediakan TPS-3R pada masing-masing kelurahan. Hal ini juga dilakukan guna mendukung kegiatan pengurangan sampah di Kota Bontang dan memaksimalkan sampah terkelola di fasilitas pengolahan sampah sebelum masuk ke fasilitas penanganan atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

2) Prasarana Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjelaskan bahwa sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bontang dilaksanakan dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). SPALD-S dilakukan melalui *Septictank* individual dan komunal. Sedangkan SPALD-T dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD-T) yang terdiri atas skala permukiman dan skala kawasan. IPAL skala kawasan Kota Bontang berjumlah 5 (lima) unit, sedangkan IPAL skala komunal berjumlah 14 (empat belas) unit.

Tabel 2.70. Prasarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal

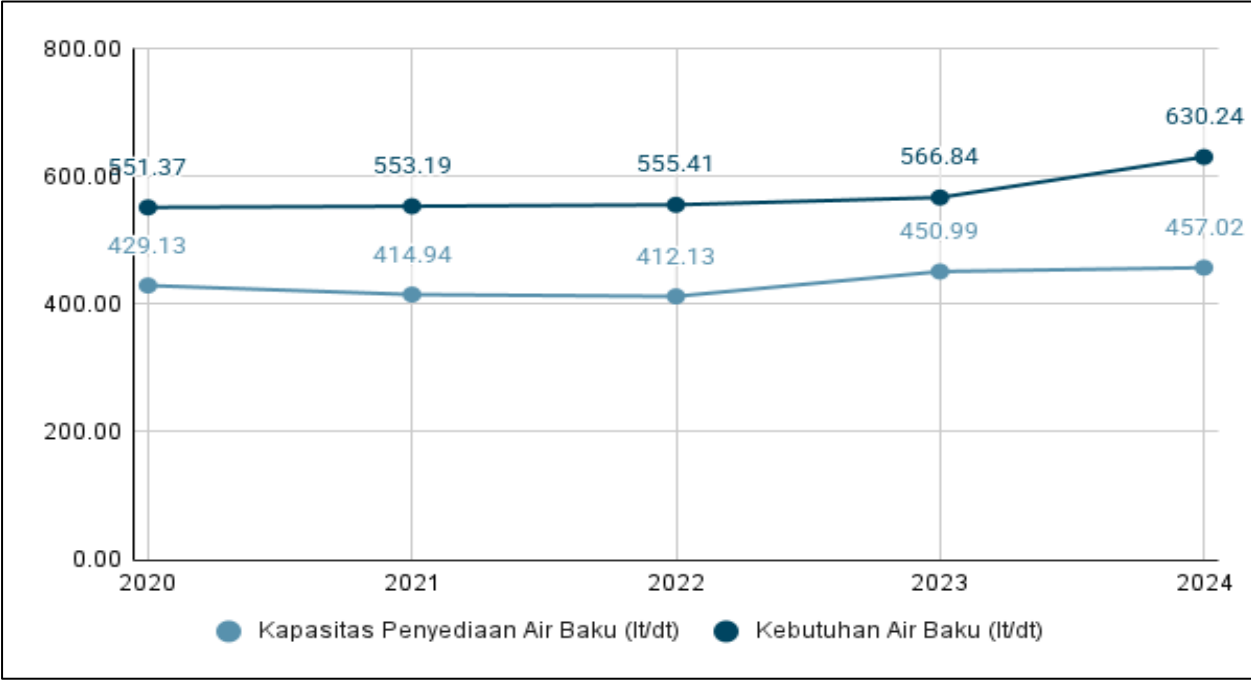
Nama IPAL	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang Digunakan
IPAL Skala Kawasan Api-api	2016	600	254	Anaerobic baffled reactor
IPAL Skala Kawasan Berbas Pantai	2010	500	63	Rotating Biological Contactor (RBC)
IPAL Skala Kawasan Guntung	2014	500	165	Rotating Biological Contactor (RBC)
IPAL Skala Kawasan Loktuan	2014	500	66	Rotating Biological Contactor (RBC)
IPAL Skala Kawasan Bontang Kuala	2007	520	66	Rotating Biological Contactor (RBC)
IPAL Komunal Berbas Pantai	2018	50	20	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Berbas Tengah	2018	50	20	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Tanjung Laut	2018	50	16	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Kanaan	2018	50	10	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Belimbing	2018	50	12	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Guntung	2020	50	4	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Berbas Tengah	2018	50	7	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Tanjung Laut Indah	2020	50	1	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Tanjung Laut	2018	50	5	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Loktuan	2021	50	38	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Loktuan	2021	50	48	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Loktuan	2021	50	39	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Loktuan	2021	40	40	Anaerobic biofilter
IPAL Komunal Berbas Tengah	2018	50	20	Anaerobic biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	4	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	7	Biofilter
Septik tank komunal	2019	10	6	Biofilter

Nama IPAL	Tahun Pembangunan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang Digunakan
Kanaan				
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	3	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	6	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	4	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	3	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	3	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	6	Biofilter
Septik tank komunal Kanaan	2019	10	8	Biofilter
Septik tank komunal Tanjung Laut	2020	10	5	Biofilter
Septik tank komunal Tanjung Laut	2020	10	7	Biofilter

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

3) Penyediaan Air Baku

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan air bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kota Bontang berupaya untuk meningkatkan ketersediaan air baku. Pada tahun 2024, air baku yang dihasilkan dari *intake* sebesar 457,02 liter/detik belum mampu mencukupi kebutuhan air baku yang diperlukan sebesar 630,24 liter/detik atau masih mengalami defisit atau kekurangan sebesar 173,22 liter/detik, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Gambar 2.18. Penyediaan Air Baku Tahun 2020-2024

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Taman Kota Bontang; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Pemenuhan akan air baku Kota Bontang masih sangat bergantung pada air tanah yang diambil melalui sumur-sumur dalam. Oleh sebab itu, sumber air baku alternatif atau sumber air baku permukaan sangat diperlukan untuk Kota Bontang, baik dari sumber air permukaan yang berada di wilayah administrasi

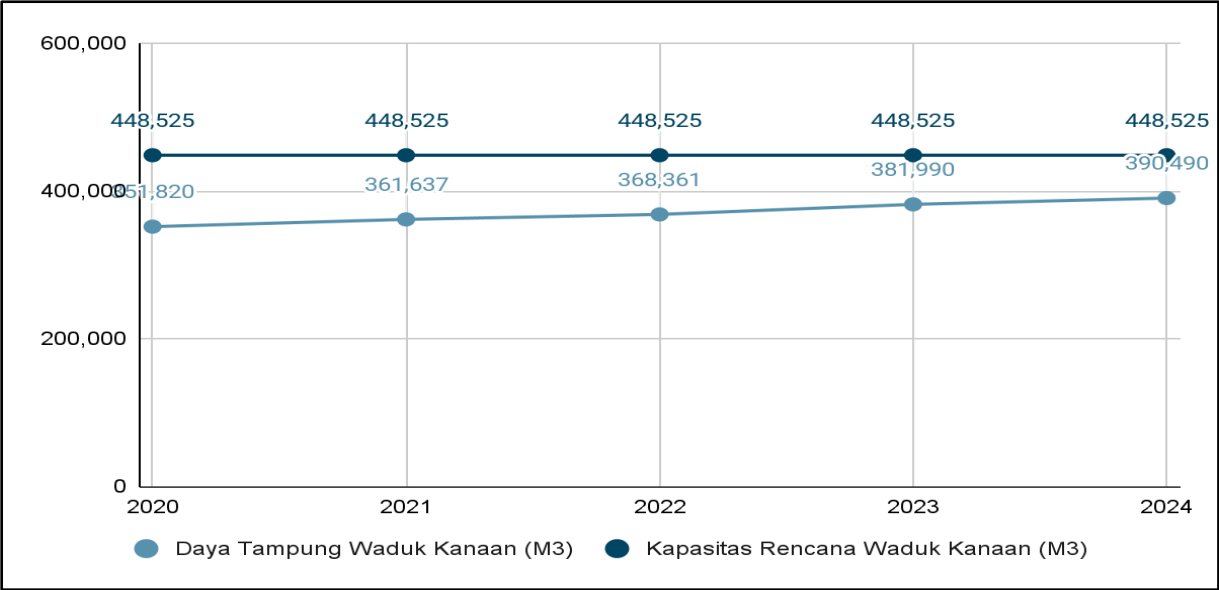
Kota Bontang maupun sumber air yang berada di luar wilayah administrasi Kota Bontang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan defisit air bersih yang terjadi, Pemerintah Kota Bontang bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dalam program Pembangunan SPAM Regional Void Indominco, SPAM Regional Bendungan Marangkayu, serta SPAM Bendung Sungai Bontang. Program tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Bontang.

4) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir

Penguatan penanggulangan banjir dilakukan dengan pembangunan drainase, rehabilitasi drainase, penurapan sungai, dan normalisasi drainase, sungai dan waduk sebagai upaya untuk memperbaiki aliran air menjadi lebih baik dan meningkatkan daya tampung drainase perkotaan, sungai dan waduk. Pada tahun 2024, panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik adalah 176.657 meter atau sebesar 72,82 persen dari total panjang drainase perkotaan 242.598 meter. Selain melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi drainase, dalam pengelolaan sumber daya air juga dilakukan peningkatan kapasitas waduk dan sungai. Hal ini dilakukan untuk menambah daya tampung waduk dan sungai sehingga semakin optimal digunakan dalam penanggulangan banjir. Peningkatan kapasitas sungai dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan bangunan perkuatan tebing sungai serta melalui normalisasi sungai, sedangkan peningkatan kapasitas waduk dilakukan dengan melakukan normalisasi waduk yang ada.

Pada tahun 2024, persentase kapasitas aliran sungai di Kota Bontang sebesar 63,29 persen yang berarti bahwa masih terdapat 36,71 persen ruang untuk memaksimalkan kinerja sungai di Kota Bontang. Selain itu, Pemerintah Kota Bontang masih perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai dengan penurapan dan normalisasi sungai, sehingga kapasitas sungai bisa bertambah dan semakin banyak volume air yang bisa dialirkan untuk meminimalisasi volume luas wilayah banjir. Selain melalui peningkatan kapasitas aliran sungai, peningkatan kapasitas waduk juga dilakukan dalam rangka menanggulangi banjir di Kota Bontang. Sampai dengan tahun 2024, telah dilakukan normalisasi Waduk Kanaan sebesar 8.500 meter kubik, sehingga kapasitas Waduk Kanaan saat ini mencapai 390.490 meter kubik sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



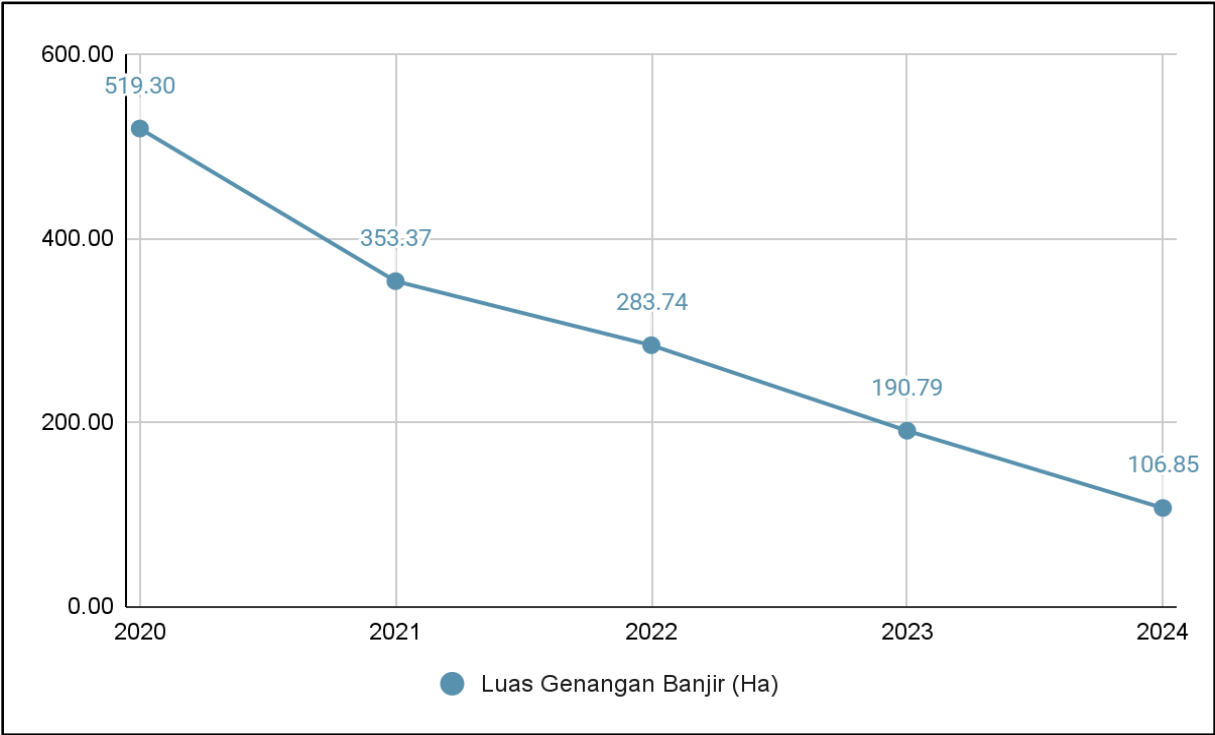
Gambar 2.19. Daya Tampung Waduk Kanaan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

Dengan kapasitas rencana Waduk Kanaan sebesar 448.525 meter kubik, persentase daya tampung yang tercapai pada tahun 2024 adalah sebesar 87,06

persen. Artinya upaya normalisasi waduk masih sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi Waduk Kanaan, terutama dalam menampung air untuk mengatasi permasalahan banjir. Dalam rangka meningkatkan daya tampung air untuk pengendalian banjir, Pemerintah Kota Bontang kedepannya berencana melakukan optimalisasi Waduk Kanaan, pembangunan Polder Tanjung Laut dan Polder Telihan, serta pembangunan kolam depresi Kanaan.

Banjir di Kota Bontang terdiri dari 3 jenis yaitu banjir lokal, banjir kiriman dan banjir rob. Sampai dengan tahun 2024, peristiwa banjir di Kota Bontang terus mengalami penurunan, baik secara jumlah, durasi, maupun luasan area terdampak. Luas wilayah terdampak banjir pada tahun 2024 adalah seluas 106,85 hektar dan tersebar di 3 kecamatan di Kota Bontang. Selain banjir lokal maupun kiriman, Kota Bontang juga mengalami banjir rob. Banjir rob merupakan bencana banjir yang disebabkan oleh masuknya air laut ke daratan sebagai akibat dari pasang air laut yang tinggi terutama di daerah pesisir.

Selama 5 (lima) tahun, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya melakukan pengurangan luas wilayah kebanjiran. Grafik berikut menunjukkan pengurangan luas wilayah kebanjiran di Kota Bontang selama 2020-2024.



Gambar 2.20. Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang 2025

Selama 5 tahun terakhir, luas wilayah kebanjiran di Kota Bontang telah berkurang sebesar 412,74 hektar atau 79,74 persen jika dibandingkan dengan luas genangan pada tahun 2020. Pencapaian ini didukung dengan masifnya pelaksanaan upaya penanggulangan banjir di Kota Bontang melalui pembangunan bangunan perkuatan tebing sungai dan normalisasi sungai, serta pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan maupun drainase lingkungan yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Bontang. Adapun luas wilayah kebanjiran pada tahun 2020-2024 menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

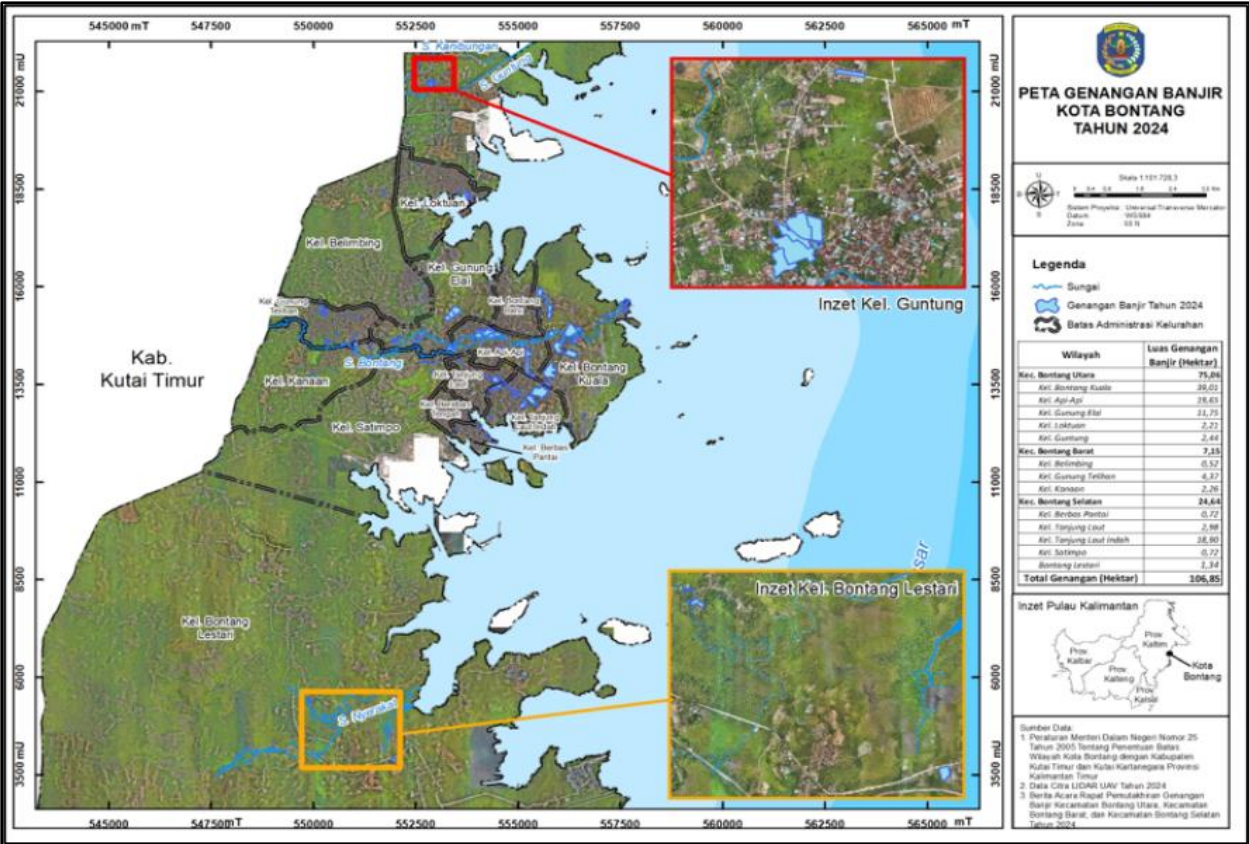
Tabel 2.71. Luas Wilayah Kebanjiran Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2020-2024

Wilayah (Kecamatan/ Kelurahan)	Luas (Hektar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kecamatan Bontang Utara	317,98	233,79	204,27	125,49	75,06
Api-api	158,58	87,97	100,58	47,61	19,65
Bontang Kuala	33,47	92,58	39,06	38,37	39,01
Gunung Elai	55,84	36,10	43,28	22,40	11,75
Bontang Baru	13,98	13,98	10,47	1,21	-
Loktuan	-	-	-	6,58	2,21
Guntung	55,81	3,16	10,87	8,71	2,44
Kecamatan Bontang Barat	100,83	38,66	24,23	27,91	7,15
Gunung Telihan	82,69	31,15	17,5	17,5	4,37
Kanaan	18,14	7,51	7,03	10,41	2,26
Belimbing	-	-	-	-	0,52
Kecamatan Bontang Selatan	100,78	80,95	54,95	37,39	24,64
Satimpo	14,25	8,57	2,06	2,84	0,72
Tanjung Laut	30,95	25,08	7,98	3,03	2,98
Tanjung Laut Indah	55,58	47,27	44,91	30,06	18,90
Bontang Lestari	-	-	-	1,46	1,34
Berbas Pantai	-	-	-	-	0,72

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Meskipun terjadi pengurangan luas wilayah banjir selama 5 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pengurangan luas wilayah banjir di wilayah pesisir, terutama Kelurahan Bontang Kuala, tidak begitu signifikan bahkan cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh banjir rob yang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Adapun wilayah pesisir Kota Bontang yang terdampak secara signifikan oleh banjir rob, meliputi Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Loktuan, dan Kelurahan Berbas Pantai.

Selama beberapa tahun terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bersama Perangkat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bontang melakukan delineasi luas wilayah banjir. Adapun sebaran wilayah tergenang banjir di Kota Bontang pada tahun 2024 dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2.21. Peta Wilayah Kebanjiran Kota Bontang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

5) Kemantapan Jalan

Jalan merupakan sarana penting untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kota Bontang. Data jumlah ruas jalan kewenangan Kota Bontang telah mengalami perubahan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/232/DPUPR/2025 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota, yang sebelumnya sepanjang 195.377 meter menjadi 76.517 meter. Adapun jumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bontang adalah sebanyak 83 ruas. Untuk melihat seberapa baik konektivitas jalan di Kota Bontang, Indeks Konektivitas Jalan menjadi ukuran yang digunakan, yakni dengan membandingkan jumlah ruas jalan dan jumlah simpul. Pada tahun 2024, nilai Indeks Konektivitas Jalan Kota Bontang adalah sebesar 0,91. Nilai Indeks Konektivitas Jalan < 1 mengindikasikan bahwa konektivitas jalan kurang baik dan beberapa simpul belum terkoneksi sepenuhnya.

Selain dari konektivitasnya, kinerja jalan Kota Bontang juga ditinjau dari kemantapannya. Selama beberapa tahun terakhir, persentase kemantapan jalan Kota Bontang mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut diakibatkan karena beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan secara berkala, sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan kualitas jalan melalui perbaikan dan pemeliharaan. Tabel berikut menyajikan data persentase kemantapan jalan Kota Bontang.

Tabel 2.72. Persentase Kondisi Jalan Kota Bontang Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Persentase Kemantapan Jalan (%)	86,72	78,21	86,39
Kondisi Baik (%)	44,37	46,15	53,02
Kondisi Sedang (%)	42,34	32,07	34,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, persentase kemantapan jalan di Kota Bontang cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, persentase kemantapan jalan turun

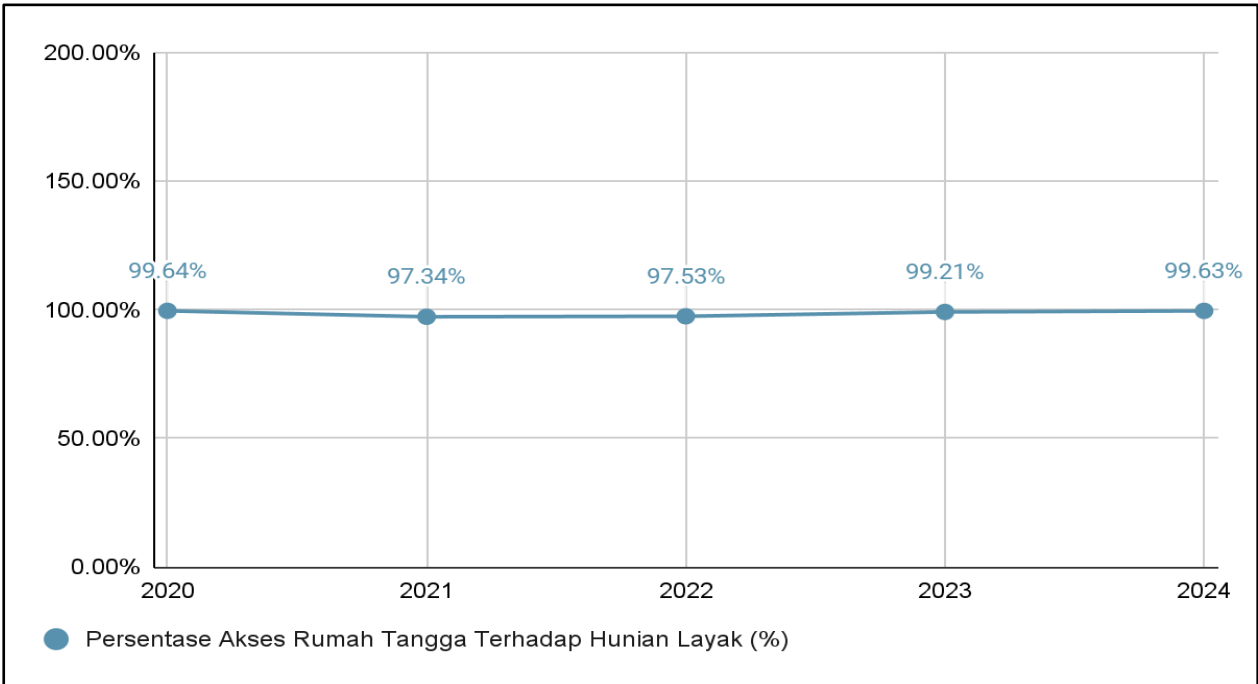
sebesar 8,51 persen dari tahun 2022. Apabila melihat capaian kondisinya, jalan dalam kondisi sedang mengalami penurunan persentase, artinya terjadi penurunan kualitas jalan, sedangkan jalan dalam kondisi baik terus bertambah. Oleh karena itu, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan terus dilakukan demi menjaga kualitas jalan baik dan meningkatkan kualitas jalan rusak. Upaya tersebut menghasilkan peningkatan persentase kemantapan jalan pada tahun 2024 sebesar 8,18 persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang pun bertambah. Artinya terjadi peningkatan kualitas jalan yang sebelumnya rusak ringan menjadi sedang, sementara jalan dalam kondisi baik juga bertambah kuantitasnya.

c. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator ke pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat diketahui berdasarkan akses terhadap hunian layak, pengurangan luas kawasan permukiman kumuh serta kondisi pemenuhan rumah bagi rumah tangga di Kota Bontang.

1) Akses Terhadap Hunian Layak

Selama lima tahun terakhir, akses terhadap hunian layak di Kota Bontang terus meningkat. Hal ini didukung oleh pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kota Bontang. Berikut ini persentase akses rumah tangga dengan hunian layak di Kota Bontang tahun 2020-2024.



Gambar 2.22. Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, 2025

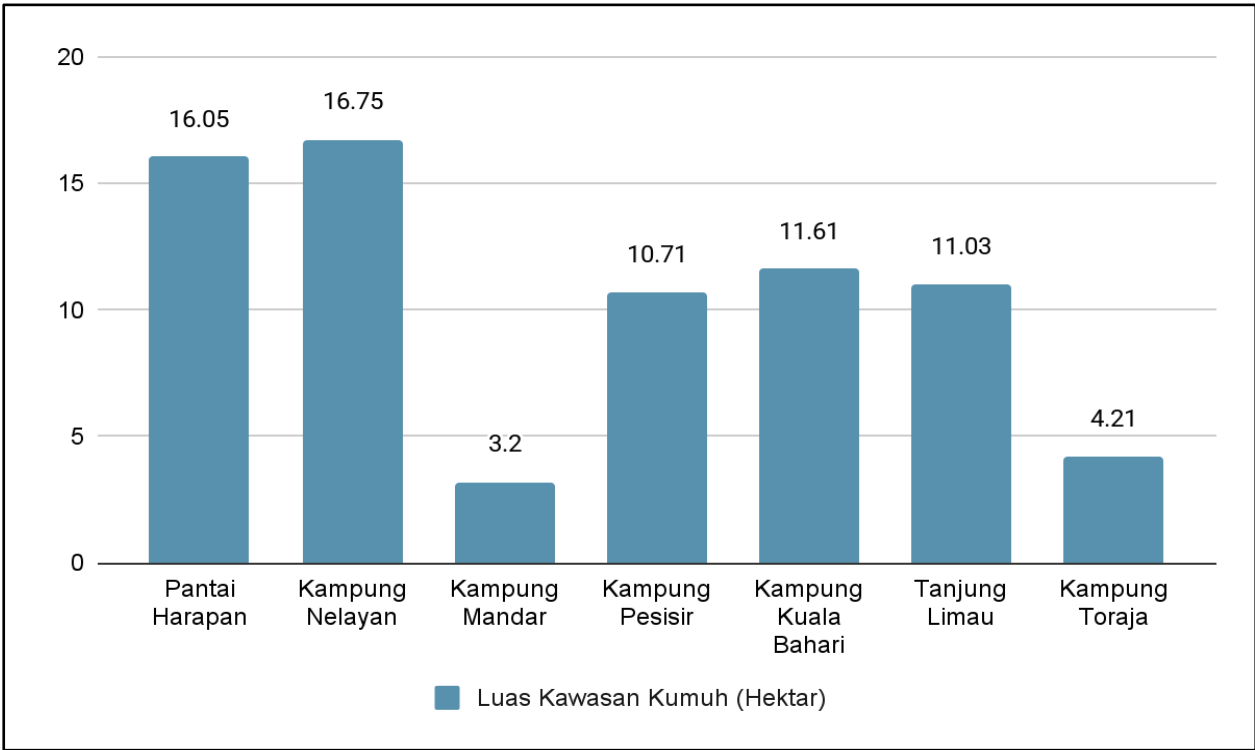
Selain melalui pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Kota Bontang juga menyediakan akses perumahan layak huni dan terjangkau melalui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan rumah khusus nelayan. Terdapat 3 rusunawa yang telah dibangun di Kota Bontang yaitu Rusunawa Api-Api, Rusunawa Loktuan, dan Rusunawa Guntung dengan total unit sebanyak 358 unit. Adapun rumah khusus nelayan yang telah dibangun berada di Kelurahan Bontang Lestari sejumlah 50 unit.

2) Kawasan Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, definisi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pengendalian perumahan yang dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perumahan sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

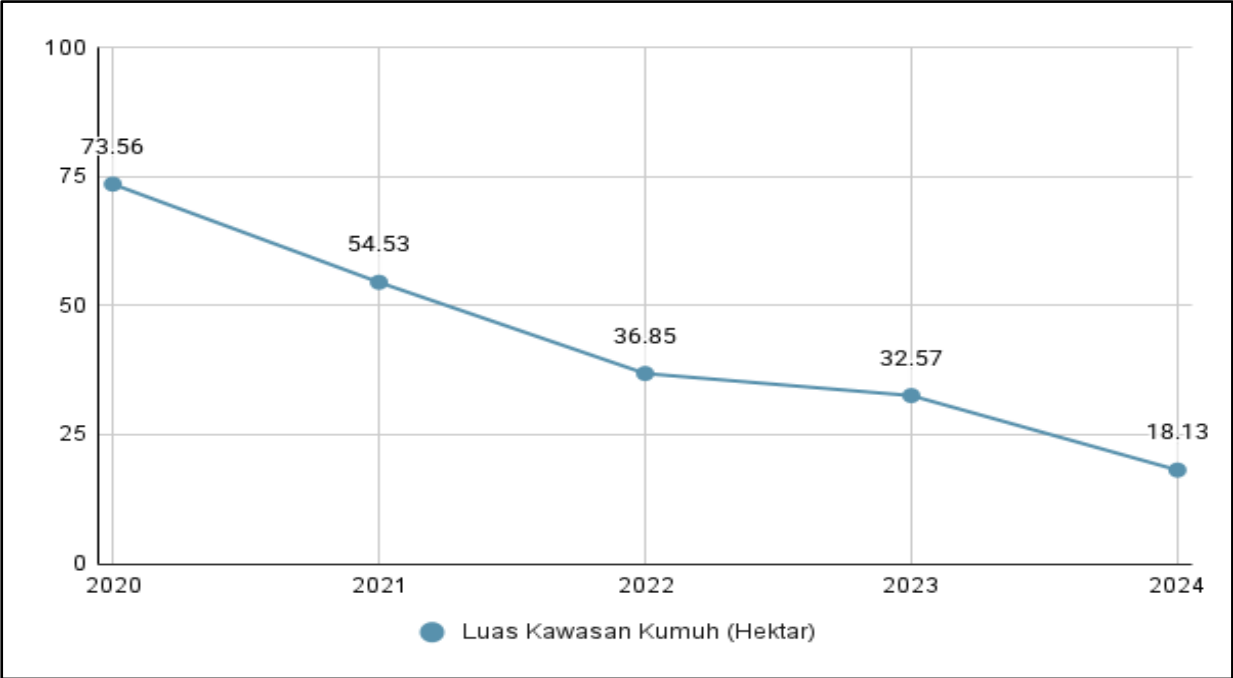
Selama 5 (lima) tahun terakhir, luas permukiman kumuh di Kota Bontang terus mengalami penurunan. Kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengacu pada lokus kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 188.45/509/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang. Terdapat 7 (tujuh) kawasan kumuh di Kota Bontang dengan total luas sebesar 73,56 hektar dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2.23. Luas Kumuh Berdasarkan Lokasi Kawasan Kumuh
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bahwa penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, 10–15 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan di atas 15 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Pantai Harapan dan Kampung Nelayan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Kampung Pesisir, Kampung Kuala Bahari, dan Tanjung Limau menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh Kampung Mandar dan Kampung Toraja menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bontang.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah luas kawasan kumuh di Kota Bontang tersisa sebesar 18,13 hektar, yang menunjukkan adanya pengurangan sebesar 55,43 ha mulai dari tahun 2020 pada saat penetapan *baseline* awal luas kawasan kumuh sampai dengan tahun 2024. Grafik berikut menunjukkan pengurangan luas kawasan kumuh Kota Bontang.



Gambar 2.24. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, 2025

Luas kawasan kumuh awal Kota Bontang adalah sebesar 73,56 hektar. Melalui kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, maka setiap tahunnya terjadi pengurangan luas kawasan kumuh. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh terus dilaksanakan untuk mengurangi luas kawasan kumuh, terutama menyasar pada pemenuhan standar teknis 7 aspek kekumuhan, meliputi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Apabila mengacu pada Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 188.45/509/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang, kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada masing-masing kawasan kumuh di Kota Bontang menghasilkan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 2.73. Luas Pengurangan Kawasan Kumuh Menurut Kawasan Kumuh Tahun 2024

Kawasan Kumuh	Lokasi	Luas Kumuh Awal (Ha)	Luas Kumuh Akhir (Ha)	Luas Pengurangan (Ha)
Kawasan Pantai Harapan	Kelurahan Berbas Pantai	16,05	5,52	10,53
Kawasan Kampung Nelayan	Kelurahan Loktuan	16,75	0	16,75
Kawasan Kampung Pesisir	Kelurahan Tanjung Laut Indah	10,71	4,97	5,74
Kawasan Kampung Kuala Bahari	Kelurahan Bontang Kuala	11,61	0	11,61
Kawasan Tanjung Limau	Kelurahan Gunung Elai dan Bontang	11,03	7,64	3,39

Kawasan Kumuh	Lokasi	Luas Kumuh Awal (Ha)	Luas Kumuh Akhir (Ha)	Luas Pengurangan (Ha)
	Baru			
Kawasan Kampung Mandar	Kelurahan Loktuan	3,20	0	3,2
Kawasan Kampung Toraja	Kelurahan Gunung Telihan dan Kanaan	4,21	0	4,21
Total		73,56	18,13	55,43

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2025

Pada tahun 2024, penanganan kumuh masih menyisakan permasalahan, yaitu masih terdapat 7 (tujuh) RT yang membutuhkan penanganan, meliputi RT 13, RT 18 dan RT 19 di Kawasan Kumuh Pantai Harapan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; RT 12 dan RT 14 di Kawasan Kumuh Kampung Pesisir yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; serta RT 1 dan RT 2 di Kawasan Kumuh Tanjung Limau yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dari total 33 RT, sebanyak 26 RT sudah ditangani dan status kekumuhannya berubah menjadi tidak kumuh. Sementara itu, sisa luasan kumuh terbesar ada di kawasan kumuh Tanjung Limau di Kelurahan Gunung Elai.

3) *Backlog* Perumahan

Secara umum *backlog* perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2024, melalui kegiatan Pendataan Perumahan Terpadu, jumlah rumah di Kota Bontang tercatat sebanyak 40.697 rumah. Sementara itu, jumlah kekurangan rumah berdasarkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah untuk dihuni dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74. *Backlog* Penghunian Tahun 2024

Uraian	2024
<i>Backlog</i> Penghunian	22.324
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	63.021
Jumlah rumah (unit)	40.697

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 22.324 KK belum memiliki rumah. Idealnya, 1 keluarga menghuni 1 rumah tinggal. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah keluarga yang membutuhkan rumah milik sendiri dengan ketersediaan rumah di Kota Bontang. Oleh sebab itu, hal ini perlu menjadi perhatian karena rumah tinggal merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi.

d. *Infrastruktur* Perhubungan

Kinerja aspek daya saing daerah juga didorong oleh ketersediaan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung aksesibilitas daerah. Selain ketersediaan infrastruktur jalan, ketercapaian atau keterjangkauan daerah juga didukung oleh ketersediaan pelabuhan, bandara, maupun terminal bus.

1) *Pelabuhan*

Pelabuhan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kota Bontang. Sebagai daerah dengan sektor industri yang berkembang pesat, Kota Bontang mengandalkan jalur laut untuk transportasi barang dan penumpang. Aksesibilitas transportasi laut di kota ini terbagi ke dalam beberapa jenis pelabuhan, yaitu Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, dan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pelabuhan Pengumpul di Kota Bontang mencakup Pelabuhan

Umum Loktuan dan Pelabuhan Umum Tanjung Laut, yang melayani angkutan laut dalam negeri serta aktivitas alih muat dalam jumlah menengah. Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi titik utama dalam distribusi barang dan penumpang dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Selain pelabuhan umum, Kota Bontang memiliki Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai pusat pendaratan ikan bagi nelayan lokal. Pelabuhan ini terletak di Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru, dan memainkan peran penting dalam mendukung sektor perikanan serta distribusi hasil laut ke berbagai wilayah. Keberadaan pelabuhan ini memungkinkan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih efisien serta meningkatkan daya saing sektor kelautan Kota Bontang. Pelabuhan perikanan juga menjadi pusat aktivitas bagi industri pengolahan ikan, baik dalam skala kecil maupun besar, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Kota Bontang memiliki beberapa Terminal Khusus (TUKS) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung operasional industrinya. Misalnya, Terminal Khusus PT. Badak LNG di Kelurahan Satimpo digunakan untuk aktivitas pengolahan minyak bumi dan gas alam, sementara Terminal Khusus PT. Pupuk Kalimantan Timur di Kelurahan Guntung berfungsi untuk industri petrokimia. Selain itu, Terminal Khusus PT. Indominco Mandiri di Kelurahan Bontang Lestari melayani aktivitas pertambangan batu bara, sementara Terminal Khusus PT. Graha Power Kaltim di lokasi yang sama berfungsi untuk pembangkitan tenaga listrik.

Beberapa terminal khusus lainnya juga mendukung sektor konstruksi dan industri lainnya. Terminal Khusus PT. Karya Wiraputra Bontang di Kelurahan Tanjung Laut Indah digunakan untuk aktivitas penumpukan material dan bahan bangunan. Sementara itu, Terminal Khusus PT. Energi Unggul Persada di Kelurahan Bontang Lestari berfungsi sebagai pusat kegiatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil). Keberadaan berbagai terminal khusus ini menunjukkan bahwa Kota Bontang memiliki infrastruktur pelabuhan yang beragam dan mendukung berbagai sektor industri. Namun, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional pelabuhan guna mengakomodasi pertumbuhan industri dan perdagangan yang terus berkembang.

Tabel 2.75. Jenis Pelabuhan dan Fungsi Utamanya di Kota Bontang

No	Jenis Pelabuhan	Lokasi	Fungsi Utama
1	Pelabuhan Pengumpul	Kelurahan Loktuan, Kelurahan Tanjung Laut	Angkutan laut dalam negeri, distribusi barang dan penumpang antar provinsi
2	Pelabuhan Perikanan	Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru	Pendaratan ikan, distribusi hasil laut, pengolahan perikanan
3	Terminal Khusus PT. Badak LNG	Kelurahan Satimpo	Pengolahan minyak bumi dan gas alam
4	Terminal Khusus PT. Pupuk Kaltim	Kelurahan Guntung	Industri petrokimia
5	Terminal Khusus PT. Indominco Mandiri	Kelurahan Bontang Lestari	Pertambangan batu bara
6	Terminal Khusus PT. Graha Power Kaltim	Kelurahan Bontang Lestari	Pembangkit tenaga listrik
7	Terminal Khusus PT. Karya Wiraputra Bontang	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penumpukan material/ bahan bangunan
8	Terminal Khusus PT. Energi Unggul Persada	Kelurahan Bontang Lestari	Industri Crude Palm Oil (CPO)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Selain pelabuhan pengumpul, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan khusus, di Kota Bontang juga terdapat pelabuhan pengumpan lokal. Pelabuhan

pengumpan lokal merupakan salah satu kategori pelabuhan dalam sistem transportasi laut yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan distribusi barang serta penumpang di tingkat lokal. Sampai dengan tahun 2024, jumlah pelabuhan pengumpan lokal di Kota Bontang mencapai 18 unit sebagai berikut.

Tabel 2.76. Pelabuhan Pengumpan Lokal Kota Bontang

No	Lokasi	Kelayakan
1	Pulau Beras Basah	Layak
2	Pulau Melahing	Layak
3	Pulau Selangan	Layak
4	Pulau Tihi-Tihi	Layak
5	Pulau Gusung	Layak
6	Guntung	Layak
7	Selambai	Layak
8	Kampung Mandar	Tidak Layak
9	Tanjung Limau	Layak
10	Bontang Kuala	Layak
11	Berbas Pantai (RT 19)	Tidak Layak
12	Berbas Pantai	Tidak Layak
13	Wisata <i>Mangrove</i>	Tidak Layak
14	Berbas Tengah	Tidak Layak
15	Teluk Kadere	Tidak Layak
16	Pagung	Tidak Layak
17	Nyerakat	Tidak Layak
18	Tanjung Laut	Tidak Layak

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bontang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dari 18 unit pelabuhan pengumpan lokal yang tersedia, sebanyak 9 unit pelabuhan berada dalam kondisi layak, sementara 9 unit pelabuhan lainnya masih belum memenuhi standar keselamatan.

Keberagaman pelabuhan di Kota Bontang, termasuk pelabuhan pengumpul, pelabuhan perikanan, dan terminal khusus industri, memberikan keunggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi jalur utama distribusi barang, bahan baku industri, serta hasil perikanan, yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dalam rangka memaksimalkan potensinya, diperlukan optimalisasi pengelolaan, modernisasi fasilitas, serta peningkatan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional. Dengan perencanaan yang matang, pelabuhan di Kota Bontang dapat menjadi pusat logistik maritim yang kompetitif, mendukung rantai pasok industri, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.

2) Bandara

Bandara di Kota Bontang merupakan Bandar Udara Khusus yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Badak LNG, berlokasi di Kelurahan Satimpo. Bandara ini memiliki peran strategis dalam mendukung operasional industri, khususnya dalam aktivitas logistik dan mobilitas tenaga kerja perusahaan. Sebagai bandara yang tidak melayani penerbangan komersial umum, fasilitas ini lebih berfokus pada kebutuhan internal perusahaan serta mendukung konektivitas dengan wilayah industri lain di Kalimantan dan sekitarnya.

Meskipun berstatus sebagai bandara khusus, potensi pengembangannya masih terbuka untuk mendukung aksesibilitas Kota Bontang secara lebih luas. Dengan pertumbuhan industri dan perekonomian daerah, peningkatan fungsi bandara ini baik melalui modernisasi infrastruktur maupun pembukaan akses terbatas untuk penerbangan tertentu dapat menjadi langkah strategis. Penguatan sektor transportasi udara akan meningkatkan daya saing daerah,

mempercepat arus barang dan tenaga kerja, serta membuka peluang kerja sama ekonomi dengan daerah lain.

3) Terminal Bus

Terminal bus di Kota Bontang merupakan terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Kelurahan Gunung Telihan. Terminal ini memiliki peran penting dalam sistem transportasi darat, khususnya dalam menghubungkan Kota Bontang dengan daerah lain seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur. Sebagai terminal tipe B, fasilitas ini dikelola oleh pemerintah provinsi dan berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan harian maupun perjalanan jarak jauh, serta distribusi barang. Keberadaan terminal ini mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi penumpang serta distribusi barang antar daerah.

Meskipun memiliki peran strategis, tantangan yang dihadapi terminal ini meliputi keterbatasan kapasitas, kondisi fasilitas, serta integrasi dengan moda transportasi lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah, diperlukan peningkatan infrastruktur terminal, optimalisasi manajemen operasional, serta pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Dengan pengelolaan yang lebih baik, terminal bus Kota Bontang dapat menjadi simpul transportasi yang modern dan nyaman, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta mobilitas masyarakat yang lebih lancar.

4) Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan, seperti rambu dan marka, memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas. Secara umum, jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di Kota Bontang terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2024, persentase ketersediaan perlengkapan jalan sebesar 80,12 persen. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan perlengkapan jalan serta pemeliharaan perlengkapan jalan eksisting, terutama pada marka delineator yang masih banyak ditemukan dalam kondisi kurang layak.

Tabel 2.77. Penyediaan Prasarana dan Sarana Perlengkapan Jalan Tahun 2024

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Ketersediaan Perlengkapan Jalan	
		Tersedia	Berfungsi
1	Rambu-rambu lalu lintas	1074	1074
2	Traffic Light	15	15
3	Warning Light	13	12
4	Pelican Crossing	2	2
5	VMS (Running Text)	0	0
6	RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan)	37	37
7	Cermin Tikungan	12	12
8	Pagar Pengaman Jalan	6	6
9	Delineator	315	42
10	Paku Marka	1768	1768
11	PJU	2646	2066
12	ATCS	0	0
13	Pita Penggaduh/Speed bump	69	69
14	ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	11	0
15	RHK (Ruang Henti Khusus)	11	0
	Jumlah	5.979	5.103

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bontang, 2025

5) Tingkat Keselamatan Pengguna Jalan

Tingkat keselamatan pengguna jalan diukur dengan melihat jumlah kecelakaan yang terjadi terhadap pengguna jalan dalam kurun waktu tertentu. Tingkat keselamatan yang tinggi berarti risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera atau kematian sangat rendah. Peningkatan tingkat keselamatan pengguna jalan adalah tujuan utama dalam manajemen lalu lintas.

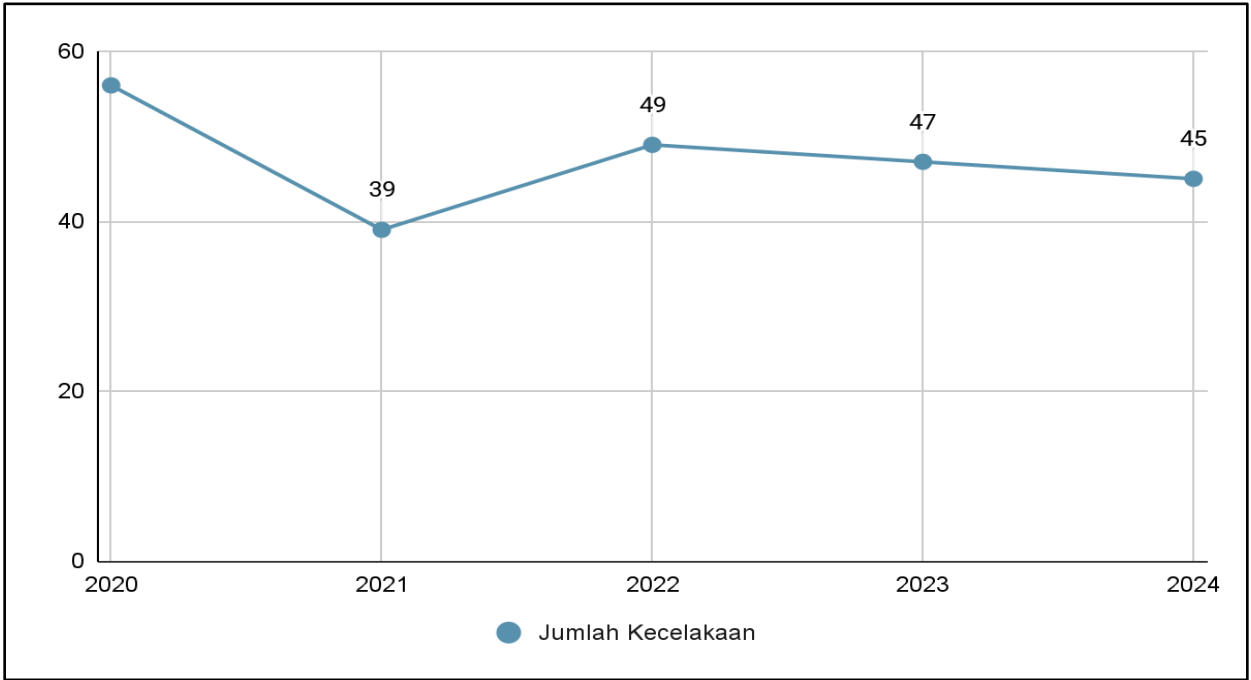
Selama lima tahun terakhir jumlah kendaraan di Kota Bontang pada umumnya terus mengalami peningkatan, di mana jumlah sepeda motor sangat mendominasi dibanding jumlah kendaraan bermotor lainnya. Tabel berikut menunjukkan jumlah kendaraan di Kota Bontang pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.78. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kendaraan bermotor (unit)	144.301	190.414	155.366	167.837	176.476

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Sementara itu, selama lima tahun terakhir, jumlah kecelakaan pengguna jalan di Kota Bontang terus mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Gambar 2.25. Jumlah Kecelakaan Pengguna Jalan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase kecelakaan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kecelakaan dan jumlah kendaraan pada tahun berkenaan, sehingga diperoleh persentase kecelakaan selama lima tahun terakhir berkisar di angka 0,02 persen sampai 0,03 persen. Dengan menggunakan data tersebut, tingkat keselamatan pengguna jalan di Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut.

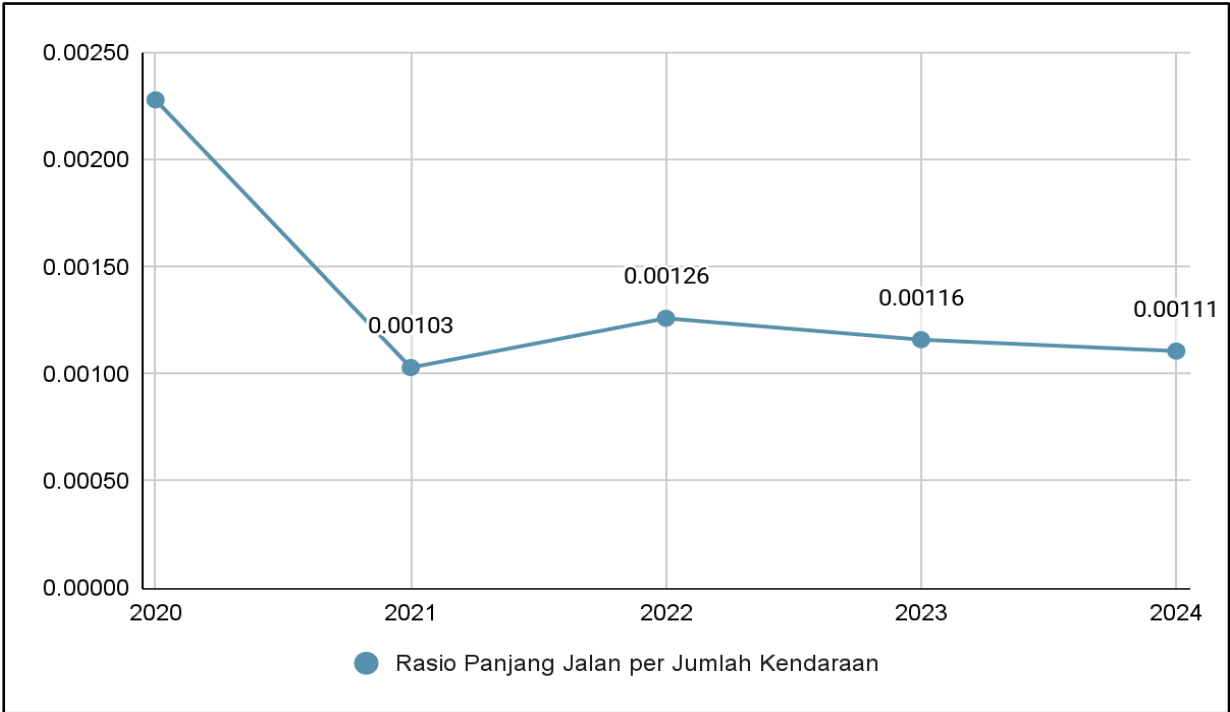
Tabel 2.79. Tingkat Keselamatan Pengguna Jalan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keselamatan Pengguna Jalan (%)	99,96	99,98	99,97	99,97	99,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2025

- 6) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di Kota Bontang. Rasio ini memberikan gambaran tentang kepadatan kendaraan relatif terhadap panjang jalan yang tersedia.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung dengan membagi panjang jalan (km) dengan jumlah kendaraan (unit). Artinya rasio ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan. Selama lima tahun terakhir, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Bontang dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.26. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Pada tahun 2024, setiap 1 kilometer jalan di Kota Bontang dapat melayani 903.44 kendaraan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 karena meningkatnya jumlah kendaraan, di mana pada tahun 2023, setiap 1 kilometer jalan melayani 795,37 kendaraan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian besar untuk meningkatkan dan memelihara kualitas jalan di Kota Bontang didukung dengan peningkatan sistem transportasi publik untuk meminimalisir kemacetan yang pada akhirnya dapat menghambat daya saing ekonomi Kota Bontang dalam jangka panjang.

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar 12,11 persen pada tahun 2024, dari Rp264,38 miliar di tahun 2023 menjadi Rp296,39 miliar. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan pajak restoran akibat bertambahnya jumlah *cafe* dan restoran baru. Namun, meskipun PAD meningkat, kontribusinya terhadap PDRB tetap kecil, mencerminkan ketergantungan Kota Bontang pada sektor lain, terutama industri migas dan manufaktur.

Perekonomian Kota Bontang mengalami kontraksi dengan PDRB yang turun 2,17 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp68,11 triliun. Sementara itu, kontribusi sektor non-migas tetap sebesar Rp44,10 triliun. Penurunan PDRB ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2023 mencapai 4,16 persen, realisasi pertumbuhan ekonomi non-migas hanya 4,41 persen, di bawah target 5,36 persen. Hal ini menandakan perlunya strategi lebih kuat dalam mengembangkan sektor ekonomi non-migas untuk meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun PAD meningkat, kontribusinya terhadap PDRB masih rendah. Kota Bontang perlu memperkuat diversifikasi ekonomi dan mengembangkan industri berbasis nilai tambah agar ketergantungan pada sektor migas berkurang dan stabilitas ekonomi makro dapat terjaga.

Tabel 2.80. Data Ekonomi Kota Bontang

Indikator	2023	2024	Perubahan (%)
PAD (Rp)	264,38 M	296,39 M	+12,11
PDRB (Rp)	68,11 T	Turun 2,17 persen	-
Kontribusi Sektor Non-Migas (Rp)	44,10 T	44,10 T	Tetap
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,16	-	-2,17
Laju Pertumbuhan Ekonomi Non-Migas (%)	4,41	5,36 (Target)	82 (Realisasi)
Data Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,28	0,36	Naik 0,08
Data Rasio Pajak Daerah terhadap tingkat inflasi (%)	0,08	0,23	Naik 0,15
Data Rasio Pajak Daerah terhadap realisasi investasi per sektor (%)	4,95	5,56	Naik 0,61

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

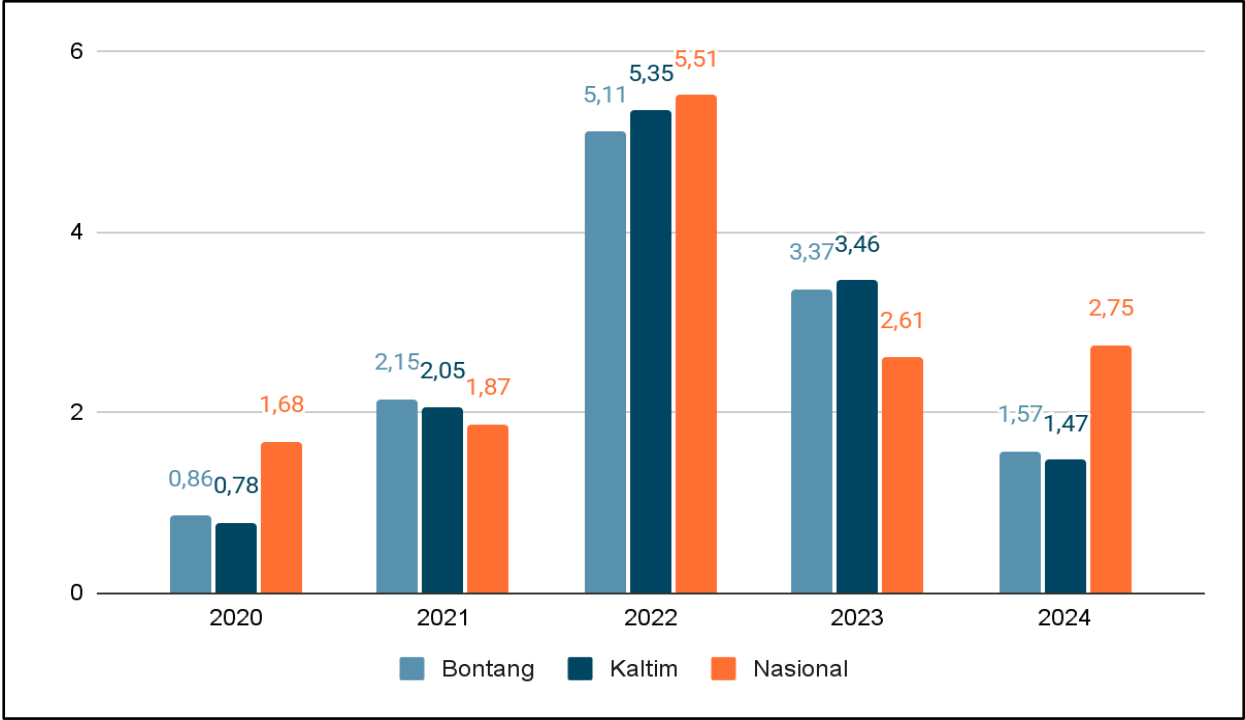
Kestabilan ekonomi makro Kota Bontang tercermin dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, dan kontribusi sektor non-migas. Meskipun PAD mengalami kenaikan 12,11 persen pada 2024, kontribusinya terhadap PDRB tetap rendah, menunjukkan bahwa sektor utama yang menopang ekonomi masih bergantung pada industri migas. Penurunan PDRB sebesar 2,17 persen mengindikasikan perlambatan ekonomi yang berisiko terhadap stabilitas jangka panjang. Ketahanan ekonomi makro Kota Bontang bergantung pada diversifikasi ekonomi, khususnya dalam sektor non-migas yang masih memiliki pertumbuhan terbatas. Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi non-migas mencapai 82 persen dari target, angka ini masih belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong investasi, inovasi, dan penguatan sektor ekonomi berbasis nilai tambah diperlukan untuk memastikan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu wilayah. Berdasarkan tabel di atas rasio pajak tahun 2024 meningkat 0,08 menjadi 0,36 yang menunjukkan penerimaan pajak Kota Bontang berbanding lurus dengan jumlah PDRB Kota Bontang yang juga meningkat. Sedangkan dari sisi inflasi menjelaskan bahwa penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh naik turunnya tingkat inflasi. Berdasarkan tabel diatas rasio pajak daerah terhadap inflasi pada tahun 2024 yaitu 0,23 lebih besar dari tahun 2023 yaitu 0,08 sementara tingkat inflasi tahun 2024 sebesar 1,57 mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan nilai 3,37. Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang menyebabkan naiknya jumlah PAD tahun 2024 sebesar 150 Miliar atau 26,7 persen dari tahun 2023.

Rasio Pajak Daerah terhadap realisasi investasi bertujuan untuk melihat sejauh mana pendapatan pajak daerah mendukung pembangunan dan pertumbuhan investasi di berbagai sektor. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rasio pajak daerah terhadap realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen. Hal ini disebabkan adanya perbaikan infrastruktur khususnya terkait aksesibilitas ke pusat-pusat industri yang mendorong masuknya investasi.

a. Inflasi dan Disparitas Harga

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Kota Bontang tidak memiliki perhitungan inflasi sendiri, sehingga tingkat inflasi yang digunakan merujuk pada data Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah ekonomi terdekat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy), mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,8 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, inflasi tahun 2024 sebesar 1,47 persen, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2.27. Inflasi Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Pergerakan inflasi di Kota Bontang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti distribusi barang, ketersediaan bahan pangan, dan fluktuasi harga energi. Peningkatan inflasi sering kali terjadi akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan harga bahan bakar, yang berdampak langsung pada harga barang kebutuhan pokok. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun, karena harga barang dan jasa naik lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Sebaliknya, jika inflasi terkendali, daya beli masyarakat cenderung meningkat, sehingga dapat mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 2.81. Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Inflasi di Kota Bontang

No	Faktor	Dampak terhadap Inflasi
1	Harga Bahan Pangan	Kenaikan harga beras, cabai, dan daging memicu inflasi pangan.
2	Fluktuasi Harga Energi	Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya produksi dan transportasi.
3	Distribusi Barang	Keterlambatan pasokan menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.
4	Musim dan Cuaca	Kemarau panjang mengurangi produksi pertanian dan menaikkan harga.
5	Kebijakan Fiskal & Moneter	Perubahan pajak atau suku bunga mempengaruhi harga barang dan daya beli.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan upaya stabilisasi harga, seperti memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan efisiensi rantai distribusi, dan memastikan stok barang kebutuhan pokok tetap tersedia, terutama saat terjadi lonjakan permintaan di hari besar dan musim tertentu

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tolok ukur keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan adalah indeks reformasi birokrasi (IRB), implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah (IKM), indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), indeks reformasi hukum dan indeks tata kelola pengadaan barang jasa (ITKP). Adapun capaian kinerja penyelenggaraan tata kelola pemerintahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.82. Capaian Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bontang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	IRB	Indeks	66,2	65,24	65,38	71,21	81,49
2	SAKIP	Skor	B (67,84)	B (67,51)	B (68,65)	B (68,04)	BB (70,04)
3	IKM	Indeks	84,59	84,39	86,14	87,13	90,80
4	Indeks pelayanan publik	Indeks	3,91	4,18	4,14	4,11	4,28
5	Indeks SPBE	Indeks	3,28	2,11	2,70	2,83	3,39
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	N/A	N/A	B (68,35)	BB (77,64)	AA (97,72)
7	ITKP PBJ	Indeks	N/A	59,44 (Cukup)	59,4 (Cukup)	67,23 (Cukup)	77,29 (Baik)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Bontang yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah kota secara konsisten melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kemajuan ini juga menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diterapkan telah memberikan dampak positif. Mulai dari digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan pengawasan internal, hingga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, semua langkah tersebut berkontribusi terhadap pencapaian yang lebih baik.

Selain itu, tren peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan reformasi, tetapi juga menggambarkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, Kota Bontang dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, efisien, dan inovatif.

Peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di Kota Bontang

semakin terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Setiap Organisasi Perangkat Daerah, dituntut untuk menyusun program kerja yang lebih terukur, berbasis kinerja, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan e-SAKIP telah memberikan kemudahan dalam pemantauan kinerja secara real-time. Hal ini memungkinkan setiap kebijakan dan program kerja dapat dievaluasi dengan lebih cepat dan tepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Capaian Nilai SAKIP yang terus meningkat juga menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin mampu menjalankan prinsip efektivitas anggaran. Dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan, sekaligus memastikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan warga. Keberhasilan dalam peningkatan indeks SAKIP tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan terus memperkuat sistem pengukuran kinerja serta komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, Kota Bontang semakin siap menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Ke depan, peningkatan Nilai SAKIP di Kota Bontang memerlukan penguatan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Penguatan budaya kinerja berbasis hasil menjadi kunci utama agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi sistem kerja yang lebih transparan dan akuntabel akan mendorong efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal.

Digitalisasi dan integrasi sistem juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kinerja. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem yang lebih canggih tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan dan penguatan kompetensi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang lebih efektif akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Aparatur yang profesional dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat juga perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang nyata. Dengan sistem pengawasan yang lebih transparan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menilai efektivitas layanan publik serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta sektor swasta, akan menjadi elemen penting dalam memperkuat inovasi di bidang pelayanan publik. Pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif akan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran, serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Bontang akan semakin mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, menjadikannya sebagai kota yang lebih transparan, efisien, dan inovatif dalam melayani masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau unit pelayanan

publik. IKM ini berfungsi sebagai cermin dari kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh lembaga atau pemerintah daerah, serta memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Dengan menggunakan IKM, instansi atau pemerintah dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan publik yang diberikan. Hasil dari survei kepuasan ini menjadi informasi yang penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi Masyarakat untuk menyampaikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan pelayanan. Secara keseluruhan, IKM bukan hanya sekedar alat ukur, tetapi juga sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah dan penyedia layanan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta untuk membangun hubungan yang lebih baik antara instansi dengan masyarakat.

Capaian nilai IKM Kota Bontang dari tahun 2022 hingga 2024 konsisten mengalami kenaikan. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang konsisten di Kota Bontang selama periode tersebut. Meskipun tren peningkatan ini positif, kedepannya masih perlu terus dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mempertimbangkan umpan balik masyarakat mengenai aspek-aspek pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dalam rangka terus meningkatkan pelayanan publik perlu upaya intensif memberikan informasi, penjelasan, dan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait standar pelayanan yang berlaku. Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian kedepannya adalah upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dan informasi akan menjadi tuntutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat dan praktis. Hal ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan literasi petugas pelayanan terhadap teknologi dan informasi agar tidak tertinggal dan dapat menggunakan teknologi dan informasi sebagai bagian dari alat atau pendukung pelayanan.

Indeks pelayanan publik di Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu dari 4,11 pada tahun 2023 menjadi 4,28 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini dapat menjadi indikator bahwa masih terdapat kendala dalam aspek pengambilan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam Upaya peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kompleksitas layanan publik yang membutuhkan inovasi dan respons yang lebih cepat dari pemerintah daerah. Seiring dengan pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap layanan publik juga semakin tinggi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sistem pelayanan agar tetap optimal. Beban pelayanan yang semakin besar menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme kerja, baik dari segi efisiensi birokrasi, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani layanan publik secara langsung. Jika sistem tidak berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitas pelayanan dapat menurun, menyebabkan ketidakpuasan dan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, perubahan regulasi atau kebijakan pelayanan yang belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif juga dapat mempengaruhi kualitas layanan. Jika terdapat peralihan sistem atau mekanisme baru yang membutuhkan penyesuaian, masyarakat mungkin mengalami masa transisi yang menyebabkan persepsi terhadap pelayanan menjadi kurang baik. Proses

adaptasi ini bisa memerlukan waktu yang tidak sebentar, terutama jika perubahan tersebut menyangkut tata kelola administrasi yang kompleks, pengintegrasian layanan lintas sektor, atau penerapan teknologi baru yang membutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hambatan dalam penyesuaian ini bisa berdampak pada kelambatan proses pelayanan, meningkatnya keluhan publik, dan penurunan kepuasan terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi membuat masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan publik yang berkualitas. Standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan layanan berbasis digital. Masyarakat kini lebih menginginkan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Jika inovasi layanan tidak berkembang sejalan dengan harapan masyarakat, maka tingkat kepuasan dapat mengalami penurunan meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pelayanan yang diterima dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan indeks pelayanan publik.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bontang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan Upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi SPBE di Kota Bontang adalah digitalisasi berbagai layanan publik. Pemerintah Kota Bontang terus berupaya untuk menggantikan proses administratif konvensional dengan sistem berbasis elektronik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir birokrasi yang rumit, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peningkatan Indeks SPBE di Kota Bontang juga seiring dengan pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih handal. Pemanfaatan jaringan internet yang lebih luas dan platform digital yang user-friendly membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah, seperti permohonan izin, pembayaran pajak daerah, atau pengaduan publik. Dengan adanya sistem elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat, sehingga memudahkan warga dalam memenuhi berbagai kebutuhan administratif. Selain itu, peningkatan SPBE juga mendorong adanya integrasi antarinstansi pemerintahan. Dengan system berbasis elektronik yang terhubung, data dan informasi antara dinas-dinas di Kota Bontang dapat dipertukarkan secara lebih cepat dan akurat. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pemerintah. Penerapan SPBE di Bontang juga didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan. Pemerintah Kota Bontang terus melaksanakan pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi informasi bagi aparatur sipil negara (ASN) agar mereka dapat lebih optimal dalam menggunakan sistem digital yang ada. Dengan demikian, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain dari sisi efisiensi dan efektivitas pelayanan, penerapan SPBE juga memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang lebih transparan.

Masyarakat dapat memantau proses pengelolaan anggaran, realisasi program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih terbuka. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena semua proses dapat dipantau secara langsung melalui platform digital yang telah disediakan. Namun, meskipun Indeks SPBE Kota Bontang menunjukkan tren positif, tantangan tetap ada, seperti perlunya penyempurnaan sistem yang terus berkembang, peningkatan keamanan data, serta mengatasi kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pengembangan sistem yang lebih baik agar semua lapisan Masyarakat dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks SPBE di Kota Bontang menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelayanan publik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan yang lebih modern dan inovatif. Peningkatan SPBE ini tentu berperan penting dalam mempercepat transformasi digital di Kota Bontang, yang pada gilirannya mendukung pembangunan kota yang lebih maju dan sejahtera.

Berdasarkan surat B/40/PD.03/2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 8 Juli 2025, tahun 2025 merupakan tahun akhir pengukuran indeks SPBE. Selanjutnya, mulai dari tahun 2026 akan berubah menjadi PEMDI (Pemerintah Digital), yang akan lebih mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user centric*), peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari sekadar penggunaan sistem elektronik menjadi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan menjalankan tugasnya.

Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Bontang Tahun 2024 adalah 97,72 dengan kategori AA (istimewa) meningkat sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Indeks Reformasi Hukum di Kota Bontang yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan kemajuan signifikan dalam upaya perbaikan sistem hukum di Kota Bontang. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kota, lembaga peradilan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan efektif. Selain itu, Pemerintah Kota Bontang juga berupaya untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem hukum di kota ini menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Namun, meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, tantangan tetap ada. Di beberapa sektor, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum daerah dan mengurangi praktik korupsi yang kadang masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi, memperbarui kebijakan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung reformasi hukum yang lebih berkelanjutan. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Reformasi Hukum di Kota Bontang menjadi indikasi positif bahwa kota ini semakin menuju sistem hukum yang lebih baik, dan ini tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan kota, kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya keadilan sosial.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan nilai CUKUP, di tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai 77,29 (Baik), hal ini memperlihatkan adanya peningkatan kualitas Pengadaan barang/jasa

Pemerintah Kota Bontang. Meskipun capaian indeks ini mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pengadaan barang dan jasa yang masih perlu menjadi perhatian antara lain peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa seringkali kompleks dan terus mengalami perubahan, yang dapat menyulitkan pemahaman dan implementasi oleh pelaku pengadaan. Selain itu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan indeks tata kelola pengadaan. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dengan pemanfaatan sistem e-procurement dan penerapan sistem pengawasan yang efektif juga akan berkontribusi pada pencapaian tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Manajemen Bencana, serta Pelayanan Pemadam Kebakaran. Kinerja dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83. Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk)	5,46	6,95	6,93	6,53	6,36
2	Rasio Penegakan PERDA	91,6	54,5	86,6	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate/15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	64,44	94,59	92,11	93,33	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2024

Secara umum waktu tanggap (response time rate/15 menit setelah pengaduan) dua tahun terakhir membaik dengan persentase diatas 92 persen. Namun tetap perlu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana seperti pembangunan pos pemadam permanen dimana tempat masyarakat untuk melaporkan bencana kebakaran yang ada sehingga bencana ini langsung bisa teratasi dan tidak menimbulkan banyak kerugian di wilayah padat penduduk seperti wilayah Berbas, Loktuan dan Bontang Barat. Selain itu juga diperlukan pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dengan memperhatikan standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran serta demi meningkatkan kesadaran masyarakat salah satunya melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran di setiap kelurahan.

Data dan informasi persentase capaian aksi HAM menggambarkan sejauh mana pemerintah telah melaksanakan program dan kebijakan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut ini adalah tabel penilaian peduli HAM Kota Bontang.

Tabel 2. 84. Penilaian Peduli HAM Kota Bontang

No	Parameter Penilaian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hak atas bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	80	100
2	Hak atas informasi	N/A	N/A	N/A	100	100

No	Parameter Penilaian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Hak turut serta dalam pemerintahan	N/A	N/A	N/A	25	80
4	Hak atas keberagaman dan pluralisme	N/A	N/A	N/A	35	85
5	Hak atas kependudukan	N/A	N/A	N/A	90	90
6	Hak atas kesehatan	N/A	N/A	N/A	87,5	90
7	Hak atas pendidikan	N/A	N/A	N/A	75	84
8	Hak atas pekerjaan	N/A	N/A	N/A	67	69
9	Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak	N/A	N/A	N/A	98	95
10	Hak perempuan dan anak	N/A	N/A	N/A	78	93
Rata-Rata Penilaian		N/A	N/A	N/A	73,55	88,60

(*) tahap penilaian
 Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2024

Data persentase capaian aksi HAM mengalami kenaikan dari 73,55 pada tahun 2022 menjadi 88,6 pada tahun 2023. Kenaikan angka persentase capaian aksi HAM ini menunjukkan adanya peningkatan dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan berbagai inisiatif HAM, termasuk penyusunan regulasi, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan akses keadilan. Data persentase capaian aksi HAM pada tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia karena kondisi pandemi covid. Data persentase capaian aksi HAM pada tahun 2024 masih dalam tahap penilaian sehingga belum dapat disajikan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi di Indonesia berdasarkan berbagai aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Saat ini data tersebut belum tersedia sehingga menggunakan data proksi yaitu proporsi pemilih yang menggunakan hak pilih. Data tersebut menunjukkan tren meningkat. peningkatan proporsi pemilih yang menggunakan hak pilih menunjukkan peningkatan kesadaran politik dan kepedulian dalam memilih pemimpin dan kebijakan. Artinya kepercayaan terhadap sistem demokrasi juga meningkat. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas sosialisasi pemilu yang dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Tabel 2.85. Data Proporsi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih

Indikator	2009	2014	2019	2024
Hak Pilih	99,06	66,91	83,29	83,25

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, 2024

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan tidak hanya bergantung pada aspek politik dan militer, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung daya saing nasional. Kota Bontang, sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan di Kalimantan Timur, memiliki sarana transportasi yang beragam, mulai dari jalan raya,

pelabuhan, bandara khusus, hingga terminal bus, yang berperan dalam memperkuat keterhubungan antar wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat serta logistik industri. Keberlanjutan pengelolaan infrastruktur ini menjadi elemen kunci dalam memperkuat posisi Kota Bontang sebagai bagian dari rantai pasok strategis nasional, sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah dalam konteks hubungan regional maupun internasional.

Selain itu, penguatan infrastruktur transportasi di Kota Bontang berkontribusi pada peningkatan ketahanan ekonomi dan keamanan kawasan, yang merupakan bagian dari strategi pertahanan berdaya gentar. Dengan tersedianya jalur distribusi yang efisien melalui jalan raya, pelabuhan, dan terminal khusus industri, Kota Bontang dapat memastikan kelancaran arus barang dan jasa yang krusial bagi sektor energi, pertambangan, dan manufaktur. Konektivitas yang kuat juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global, termasuk persaingan sumber daya dan investasi asing di kawasan. Oleh karena itu, optimalisasi dan modernisasi infrastruktur transportasi menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan nasional, memperkuat daya saing daerah, serta memperluas peran Indonesia dalam diplomasi ekonomi dan pertahanan kawasan.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga mencerminkan kemampuan kota dalam mengoptimalkan potensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan data terbaru, tahun 2024 nilai skor 3,58 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan persentase kenaikan 12,58 persen IDSD Kota Bontang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas sumber daya manusia, inovasi industri, serta efisiensi tata kelola pemerintahan. Sebagai kota industri dan jasa, Bontang memiliki tantangan dalam diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada sektor tertentu. Hal ini terlihat dari data BPS tahun 2024 bahwa Kontribusi PDRB Kota Bontang terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sekitar 7,98 persen. Namun demikian peningkatan skor IDSD tahun 2024 perlu menjadi fokus pemerintah Kota Bontang dalam memperhatikan aspek lingkungan.

Aspek lingkungan dan keberlanjutan kini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan daya saing suatu daerah, termasuk di Kota Bontang. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang berpihak pada masa depan. Pemerintah Kota Bontang telah merancang berbagai strategi komprehensif guna memperkuat daya saing daerah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari aspek sosial dan ekologis. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui integrasi antara inovasi, keberlanjutan, dan efisiensi layanan, diharapkan Bontang mampu menjadi kota yang kompetitif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Tabel 2.86. Indeks Daya Saing Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor IDSD	3,37	3,23	3,11	3,18	3,58

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Visi RPJMD 2021- 2026 adalah **Terwujudnya Kota Bontang yang lebih Hebat dan Beradab** dan dalam kerangka untuk mewujudkan Visi tersebut, maka agenda pembangunan lima tahun mendatang dirumuskan dalam tiga Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut:

1. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
2. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang 2021-2026

Tujuan		Indi- kator	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	2024					Target RPJMD	Target RKPD
							2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Capaian	2025	2025
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pembangunan																						
T.1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah				Indeks	N/A	N/A	N/A	75	75	N/A	79	79	N/A	82	82	N/A	N/A	N/A	85	85
		S.1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B (66,20)	B (66,20)	66.2	B (67,41)	B (67,41)	65.38	B (68,41)	B (68,41)	BB (71,21)	BB (70,41)	BB (72,41)	81,49	112,54	Tercapai	BB (72,41)	BB (72,41)	
				Nilai LPPD	Predikat	Tinggi (3,8607)	Tinggi (3,8607)	3.8607	Tinggi (3,87)	Tinggi (3,87)	Sedang (3,370)	Tinggi (3,90)	Tinggi (3,90)	Sedang (3,379)	Tinggi (4,00)	Tinggi (4,00)	3,0659	84.48	Tidak Tercapai	Tinggi (4,10)	Tinggi (4,20)	
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	Tercapai	WTP	WTP
		S.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah konflik	Kasus	9	9	N/A	8	8	6	8	6	7	7	6	5	120.00	Tercapai	7	7	
				Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Tercapai	100	100	
Misi 2: Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup																						
T.2	Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan	Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL)				Indeks	64.63	64.63	64.47	66.34	66.34	66.96	68.02	68.02	65.49	69.69	71.03	68.09	95.87	Tidak Tercapai	71.78	71.78
		S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh	Indeks Kualitas Perkotaan	Indeks	64.47	64.47	66,15	67.35	76.35	67.41	70.16	70.16	64.16	72.98	72.98	68.47	94	Tidak Tercapai	76.61	76.61	
				S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64.79	64.79	64.09	65.33	65.33	67.96	65.87	67.96	66.81	66.41	66.82	67.71	101.33	Tercapai	66.95
T.3	Mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat	Indeks Gini				Indeks	405	405	0.34	0,33	0,33	324	0,3	0,32	299	0,3	0,3	0,299	100.33	Tercapai	0,3	0,3
		S.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Non Migas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	Persen	2.38	2.48	4.4	4.2	4.2	5.36	4.2	5.36	4.41	5.3	5.3	9,4	177,35	Tercapai	6	3,5 - 4,5	
Misi 3: Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia																						
T.4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Indeks	80.02	81	80.59	81	81	80.59	81	81,2	81.63	81	81.7	82.49	100.97	Tercapai	81.29	81.83
		S.6	Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13.03	13.03	13.17	13.3	13.3	13.18	13.42	13.42	13.43	13.54	13.54	13.73	101.40	Tercapai	13.66	13.66	
				Rata-rata lama sekolah	Tahun	10.79	10.79	10.8	10.91	10.91	10.81	10.98	10.98	10.92	11.14	11.64	10.97	94.24	Tidak Tercapai	11.29	11.1	
				Usia harapan hidup	Tahun	74.28	74.28	74.55	74.44	74.44	74.57	74.51	74.73	74.81	74.56	74.85	75.03	100.24	Tercapai	74.61	74.85	
		S.7	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9.46	9.46	9.92	8.7	8.7	7.81	8,7	7.81	7.74	8.5	7.35	07.06	104.11	Tercapai	8	7.35	
		S.8	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.38	4.38	4.62	04.03	04.03	4.45	04.03	4.54	4.11	3,9	3,9	3.74	104.28	Tercapai	3.8	3.8	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Dalam Misi 1 yaitu Kota Bontang yang HARMONI Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pembangunan, terdapat satu tujuan dan dua sasaran jangka menengah yang telah disesuaikan. Secara umum, tingkat ketercapaian pada misi satu ini adalah 45,83 persen, tidak tercapai 29,17 persen, dan N/A 25,00 persen. Tujuan 1 (T.1) yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab yang mana tujuan tersebut diukur dalam satu indikator (indeks kepemimpinan kepala daerah). Namun, dalam realisasinya indikator tersebut data masih belum tersedia dari tahun 2021 hingga 2024. Selanjutnya, terdapat dua sasaran yaitu sasaran pertama (S.1) adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif yang mana sasaran tersebut diukur dalam tiga indikator untuk melihat tingkat ketercapaiannya. Tiga indikator tersebut antara lain indeks reformasi birokrasi, nilai LPPD, dan opini BPK. Dalam realisasinya indeks reformasi birokrasi telah tercapai pada tahun 2021, 2023 dan 2024, tahun 2022 tidak tercapai. Nilai LPPD hanya tercapai pada tahun 2021, tahun 2022 hingga tahun 2024 tidak tercapai. Opini BPK telah tercapai pada semua tahun 2021 hingga 2024. Sasaran kedua (S.2) adalah Meningkatnya kondusifitas wilayah yang mana sasaran ini diukur dalam dua indikator untuk melihat tingkat ketercapaiannya. Dua indikator tersebut antara lain jumlah konflik dan persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum. Realisasi pada sasaran dua ini semua indikator tercapai yang berarti pada pelaksanaan untuk peningkatan kondusifitas wilayah di Kota Bontang sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, misi 2 yaitu Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. Dalam misi tersebut terdapat 2 tujuan dan 3 sasaran jangka menengah yang telah disesuaikan. Secara umum, tingkat ketercapaian pada misi 2 adalah 50 persen, tidak tercapai 45 persen, dan N.A 5 persen. Tujuan dua (T.2) adalah mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan yang mana tujuan tersebut diukur dengan satu indikator yaitu Indeks Kota Berwawasan Lingkungan (IKBL). IKBL merupakan indikator yang dapat melihat keberhasilan pembangunan perkotaan. IKBL terdiri dari (dua) indikator yaitu Indeks Kualitas Perkotaan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Maka, sasaran ketiga (S.3) adalah meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju dan tangguh yang mana dalam sasaran tersebut terdapat indikator untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yaitu indeks kualitas perkotaan. Selanjutnya, sasaran empat (S.4) adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang lestari yang mana dalam sasaran tersebut terdapat indikator untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yaitu indeks kualitas lingkungan hidup. Realisasi dari dua indikator tersebut cukup baik, namun harus tetap memperhatikan faktor-faktor penghambat yang dapat menjadikan capaiannya menjadi dibawah target yang ditetapkan. Tujuan 3 (T.3) yaitu mewujudkan inklusivitas dan keseimbangan ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi lokal dan keragaman sosial budaya masyarakat, yang mana indikator untuk mengukur ketercapaiannya adalah menggunakan indeks gini. Realisasi indeks gini tahun 2021 - 2024 sudah mencapai target. Dalam tujuan 3 terdapat satu sasaran yaitu sasaran lima (S.5) meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas. Indikator laju pertumbuhan ekonomi non migas menjadi indikator yang digunakan untuk mengetahui capaiannya. Dalam realisasinya laju pertumbuhan ekonomi non migas tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas

Dasar Harga Konstan tahun 2023 dari beberapa lapangan usaha mengalami penurunan seperti industri perikanan, transportasi dan perdagangan. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan geliat kegiatan ekonomi lokal.

Pada Misi 3 yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Kota Bontang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misi ketiga memiliki pencapaian secara umum yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mendapat predikat “tercapai” pada tahun 2021 dan tahun 2023, namun predikat “tidak tercapai” tercatat pada tahun 2022 dan tahun 2024. Sasaran pertama (S.6) pada Misi 3 yang meliputi “Meningkatnya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas” memiliki tiga indikator sasaran, yaitu angka harapan sekolah (1), rata-rata lama sekolah (2), dan usia harapan hidup (3). Ketiga indikator ini secara keseluruhan mendapatkan predikat “tercapai”. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2022, indikator pertama (angka harapan lama sekolah) tidak memenuhi target yang diharapkan. Target yang ditetapkan adalah 13,3 tahun, namun realisasinya hanya mencapai 13,18 tahun. Hal tersebut juga terjadi di tahun 2024, sebagaimana target yang diterapkan adalah 13,54 tahun, namun hanya mencapai 11,02 tahun saja. Pada indikator sasaran kedua (rata-rata lama sekolah) memiliki predikat “tercapai” dengan memiliki persentase 100,09 persen pada tahun 2021 dan tahun 2024 dengan persentase sebesar 115,46 persen. Kondisi berbeda terlihat pada indikator sasaran usia harapan hidup (3), yaitu memiliki predikat ketercapaian diatas 100 persen pada setiap tahunnya (tahun 2021 hingga tahun 2024).

b. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.88. Capaian IKK 2021-2024

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket	
				2021	2022	2023	2024		
URUSAN WAJIB									
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kota yang bersangkutan (\%)}} \times 100$	47,16	67,22	71,33	68,62	Sumber Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Jumlah satuan PAUD terakreditasi (Negeri dan Swasta)					
			2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah					
			3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan					
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD					
			5	Jumlah pendidik pada PAUD					
			6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini (%)	86,24	86,24	86,24	92,50	
			7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang					
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	92,75	82,58	88,82	90,37	Sumber Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	
			2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang menerima					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah					Sumber Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan					
		6	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)					
		8	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)					
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)					
		12	Jumlah tenaga kependidikan Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)					
		14	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah (D-IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat pendidik (%)	51,81	51,67		50,30	
		16	Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah					
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat					
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	71,94	81,45	78,37	86,06	
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah					
		5	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			yang menerima pembebasan biaya pendidikan					Sumber Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)					
		9	Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)					
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)					
		13	Jumlah tenaga kependidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta)					
		15	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah (D-IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat pendidik (%)	48,83	60,15		57,61	
		17	Jumlah Kepala Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah					
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat					
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) (%)				100,00	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan				
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)				
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)				
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1				
			7	Jumlah Kepala Sekolah Jenjang pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				
			8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah (D-IV) atau sarjana (S1)				
2	Kesehatan	1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{100\% \text{ Jumlah Penduduk di Kota}} \times$	4,12	1,37	0,27	0,27	Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1	Jumlah RS Rujukan yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar				
		2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{100\% \text{ Jumlah RS di Kota}} \times$	60,00	100,00	100,00	100,00	Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1	Jumlah RS yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya				Sumber Data dari Dinas Kesehatan
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{100\% \text{ Jumlah Ibu hamil di Kota}} \times$	97,79	96,35	47,87	100,40	
			1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal				

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
	4	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan $\frac{\text{Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu bersalin di Kota}} \times 100\%$	100,51	98,35	88,60	100,08	Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar					
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kota}} \times 100\%$	77,94	78,79	87,13	92,01	Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar					
	6	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kota}} \times 100\%$	74,94	68,70	74,76	89,07	Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar					
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota}} \times 100\%$	21,27	71,39	73,59	81,33	Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar					
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun}} \times 100\%$	25,92	71,39	58,83	85,03	Sumber Data dari Dinas Kesehatan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		kesehatan sesuai standar	100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota					Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar _____ x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di Kota	67,36	43,83	90,26	96,47	
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar _____ x 100% Jumlah penderita hipertensi di Kota	33,04	38,79	46,42	59,73	
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					Sumber Data dari Dinas Kesehatan
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar _____ x 100% Jumlah penderita DM di Kota	35,68	57,28	70,55	90,23	
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar _____ x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kota	96,50	91,54	92,75	102,86	Sumber Data dari Dinas Kesehatan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kota}} \times 100\%$	122,66	110,37	119,08	97,19	
			1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia					Sumber Data dari Dinas Kesehatan
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar					
		14 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kota}} \times 100\%$	108,57	101,94	101,53	136,83	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota					Sumber Data dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	100,00	100,00	100,00	0,00	
				$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)}} \times 100\%$					
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kota (m)					Sumber Data dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota (m)	100,00	100,00	100,00	0,00	
				$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota (m)}} \times 100\%$					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)					Sumber Data dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS Kewenangan Kota (m)					
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, dan akresi di WS Kewenangan Kota (m)					
			5 Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan / pengelolaan SD Air WS kewenangan kab/kota					
			6 Rencana teknis tata penaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota					
			7 Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota					
		3 Rasio luas daerah irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kota yang di layani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha) dioperasikan (ha) dan dipelihara (ha)}}{100\%} \times \text{Luas luas daerah irigasi Kewenangan Kota (ha)}$	100,00	100,00	100,00	0,00	
		4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota}}{100\%} \times \text{Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut}$	99,65	99,65	99,75	89,18	Sumber Data dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			1 Penetapan dokumen RISPAM kab/kota (ada/tidak)					
			2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota (ada/tidak)					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD kab/kota penyelenggara SPAM (ada/tidak)					Sumber Data dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM					
			5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya					
	5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan limbah berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 100% Jumlah rumah di Kota x	99,23	99,65	99,39	96,36	
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S						
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T						
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T						
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja						
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja						
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik						
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar						
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman						

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket	
					2021	2022	2023	2024		
			9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman					Sumber Data dari Dinas PUPR	
			10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat						
			11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja						
			12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja						
			13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD						
			14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja						
		6	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota		$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{100\% \text{ Jumlah IMB yang berlaku}} \times$	100,00	100,00	100,00		100,00
			1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi						
			2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah kab/kota dalam tahun existing						
			3	Penetapan Perda tentang Bangunan/Gedung (ada/tidak)						
			4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (ada/tidak)						
			5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk dilindungi dan dilestarikan						
			6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk kepentingan strategis daerah propinsi						
			7	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota (%)			133,00	133,00		
			8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/ dirawat(%)			26,00	26,00		
		7	Tingkat Kemantapan jalan kab/kota		$\frac{\text{Panjang jalan kota dalam kondisi Mantap (baik dan sedang)}}{100\%} \times$	100,00	100,00	100,00		100,00

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut					Sumber Data dari Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		1	Panjang jalan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota					
		2	Panjang jalan yang dibangun			1.769M	1.769M	
		3	Panjang jembatan yang di bangun			32M	32M	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)			9.936m	9.936m	
		5	Panjang jembatan yang di ganti/dilebarkan					
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi			9936m	9936m	
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi					
		8	Panjang jalan yang di pelihara			6820m	6820m	
		9	Panjang jembatan yang di pelihara (%)			16,00	16,00	
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{100\% \text{ Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota}} \times$	100,00	100,00	100,00	80,78	
		1	Jumlah pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota					
		2	Jumlah tenaga kerja operator dan teknis/analisis terlatih di wilayah kab/kota					
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota					
		4	Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir					
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kab/kota					
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN					
			7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya					
			8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang di laksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala					
			9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota					
			10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.					
			11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis					
			12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota					
			13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota					
			14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui					
			15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.					
			16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan kosntruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya					
			17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.					
			18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota					
			19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota					
			20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota					
			21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota					
			22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			1.171	1.171	
			23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.					
			24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.					
			25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.					
	9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangann pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi x	100,00	100,00	100,00	100,00	Sumber Data dari Dinas Pekerjaan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya					Umum & Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{100\% \times \text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n}$	100,00	100,00	100,00	100,00	Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penangannya					
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam					
		3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana					
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang akan direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi					
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi					
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi					
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana					
		8	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi					
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan					
		2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	$\frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{100\% \times \text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}$	100,00	100,00	100,00	100,00	Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			1	Jumlah Rumah tangga penerima layanan yang telah mendapat fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM					Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM					
			3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM					
			4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM					
			5	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM					
			6	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah					
	3	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{100\% \times \text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}}$	91,95	49,90	68,42	100,00		
		1	Luas luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha						
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH						
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh						
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah kumuh}}{100\% \times \text{Jumlah total unit rumah Kota}}$	2,66	2,47	0,79	0,46	Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		1	Jumlah rumah di kab/kota						
		2	Jumlah unit Peningkatan Kuaitas RTLH						
		3	Jumlah rumah tidak layak huni						
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni						
		5	Rasio Rumah dan KK (Jumlah KK dibagi jumlah rumah) (%)			118,63	118,63		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru						

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{100\% \text{ Jumlah Unit Rumah}} \times$	100,00	100,00	99,48	7,32	Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			1 Jumlah perumahan terfasilitasi PSU					
			2 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum					
			3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan					
			4 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)					
			5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH					
			6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU					
			7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi					
			8 Jumlah pengembang yang teregistrasi					
			9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan					
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{100\% \text{ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times$	100,00	100,00	100,00	100,00	Sumber data dari Kantor Satpol PP
			1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kota yang ditangani					
			2 Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan					
			3 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan					
			4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS					
			5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			22	22	
			6 Tersedianya sarana dan prasarana minimal			803	803	
		2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang diterbitkan}} \times$	100,00	86,67	93,33	100,00	Sumber data dari Kantor Satpol PP

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi					
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	26136	104,00	100,00	100,00	Sumber data dari BPBD
		1	Prosentase penyelesaian dokumen Kawasan Rawan Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	80,00	80,00	100,00	100,00	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	100,00	100,16	100,16	Sumber data dari BPBD
		1	Prosentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal			-	-	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi sampai dinyatakan sah/legal			-	-	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (%)	100,00	100,00	100,16	100,16	
		4	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan (%)	6,04	83,82	88,89	88,89	
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penganggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	Sumber data dari BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	41	216	94,87	94,87	
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	100,00	100,00	-	-	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket	
					2021	2022	2023	2024		
			2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	82,00%	100,00%	94,87%	94,87%		
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kota}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
				1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
				2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1 pos	4 pos	5 pos		5 pos
				3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	149 orang	148 org%	148 org		148 org
				4	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan	3 pos	4 pos	5 pos		5 pos
				5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadamam, penyelamatan dan evakuasi	92 jenis	92 jenis	887 jenis		887 jenis

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 16/2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	48 orang	61 orang	161 orang	161 orang	Sumber data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			7	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan DPKP yang menyelenggarakan urusan kebakaran	506 orang	70 orang	72 orang	72 orang	
			8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	149 orang	28 orang	2 orang	2 orang	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	1500,00%	876,00%	1164,00%	1164,00%	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki						
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM						
		3	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk						
		4	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dijangkau						
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki						
		6	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang						

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			menerima paket permakanan sesuai sandar gizi					
			7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar					
			8 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket sandang					
			9 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan alat bantu					
			10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter					
			11 Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia					
			12 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan					
			13 Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah					
			14 Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan					
			15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapat bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan.					
			16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat					
			17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar					Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan penelusuran keluarga					
			20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga					
			21	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk					
		2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{100\% \times \text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan					
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang					
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki					
			4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan					
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial					
			6	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau relawan sosial yang tersedia.					
7	Tenaga Kerja	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Rencana tenaga kerja}} \times 100\%$	85,71%	100,00%	92,31%	100,00%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			100% $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota}}$					
			1 Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota	16	14	14	14	
			2 Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
			3 Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kab/kota					
		2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	2,54%	12,37%	11,80%	10,98%	
			1 Persentase penerapan progam PBK dengan kualifikasi klaster	40,00%	32,20%	14,56%	14,56%	
			2 Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi	43,24%	60,00%	20,00%	20,00%	
			3 Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	5,96%	7,94%	3,38%	3,38%	
			4 Persentase LPK yang terakreditasi	4,55%	30,43%	33,33%	33,33%	
			5 Persentase LPK yang memiliki perijinan	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			6 Jumlah penganggur yang dilatih	621	441	1.237	1.237	
			7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100,00%	29,02%	83,83%	83,83%	
			8 Persentase penyerapan lulusan	30,77%	6,35%	7,36%	7,36%	
			9 Lulusan bersertifikat kompetensi	0	142	1.037	1.037	
			10 Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			11 Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	12	-	4	4	
		3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	484.485.431,87	44.778.786,16	44.913.907.135,00	476.109.807,00	
			1 Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas					
			2 Data tingkat produktivitas total					
		4 Persentasi Perusahaan yang menetapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menetapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	16,84%	13,10%	55,00%	14,75%	

Sumber data dari DPUPR dan Dinas Ketenagakerjaan

Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan

Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
			1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	42,51%	34%	69,28%	69,28%	
			2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	9,31%	79%	82,86%	82,86%	
			3 Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yagn tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	38,00%	41	42	42	
			4 Persentase perusahaan yang menyusun struktur skala upah	16,84%	41%	77,42%	77,42%	
			5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100,00%	43%	100,00%	100,00%	
			6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,24%	2%	1,88%	1,88%	
			7 Jumlah mogok kerja					
			8 Jumlah penutupan perusahaan					
			9 Jumlah perselisihan kepentingan					
			10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam satu perusahaan					
			11 Jumlah perselisian PHK	16		1	1	
			12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	107	50	180	180	
			13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	11				
			14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite kab/kota yang diberdayakan	1	1	1	1	
			15 Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industri	21	7	6	6	
	5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Jumlah Pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan x 100% Jumlah Pencaker yang terdaftar	21,89%	26,55%	28,35%	36,15%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
			1 Jumlah lowongan kerja yang tersedia di kab/kota					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			2	Jumlah Pencaker yang terdaftar di kab/kota				
			3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) di kab/kota				
			4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar di kab/kota				
			5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja				
			6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota				
			7	Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh bidang ketenagakerjaan kab/kota				
			8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui inforasi pasar kerja (IPK) Online (SISNAKER)				
			9	Jumlah Calon pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi				
			10	Jumlah Calon pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata				
			11	Jumlah Calon pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan				
			12	Jumlah Calon pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja				
			13	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya				
			14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.				
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{100\% \text{ Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times$	1,31%	0,49%	13,01%	0,63%	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	Jumlah Lembaga pemerintah tingkat kab/kota yang telah dilatih PUG	27	31	12 opd	12 opd

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			2	Jumlah program PUG perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kab/kota	-	-	14 program	14 program	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			2	$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi}}{10.000} \times \text{Jumlah anak korban kekerasan (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			1	Jumah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dngan pemerintah kab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	11 media		3 Media	3 Media	
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	6 lembaga	8 lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	
			3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	15 lembaga	15 lembaga	163 Lembaga	163 Lembaga	
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kab/kota	8 lembaga	8 lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	
		3		$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{100.000} \times \text{Jumlah penduduk perempuan}$	59,36	49,05	52,32	50,72	Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapat pelatihan	3 lembaga	3 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	
			2	Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih		71 kader	447 kader	447 kader	
			3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	
			4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat bantuan keuangan oleh pemerintah kab/kota	2 lembaga	2 lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	
			5	Jumlah kebijakan/program pencegahan terhadap perampuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 perda	5 kebijakan/program	6 Kebijakan / Program	6 Kebijakan / Program	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 lembaga	1 lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	
			7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Pangan	1 Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{100\% \times \text{Jumlah kebutuhan pangan}}$	124,00%	106,53%	1,02%	125,22%	
			1 Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Sumber Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
			2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal			-	-	
			4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan			1 bh	1 bh	
			6 Tertanganinya kerawanan pangan	100,00%	100,00%	6 kel	6 kel	
			7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	100,00%		100,00%	100,00%	
			8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Pertanahan	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukannya sesuai kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang berikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$	98,85%	98,85%	98,85%	100,00%	Sumber Data dari DPUPR, Dinas Perkim & DPMPSTP
			1 SK Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh walikota					
			2 SK walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah kelebihan maksimum/absentee dan Daftar Subyek					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			3	SK walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee					Sumber Data dari Dians Perkim dan Bapeltbang Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta DPMPSTP Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			4	Dokumen Ijin membuka tanah					
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah					
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{100\% \times \text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukannya sesuai kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang berikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	98,85%	100,00%	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah obyek Landreform (TOL)}}{100\% \times \text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{100\% \times \text{Izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
11	Lingkungan Hidup	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{100\% \times \text{jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\text{IKLH kab/kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$	64,09	67,96	66,81	67,71	
			1	Indeks kualitas air (IKA)					
			2	Indeks kualitas udara (IKU)					
			3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket	
					2021	2022	2023	2024		
	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota		$\frac{\text{Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{100\% \text{ Total vol timbunan sampah Kota}} \times$	99,67%	96,43%	99,70%	99,06%	Sumber Data dari Dinas Lingkungan Hidup	
			1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di kab/kota	ADA	ADA	Aplikasi SIPSN	Aplikasi SIPSN		
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota		$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota}}{100\% \text{ Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times$	0,00%	3,45%	3,85%		19,23%
			1	Data ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota	2	1	3	3	Sumber Data dari Dinas Lingkungan Hidup	
			2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di propinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota						
			4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH						
			5	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat		65	30	30		
			6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP -el		$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{100\% \text{ Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times$	97,72%	99,92%	100,00%	99,80%
		1	Penerbitan Akta perkawinan							
		2	Penerbian akta perceraian							
		3	Penerbian akta kematian							
		4	Penyajian data penduduk							

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		2 Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA}}{100\% \text{ Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times$	55,79%	59,89%	72,84%	76,10%	Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3 Kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun yang memiliki akte kelahiran}}{100\% \text{ Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun}} \times$	96,51%	95,68%	98,73%	93,85%	
		4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama}}{100\% \text{ Jumlah OPD yang mempunyai akses NIK}} \times$	35,48%	35,48%	78,57%	78,57%	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{100\% \text{ Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		2 Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{100\% \text{ Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$	47,00%	141,00%	215,00%	217,00%	Sumber Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		1	Tersedianya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perda-kan		1 dok	1 dok	1 dok	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	58,86%	0,00%	22,5	22,5	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	4,65	8,58	18,2	18,2	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			4	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	79,26%	56,72%	81,80%	81,80%	Sumber Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK	72 lembaga	157 lembaga	118 lembaga	118 lembaga	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern $\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}{100\%} \times$	71,87%	56,42%	67,37%	56,40%	
			1	Persentase fasilitasi kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	93,02%	88,37%	82,22%	82,22%	
			2	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	71,87%	19,38%	48,20%	48,20%	
			3	Pemerintah daerah memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	151 pokja	157 poktan	155 poktan	155 poktan	
			4	Persentase Pelayanan KB pasca persalinan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani $\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}{100\%} \times$	15,26%	54,43%	13,91%	17,20%	Sumber Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
			1	Persentase kesertaan KB di kab/kota dengan kesertaan rendah	0,73%	0,53%	0,50%	0,50%	
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	70,40%	92,71%	51,00%	51,00%	
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber Data dari Dinas Perhubungan
				o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)					
				o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)					
				Keterangan:					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			IK1 (Angkutan Jalan)					
			- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP					
			- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu					
			IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)					
			- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil					
			- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu					
			Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)					
			Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)					
			Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)					
			Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)					
			Bobot Trayek atau Lintas :					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1					Sumber Data dari Dinas Perhubungan
			b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8					
			c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5					
		2 Rasio Konektivitas Provinsi	1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C			100,00%	100,00%	
			2 Terlaksananya pelayanan uji berkala			41,06%	41,06%	
			3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.			-	-	
			4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota			41,06%	41,06%	
		3 V/C Rasio di Jalan Kota	Mengukur Kinerja Lalulintas kab/kota	40,00%	40,00%	0,43	43,00%	Sumber Data dari Dinas Perhubungan
			1 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota			87,38%	87,38%	
16	Komunikasi dan Informatika	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	90,00%	Sumber Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika
			1 Jumlah OPD yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	
			2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	
			3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.					
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
			Jumlah layanan publik yang di selenggarakan online dan integrasi $\frac{\text{Jumlah layanan publik yang di selenggarakan online dan integrasi}}{\text{Jumlah layanan Publik}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Perangkat Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No..5/2015					
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.	100,00%	100,00%	72,24%	72,24%	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100,00%	100,00%	1,22%	1,22%	
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi sistem penghubung layanan pemerintah					
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	74,19%	93,55%	90,00%	90,00%	
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	74,19%	93,55%	90,00%	90,00%	

Sumber Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	74,19%	93,55%	90,00%	90,00%	Sumber Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika
			11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100,00%	100,00%			
			12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	70,97%	100,00%			
			13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100,00%	100,00%			
			14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2	2	3 perwali	3 perwali	
		3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota					
				$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota}}{100\% \text{ Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	72,00%	72,00%	73,23%	100,00%	
			1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			2	Persentase kontain Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)					
			3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	47,06%	54,93%	57,97%	62,69%	Sumber Data dari Dinas Koperasi dan UMKM
				$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{100\% \text{ Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$					
			1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			2 Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		100,00%	100,00%	100,00%	
			3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	48,53%	70,42%	100,00%	100,00%	
			4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	44,12%	42,25%	100,00%	100,00%	
			5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	88,24%	98,59%	78,82%	78,82%	
			6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,69%	6,55%	100,00%	100,00%	
			7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%	
			8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5,88%	5,63%			
			9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100,00%	100,00%	67,16%	67,16%	
			10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	5,88%	5,63%			
			11 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,29%	9,86%	100,00%	100,00%	
			12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi	44,12%	42,25%	100,00%	100,00%	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota					Sumber Data dari Dinas Koperasi dan UMKM
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{100\% \text{ Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	98,39%	12,62%	18,81%	18,81%	
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (OSD)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,71%	5,62%	100,00%	100,00%	
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100,00%	4,07%	30,53%	30,53%	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	30,57%	30,57%	100,00%	100,00%	
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3,77%	11,70%			
		7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,08%	8,56%			
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kota $\frac{\text{Jumlah invesatasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kota}}{100\% \text{ Jumlah investasi tahun n-1 di kota)} \times$	-93,00%	-4,00%	61,85%	-14,88%	Sumbaer Data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Investasi tahun 2024					
			Investasi tahun 2023					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota			1	1	
		2	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal			1	1	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal					
			4 Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting					
			5 Kegiatan pameran penanaman modal					
			6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal					
			7 Konsultasi perijinan dan non perijinan penanaman modal					
			8 Penerbitan perijinan dan non perijinan penanaman modal					
			9 Laporan realisasi penanaman modal					
			10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota					
			11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN					
			12 Tersedianya data dan informasi perijinan dan non perijinan kab/kota					
19	Kepemudaan & Olahraga	1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota}}{100\% \times \text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota}}$	8,00%	65,00%	65,12%	63,50%	Sumber Data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan					
			2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan					
		2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota}}{100\% \times \text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota}}$	77,00%	76,00%	77,42%	67,00%	Sumber Data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda					
			2 Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan					

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		3 Peningkatan prestasi olah raga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	1	59	59	27	Sumber Data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			1 Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan					
			2 Jumlah penyelenggaraan even olahraga prestasi tingkat daerah					
20	Statistik	1 Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah OPD}}{100\%} \times$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika
			1 Tersedianya buku profil daerah					
			2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4 survei	8 survei	10 survei	10 survei	
			3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	8 survei	3 survei	3 survei	
			4 Jumlah surey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	4 survei	0,00%	6 survei	6 survei	
			5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	2	3 survei	3 survei	
			6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	94%	100%	100%	
			7 Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral	64,82%	81,25%	100,00%	100,00%	
		2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah OPD}}{100\%} \times$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sumber Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1 Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi $\frac{\text{Jumlah area penilaian}}{100\%} \times$	100,00%	37,00%	27,18%	30,68%	Sumber Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika
			1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			2 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2	43,57%	46,05%	76,76%	76,76%	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah					
			3 Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	12,86%	50,66%	4,86%	4,86%	
			4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22	Kebudayaan	1 Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)					
			2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)					
			3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)					
			4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)					
			5 Register cagar budaya (pendaftaran, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)					
			6 Perlindungan cagar budaya (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)					
			7 Layanan perijinan membawa cagar budaya keluar daerah dengan dukungan data					
			8 Pengembangan cagar budaya (penelitian, revitalisasi, adaptasi)					

Sumber Data dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan

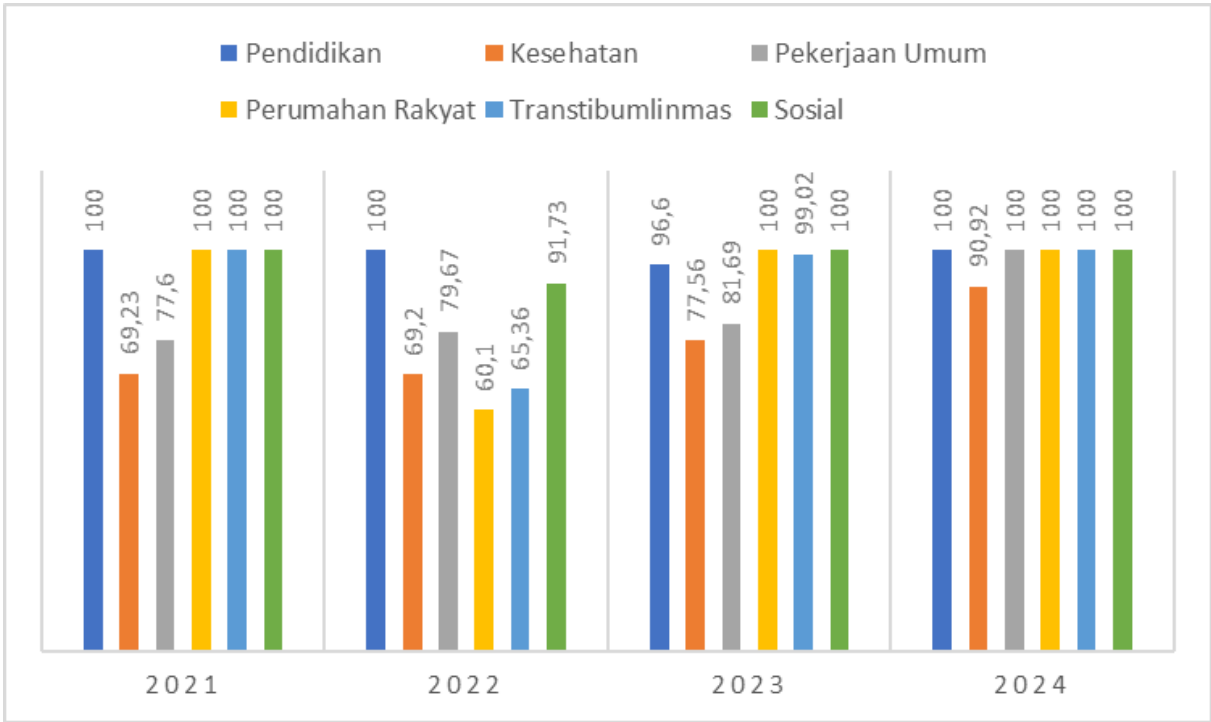
No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output		Capaian Kinerja				Ket
					2021	2022	2023	2024	
			9	Pemanfaatan cagar budaya (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)					
			10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum					
			11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan					
			12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota					
			13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya					
			14	Pembentukan tim ahli cagar budaya					
			15	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya					
			16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman					
			17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman					
			18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman					
			19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat					
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei / kajian kegemaran membaca masyarakat	4,44%	48,45%	42,39%	75,83%	Sumber Data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	62,58%	50,32%	17,37%	17,37%		
		2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4,44%	27,42%	41,94%	41,94%		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%		
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	24,80%	14,40%	41,60%	41,60%		
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12	12	63	63		
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum(\text{UPLM}/\text{ALM}) \times 100$			78,07%	84,70%	Sumber Data dari Dinas	

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
			1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya					Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa					
24	Kearsipan	1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Psl 40 dan 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	1. $T = (a + i + s + j)/4$	0,00%	0,00%	75,00%	55,00%	Sumber Data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			T= tingkat ketersediaan arsip					
			a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip					
			i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip					
			s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik					
			j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN					
			1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip					
			2 Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip					
			3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik					
			4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN					
		2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	75,00%	83,33%	83,33%	56,67%	Sumber Data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus / IKK Output	Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
		pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
			T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban					
			m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK					
			b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK					
			g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kota dengan NSPK					
			a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK					
			c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK					
			I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK					
			1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK					
			2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK					
			3 Penyelamatan arsip perangkat daerah yang di gabung dan atau dibubarkan yang sesuai NSPK					
			4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media uang dikelola oleh lembaga kearsipan yang sesuai NSPK					
			5 Pencariaa arsip statis yang pengelolaanya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencairan arsip yagn sesuai NSPK					
			6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK					

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2024

c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, dan Sosial Kota Bontang disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.28. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Bontang Tahun 2021-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bontang, 2025

Selama kurun waktu 2021 – 2024 capaian penerapan SPM di Kota Bontang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 rata-rata capaian SPM adalah sebesar 91.14 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 77.68 persen di tahun 2022. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 92.47 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 98.49 persen di tahun 2024. Penurunan capaian SPM pada tahun 2022 disebabkan oleh tidak tercapainya target penerapan SPM pada tahun tersebut karena terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi kondisi ini berhasil ditingkatkan karena perhatian serius dari pemerintah kota terhadap penerapan SPM di Kota Bontang. Amanah nasional bahwa, pelayanan dasar harus mencapai 100 persen, akan tetapi capaian Kota Bontang secara umum masih di bawah target tersebut. Untuk itu perlu perhatian terkait penerapan SPM agar pelayanan dasar tersebut dapat diberikan sesuai target yang ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam bidang pendidikan terdapat 3 jenis pelayanan yaitu: Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Untuk melihat capaian kinerja pelayanan dalam masing-masing programnya digambarkan oleh angka partisipasi kasar (APK) pendidikan formal dan non formal, persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal dan persentase guru yang memenuhi S1/D4. Dalam bidang kesehatan terdapat 11 jenis layanan, yaitu 5 jenis pelayanan dasar sudah tercapai antara lain: pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia lanjut dan penderita hipertensi.

Infrastruktur yang baik mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Perbaikan dan pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase, dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya, serta meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Pada bidang pekerjaan umum terdapat

2 jenis pelayanan dasar yaitu jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen. Sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik masih terkendala dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mengelola air limbah domestiknya terutama untuk daerah pesisir sehingga masih melakukan BABS yang langsung dibuang ke laut sehingga kegiatan pemucuan harus terus dilakukan secara masif dan terus-menerus.

Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah.

Keamanan dan ketertiban kota menjadi landasan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kelima jenis pelayanan dasar yang telah dilaksanakan sepenuhnya dan memperoleh status ketercapaian tercapai. Keberhasilan pelaksanaan ini mencerminkan komitmen dari pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang Trantibum Linmas. Dengan capaian ini, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari layanan yang diberikan, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan situasi darurat. Penting untuk menjaga konsistensi kinerja dan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Untuk pelayanan dasar Bidang Sosial, program pelayanan dasar yang diusung pada bidang ini adalah rehabilitasi sosial yang ditujukan khusus untuk penyandang disabilitas, penduduk terlantar, tuna sosial, dan korban bencana. Pelaksanaan program ini menunjukkan ketercapaian target yang optimal. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan layanan inklusif bagi masyarakat kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

2.1.4.5. Transformasi Digital

Transformasi digital di Kota Bontang semakin berkembang seiring dengan kemajuan infrastruktur telekomunikasi yang semakin baik. Digitalisasi telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga industri. Salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi digital adalah ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, termasuk akses internet yang stabil dan merata di seluruh wilayah kota. Dengan semakin luasnya cakupan jaringan telekomunikasi, implementasi teknologi digital dapat berjalan lebih optimal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kota Bontang telah berupaya meningkatkan kualitas layanan digital dengan mendorong penggunaan teknologi dalam layanan publik. Implementasi *e-government*, seperti pelayanan administrasi berbasis *online*, sistem informasi kependudukan digital, serta layanan kesehatan dan pendidikan daring, semakin menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Namun, tantangan utama dalam transformasi digital tetap berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang stabil dan aksesibilitas teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,

gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan informatika adalah menggunakan kekuatan teknologi digital untuk mengubah suatu data dan informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelayanan telekomunikasi dan informatika mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah dan mendukung kegiatan perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan data indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika signifikan dalam performa digitalisasi pemerintahan. Tahun 2020 mencatat indeks SPBE tertinggi kedua sebesar 3,28, namun terjadi penurunan tajam pada 2021 menjadi 2,11 penurunan ini dijelaskan oleh adanya perubahan pendekatan penilaian dan belum optimalnya pemenuhan indikator tata kelola dan TIK. Pemulihan mulai terjadi pada 2022 dengan indeks naik menjadi 2,70, dan berlanjut ke 2,83 pada 2023 meskipun nilai domain tata kelola menurun. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan paling kuat dengan indeks SPBE mencapai 3,39, didorong oleh perbaikan merata di aspek tata kelola (2,94) dan TIK (3,10). Secara analitis, tren ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi sistem sempat berdampak negatif, adaptasi terhadap metode evaluasi baru dan peningkatan kapabilitas digital akhirnya memberikan hasil positif. Fluktuasi nilai domain tata kelola mengindikasikan tantangan dalam membangun struktur regulasi dan manajemen yang solid, sementara aspek TIK cenderung lebih cepat pulih dan berkembang. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan strategis dan dukungan infrastruktur teknologi dalam meningkatkan kinerja SPBE secara berkelanjutan.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Selama periode tersebut, keuangan daerah mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, serta tantangan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada penerimaan dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan rata-rata setiap tahunnya. Pendapatan transfer, terutama yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, tetap menjadi komponen dominan dalam struktur keuangan daerah, yang menunjukkan ketergantungan Kota Bontang terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah tergambar melalui pengelolaan keuangan yang mencakup belanja operasi belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan, tetap menjadi komponen penting dalam mendukung operasional pemerintahan. Pengalokasian belanja modal diarahkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga dialokasikan untuk membiayai pengeluaran anggaran atas keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer dialokasikan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Bontang kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam rangka untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam rangka pelaksanaan

pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang termuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan secara efektif dan efisien dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk itu, strategi yang ditempuh dalam struktur APBD adalah dengan melakukan pengelolaan APBD secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

2.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024

Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja, pendapatan daerah dan pembiayaan. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dan kondisi aset pemerintah Kota Bontang, kondisi kewajiban pemerintah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Realisasi APBD Kota Bontang tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata realisasi 96,39 persen. Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata 106,89 persen. Sedangkan pada belanja daerah realisasi rata-rata 89,65 persen, lebih rendah dari realisasi pendapatan daerah karena adanya efisiensi belanja daerah dan beberapa kegiatan fisik yang belum selesai hingga akhir tahun. Lebih lanjut realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89. Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Daerah			
2020	1.374.543.490.116,38	1.530.119.291.669,68	111,32
2021	1.287.008.373.928,00	1.206.837.015.293,47	93,77
2022	1.566.982.158.682,00	1.797.913.747.493,54	114,74
2023	2.160.860.136.071,00	2.448.306.492.422,68	113,30
2024	2.780.738.111.584,00	2.817.668.394.556,87	101,33
Belanja Daerah			
2020	1.556.121.460.870,00	1.449.070.612.511,84	93,12
2021	1.549.715.333.138,00	1.360.004.880.879,28	87,76
2022	1.656.441.252.306,00	1.444.485.193.852,71	87,20
2023	2.532.272.667.551,00	2.214.458.110.841,32	87,45
2024	3.360.998.808.720,00	3.117.029.950.793,71	92,74
Penerimaan Pembiayaan			
2020	181.577.970.753,62	181.578.280.052,80	100,00
2021	262.626.959.210,00	262.626.959.209,94	99,86
2022	109.459.093.624,00	62.963.793.938,91	57,52
2023	396.412.531.480,00	396.412.315.554,74	100,00
2024	605.260.697.136,00	606.519.074.134,10	100,21
Pengeluaran Pembiayaan			
2020	-	-	0,00
2021	-	-	0,00
2022	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2023	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
2024	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

2.2.1.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua komponen hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain

Pendapatan Yang Sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Bontang mengalami fluktuasi pada tahun 2020-2024 dengan rata-rata realisasi sebesar 107,53 persen dan pertumbuhan rata-rata 1,60 persen per tahun. Realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19. Realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.90. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Nama Rekening	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	1.530.119.291.669,68	1.206.837.015.293,47	1.797.913.747.493,54	2.448.306.492.422,68	2.817.668.394.556,87
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.787.613.287,27	245.901.872.798,38	231.351.605.844,18	264.421.428.875,68	329.657.276.443,99
4.1.01	Pajak Daerah	100.014.196.975,55	116.883.388.141,45	134.539.080.196,35	118.218.692.064,81	150.018.177.986,95
4.1.02	Retribusi Daerah	4.490.742.059,25	2.937.297.589,01	3.959.817.810,90	2.961.878.370,00	107.833.253.435,03
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.561.257.068,55	2.747.614.686,87	3.847.655.621,23	3.487.431.779,72	4.137.180.321,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.721.417.183,92	123.333.572.381,05	89.005.052.215,70	139.753.426.661,15	67.668.664.700,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.239.620.186.468,00	923.312.589.535,00	1.488.368.997.077,95	2.116.330.370.652,00	2.412.503.986.437,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.125.793.185.220,00	785.213.265.680,00	1.300.948.692.401,95	1.857.072.687.433,00	2.051.183.904.273,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.827.001.248,00	138.099.323.855,00	187.420.304.676,00	259.257.683.219,00	361.320.082.164,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.711.491.914,41	37.622.552.960,09	78.193.144.571,41	67.554.692.895,00	75.507.131.675,88
4.3.01	Pendapatan Hibah	86.139.653.874,62	31.903.179.070,00	31.522.302.867,22	67.554.692.895,00	2.296.338.156,60
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.571.838.039,79	5.719.373.890,09	46.670.841.704,19	0,00	73.210.793.519,28

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

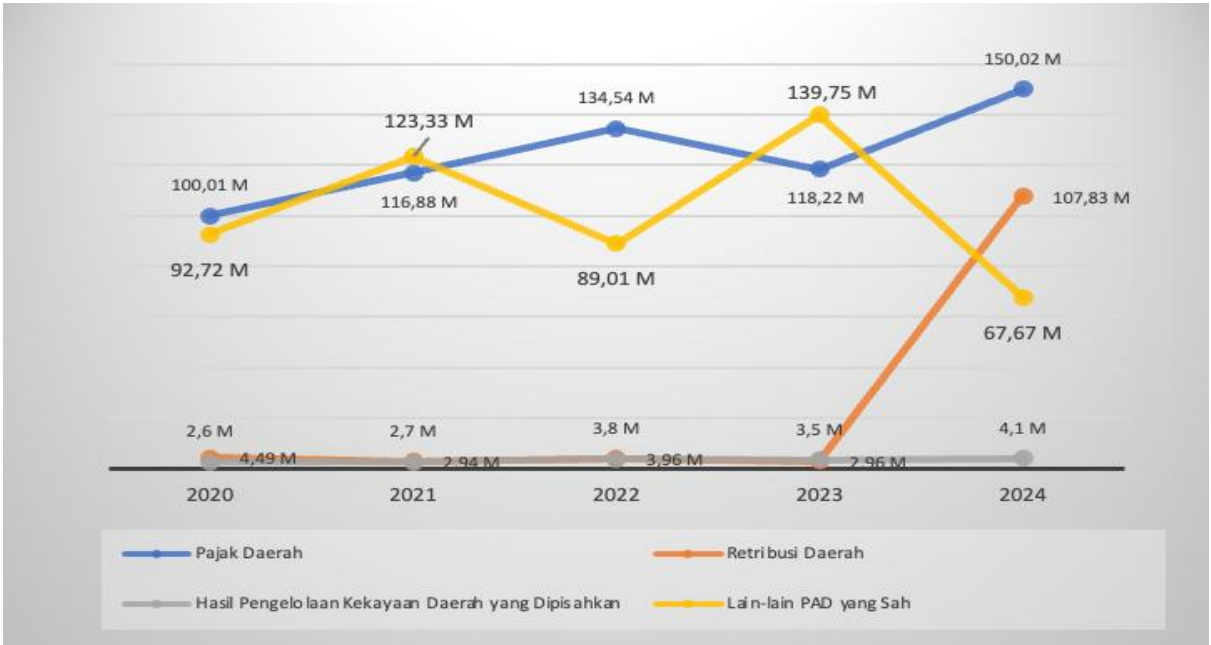
a. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 2020-2024, realisasi PAD menunjukkan perkembangan yang positif dengan pelampauan terhadap target dengan rata-rata realisasi PAD sebesar 114,24 persen terhadap target yang ditetapkan. Pajak daerah memberikan kontribusi lebih dari 50 persen dalam realisasi PAD Kota Bontang. Pada tahun 2021, retribusi daerah mengalami penurunan yang signifikan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid -19. Peningkatan terbesar. Peningkatan retribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebagai pengaruh ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, dari rincian realisasi retribusi jasa umum terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan karena perbedaan pencatatan pendapatan, yang sebelumnya Pendapatan BLUD pada Lain-lain PAD yang Sah, selanjutnya pada tahun 2024 dicatat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan penurunan signifikan karena adanya penghapusan pemungutan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Retribusi yang dihapuskan antara lain Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang karena bukan termasuk objek retribusi. Demikian juga dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan UU HKPD pada Pasal 187 huruf a dan huruf b, yang menyatakan bahwa retribusi masih dapat dipungut sesuai dengan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang masih tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak tanggal diundangkannya UU HKPD, sehingga pada tahun 2024 sudah tidak dilakukan pemungutan.

Pada komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 terealisasi sebesar 431 persen yang disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan bunga deposito dari Bank atas penempatan di beberapa Bank dan remunerasi yang merupakan imbal hasil atas penyimpanan dana milik pemda pada fasilitas TDF. Berikut adalah rincian target dan realisasi PAD Kota Bontang tahun 2020-2024. Tren pertumbuhan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, meskipun beberapa komponen PAD masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kontribusinya.



Gambar 2.29. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Kota Bontang, dengan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan 28,74 persen dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan oleh menurunnya dana bagi hasil pajak. Sedangkan pada 2022-2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang dipengaruhi oleh kenaikan bagi hasil sumber daya alam.

Pada tahun 2020, pendapatan transfer mencapai Rp 1.239,62 miliar, namun mengalami penurunan cukup tajam pada 2021 menjadi Rp 923,31 miliar. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kebijakan fiskal nasional, termasuk pengurangan dana transfer ke daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menyeimbangkan anggaran dalam kondisi krisis. Meski demikian, pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya menyebabkan pendapatan transfer kembali meningkat secara signifikan, mencapai Rp 1.488,37 miliar pada 2022 dan Rp 2.116,33 miliar pada 2023. Berdasarkan data sementara, pada 2024 angka ini diperkirakan naik lagi menjadi Rp 2.219,6 miliar, menunjukkan adanya tren positif dalam distribusi dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Provinsi menunjukkan tren kenaikan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,85 persen per tahun. Pada 2020, jumlah transfer dari provinsi ke Kota Bontang tercatat sebesar Rp 113,82 miliar, yang kemudian meningkat menjadi Rp 138,09 miliar pada 2021. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, tren kenaikan tetap berlanjut seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Pada 2022, pendapatan transfer dari provinsi meningkat tajam menjadi Rp 187,42 miliar, dan pada 2023 mencapai Rp 259,25 miliar. Berdasarkan data sementara, pada 2024 jumlahnya diperkirakan naik lagi menjadi Rp 265,49 miliar, yang menandakan bahwa distribusi dana bagi hasil pajak dari provinsi ke daerah semakin meningkat.

Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah di tingkat provinsi, yang secara langsung berdampak pada alokasi dana bagi hasil ke Kota Bontang. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi, didukung oleh kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor-sektor utama, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selain itu, kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih kuat juga memungkinkan peningkatan transfer dana dari provinsi, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi Kota Bontang dalam membiayai program pembangunan dan layanan publik. Dengan tren ini, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat sektor ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang lebih optimal. Perkembangan realisasi pendapatan transfer Kota Bontang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.30. Realisasi Pendapatan Tansfer Kota Bontang Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Kategori Lain-Lain Pendapatan yang Sah menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun, mencerminkan ketidakstabilan dalam komponen pendapatan ini. Pada 2020, kategori ini mencatat penerimaan sebesar Rp 90,71 miliar, tetapi mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 8,75 miliar pada 2023. Penurunan tajam ini kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya pendapatan hibah serta perubahan kebijakan dalam alokasi dana non-reguler dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal. Pada tahun 2024, lain-lain pendapatan mengalami kenaikan karena adanya bagi hasil pemegang ijin usaha pemegang pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara. Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.31. Perkembangan Pendapatan yang Sah 2020-2024
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

2.2.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran dan disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil

dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Analisa belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, belanja daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi merupakan pengeluaran daerah untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi merupakan belanja yang memiliki nilai manfaat kurang dari 1 tahun. Sedangkan belanja modal adalah belanja yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Sedangkan belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperlukan dalam kondisi tidak biasa atau mendesak.

Realisasi belanja daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91. Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Proyeksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA DAERAH	1.449.070.612.511,84	1.360.004.880.879,28	1.444.485.193.852,71	2.214.458.110.841,32	3.117.029.950.793,71
5.1	BELANJA OPERASI	1.055.975.889.776,84	1.132.943.995.543,28	1.191.545.901.239,71	1.551.892.075.448,32	2.064.462.920.368,71
5.1.01	Belanja Pegawai	501.023.768.383,00	514.312.207.543,00	548.463.610.192,11	571.593.451.714,00	709.969.282.885,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.489.477.225,84	559.932.670.303,28	600.544.251.142,60	867.525.260.190,32	1.257.207.393.171,71
5.1.05	Belanja Hibah	44.227.697.894,00	58.699.117.697,00	39.655.249.905,00	111.127.371.310,00	96.086.644.312,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	234.946.274,00	0,00	2.882.790.000,00	1.645.992.234,00	1.199.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	336.342.840.626,00	217.831.317.359,00	250.247.642.640,00	661.033.963.537,00	1.051.965.132.367,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	812.584.064,00	0,00	2.387.756.800,00	1.520.000.000,00	5.263.015.170,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.169.317.494,00	71.110.874.907,00	86.743.381.712,00	245.818.086.686,00	243.101.129.946,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.190.028.995,00	51.817.588.180,00	57.127.100.859,00	118.003.698.038,00	259.132.176.018,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.632.835.995,00	84.096.434.548,00	101.770.176.243,00	289.457.351.037,00	537.738.283.319,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.237.668.150,00	1.668.335.989,00	1.475.251.236,00	4.390.143.417,00	5.130.404.098,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	9.300.405.928,00	9.138.083.735,00	743.975.790,00	1.844.684.359,00	1.600.123.816,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	56.080.902.759,00	9.229.567.977,00	2.378.902.933,00	1.532.071.856,00	601.898.058,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	56.080.902.759,00	9.229.567.977,00	2.378.902.933,00	1.532.071.856,00	601.898.058,00
5.4	BELANJA TRANSFER	670.979.350,00	0,00	312.747.040,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	670.979.350,00	0,00	312.747.040,00	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	181.578.280.052,80	262.626.959.209,94	42.983.793.938,91	371.412.315.554,74	581.519.074.134,10
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.578.280.052,80	262.626.959.209,94	62.983.793.938,91	396.412.315.554,74	606.519.074.134,10
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	181.578.280.052,80	262.626.959.209,94	62.983.793.938,91	396.412.315.554,74	606.519.074.134,10
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

Tabel di atas menampilkan realisasi belanja daerah dari tahun 2020 hingga 2024 serta rata-rata pertumbuhannya. Secara keseluruhan, total belanja daerah mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,53 persen per tahun. Pada tahun 2020, total belanja daerah tercatat sebesar Rp 1.449,07 miliar, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi Rp 1.360 miliar. Namun, belanja daerah kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp 1.444,49 miliar pada 2022, Rp 2.214,46 miliar pada 2023, dan mencapai Rp 3.117,02 miliar pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, belanja daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Dalam periode 2020 hingga 2024, belanja operasi terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,09 persen. Pada tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp 1.056,65 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 1.132,94 miliar pada 2021. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun-tahun berikutnya, tren pertumbuhan tetap terjaga, dengan belanja operasi mencapai Rp 1.551,89 miliar pada 2023 dan diproyeksikan naik signifikan menjadi Rp 1.708,47 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pemerintah dalam membiayai program-program operasional serta layanan dasar kepada masyarakat.



Gambar 2.32. Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2020-2024

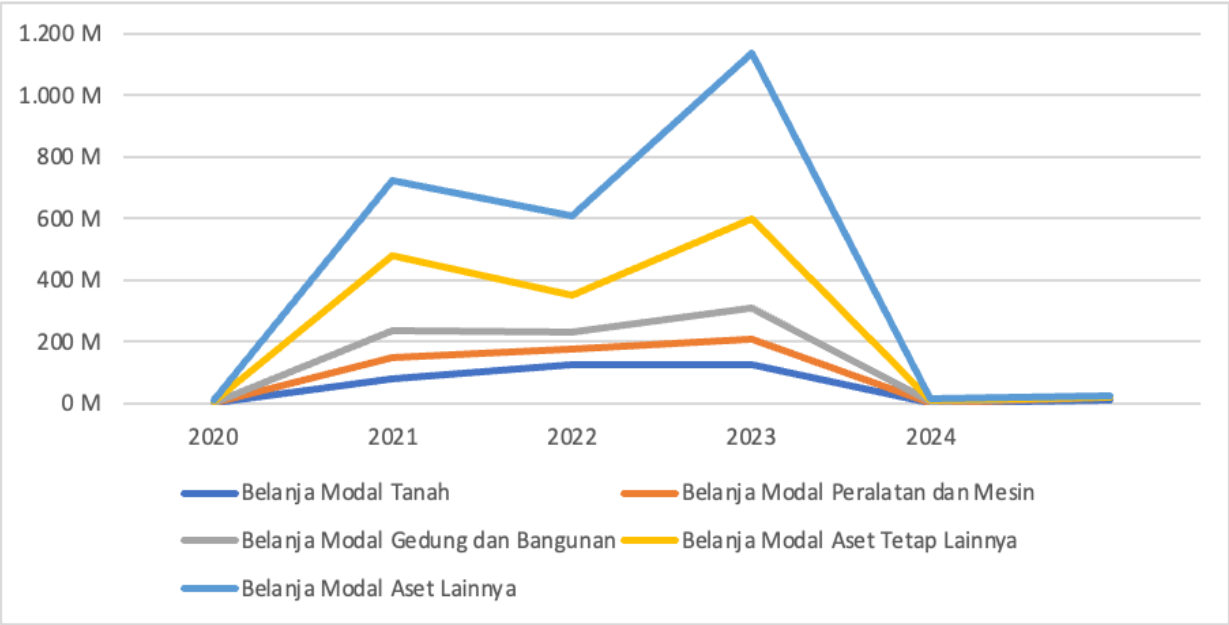
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

Peningkatan belanja operasi yang cukup signifikan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan belanja barang dan jasa mencerminkan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang lebih baik untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pertumbuhan belanja hibah yang tinggi menunjukkan adanya alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung organisasi sosial, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat yang berperan dalam pembangunan daerah. Sementara itu, pertumbuhan belanja bantuan sosial yang drastis pada 2023 dan 2024 menunjukkan respons pemerintah dalam meningkatkan jaring pengaman sosial,

terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Namun, meskipun peningkatan belanja operasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan yang efisien agar tidak membebani anggaran daerah dan tetap menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja investasi jangka panjang.

b. Belanja Modal

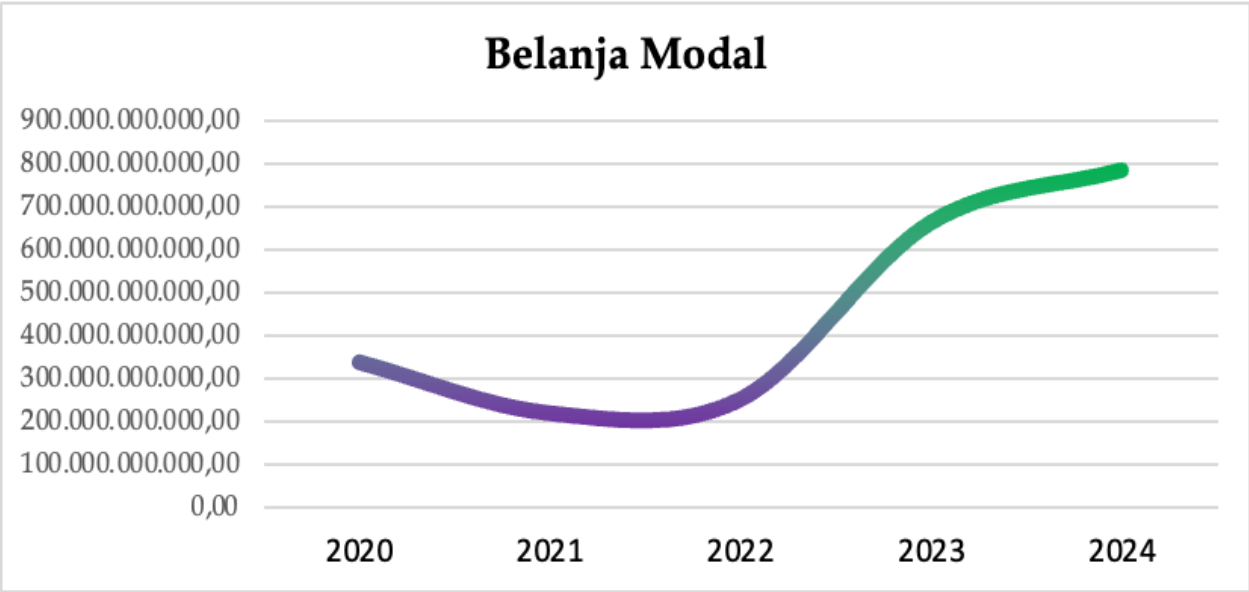
Belanja modal yang mencerminkan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan aset daerah tahun 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,40 persen per tahun. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp 336,34 miliar, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi Rp 217,83 miliar. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan penghematan akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah lebih memprioritaskan belanja operasional dan bantuan sosial. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, belanja modal kembali mengalami kenaikan bertahap, mencapai Rp 250,24 miliar pada 2022, kemudian melonjak tajam menjadi Rp 661,03 miliar pada 2023. Pada tahun 2024, belanja modal diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp 782,66 miliar, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Gambaran realisasi belanja modal dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.33. Perkembangan Belanja Modal Per Jenis Belanja Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Kenaikan signifikan dalam belanja modal terutama didorong oleh lonjakan belanja untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Pada tahun 2020, alokasi untuk kategori ini sebesar Rp 123,63 miliar, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, kemudian kenaikan bertahap hingga mencapai Rp 537, 74 miliar pada tahun 2024. Selain itu, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin juga mengalami kenaikan sejak tahun 2022 secara signifikan sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.



Gambar 2.34. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

Peningkatan belanja modal memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan berkontribusi langsung terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri. Kenaikan belanja pada peralatan dan mesin juga mencerminkan upaya modernisasi sarana dan prasarana pemerintah, yang dapat meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan adanya lonjakan belanja modal ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan efek multiplier dalam perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja dan peningkatan investasi sektor swasta. Namun, agar belanja modal lebih efektif, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat agar proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai target dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -59,34 persen per tahun. Pada tahun 2020, anggaran untuk belanja tidak terduga masih cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 56,08 miliar. Besarnya alokasi anggaran tahun 2020 dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah dalam penanganan Pande besar dipengaruhi oleh situasi darurat akibat pandemi COVID-19, yang mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan dana besar guna penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan langkah-langkah pemulihan ekonomi.

Tren penurunan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, anggaran belanja tidak terduga kembali turun menjadi Rp 2,37 miliar, menandakan semakin sedikitnya kebutuhan pengeluaran yang bersifat darurat. Pada 2023, anggaran ini tetap mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 1,53 miliar, dan pada tahun 2024, hanya tersisa Rp 622,94 miliar. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan anggaran pemerintah, di mana alokasi untuk kebutuhan darurat semakin ditekan, sementara belanja sektor lainnya seperti belanja operasi dan belanja modal mendapatkan porsi lebih besar.

Dampak dari penurunan belanja tidak terduga ini dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Dari sisi positif, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin efektif dalam mengelola keuangan daerah dengan meminimalisir ketergantungan pada anggaran darurat dan lebih mengutamakan

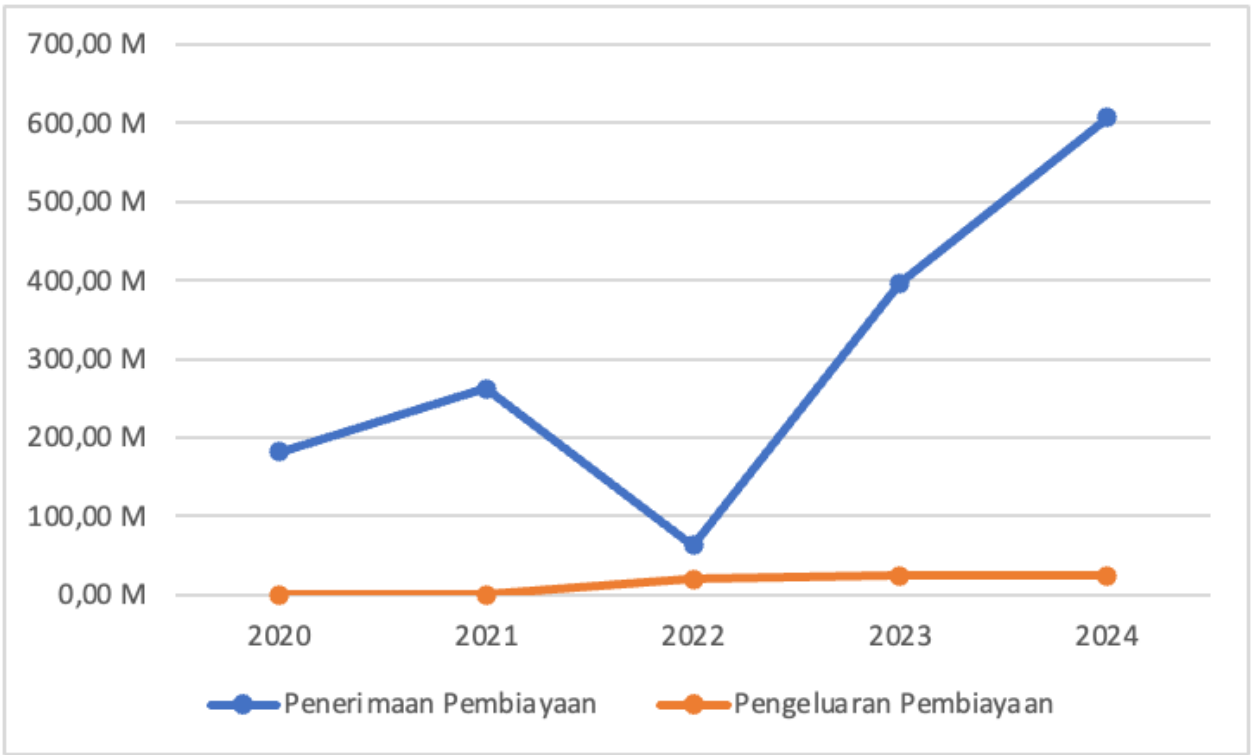
perencanaan yang matang dalam alokasi dana. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi lebih terarah dan risiko pemborosan anggaran dapat dikurangi. Namun, di sisi lain, alokasi yang terlalu kecil untuk belanja tidak terduga dapat menjadi tantangan jika terjadi kondisi darurat yang memerlukan respons cepat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi yang tidak terduga. Oleh karena itu, meskipun tren penurunan ini menunjukkan efisiensi, pemerintah tetap perlu memastikan bahwa cadangan dana darurat tetap memadai untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga di masa mendatang.

2.5.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2022-2024, Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal ke Bank Kaltimara dengan total nilai Rp 70 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2024 yang merupakan SILPA *audited* tahun 2023 sebesar Rp 606,5 miliar.

Gambar berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2.35. Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

d. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada

tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Bandung tahun 2020-2024 dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92. Neraca Daerah Kota Bontang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET	4.904.574.927.618,55	4.699.630.738.534,05	5.485.414.876.619,18	6.471.529.611.231,57	6.604.475.107.766,60	8,04
ASET LANCAR	412.278.753.354,30	233.690.463.641,98	527.630.606.587,84	790.946.839.841,86	466.220.854.921,34	56,35
INVESTASI JANGKA PANJANG	192.823.963.880,47	197.893.614.896,24	210.327.869.660,70	235.183.114.040,99	261.911.680.640,54	6,66
ASET TETAP	4.017.673.912.068,99	3.995.891.016.531,99	3.939.085.743.583,12	4.141.847.676.904,12	4.883.301.712.208,12	3,83
PROPERTI INVESTASI	-	-	36.732.340.272,00	36.732.340.272,00	36.732.340.272,00	-17,43
ASET LAINNYA	281.798.298.314,79	272.155.643.463,84	771.638.316.515,52	1.266.819.640.172,60	956.308.519.724,60	666,13
KEWAJIBAN	45.884.890.393,47	34.138.009.575,00	23.484.029.915,00	44.824.535.795,00	37.654.681.939,00	8,95
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.884.890.393,47	34.138.009.575,00	23.484.029.915,00	44.824.535.795,00	37.654.681.939,00	8,95
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	4.858.690.037.225,08	4.665.492.728.959,05	5.461.930.846.704,18	6.426.705.075.436,57	6.566.820.425.827,60	6,80
Ekuitas	4.858.690.037.225,08	4.665.492.728.959,05	5.461.930.846.704,18	6.426.705.075.436,57	6.566.820.425.827,60	6,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.904.574.927.618,55	4.699.630.738.534,05	5.485.414.876.619,18	6.471.529.611.231,57	6.604.475.107.766,60	6,79

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2025

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

Rata-rata pertumbuhan aset pemerintah mengalami peningkatan rata-rata 8,04 persen. Secara umum pertumbuhan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan properti investasi cenderung mengalami penurunan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kota Bontang rata-rata tumbuh 8,95 persen pada tahun 2020-2024.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Bontang selama periode 2020-2024 tumbuh rata-rata sebesar 6,80 persen. Rasio keuangan Pemerintah Kota Bontang berdasarkan neraca tahun 2020-2024 tersaji sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.93. Analisis Rasio Keuangan Kota Bontang Tahun 2020-2024

Rasio	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Solvabilitas (<i>Ratio Leverage</i>)					
a. Rasio Kewajiban terhadap aset	0,94	0,73	0,57	0,69	0,57
b. Rasio Kewajiban terhadap ekuitas	0,94	0,73	0,58	0,70	0,57
c. Rasio Likuiditas					
d. Rasio Lancar	8,91	8,99	6,85	32,22	17,65
e. Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	4,12	10,22	5,51	20,78	17,22
f. Rasio hutang terhadap aset (<i>debt to aseat</i>)	0,66	0,94	0,73	0,57	0,69
g. Rasio hutang terhadap ekutasi (<i>debt to equity</i>)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, 2024

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel 2.92 di atas dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis rasio yang digunakan yaitu rasio solvabilitas dan rasio likuiditas solvabilitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rasio Solvabilitas (*leverage ratio*), yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.
2. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban

lancarnya. Berdasarkan hasil Analisa sebagaimana tabel 2.92 di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang memiliki kondisi pendanaan yang sangat kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya. Rasio likuiditas ditunjukkan dengan rasio cepat (*quick ratio*) dan rasio total hutang terhadap total aset. *Quick ratio* tahun 2024 sebesar 1.721,81 artinya bahwa hutang lancar sebesar Rp100,00 dijamin dengan aktiva sebesar Rp1.721,81 yang menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (*debt to asset ratio*), menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva di mana semakin besar nilainya artinya semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan. Hal ini juga menunjukkan semakin besar risiko yang dihadapi oleh kreditur. Selama tahun 2020-2024 rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan bahwa hutang memiliki pengaruh yang kecil terhadap pembiayaan. Rasio solvabilitas ditunjukkan dengan rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Selama tahun 2020-2024, rasio solvabilitas menunjukkan bahwa nilai hutang masih jauh di bawah nilai aset yang dimiliki pemerintah, dan ekuitas.

2.2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk merumuskan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Bontang tahun 2026-2030 memperhatikan. Kondisi dan proyeksi ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang di dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh antara 5,3 – 8 persen (*yoy*), *Gross National Income* per kapita antara USD5.410-8000, dan inflasi diperkirakan berada dikisaran 2,5±1 persen. Sedangkan perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan tumbuh pada tahun 2025 pada kisaran 6,17–6,40 persen (*yoy*), serta pada tahun 2030 diperkirakan berada di kisaran 8,60–8,75 persen (*yoy*). Selanjutnya inflasi pada 2025-2030 diperkirakan berada di kisaran target 2,5+1 persen. Perekonomian Kota Bontang diperkirakan tumbuh pada tahun 2025 pada kisaran 6,17–6,40 persen (*yoy*) dan pada tahun 2030 diperkirakan berada dikisaran 8,60–8,75 persen (*yoy*). Selanjutnya inflasi pada 2025-2030 diperkirakan berada di kisaran target 2,5+1 persen.

Proyeksi pendapatan daerah merupakan instrumen strategis dalam mengelola perencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah secara efektif dalam jangka menengah. Melalui kerangka ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menjalankan program prioritas pembangunan. Selain itu proyeksi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan, menentukan skala prioritas belanja, serta mengantisipasi tantangan fiskal yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

Lebih lanjut, proyeksi pendapatan dan belanja daerah juga berfungsi sebagai pedoman dalam menggali sumber pendapatan alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam skema pembiayaan yang inovatif. Dengan diversifikasi sumber pendapatan ini, daerah akan lebih mandiri dalam membiayai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan kerangka pendanaan yang komprehensif dan berbasis data

yang akurat sangat diperlukan agar kebijakan fiskal daerah dapat berjalan secara efektif dan berdaya guna.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dibidang keuangan negara, asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pendapatan dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan untuk memperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah. Performa pendapatan daerah tahun 2020-2024, menjadi referensi untuk terus meningkatkan nilai pendapatan daerah yang diikuti dengan berbagai upaya untuk mencapainya.

Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Memperkuat penyusunan regulasi sebagai dasar kebijakan tata kelola peningkatan PAD;
4. Memperkuat basis data objek pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam menentukan potensi pajak dan retribusi daerah;
5. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi dan pelaporan pajak/retribusi daerah;
6. Mendorong pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah;
7. Revitalisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset milik pemerintah daerah agar dapat menarik minat investor;
8. Melakukan evaluasi kinerja BUMD untuk mendorong keseimbangan antara keuntungan dividen dengan penyertaan modal yang diberikan;
9. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan literasi dan pemberian penghargaan dan sanksi; dan
10. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah;

b. Pendapatan Transfer

Arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer, baik transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah, dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan dan penyaluran pendapatan transfer;
2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam;

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Arah kebijakan dalam meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:

1. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait dengan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara dalam pembayaran laba bersih kepada provinsi.

Adapun proyeksi pendapatan Kota Bontang tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.94. Proyeksi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2025-2029

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
3	4	5	6	7		
4	PENDAPATAN DAERAH	2.857.046.266.261,00	2.990.512.749.674,00	3.106.695.684.630,00	3.237.831.824.704,00	3.316.489.440.144,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	371.067.584.075,00	384.019.806.794,00	396.834.937.023,00	410.500.817.121,00	425.873.616.925,00
4.1.01	Pajak Daerah	226.975.518.000,00	236.228.746.000,00	245.765.805.000,00	255.763.865.000,00	267.273.241.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.207.731.000,00	1.307.731.000,00	1.407.731.000,00	1.646.011.000,00	1.720.082.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	8.662.437.000,00	8.788.206.000,00	8.913.975.000,00	9.039.744.000,00	9.446.533.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.184.000,00	2.282.000,00	2.385.000,00	2.492.000,00	2.605.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	300.000.000,00	313.500.000,00
4.1.01.15	PBB-P2	62.060.154.000,00	63.949.102.000,00	65.838.051.000,00	67.727.000.000,00	70.774.715.000,00
4.1.01.16	BPHTB	10.603.527.000,00	11.080.686.000,00	11.579.317.000,00	12.100.386.000,00	12.644.903.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	82.098.894.000,00	85.913.822.000,00	89.890.267.000,00	94.035.495.000,00	98.267.092.000,00
4.1.01.20	Opsen PKB	37.109.309.000,00	38.779.227.000,00	40.524.293.000,00	42.347.886.000,00	44.253.541.000,00
4.1.01.21	Opsen BBNKB	25.031.282.000,00	26.157.690.000,00	27.334.786.000,00	28.564.851.000,00	29.850.270.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	128.755.207.550,00	132.496.030.803,00	135.396.726.281,00	138.677.736.238,00	142.144.679.644,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	126.443.700.000,00	129.916.278.698,00	132.609.100.066,00	135.364.354.722,00	138.748.463.590,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.945.757.550,00	2.197.543.355,00	2.388.218.071,00	2.896.000.006,00	2.968.400.006,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	365.750.000,00	382.208.750,00	399.408.144,00	417.381.510,00	427.816.048,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.820.792.985,00	5.966.312.810,00	6.115.470.631,00	6.268.357.396,00	6.425.066.331,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.820.792.985,00	5.966.312.810,00	6.115.470.631,00	6.268.357.396,00	6.425.066.331,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.516.065.540,00	9.328.717.181,00	9.556.935.111,00	9.790.858.487,00	10.030.629.950,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	71.750.000,00	73.543.750,00	75.382.344,00	77.266.902,00	79.198.575,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	903.499.132,00	926.086.610,00	949.238.776,00	972.969.745,00	997.293.989,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.640.886.852,00	6.806.909.025,00	6.977.081.750,00	7.151.508.794,00	7.330.296.514,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	102.500.000,00	105.062.500,00	107.689.063,00	110.381.289,00	113.140.821,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	503.059.750,00	515.636.244,00	528.527.150,00	541.740.329,00	555.283.837,00

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
		NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6	7
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.537.500,00	1.575.938,00	1.615.336,00	1.655.719,00	1.697.112,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	67.832.306,00	69.528.114,00	71.266.317,00	73.047.975,00	74.874.174,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.025.000.000,00	630.375.000,00	646.134.375,00	662.287.734,00	678.844.928,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.457.419.093.324,00	2.577.678.839.296,00	2.680.376.466.433,00	2.797.168.594.380,00	2.859.735.024.686,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.125.707.033.475,00	2.190.173.977.950,00	2.236.933.983.553,00	2.297.640.049.428,00	2.353.968.266.110,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.765.979.404.875,00	1.810.128.889.997,00	1.855.382.112.247,00	1.901.766.665.053,00	1.949.310.831.679,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	280.904.785.225,00	287.927.404.856,00	295.125.589.977,00	302.503.729.726,00	310.066.322.970,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.822.843.375,00	92.117.683.097,00	86.426.281.329,00	93.369.654.649,00	94.591.111.461,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	331.712.059.849,00	387.504.861.346,00	443.442.482.880,00	499.528.544.952,00	505.766.758.576,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	231.712.059.849,00	237.504.861.346,00	243.442.482.880,00	249.528.544.952,00	255.766.758.576,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	200.000.000.000,00	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.559.588.862,00	28.814.103.584,00	29.484.281.174,00	30.162.413.203,00	30.880.798.533,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.559.588.862,00	28.814.103.584,00	29.484.281.174,00	30.162.413.203,00	30.880.798.533,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.924.000.000,00	8.693.000.000,00	8.868.000.000,00	9.037.000.000,00	9.235.000.000,00
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	18.660.588.862,00	19.127.103.584,00	19.605.281.174,00	20.095.413.203,00	20.597.798.533,00
4.3.03.05	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	975.000.000,00	994.000.000,00	1.011.000.000,00	1.030.000.000,00	1.048.000.000,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.2.2.2. **Proyeksi Belanja Daerah**

Belanja daerah mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Pada tahun 2026-2030 belanja daerah diproyeksikan untuk membiayai belanja wajib mengikat, pelaksanaan SPM, pelaksanaan program prioritas daerah termasuk di dalamnya program unggulan daerah. Belanja wajib merupakan belanja daerah yang diprioritaskan untuk pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus seperti gaji, pemeliharaan kantor.

Proyeksi belanja operasi Kota Bontang pada periode 2026-2030 menunjukkan adanya dinamika perubahan persentase pada setiap komponen belanja. Rincian proyeksi belanja daerah Kota Bontang tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95. Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029

KODE	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
		NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	3.057.046.266.261,00	3.136.512.749.674,00	3.252.695.684.630,00	3.383.081.824.704,00	3.466.489.440.144,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.838.289.183.252,00	1.876.196.069.175,00	1.922.695.138.233,00	1.970.758.731.506,00	2.021.058.857.732,00
5.1.01	Belanja Pegawai	828.266.047.708,00	914.995.687.386,00	937.672.660.414,00	961.112.630.941,00	985.643.328.627,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.133.514.593,00	890.568.111.035,00	912.639.678.489,00	935.453.873.750,00	959.329.677.102,00
5.1.03	Belanja Hibah	71.969.620.951,00	66.527.696.137,00	68.176.498.193,00	69.880.776.430,00	71.664.359.483,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	23.920.000.000,00	4.104.574.617,00	4.206.301.137,00	4.311.450.385,00	4.421.492.520,00
5.2	BELANJA MODAL	1.212.757.083.009,00	1.253.816.680.499,00	1.323.000.546.397,00	1.404.323.093.198,00	1.436.430.582.412,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	48.177.156.625,00	39.829.152.587,00	48.782.096.630,00	59.757.972.335,00	61.283.188.740,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.898.117.837,33	286.078.360.673,00	361.160.790.286,00	385.733.895.354,00	393.940.425.280,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	283.455.181.574,33	281.898.134.935,00	353.605.907.876,00	372.960.042.349,00	382.033.376.530,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	724.556.560.272,33	640.983.724.360,00	554.299.848.400,00	580.158.490.819,00	593.375.793.970,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	562.946.700,00	3.058.552.266,00	3.134.354.489,00	3.493.388.754,00	3.556.301.269,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.107.120.000,00	1.968.755.678,00	2.017.548.716,00	2.219.303.587,00	2.241.496.623,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.2.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam rangka perencanaan tahun 2026-2030, kebijakan Penerimaan Pembiayaan utamanya bersumber pada perkiraan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Secara rata-rata proyeksi proporsi SiLPA terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja diproyeksikan sebesar Rp150.000.000.000,-miliar pada tahun 2026-2030.

Komponen pengeluaran pembiayaan direncanakan dialokasikan sebesar Rp.12.500.000.000,00 untuk alokasi penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Bontang (Perseroda). Skema rencana penambahan penyertaan modal dianggarkan pada tahun 2026-2028. Kebijakan penyertaan modal kepada BPR ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu kebijakan ini sebagai perluasan akses keuangan kepada masyarakat pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Pada tahun 2026 juga direncanakan akan dilakukan penyertaan modal barang milik daerah dalam bentuk fasilitas jaringan gas kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebesar Rp.15.714.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah). Penyertaan modal ini perlu dilakukan karena adanya pemanfaatan jaringan induk distribusi kapasitas sedang yang merupakan aset Pemerintah Kota Bontang dan dimanfaatkan oleh PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dalam memberikan layanan jaringan gas kepada masyarakat. Uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.96. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000.000,00	154.000.000.000,00	154.000.000.000,00	154.750.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.750.000.000,00
6.2.01	Pengeluaran Pembiayaan	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.750.000.000,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.2.2.4. **Proyeksi APBD**

Berdasarkan hasil analisa proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2026-2030 , maka proyeksi APBD dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2026-2030, sebagai berikut:

Tabel 2. 97. Proyeksi APBD Daerah Tahun 2026-2030

KODE	URAIAN	2026 NILAI	2027 NILAI	2028 NILAI	2029 NILAI	2030 NILAI
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2,857,046,266,261.00	2,990,512,749,676.36	3,106,695,684,629.61	3,237,831,824,704.25	3,316,489,440,144.69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	371,067,584,075.00	384,019,806,793.76	396,834,937,021.07	410,500,817,121.75	425,873,616,924.77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.457.419.093.324,00	2.577.678.839.296,00	2.680.376.466.433,00	2.797.168.594.380,00	2.859.735.024.686,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.559.588.862,00	28.814.103.584,00	29.484.281.174,00	30.162.413.203,00	30.880.798.533,00
5	BELANJA DAERAH	3.057.046.266.261,00	3.136.512.749.674,00	3.252.695.684.630,00	3.383.081.824.704,00	3.466.489.440.144,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.838.289.183.252,00	1.876.196.069.175,00	1.922.695.138.233,00	1.970.758.731.506,00	2.021.058.857.732,00
5.2	BELANJA MODAL	1.212.757.083.009,00	1.253.816.680.499,00	1.323.000.546.397,00	1.404.323.093.198,00	1.436.430.582.412,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.000.000.000,00	154.000.000.000,00	154.000.000.000,00	154.750.000.000,00	150.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.750.000.000,00	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara pencapaian pembangunan dengan target yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi daerah. Tujuan utama dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program pembangunan di masa lalu. Sementara itu, isu strategis daerah merupakan kondisi yang perlu diperhatikan karena dampaknya dapat mempengaruhi pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan daerah pada masing-masing bidang urusan dan diselaraskan dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang, maka permasalahan pembangunan di Kota Bontang dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, meliputi sumber daya manusia, perekonomian, tata pemerintahan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

2.3.1.1. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi prioritas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang menggambarkan capaian pembangunan SDM yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita.

b. Akses dan Kualitas Pendidikan yang Belum Optimal

Di beberapa sekolah, masih banyak yang kekurangan sarana dan prasarana dasar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, distribusi guru berkualitas juga belum merata, sehingga ada kesenjangan antara sekolah di pusat kota dan wilayah terpencil. Hal ini mengakibatkan siswa di daerah pinggiran kurang mendapatkan pendidikan yang optimal. Pemerintah Kota Bontang telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa pendidikan tinggi dan peningkatan sarana belajar. Namun, tantangan lain adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam orang tua dalam mendukung pendidikan anak juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan program pendidikan.

Tabel 2.98. Permasalahan Bidang Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akses dan Kualitas pendidikan yang belum optimal	Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas hingga jenjang pendidikan tinggi	- Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun, yakni 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan secara merata, antara lain gedung sekolah yang layak termasuk fasilitas pembelajaran lainnya terutama di pesisir dan pulau-pulau - Minimnya transportasi pendukung bagi siswa di wilayah terpencil - Kurangnya pengembangan sistem manajemen layanan pendidikan melalui penguatan implementasi muatan dan kurikulum pembelajaran - Keterbatasan akses terhadap teknologi pembelajaran - Kurangnya bahan ajar dan buku pelajaran yang memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Jumlah dan Distribusi guru yang tidak merata antara pusat kota dan daerah terpencil - Rendahnya jumlah guru yang memiliki sertifikasi profesional - Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru - Kurangnya insentif bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil.
		Kurangnya kemampuan dasar literasi, dan numerasi	- Kurangnya pengembangan bahan ajar kontekstual dan media pembelajaran inovatif - Kurangnya kampanye literasi dan numerasi daerah
		Kurang optimalnya kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri untuk pengembangan program vokasi	- Kurangnya kerja sama antara sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan industri dalam penyelarasan kurikulum dan program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja - Kurangnya program pelatihan bersertifikasi bekerjasama dengan industri, BUMN, dan perguruan tinggi - Kurangnya pengembangan program vokasi di kota Bontang
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	- Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan - Faktor ekonomi yang membuat anak harus bekerja daripada bersekolah - Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pendidikan - Keterbatasan program pendidikan berbasis komunitas - Rendahnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

b. Permasalahan Bidang Kesehatan di Kota Bontang

Permasalahan kesehatan di Kota Bontang menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi beberapa perbaikan, masih banyak aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi khususnya untuk penanganan *stunting*, gizi masyarakat, serta pencegahan penyakit menular perlu terus diperkuat dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan kesehatan tidak hanya terfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan yang lebih luas. Dengan pendekatan holistik dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kualitas layanan kesehatan di Kota Bontang dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.99. Permasalahan Bidang Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akses dan Kualitas layanan kesehatan belum optimal	Kurangnya kemudahan akses layanan kesehatan	- Kurangnya kemudahan akses kesehatan bagi seluruh warga terutama warga pesisir dan pulau-pulau kecil. - Rendahnya upaya kesehatan Masyarakat - Kurangnya penyediaan pembiayaan kesehatan gratis melalui <i>universal health coverage</i> - Kurangnya pengembangan sistem manajemen layanan Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Tingginya prevalensi stunting		- Kurangnya keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak, terutama pada wilayah prevalensi stunting tinggi - belum optimalnya aksi konvergensi percepatan penurunan stunting
		Kurangnya kualitas layanan kesehatan	- Kurangnya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar - Rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat - kurangnya penyediaan layanan kesehatan sesuai standar
		Kurangnya asupan gizi yang memadai	- Bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif yang cukup - Kurangnya akses dan konsumsi pangan bergizi yang terjangkau
		Kesehatan balita terganggu (penyakit infeksi berulang)	- Tingginya insiden infeksi penyakit pernafasan akut (ISPA) atau penyakit menular lainnya - Imunisasi tidak lengkap - Kurangnya kebersihan diri dan lingkungan - Kurangnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia di bawah 5 tahun
		Kondisi kesehatan ibu kurang optimal sebelum dan selama kehamilan	- Ibu hamil mengalami kurang energi kronis (KEK) atau anemia; - Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan reproduksi masih rendah - Jarak kehamilan terlalu dekat - Kurangnya asupan gizi saat hamil dan menyusui - Kehamilan usia muda
		Sanitasi dan higiene yang buruk	- Masih adanya praktek buang air besar sembarangan (BABS) - Akses terhadap jamban sehat terbatas - Akses terhadap air bersih yang aman dan layak terbatas - Praktik cuci tangan pakai sabun (CPTS) yang belum membudaya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

c. Permasalahan Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga

Sumber masalah ini berakar pada beberapa faktor saling terkait. Layanan dasar bidang sosial bagi keluarga miskin dan rentan (PPKS) masih sangat terbatas, mengakibatkan banyak keluarga yang tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Minimnya keterampilan dan bimbingan yang diberikan kepada warga miskin membuat mereka sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Tabel 2.100. Permasalahan Bidang Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Perlindungan sosial dan ketahanan keluarga	Perluasan dan Penguatan perlindungan sosial yang kurang memadai	- Terbatasnya layanan dasar bidang sosial bagi PPKS - Rendahnya keterampilan dan bimbingan bagi warga miskin - Kurangnya kolaborasi kerjasama multipihak dalam pengendalian judi dan penyalahgunaan narkoba
		pengarusutamaan gender, pemuda, penyandang disabilitas dan	- Perencanaan dan penganggaran belum memperhatikan perspektif gender, kelembagaan PUG belum memadai, partisipasi perempuan dalam pembangunan rendah, dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perlindungan anak yang rendah	perlindungan perempuan dan kelompok renta masih kurang
		Belum optimalnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	- Tidak terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), keterampilan, dan akses pembiayaan - Kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Permasalahan kesejahteraan masyarakat ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Intervensi yang dibutuhkan harus mencakup peningkatan layanan dasar sosial, penyediaan pelatihan keterampilan yang relevan dan berkelanjutan, akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, penguatan kolaborasi multipihak untuk mengatasi masalah sosial, dan integrasi perspektif gender, pemuda, penyandang disabilitas, dan perlindungan anak dalam semua aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

d. Tingginya Angka Pengangguran

Pengangguran menjadi masalah serius di Kota Bontang, terutama di kalangan angkatan kerja muda. Angka pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan lapangan kerja yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pencari kerja dan kurangnya informasi bagi pencari kerja.

Tabel 2.101. Permasalahan Tingginya Angka Pengangguran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya angka pengangguran	Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas dibandingkan jumlah pencari kerja	- Dominasi sektor migas yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal - Belum berkembangnya sektor industri lain sebagai alternatif lapangan kerja - Ketatnya persaingan tenaga kerja dengan pekerja dari luar daerah - Keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru yang inklusif - Rendahnya dukungan terhadap pengembangan UMKM dan wirausaha - Kurangnya akses peluang kerja bagi warga miskin dan pekerja rentan
		keterbatasan kapasitas kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja	- Masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan pasar kerja - Kurangnya pelatihan, keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar - Kesadaran akan pentingnya sertifikasi masih rendah
		Inefisiensi informasi pasar tenaga kerja	- kurangnya platform atau mekanisme yang transparan dan efektif untuk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			menghubungkan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia - Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja secara luas - Terbatasnya sistem bursa kerja yang efektif - Minimnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja - Kurangnya pendampingan bagi pencari kerja dalam proses melamar pekerjaan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Selain itu, rendahnya partisipasi dalam pelatihan keterampilan menyebabkan banyak pencari kerja tidak siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya akses informasi mengenai lowongan pekerjaan dan keterbatasan jaringan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan. Untuk mengatasi pengangguran, perlu adanya program intervensi langsung, seperti penguatan *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan program magang dan pelatihan kerja yang lebih intensif. Selain itu, pelaksanaan bursa kerja secara rutin dapat membantu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja secara langsung. Peningkatan program kewirausahaan juga menjadi solusi jangka panjang. Dengan memberikan keterampilan berwirausaha dan akses permodalan, angkatan kerja muda dapat menciptakan peluang kerja baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

2.3.1.2. Permasalahan Perekonomian

Perekonomian Kota Bontang menghadapi berbagai tantangan, terutama ketergantungan pada sektor migas, ketimpangan ekonomi, dan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Pembahasan berikut akan menguraikan secara mendalam permasalahan ini serta langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

- a. Ketergantungan yang tinggi pada sektor migas dan potensi hilirisasi yang belum dikembangkan

Sektor migas merupakan pilar utama perekonomian Kota Bontang. Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan dengan migas adalah sebesar 76,33. Tingginya kontribusi sektor pengolahan ini menyebabkan perekonomian kota menjadi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, sehingga setiap perubahan pada sektor migas sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk mengurangi dominasi sektor migas melalui diversifikasi ekonomi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan potensi hilirisasi yang belum tergarap secara maksimal, seperti turunan dari industri dari petrokimia dan oleokimia. Selain itu sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti UMKM, pariwisata, dan jasa perlu dilakukan penguatan, di mana sektor-sektor ini tidak hanya akan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian, Bontang dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendorong tumbuhnya usaha lokal. Selain itu, promosi potensi wisata dan penguatan ekonomi berbasis komunitas dapat meningkatkan daya tarik Bontang sebagai destinasi wisata. Sektor jasa keuangan dan asuransi

juga berpeluang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan. Dengan kebijakan yang tepat, Bontang dapat memperluas basis ekonominya sehingga tidak lagi hanya bergantung pada migas, melainkan memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dan tangguh menghadapi tantangan global.

Tabel 2.102. Permasalahan Ketergantungan pada Sektor Migas dan Hilirisasi yang Belum Dikembangkan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya daya ungkit sektor non migas terhadap PDRB Kota Bontang	Belum optimalnya kinerja dan penggalian potensi sektor non migas	- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keterampilan - Lingkungan Investasi yang Kurang Menarik untuk Sektor Non-Migas - Kurangnya Inovasi dan Pengembangan Produk - Minimnya Promosi dan akses Pemasaran - Infrastruktur dan ekosistem industri yang masih terpusat pada sektor migas - Minimnya ketersediaan bahan baku tertentu
		Belum optimalnya peran lembaga usaha pendukung ekonomi lokal	- Keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan - Minimnya peran inkubator bisnis dalam mendukung potensi ekonomi lokal
2	Potensi hilirisasi yang belum dikembangkan	Minat investor belum mengarah pada hilirisasi di luar sektor industri pengolahan	- Tingginya harga bahan baku untuk menunjang proses hilirisasi - Minimnya informasi potensi investasi daerah - Persaingan regional yang kompetitif sehingga investor lebih memilih daerah lain - Belum terjalinnya kerjasama antar daerah untuk pengembangan industri pengolahan
		Belum optimalnya pengembangan kawasan industri strategis	- Belum mantapnya infrastruktur, dan akses yang baik ke kawasan peruntukan industri serta sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan peruntukan industri - Kurangnya perkembangan industri di kawasan peruntukan industri

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Ketersediaan bahan baku yang melimpah dan lahan yang dialokasikan khusus untuk kawasan industri menjadi modal penting dalam proses hilirisasi. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan internal. Salah satunya adalah ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air masih membutuhkan perhatian serius untuk menunjang aktivitas manufaktur secara berkelanjutan.

Beberapa potensi hilirisasi yang belum tergarap maksimal antara lain seperti sektor perikanan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat hilirisasi perikanan nasional, khususnya pada industri manufaktur pengalengan ikan (Cakalang, Tongkol, dan Tuna). Ketersediaan bahan baku melimpah dari hasil tangkapan nelayan lokal merupakan modal utama. Dari data yang ada produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai 22.143 ton, yang sebagian besarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga daerah sekitar seperti Samarinda dan Kutai Timur, namun untuk mengembangkan potensi hilirisasi perikanan, salah satu tantangan internal

adalah ketergantungan pada bahan baku impor, seperti *tinplate*, yang membuat biaya produksi meningkat akibat bea masuk.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bontang juga menunjukkan potensi besar dengan produk-produk lokal seperti pempek, makanan khas, dan batik. Dengan jumlah pelaku UMKM tahun 2024 sebanyak 21.670, sektor UMKM merupakan salah satu fondasi utama perekonomian lokal Kota Bontang. Pengembangan UMKM ini didukung oleh program CSR dari industri besar. Salah satu kendala utama pengembangan sektor UMKM yaitu ketersediaan pasar, di mana dari jumlah UMKM yang ada berbanding jumlah penduduk, daya saing UMKM Kota Bontang berada pada titik jenuh sehingga penguatan ekosistem digital UMKM masih menjadi perhatian utama.

Selain industri, Kota Bontang juga memiliki peluang besar di sektor jasa, terutama pariwisata dan perhotelan, yang dapat menunjang promosi wisata dan membuka peluang usaha baru bagi UMKM. Dari data yang ada, jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2024 sebanyak 294.531 orang, sementara jumlah hotel di Kota Bontang sebanyak 27 hotel yang diantaranya hanya 3 hotel berbintang. Hal ini tentu saja menjadi peluang besar bagi investor untuk pengembangan jasa perhotelan untuk mengakomodir kebutuhan akomodasi bagi wisatawan yang datang.

b. Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Sektor industri pengolahan dan jasa perusahaan merupakan sektor basis di Bontang. Ketergantungan pada sektor ini dapat menyebabkan kurangnya pengembangan sektor lain, yang berpotensi membatasi peluang pendapatan bagi masyarakat di luar sektor unggulan tersebut. Pada tahun 2024 indeks ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kota Bontang tercatat sebesar 0,330 atau mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,031 poin. Dalam interpretasi Gini Ratio, penurunan nilai mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin rendah (lebih merata), sedangkan kenaikan nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, hingga kenaikan ini dapat diindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin tinggi. Sebagai contoh, jumlah upah minimum Kota Bontang di sektor formal tahun 2025 sebesar Rp3.780.012, sementara bagi pekerja yang bekerja di sektor industri pengolahan khususnya migas angka tersebut dapat naik hingga berkali lipat.

Tabel 2.103. Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat	Dominasi sektor informal dengan pendapatan rendah	- Adanya perbedaan standarisasi pendapatan - Ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan pasar kerja - Keterbatasan kapabilitas sektor informal dalam memberikan upah yang setara dengan UMK bagi pekerjaanya

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Secara umum beberapa faktor yang relevan yang menjadi penyebab kesenjangan pendapatan di Kota Bontang adalah adanya konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tertentu (misalnya industri pengolahan seperti gas alam cair), di mana daerah atau individu yang terlibat langsung dalam sektor tersebut memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan SDM yang tidak merata juga dapat berkontribusi pada kesenjangan pendapatan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Bontang masih berpendidikan SMA/Sederajat yaitu 5.334 orang atau 62,77 persen. Hal ini dapat membatasi akses ke pekerjaan berpendapatan tinggi, di mana kebutuhan tenaga kerja lebih mengarah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah menjalankan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pencari kerja, sosialisasi lowongan pekerjaan, dan pembangunan kerja sama yang lebih luas untuk menciptakan peluang kerja. Selain itu, dari sisi pengelolaan APBD, Pemerintah berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta pengambilan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses terhadap peluang ekonomi dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh yang akan berdampak pada pembangunan yang lebih inklusif di Kota Bontang.

c. Belum Optimalnya Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu prioritas strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Daya saing tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi semata, melainkan juga dari kekuatan sosial, budaya, sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks ini, peningkatan daya saing daerah diarahkan melalui tiga pilar utama kebijakan: pengaruh globalisasi dan modernisasi, kurangnya regenerasi pelestari budaya, serta kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah.

Tabel 2.104. Permasalahan Belum Optimalnya Daya Saing Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya Pengaruh globalisasi dan modernisasi	Pelestarian kebudayaan berbasis kearifan lokal belum maksimal	- Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana penunjang kebudayaan - Masih terbatasnya cakupan Promosi seni dan budaya - Keterbatasan kapasitas pelaku seni dan budaya - Minimnya Indikasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan berbasis kearifan lokal - Belum ditetapkannya cagar budaya dan warisan benda tak benda - Penyelenggaraan <i>event</i> seni dan budaya belum maksimal
		Belum optimalnya Kualitas, Partisipasi, dan Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah	- Minimnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam Pembangunan - Keterbatasan Pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda - Keterbatasan kapabilitas pemuda di bidang teknologi dan inovasi
		Pembudayaan Olahraga Masyarakat dan Pengembangan Prestasi Olahraga	- Belum berkembangnya Kapasitas dan kelembagaan olahraga - Sarana dan prasarana olahraga yang layak dan berkualitas masih kurang - Belum optimalnya Pendidikan olahraga - Belum optimalnya Pembinaan olahraga prestasi - Belum optimalnya Pembudayaan olahraga Masyarakat

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Pelestarian kebudayaan berbasis kearifan lokal menjadi dasar penting dalam membangun identitas dan karakter daerah. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur, norma sosial, dan praktik budaya yang telah teruji oleh waktu, serta menjadi landasan dalam menjaga harmoni sosial. Pelestarian budaya tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang dapat mendukung sektor pariwisata,

ekonomi kreatif, dan pendidikan karakter masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pelibatan masyarakat, komunitas budaya, dan lembaga adat dalam merancang serta melaksanakan program pelestarian budaya, seperti festival budaya, revitalisasi bahasa daerah, dokumentasi cerita rakyat, dan pembinaan seni tradisional.

Peningkatan kualitas, partisipasi, dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang siap bersaing di era globalisasi. Pemuda merupakan aset strategis karena memiliki potensi, semangat inovasi, dan daya dorong perubahan yang besar. Oleh karena itu, arah kebijakan diarahkan untuk menyediakan ruang partisipasi yang luas bagi pemuda, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, dukungan terhadap kewirausahaan muda, maupun pelibatan dalam proses perumusan kebijakan publik. Pemerintah daerah juga perlu membangun kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian pemuda, seperti program inkubasi usaha, pelatihan digital, dan forum kepemudaan.

Pembudayaan olahraga masyarakat dan pengembangan prestasi olahraga bertujuan membangun masyarakat yang sehat, aktif, dan berdaya saing tinggi. Olahraga bukan hanya kegiatan fisik, tetapi juga sarana pembentukan karakter, solidaritas sosial, dan kebanggaan daerah. Pembudayaan olahraga harus dimulai dari tingkat keluarga dan komunitas, melalui penyediaan sarana olahraga yang terjangkau, kampanye gaya hidup sehat, serta penyelenggaraan *event* olahraga lokal. Di sisi lain, pengembangan prestasi olahraga perlu difokuskan pada pembinaan atlet muda melalui sekolah olahraga, kompetisi berjenjang, serta dukungan pembiayaan dan pelatih yang kompeten.

2.3.1.3. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan daerah. Kota Bontang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan daerah. Kota Bontang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kota Bontang mencakup beberapa isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian mendalam khususnya reformasi birokrasi yang belum optimal, implementasi SAKIP yang masih perlu penguatan, kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, implementasi SPBE yang belum maksimal, serta belum optimalnya tata kelola pengadaan barang/jasa.

a. Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Salah satu tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan di Kota Bontang adalah belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya reformasi birokrasi adalah komitmen pimpinan dan pola pikir birokrat, koordinasi dan kerja sama antar instansi, budaya organisasi yang lebih adaptif dan inovatif, pengawasan dan akuntabilitas, kompetensi dan motivasi ASN, serta partisipasi masyarakat dalam proses reformasi birokrasi.

Tabel 2.105. Permasalahan Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi	Kualitas pelayanan publik masih rendah	- Kurangnya standar pelayanan yang jelas dan terukur - Prosedur yang berbelit-belit dan tidak transparan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Sumber daya manusia (SDM) ASN yang belum kompeten dan berintegritas
		Tata kelola pemerintahan belum efektif dan efisien	- Sistem kerja yang belum terintegrasi - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi - Lemahnya koordinasi antarinstansi
		Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal	- Target kinerja yang tidak realistis atau tidak terukur - Kurangnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan - Belum optimalnya penerapan sistem penghargaan dan sanksi
		Integritas ASN belum sepenuhnya terwujud	- Masih adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme - Kurangnya pengawasan internal yang efektif - Belum optimalnya penegakan kode etik dan disiplin ASN
		Kapasitas kelembagaan belum memadai	- Struktur organisasi yang tidak adaptif - Kurangnya inovasi dalam kebijakan dan program - Belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

- b. Implementasi SAKIP yang masih perlu penguatan
- Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat diperlukan oleh pemerintah daerah karena SAKIP menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan SAKIP yang optimal, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya secara lebih optimal, mencapai tujuan pembangunan daerah, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- Beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terutama dalam analisis kinerja dan penyusunan laporan, keterbatasan teknologi informasi, kurangnya koordinasi antar instansi, serta resistensi terhadap perubahan dan birokrasi yang kompleks.

Tabel 2.106. Permasalahan penguatan implementasi SAKIP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya implementasi SAKIP	Perencanaan kinerja belum selaras dan terukur	- Perumusan visi, misi dan tujuan belum jelas - Indikator kinerja belum spesifik, terukur, relevan, dapat dicapai, dan berbatas waktu - Belum adanya keterkaitan yang kuat antara perencanaan strategis dengan perencanaan anggaran
		Pengukuran kinerja belum efektif dan akuntabel	- Data kinerja tidak akurat atau tidak valid - Kurangnya sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan dan analisis data kinerja
		Pelaporan kinerja belum informatif dan tepat waktu	- Laporan kinerja hanya bersifat formalitas dan tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Keterlambatan dalam penyampaian laporan kinerja
		Evaluasi kinerja belum komprehensif dan berkelanjutan	- Kurangnya tindaklanjut terhadap hasil evaluasi - Evaluasi hanya berfokus pada capaian angka, bukan pada substansi dan dampak - Belum optimalnya kapasitas SDM dalam melakukan evaluasi kinerja
		Sumber daya manusia (SDM) belum memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap SAKIP	- Kurangnya pelatihan dan sosialisasi SAKIP kepada ASN - Anggapan SAKIP sebagai beban administratif, bukan sebagai alat manajemen kinerja - Kurangnya komitmen pimpinan dalam penerapan SAKIP
		Sistem dan prosedur SAKIP belum terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya	- SAKIP berjalan sendiri-sendiri, tidak terkait dengan sistem manajemen keuangan, kepegawaian, atau pelayanan - Kurangnya regulasi internal yang mendukung implementasi SAKIP secara menyeluruh - Resistensi terhadap perubahan dan adaptasi sistem baru

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

c. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan

Peningkatan kualitas pelayanan publik berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, dan efisiensi birokrasi. Pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah diakses, dan terjangkau akan memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong reformasi birokrasi, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian indeks pelayanan publik yang berfluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tantangan dan kendala dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Bontang menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa permasalahan utama meliputi kurangnya infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya anggaran untuk inovasi. Selain itu, ada juga masalah seperti kurangnya pemahaman tentang standar pelayanan publik, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya responsif terhadap keluhan masyarakat.

Tabel 2.107. Permasalahan peningkatan kualitas pelayanan publik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Prosedur pelayanan yang masih rumit	- Standar operasional prosedur (SOP) yang tidak diperbarui - Transparansi dalam alur pelayanan belum memadai - Adanya tahapan pelayanan yang tidak efisien
		SDM aparatur belum optimal dalam memberikan pelayanan	- Masih kurangnya kompetensi teknis dan <i>soft skill</i> - Beban kerja yang tinggi - Distribusi pegawai yang tidak merata
		Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai	- Fasilitas pelayanan tidak lengkap - Belum maksimalnya dukungan teknologi informasi dan digitalisasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terbatas
		Kurangnya partisipasi masyarakat dan mekanisme pengaduan yang efektif	- Saluran pengaduan yang tidak mudah diakses atau tidak responsif - Minimnya sosialisasi terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan - Belum optimalnya tindaklanjut terhadap masukan atau keluhan masyarakat
		Sistem manajemen pelayanan belum berorientasi pada kepuasan pengguna	- Data dan informasi pelayanan tidak terintegrasi - Belum optimalnya penerapan budaya organisasi yang menempatkan pelayanan prima sebagai prioritas

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

d. Implementasi SPBE yang belum maksimal

Implementasi SPBE yang merupakan komponen penting dari tata kelola pemerintahan modern, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan indeks SPBE yang tahun ini masih berada di angka 3,39 menunjukkan bahwa penerapan SPBE di Kota Bontang masih tergolong sedang dan belum mencapai tingkat kematangan yang optimal, sedangkan pada tahun 2045 ditargetkan indeks SPBE mencapai 4,00 atau kategori sangat baik.

Dari 8 (delapan) aspek SPBE terdapat 4 (empat) aspek yang masih perlu menjadi perhatian dan perbaikan yakni aspek penerapan manajemen SPBE, audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan public berbasis elektronik. Penerapan manajemen SPBE harus disertai dengan pedoman-pedoman dan harus didokumentasikan sekecil apapun sehingga manajemen SPBE dapat berjalan dengan baik. Pada aspek audit TIK, perlu dilakukan audit eksternal untuk keamanan SPBE. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan agar dapat menggunakan aplikasi-aplikasi umum yang tersedia. Sedangkan pada aspek layanan public berbasis elektronik, perlu dilaksanakan pemeliharaan layanan atau meningkatkan layanan lebih baik untuk menjaga kualitas layanan publik.

Tabel 2.108. Permasalahan implementasi SPBE

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Implementasi SPBE belum maksimal	Penerapan manajemen SPBE belum optimal	- Belum diterapkannya manajemen keamanan informasi - Penerapan manajemen aset TIK belum optimal - Penerapan kompetensi SDM belum memadai - Manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan belum diterapkan dengan baik - Penerapan manajemen layanan SPBE belum dilaksanakan secara menyeluruh
		Audit untuk keamanan SPBE belum memadai	- Keterbatasan SDM auditor TIK - Kurangnya kerangka kerja dan metodologi audit TIK yang jelas - Keterbatasan akses data dan informasi TIK - Perkembangan teknologi yang cepat - Minimnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar berbagai pemangku kepentingan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum masih terbatas	- Integrasi dan kolaborasi aplikasi-aplikasi umum pemerintahan belum optimal - Masih terdapat layanan aplikasi umum yang dioperasikan secara mandiri yang memungkinkan perbedaan data

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

e. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang/jasa

Tata kelola pengadaan barang/jasa memegang peranan yang sangat fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu pintu gerbang terbesar dalam pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, peluang terjadinya praktik-praktik ilegal ini dapat diminimalisir secara signifikan. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik, memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien dan efektif. Meskipun Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang meningkat setiap tahunnya akan tetapi masih terdapat permasalahan yang mempengaruhi kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang perlu menjadi perhatian.

Tabel 2.109. Permasalahan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah	Perencanaan pengadaan yang belum matang dan terintegrasi	- Kurangnya kapasitas SDM perencana pengadaan - Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam identifikasi kebutuhan dan konsolidasi pengadaan
		Proses pemilihan penyedia yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel	- Belum optimalnya penerapan <i>e-procurement</i> secara menyeluruh termasuk <i>e-katalog</i> dan <i>e-purchasing</i> - Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan prosedur pengadaan
		Pelaksanaan kontrak dan manajemen risiko yang masih lemah	- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan - Belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengadaan - Kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum dan teknis kontrak
		Kapasitas SDM pengelola pengadaan belum memadai	- Minimnya jumlah SDM bersertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa - Kurangnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi pengelola pengadaan
		Pengawasan dan evaluasi kinerja pengadaan yang belum efektif	- Kurang tersosialisasinya mekanisme pengaduan dan <i>whistleblowing system</i> yang kredibel dan terlindungi - Rekomendasi hasil audit atau evaluasi pengadaan yang tidak ditindaklanjuti secara konsisten - Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pengadaan yang komprehensif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.3.1.4. Permasalahan Infrastruktur dan Prasarana Dasar

Permasalahan utama infrastruktur dan prasarana dasar di Kota Bontang meliputi kualitas perumahan dan kawasan permukiman belum merata, aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan dan antar wilayah belum menyeluruh, belum optimalnya penataan ruang kota, luas wilayah banjir

perkotaan dan banjir rob, pengelolaan persampahan belum berkelanjutan, rendahnya penataan bangunan gedung pemerintah, serta kualitas layanan kebakaran dan penyelamatan belum merata.

a. Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkualitas Belum Merata

Pemenuhan terhadap akses perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas semestinya dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah keluarga yang dapat menghuni rumah tinggal, juga pemenuhan terhadap prasarana dasarnya. Tingginya *backlog* perumahan, akses prasarana air minum dan air limbah domestik yang belum optimal, serta penanganan kawasan kumuh yang belum sepenuhnya tuntas menghasilkan permasalahan sektor perumahan dan kawasan permukiman yang memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan gambaran umum daerah yang telah disajikan sebelumnya, maka analisis terhadap permasalahan perumahan dan kawasan permukiman berkualitas yang belum merata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110. Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkualitas Belum Merata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas belum merata	Pemenuhan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman belum optimal	- Belum seluruh wilayah terjangkau jaringan air minum, terutama pulau-pulau - Cakupan kapasitas air minum yang aman dan berkualitas belum merata - Keterbatasan air baku untuk air minum - Belum seluruh hunian dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan air limbah domestik, terutama daerah pesisir dan pulau-pulau - Jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang berkualitas belum merata
		Tingginya <i>backlog</i> perumahan	- Rendahnya daya beli MBR untuk mengakses rumah yang layak, baik melalui skema KPR, komersial, maupun subsidi - Ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat masih minim
		Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani secara menyeluruh	- Terdapat bangunan rumah yang tidak teratur dan tidak memenuhi persyaratan teknis - Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman - Infrastruktur dasar permukiman tidak memenuhi persyaratan teknis

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

b. Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Wilayah Belum Menyeluruh

Aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan maupun antar wilayah yang berkualitas dan merata akan mendorong integrasi pusat-pusat kegiatan kota yang selanjutnya menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat dan turut meningkatkan perkembangan sektor ekonomi lokal. Oleh karena itu, perhatian terhadap aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan ini menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya pada sektor prasarana jalan, namun penyediaan moda dan sistem transportasi yang terintegrasi. Berdasarkan gambaran umum daerah yang telah disajikan sebelumnya, Kota Bontang masih memiliki permasalahan pada kualitas prasarana jalan yang belum seluruhnya mantap. Selain itu, keberadaan angkutan umum juga belum sepenuhnya menjangkau

seluruh wilayah Kota Bontang. Analisis terhadap permasalahan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan dan antar wilayah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111. Permasalahan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Wilayah Belum Menyeluruh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Aksesibilitas antar kawasan dan konektivitas antar wilayah belum merata	Sarana prasarana jalan dan angkutan belum seluruhnya memadai	- Terjadi kerusakan pada sebagian ruas jalan - Penyediaan jalan dan jembatan belum mampu menjangkau seluruh wilayah - Perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis belum tersedia secara merata - Transportasi umum kota belum berjalan dengan baik
		Penyediaan prasarana dan sarana transportasi massal belum optimal	- Pelabuhan umum nasional belum dikembangkan secara optimal - Minimnya rute pelayaran dari dan ke Kota Bontang - Belum tersedianya bandara umum - Belum tersedianya pelabuhan di kawasan industri

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

c. Penataan Ruang Kota Belum Optimal

Kesesuaian penataan ruang ditinjau dari realisasi pemanfaatan ruang terhadap peruntukan ruang yang seharusnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang menciptakan keteraturan dalam pembangunan dan penggunaan lahan. Berdasarkan gambaran umum daerah yang telah disajikan sebelumnya, realisasi pemanfaatan ruang Kota Bontang belum optimal. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang. Permasalahan terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penataan ruang kota belum optimal	Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	- Dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pembangunan - Belum terintegrasinya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang - Perubahan kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi - Penataan nilai tanah per zona belum terlaksana secara menyeluruh

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

d. Luas Wilayah Kebanjiran Perkotaan dan Banjir Rob

Kota Bontang tidak hanya mengalami permasalahan banjir perkotaan, namun juga banjir rob yang terjadi di daerah pesisir. Terjadinya banjir perkotaan dan banjir rob berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat bahkan dapat berdampak pada keberlanjutan perekonomian kota secara jangka panjang apabila tidak ditangani segera. Oleh sebab itu, permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Bontang. Adapun akar permasalahan terjadinya banjir perkotaan dan banjir rob di Kota Bontang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 2.113. Permasalahan Banjir Perkotaan dan Banjir Rob

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadinya banjir yang menggenangi perkotaan dan pesisir	Prasarana dan sarana penanggulangan banjir belum memadai	- Kurangnya kapasitas tampungan sungai/waduk/danau - Drainase perkotaan yang berkualitas belum merata dan terkoneksi secara optimal - Penyempitan aliran sungai akibat pembangunan permukiman di bantaran sungai - Infrastruktur pengendali banjir belum adaptif dan berwawasan lingkungan - Belum optimalnya sistem peringatan dini yang responsif - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir berbasis komunitas

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

e. Pengelolaan Persampahan Belum Berkelanjutan

Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan jumlah timbulan sampah. Oleh sebab itu, pengelolaan persampahan yang berkelanjutan harus menjadi perhatian sering dengan bertambahnya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana persampahan di Kota Bontang. Pengelolaan persampahan yang baik adalah pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, artinya pengelolaan sampah tidak hanya fokus pada pembuangan akhir, tetapi juga pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Berdasarkan penjelasan gambaran umum pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa pengelolaan sampah di Kota Bontang masih didominasi oleh penggunaan TPA dan belum cukup optimal dalam pengelolaan di TPS-3R. Tabel di bawah ini menunjukkan akar permasalahan pengelolaan persampahan belum berkelanjutan.

Tabel 2.114. Permasalahan Pengelolaan Sampah Belum Berkelanjutan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan persampahan belum berkelanjutan	Penyediaan prasarana dan sarana sampah belum merata	- Cakupan TPS-3R belum dapat melayani seluruh kelurahan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau - Cakupan layanan pengumpulan sampah rumah tangga belum menyeluruh - Minimnya kerja sama regional dan internasional dalam pengelolaan sampah - Prasarana pengelolaan sampah spesifik dan limbah B3 belum optimal
		Upaya pengurangan sampah rumah tangga belum optimal	- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah - Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

f. Bangunan Gedung Pemerintah Belum Seluruhnya Berkondisi Baik dan Memenuhi Persyaratan Teknis

Bangunan gedung pemerintah, yang seharusnya menjadi cerminan kemajuan dan tata kelola yang baik, masih menghadapi masalah serius terkait kualitasnya. Masalah pokoknya adalah rendahnya kualitas bangunan secara umum, meliputi gedung perkantoran, rumah ibadah milik pemerintah, rumah negara, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Beberapa kelemahan yang mendasar adalah minimnya penerapan konsep *green building* dalam perencanaan dan pembangunan. Konsep *green building* sendiri mencakup

berbagai aspek, mulai dari penghematan energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, hingga peningkatan kualitas udara dalam ruangan.

Tabel 2.115. Permasalahan Bangunan Gedung Pemerintah Belum Seluruhnya Berkondisi Baik dan Memenuhi Persyaratan Teknis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Belum semua bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan teknis	- Masih rendahnya kualitas gedung perkantoran, rumah ibadah, rumah negara dan bangunan pemerintah lainnya - Minimnya pengembangan konsep bangunan <i>green building</i>, sehingga pemanfaatan energi ramah lingkungan belum optimal

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.3.1.5. Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan seiring pesatnya pembangunan dan aktivitas manusia. Dampak negatif terhadap air, udara, lahan, dan manajemen sampah mengancam kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem. Diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut secara berkelanjutan.

a. Pencemaran Air

Pencemaran air menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang paling mendesak, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Di Kota Bontang, pencemaran air terjadi akibat meningkatnya limbah rumah tangga dan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak dikelola dengan baik. Peningkatan parameter tersebut utamanya berasal dari aktivitas rumah tangga, termasuk limbah domestik dan limbah usaha kecil yang tidak melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Hal ini dapat mengganggu ekosistem perairan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Jika tidak ditangani, dampak jangka panjangnya adalah rusaknya keanekaragaman hayati air dan terganggunya ketersediaan air bersih.

Upaya untuk mengurangi pencemaran air meliputi peningkatan pengelolaan limbah domestik melalui sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, pembatasan penggunaan deterjen fosfat tinggi, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pihak pemerintah perlu mendorong partisipasi dunia usaha dalam menerapkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Melalui program perbaikan kualitas air, pemerintah juga berfokus pada upaya rehabilitasi sungai dengan menanam vegetasi di sepanjang bantaran sungai. Hal ini tidak hanya membantu menjaga kualitas air tetapi juga meningkatkan daya serap lahan terhadap air hujan, sehingga dapat meminimalkan risiko banjir.

Tabel 2.116. Permasalahan Pencemaran Air

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik	Limbah rumah tangga langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan	- Minimnya fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal - Kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengelola limbah rumah tangga - Tidak adanya regulasi yang mewajibkan pengolahan limbah skala rumah tangga - Sistem sanitasi yang belum memadai di beberapa wilayah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Kurangnya sosialisasi mengenai dampak limbah domestik terhadap lingkungan - Minimnya pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas air
		Limbah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencemari sumber air	- Tidak adanya sistem pengelolaan limbah terpadu bagi UMKM - Biaya pengolahan limbah yang dianggap membebani pelaku usaha - Belum adanya insentif bagi UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan - Lemahnya regulasi terkait pencemaran air oleh UMKM - Banyak UMKM yang membuang limbah langsung tanpa proses pengolahan - Minimnya pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas air - Minimnya pengawasan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
		Tingginya kandungan BOD, COD, dan Fecal Coliform	- Peningkatan pencemaran akibat limbah organik dari rumah tangga dan usaha kecil - Kurangnya teknologi pengolahan limbah yang diterapkan oleh masyarakat - Tidak adanya sistem pemantauan kualitas air yang efektif - Rendahnya kesadaran dalam mengurangi penggunaan bahan pencemar seperti deterjen fosfat tinggi - Kurangnya vegetasi di bantaran sungai yang berfungsi sebagai penyaring alami
2	Ketidakseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Air	Terganggunya keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati air	- Pembuangan limbah secara terus-menerus tanpa pengolahan - Berkurangnya populasi biota air akibat pencemaran - Sedimentasi dan eutrofikasi akibat peningkatan zat organik dalam air - Tidak adanya program konservasi air yang berkelanjutan - Kurangnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi sungai dan perairan - Minimnya pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas air - Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati termasuk ekosistem <i>mangrove</i>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara merupakan masalah serius yang sering kali terjadi akibat aktivitas industri dan transportasi. Di Kota Bontang, kualitas udara masih tergolong baik dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024 sebesar 87,54. Meskipun demikian, terdapat peningkatan konsentrasi gas SO₂ akibat aktivitas industri, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil pada pabrik dan kendaraan bermotor. Selain itu, peningkatan emisi NO₂ dari kendaraan bermotor juga menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat,

terutama di daerah padat lalu lintas. Salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran udara adalah melakukan uji emisi kendaraan secara rutin dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan.

Tabel 2.117. Permasalahan Pencemaran Udara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan Polusi dari Industri	Pembakaran bahan bakar fosil oleh pabrik menyebabkan peningkatan kadar SO ₂ di udara	- Banyaknya industri yang masih bergantung pada bahan bakar fosil - Kurangnya penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi - Sistem pemantauan emisi yang belum optimal - Regulasi tentang batas emisi yang belum ditegakkan secara ketat - Minimnya insentif bagi industri yang menerapkan energi bersih - Minimnya pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas udara
2	Peningkatan polusi udara akibat kendaraan bermotor	Emisi NO ₂ dari kendaraan bermotor semakin tinggi terutama di daerah padat lalu lintas	- Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat - Penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil masih dominan - Kurangnya transportasi publik yang ramah lingkungan - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi berkelanjutan - Tidak adanya kebijakan uji emisi yang diterapkan secara ketat - Minimnya pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas udara
3	Berkurangnya kualitas udara di daerah perkotaan	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya	- Kurangnya tutupan vegetasi sebagai penyerap polutan - Peningkatan aktivitas transportasi dan industri - Kurangnya program penghijauan kota secara berkelanjutan - Polusi dari pembakaran sampah yang masih terjadi di permukiman - Minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kualitas udara - Minimnya pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas udara
4	Dampak kesehatan akibat pencemaran udara	Peningkatan risiko gangguan pernapasan akibat paparan polusi udara	- Konsentrasi gas beracun seperti SO₂ dan NO₂ yang meningkat - Kurangnya sistem pemantauan kualitas udara yang dapat diakses oleh masyarakat - Minimnya edukasi tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan - Tidak adanya kebijakan mitigasi kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia - Kurangnya fasilitas kesehatan yang menangani penyakit akibat pencemaran udara

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Langkah konkret lainnya adalah melakukan penambahan tutupan vegetasi pada ruang terbuka hijau (RTH) yang telah tersedia serta menerapkan kewajiban bagi ASN dan calon pengantin untuk melakukan penanaman pohon. Upaya ini akan membantu menyerap karbon dioksida dan meningkatkan

kualitas udara. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye udara bersih juga sangat penting untuk mengurangi kebiasaan buruk seperti pembakaran sampah di area pemukiman.

c. Degradasi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan suatu hal yang pasti terjadi seiring dengan perkembangan kota dan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan tersebut tentunya harus dikendalikan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah Kota Bontang telah melakukan beberapa inisiatif seperti penanaman pohon dan rehabilitasi ruang terbuka hijau. Namun, keterlibatan masyarakat secara aktif masih diperlukan guna meningkatkan keberhasilan program tersebut.

Tabel 2.118. Permasalahan Degradasi Lahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Alih fungsi lahan yang kurang terkendali	Konversi lahan hutan menjadi pemukiman dan industri yang semakin meluas	- Peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan - Kurangnya pengawasan dalam penerapan tata ruang - Lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lahan - Kurang meratanya akses terhadap ruang terbuka hijau publik berkualitas di setiap kelurahan - Minimnya pengendalian kerusakan tanah dan lahan - Minimnya penghargaan untuk pelestarian lingkungan
2	Penurunan kualitas tutupan lahan	Berkurangnya tutupan vegetasi akibat kebakaran hutan dan lahan serta pembangunan	- Pembukaan lahan oleh aktivitas manusia - Perambahan hutan lindung dan <i>mangrove</i> - Pembangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukan - Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum - Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi lahan - Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya penghijauan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

d. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Kota Bontang. Aktivitas industri, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, menjadi penyebab utama tingginya emisi karbon dioksida (CO₂) dan gas rumah kaca lainnya. Selain itu, transportasi yang didominasi oleh kendaraan pribadi dengan penggunaan bahan bakar konvensional juga turut meningkatkan emisi. Jika tidak dikendalikan, emisi GRK akan berdampak pada peningkatan suhu rata-rata kota dan memperburuk perubahan iklim secara global.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan di sektor industri. Selain itu, kampanye pengurangan emisi melalui transportasi hijau juga terus digencarkan, seperti mempromosikan penggunaan kendaraan listrik dan mendorong pemanfaatan transportasi umum. Upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan emisi secara signifikan dan meningkatkan kualitas udara di wilayah perkotaan.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam menurunkan emisi GRK. Melalui program Kampung Iklim (Proklam) yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), warga diajak untuk berkontribusi

dalam pengurangan emisi melalui kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan tetapi juga mendorong aksi nyata dalam mengurangi jejak karbon secara kolektif. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif ini, diharapkan emisi GRK di Kota Bontang dapat terus ditekan demi menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Tabel 2.119. Permasalahan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya emisi dari sektor industri	Industri masih mengandalkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama	- Ketergantungan industri terhadap batu bara dan minyak bumi - Rendahnya insentif bagi industri untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan - Biaya investasi awal untuk teknologi hijau masih tinggi - Kurangnya regulasi ketat terkait pembatasan emisi industri - Minimnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim - Belum optimalnya penguatan kebijakan dan implementasi penggunaan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan pada berbagai sektor - Rendahnya penguatan kolaborasi, kesiapsiagaan dan kapasitas kepentingan terhadap bencana dan ancaman perubahan iklim
2	Peningkatan emisi dari sektor transportasi	Dominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menyebabkan tingginya emisi karbon	- Rendahnya penggunaan transportasi umum - Minimnya infrastruktur untuk kendaraan listrik - Harga kendaraan ramah lingkungan masih relatif mahal - Kesadaran masyarakat akan dampak transportasi terhadap emisi masih rendah - Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor belum diterapkan secara efektif - Minimnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim - Belum optimalnya penguatan kebijakan dan implementasi penggunaan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan pada berbagai sektor - Rendahnya penguatan kolaborasi, kesiapsiagaan dan kapasitas kepentingan terhadap bencana dan ancaman perubahan iklim
3	Dampak perubahan iklim akibat emisi GRK	Peningkatan suhu rata-rata kota dan risiko cuaca ekstrem semakin tinggi	- Konsentrasi CO₂ yang terus meningkat di atmosfer - Kurangnya tutupan vegetasi pada ruang terbuka hijau untuk menyerap karbon - Minimnya penghijauan di kawasan industri dan perkotaan - Lambatnya transisi menuju ekonomi rendah karbon - Belum optimalnya kebijakan adaptasi perubahan iklim - Rendahnya penguatan kolaborasi, kesiapsiagaan dan kapasitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kepentingan terhadap bencana dan ancaman perubahan iklim
4	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi emisi	Program pengurangan emisi masih terbatas pada skala pemerintah dan industri	- Minimnya edukasi terkait dampak emisi GRK - Kurangnya insentif bagi masyarakat untuk beralih ke gaya hidup rendah karbon - Belum maksimalnya penerapan program Kampung Iklim (Proklim) - Tidak adanya mekanisme penghargaan bagi warga yang berkontribusi dalam pengurangan emisi - Rendahnya penguatan kolaborasi, kesiapsiagaan dan kapasitas kepentingan terhadap bencana dan ancaman perubahan iklim

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

e. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Capaian indikator SDGs di Kota Bontang menunjukkan keberhasilan yang bervariasi pada setiap pilar pembangunan. Pada pilar sosial, capaian indikator mencapai 53,09 persen (43 dari 81 indikator), menandakan progres yang cukup baik dalam aspek sosial. Pilar ekonomi menunjukkan pencapaian sebesar 47,37 persen (18 dari 38 indikator), yang mencerminkan masih adanya tantangan untuk mencapai target di sektor ekonomi. Pilar lingkungan memiliki capaian tertinggi, yaitu 58,82 persen (20 dari 34 indikator), mengindikasikan langkah positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, pada pilar hukum, capaian indikator hanya sebesar 36,36 persen (8 dari 22 indikator), menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan pencapaian dalam aspek hukum dan tata kelola. Secara keseluruhan, ketercapaian target indikator TPB di Kota Bontang terbagi menjadi empat kategori: (1) SS (Sudah dilaksanakan – Sudah mencapai target) sebesar 50,9 persen, (2) SB (Sudah dilaksanakan – Belum mencapai target) sebesar 26,3 persen, (3) NA (Data tidak tersedia) sebesar 18,3 persen, dan (4) BB (Belum dilaksanakan – Belum mencapai target) sebesar 4,5 persen. Pembagian ini menggambarkan bahwa lebih dari setengah dari indikator telah mencapai target, sementara terdapat tantangan signifikan pada indikator yang belum mencapai target dan keterbatasan data yang perlu diatasi.

Berdasar analisis isu pembangunan berkelanjutan di Kota Bontang menunjukkan terdapat 39 isu strategis yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu-isu ini terdistribusi ke dalam 15 TPB sebagai berikut: TPB 1 - Tanpa Kemiskinan; TPB 2 - Tanpa Kelaparan; TPB 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera; TPB 4 - Pendidikan Berkualitas; TPB 5 - Kesetaraan Gender; TPB 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak; TPB 7 - Energi Bersih dan Terjangkau; TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; TPB 9 - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan; TPB 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; TPB 13 - Penanganan Perubahan Iklim; TPB 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; TPB 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Keseluruhan isu strategis ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kota Bontang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan kemitraan yang terpadu.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan.

2.3.2.1. Isu Global

- a. Ketidakpastian ekonomi global, terutama fluktuasi harga migas, yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah

Ketidakpastian ekonomi global menjadi salah satu tantangan utama bagi Kota Bontang, terutama karena ketergantungannya pada sektor migas dan industri kimia. Fluktuasi harga komoditas serta dinamika perdagangan internasional dapat berdampak langsung terhadap pendapatan daerah, investasi, dan stabilitas ekonomi lokal. Seiring dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan kebijakan ekonomi di berbagai negara, Kota Bontang harus menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya di masa depan.

Dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan ini adalah fluktuasi harga komoditas global dan dampak perang dagang serta proteksionisme terhadap rantai pasok dan investasi asing. Perubahan harga minyak dunia secara langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan Kota Bontang.

- 1) Fluktuasi Harga Komoditas dan Dampaknya terhadap Pendapatan Daerah

Sebagai kota yang sangat bergantung pada industri kimia dan energi, terutama minyak dan gas (migas), Kota Bontang menghadapi risiko besar akibat fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang tahun 2024, sektor migas berkontribusi sebesar 76,33 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menjadikannya sektor utama dalam struktur ekonomi daerah. Namun, ketergantungan ini menyebabkan ekonomi Kota Bontang sangat rentan terhadap volatilitas harga energi global. Sebagai contoh, pada tahun 2020, harga minyak dunia mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan perlambatan industri migas dan berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bontang yang hanya mencapai 4,16 persen, lebih rendah dibandingkan dengan Balikpapan (5,21 persen) dan Kutai Kartanegara (5,47 persen).

Ketidakstabilan harga migas juga mempengaruhi pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Pada periode 2020-2022, fluktuasi harga minyak dunia menyebabkan penurunan DBH migas yang diterima Kota Bontang sebesar 12 persen, menghambat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sebagai perbandingan, ketika harga minyak dunia naik pada tahun 2022 akibat ketegangan geopolitik global, pendapatan daerah meningkat kembali. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor migas ini menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi guna mengurangi risiko terhadap guncangan eksternal dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di masa depan.

- 2) Perang Dagang dan Proteksionisme dalam Rantai Pasok dan Investasi Asing

Ketegangan perdagangan internasional, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh beberapa negara, berdampak langsung terhadap rantai pasok industri dan investasi asing di Kota Bontang. Sebagai contoh, perang dagang antara AS dan Tiongkok yang berlangsung sejak 2018 telah menghambat perdagangan global, termasuk ekspor dan impor bahan baku untuk industri petrokimia dan manufaktur di Kota Bontang. Berdasarkan laporan BPS Kota Bontang tahun 2023, nilai impor bahan baku industri mengalami penurunan sebesar 8,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya dampak dari gangguan rantai pasok global.

Selain itu, kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh beberapa negara juga berpengaruh terhadap minat investor asing untuk menanamkan

modalnya di Kota Bontang. Berdasarkan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), realisasi investasi asing langsung (FDI) di Kota Bontang pada tahun 2023 turun sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terjadi akibat ketidakpastian kebijakan perdagangan global, yang membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di sektor industri berbasis ekspor. Jika tren ini terus berlanjut, Kota Bontang perlu mengembangkan kebijakan yang lebih menarik bagi investor domestik dan asing, seperti insentif pajak, peningkatan infrastruktur, serta kemudahan regulasi investasi guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan industri dan ekonomi daerah.

b. Persaingan SDM di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam dunia kerja, di mana otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi digital semakin menggantikan pekerjaan manual dan menuntut keterampilan yang lebih tinggi dari tenaga kerja. Kota Bontang, yang selama ini bergantung pada sektor industri migas dan manufaktur, menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang tahun 2024, sebanyak 66,72 persen tenaga kerja di kota ini masih didominasi oleh lulusan SLTP dan SLTA, yang menunjukkan bahwa tingkat keterampilan tenaga kerja masih relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan industri berbasis teknologi tinggi. Kondisi ini menyebabkan *missmatch* antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Bontang yang mencapai 7,06 persen pada tahun 2024.

Selain itu, digitalisasi ekonomi juga menciptakan peluang baru di sektor teknologi, *startup*, dan industri kreatif, tetapi minimnya tenaga kerja dengan keterampilan digital menjadi kendala utama dalam pengembangannya. Data Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 22 persen tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital dasar, seperti pemrograman, analisis data, dan kecerdasan buatan. Kota Bontang perlu segera meningkatkan investasi dalam pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis teknologi agar tenaga kerja lokal dapat bersaing dalam era digital ini. Tanpa strategi yang tepat, Kota Bontang berisiko tertinggal dalam persaingan ekonomi regional dan kehilangan peluang untuk menarik investasi di sektor industri berbasis digital dan teknologi maju.

c. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan:

1) Kenaikan Permukaan Air Laut dan Dampaknya terhadap Kota Bontang

Sebagai kota pesisir, Kota Bontang menghadapi ancaman serius dari kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 menunjukkan bahwa permukaan air laut di wilayah pesisir Kalimantan Timur mengalami kenaikan rata-rata 4-6 mm per tahun, yang dapat menyebabkan abrasi, banjir rob, dan intrusi air laut ke sumber air tawar. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), beberapa wilayah di pesisir Kota Bontang, seperti Bontang Kuala dan Tanjung Laut, sudah mengalami peningkatan frekuensi banjir rob dalam lima tahun terakhir, yang berdampak pada infrastruktur dan pemukiman penduduk. Untuk mengatasi ancaman ini, perencanaan tata ruang dan pembangunan di Kota Bontang harus mencakup strategi mitigasi dan adaptasi, seperti pembangunan tanggul laut, peningkatan kawasan hijau pesisir, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air dan sistem drainase untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

2) Transisi Energi Global dan Tantangan bagi Ekonomi Bontang

Meningkatnya fokus global pada energi terbarukan, industri berbasis energi fosil di Kota Bontang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Berdasarkan laporan *International Energy Agency* (IEA) tahun 2023, permintaan global terhadap gas alam diperkirakan menurun sekitar 10 persen pada 2030 akibat peralihan ke sumber energi bersih seperti tenaga surya dan angin. Kota Bontang, yang ekonominya masih bergantung pada industri gas dan petrokimia—menyumbang 76,33 persen dari PDRB kota pada 2024 (BPS Kota Bontang), perlu segera melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi dampak transisi energi ini. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah mengembangkan sektor industri hijau, seperti manufaktur berbasis energi terbarukan dan industri hilir berbasis bahan baku non-fosil. Selain itu, pemerintah perlu menarik investasi dalam sektor teknologi dan ekonomi digital untuk menciptakan peluang kerja baru yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Kota Bontang.

d. Perubahan Demografi Global: Penuaan Populasi dan Dampaknya terhadap Kebutuhan Layanan Sosial dan Kesehatan

Tren penuaan populasi yang terjadi secara global juga mulai terlihat di Indonesia, termasuk di Kota Bontang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, persentase penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) di Indonesia mencapai 10,48 persen, meningkat dari 9,78 persen pada tahun 2020. Kota Bontang sendiri mengalami tren yang sama, dengan peningkatan jumlah lansia setiap tahunnya. Meskipun dampaknya belum signifikan saat ini, peningkatan populasi lansia di masa depan akan meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan, fasilitas perawatan jangka panjang, serta program sosial bagi kelompok usia ini. Tantangan lainnya adalah berkurangnya proporsi tenaga kerja produktif, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang perlu mulai merancang kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan lansia, pelatihan tenaga medis khusus geriatri, serta penguatan program jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan kelompok lanjut usia.

1) Migrasi dan Urbanisasi serta Tantangan bagi Infrastruktur Kota Bontang

Sebagai salah satu kota industri utama di Kalimantan Timur, Kota Bontang mengalami pertumbuhan populasi yang didorong oleh urbanisasi dan migrasi tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kota Bontang tahun 2024, jumlah penduduk kota ini mencapai 191.811 jiwa, yang terdiri atas 99.151 jiwa laki-laki dan 92.660 jiwa perempuan, meningkat sekitar 2,4 persen dibandingkan tahun 2020, sebagian besar disebabkan oleh migrasi tenaga kerja ke sektor industri migas dan petrokimia. Arus migrasi yang tinggi ini menyebabkan peningkatan tekanan terhadap infrastruktur dasar, seperti perumahan, transportasi, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, migrasi juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana kelompok penduduk baru menghadapi kesulitan dalam akses pekerjaan yang layak serta layanan sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, Kota Bontang perlu mengembangkan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif, meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan, serta memperkuat program pelatihan tenaga kerja untuk memastikan bahwa migrasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi kota.

e. Ketahanan Pangan dan Energi

1) Krisis Pangan Global dan Urgensi Ketahanan Pangan Lokal di Bontang

Perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global semakin meningkatkan risiko krisis pangan di berbagai negara, termasuk

Indonesia. FAO (*Food and Agriculture Organization*) mencatat bahwa pada tahun 2023, indeks harga pangan global naik sebesar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dipicu oleh cuaca ekstrem dan ketegangan perdagangan internasional. Kota Bontang, yang sebagian besar bergantung pada impor bahan pangan dari luar daerah, menjadi rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan. Berdasarkan data BPS Kota Bontang tahun 2023, sekitar 68 persen kebutuhan beras dan 75 persen kebutuhan sayur-mayur kota ini masih dipasok dari daerah lain, terutama Sulawesi dan Jawa. Untuk memperkuat ketahanan pangan, Kota Bontang perlu mengembangkan pertanian perkotaan (*urban farming*), meningkatkan produksi pangan lokal melalui teknologi hidroponik dan aquaponik, serta memperkuat rantai distribusi pangan dengan menggandeng pelaku UMKM dan koperasi pertanian.

2) Ketahanan Energi: Diversifikasi dan Efisiensi sebagai Solusi Keberlanjutan

Ketahanan energi menjadi isu strategis bagi Kota Bontang, mengingat ketergantungannya yang tinggi pada gas alam dan energi fosil. BPS Kota Bontang (2023) mencatat bahwa 82 persen energi yang digunakan di kota ini masih berasal dari sumber fosil, terutama gas yang diproduksi oleh industri migas setempat. Namun, dengan meningkatnya permintaan global terhadap energi terbarukan, Kota Bontang perlu melakukan diversifikasi sumber energi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi jangka panjang. IEA memperkirakan bahwa permintaan gas alam global akan menurun 10 persen pada 2030, yang dapat berdampak pada industri energi di Bontang. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk kawasan industri, meningkatkan efisiensi energi pada sektor manufaktur, serta mempercepat penerapan kebijakan konservasi energi bagi rumah tangga dan usaha kecil guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

f. Kesehatan Global

1) Kesiapan Menghadapi Pandemi dan Penyakit Menular di Kota Bontang

Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi krisis global sangat krusial. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2022, tercatat sebanyak 8.436 kasus COVID-19 dengan tingkat fatalitas 2,3 persen, menunjukkan bahwa pandemi memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan kapasitas layanan medis. Selain COVID-19, ancaman penyakit menular lainnya seperti tuberkulosis (TBC) dan demam berdarah dengue (DBD) juga masih tinggi. BPS Kota Bontang mencatat bahwa kasus DBD mencapai 1.134 kasus pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya akibat perubahan pola iklim yang memperpanjang musim hujan. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap krisis kesehatan global, Kota Bontang perlu memperkuat sistem deteksi dini, memperluas cakupan imunisasi, meningkatkan fasilitas kesehatan primer, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan peralatan yang memadai guna menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan.

2) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM

Kualitas layanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan kompetitif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang tahun 2023 mencapai 82,42, meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan kota industri lainnya seperti Balikpapan (83,12). Salah satu tantangan utama dalam peningkatan kualitas SDM adalah akses terhadap layanan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah pesisir dan permukiman padat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2023, rasio dokter terhadap

penduduk masih 1:3.700, lebih tinggi dibandingkan standar WHO yang merekomendasikan 1:1.000. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada peningkatan jumlah tenaga medis, investasi dalam teknologi kesehatan digital seperti *telemedicine*, serta optimalisasi fasilitas puskesmas dan rumah sakit agar layanan kesehatan dapat diakses dengan lebih cepat dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Bontang.

g. Geopolitik dan Keamanan

1) Konflik Regional di Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Stabilitas Ekonomi Bontang

Ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan terus meningkat akibat perselisihan klaim wilayah antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan global yang dilalui sekitar 30 persen dari total perdagangan dunia, termasuk ekspor dan impor energi serta bahan baku industri. Kementerian Perdagangan RI (2023) mencatat bahwa sekitar 45 persen impor bahan baku untuk industri migas dan petrokimia di Kota Bontang berasal dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini, seperti Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam. Jika konflik eskalatif menyebabkan terganggunya jalur perdagangan, maka pasokan bahan baku untuk industri di Bontang dapat terdampak, menyebabkan kenaikan harga produksi dan potensi keterlambatan operasional. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang perlu mendorong strategi diversifikasi sumber impor bahan baku dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara di luar wilayah sengketa untuk mengurangi ketergantungan pada jalur perdagangan yang berisiko tinggi.

2) Perubahan Kebijakan Luar Negeri Negara-Negara Besar dan Dampaknya terhadap Investasi

Kebijakan luar negeri negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, memiliki pengaruh signifikan terhadap arus investasi dan perdagangan di Indonesia, termasuk di Kota Bontang. Berdasarkan data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) tahun 2023, Tiongkok dan Jepang merupakan dua negara dengan investasi terbesar di sektor industri kimia dan energi di Kalimantan Timur, termasuk di Bontang, dengan total investasi mencapai USD 1,8 miliar dalam lima tahun terakhir. Namun, dengan meningkatnya proteksionisme ekonomi global dan perubahan kebijakan luar negeri, seperti pembatasan ekspor teknologi energi oleh AS dan perang dagang antara AS dan Tiongkok, investor asing menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Hal ini berpotensi menghambat proyek-proyek strategis di sektor energi dan manufaktur di Kota Bontang. Oleh karena itu, diperlukan diplomasi ekonomi yang proaktif dari pemerintah daerah untuk menarik lebih banyak investor dengan memberikan insentif pajak, penyederhanaan regulasi, serta memperluas kerja sama dengan negara-negara mitra strategis lainnya.

2.3.2.2. Isu Nasional

a. Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi anak-anak, sehingga mendukung masa depan yang lebih sehat dan produktif. Program ini juga mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan petani, UMKM pangan, dan industri pengolahan makanan dalam rantai pasok. Efisiensi anggaran dan logistik perlu diperhatikan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan program. Selain itu, program ini berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi angka stunting dan

memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Infrastruktur pendukung, seperti fasilitas penyimpanan, dapur umum, dan sistem distribusi, harus dirancang secara matang agar implementasi berjalan optimal.

b. Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Kota Bontang melalui skema pendanaan alternatif bagi proyek strategis. Dengan menyediakan investasi jangka panjang, terutama dari luar negeri, Danantara dapat mempercepat pengembangan sektor unggulan seperti industri kimia, energi, dan pariwisata. Salah satu dampak utama dari keterlibatan Danantara adalah **peningkatan infrastruktur**, termasuk pembangunan pelabuhan, jalan logistik, dan kawasan industri yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi produksi di Kota Bontang.

Selain itu, **diversifikasi ekonomi** menjadi aspek penting dalam mengurangi ketergantungan Kota Bontang pada energi fosil. Danantara dapat berperan dalam mendukung investasi di sektor energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan bioenergi, serta mempercepat pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital. Dengan skema investasi yang berkelanjutan, Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

c. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

1) Dampak Pembangunan IKN terhadap Infrastruktur dan Layanan Publik di Kota Bontang

Kedekatan geografis Kota Bontang dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berjarak sekitar 200 km, membawa peluang besar sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. BPS Kalimantan Timur (2023) mencatat bahwa pembangunan IKN diprediksi akan meningkatkan arus migrasi tenaga kerja ke wilayah sekitarnya, termasuk Bontang, yang dapat berdampak pada lonjakan permintaan perumahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, sebagai kota industri, Bontang berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku dan tenaga kerja bagi proyek-proyek konstruksi di IKN. Namun, peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi juga berisiko menekan daya dukung kota, terutama dalam aspek ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan kapasitas layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang perlu merancang strategi pembangunan yang adaptif, termasuk ekspansi infrastruktur dasar dan peningkatan efisiensi pelayanan publik guna mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat dampak pembangunan IKN.

2) Pengembangan Konektivitas Transportasi dan Logistik untuk Mendukung IKN

Pembangunan IKN Nusantara akan meningkatkan kebutuhan konektivitas antar wilayah, termasuk akses transportasi dan logistik dari Kota Bontang ke kawasan ibu kota baru. Saat ini, jalur utama yang menghubungkan Bontang dengan IKN masih mengandalkan Jalan Trans-Kalimantan dan Pelabuhan Samarinda sebagai jalur distribusi utama. Kementerian PUPR (2023) telah merencanakan peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan jaringan kereta api yang akan menghubungkan kawasan industri di Kalimantan Timur dengan IKN. Bagi Kota Bontang, ini menjadi peluang untuk mempercepat pengembangan pelabuhan industri, modernisasi jalur transportasi darat, serta peningkatan kapasitas bandara APT Pranoto Samarinda yang menjadi akses udara terdekat. Dengan optimalisasi konektivitas ini, Kota Bontang dapat menjadi pusat logistik dan distribusi utama bagi proyek-proyek IKN, mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing industri di tingkat nasional dan internasional.

d. Kebijakan Fiskal dan Anggaran Nasional

1) Efisiensi Anggaran: Optimalisasi Penggunaan Anggaran Daerah

Dengan keterbatasan anggaran nasional, Kota Bontang perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah agar tetap dapat membiayai program pembangunan secara berkelanjutan. BPS Kota Bontang (2023) mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini hanya menyumbang sekitar 10-13 persen dari total APBD, dengan sebagian besar anggaran masih bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan belanja daerah dengan mengefektifkan program prioritas, mengurangi pemborosan anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penguatan digitalisasi sistem keuangan daerah untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Selain itu, mendorong kerja sama dengan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) dapat menjadi solusi dalam pembiayaan infrastruktur tanpa terlalu membebani APBD.

2) Dampak Kenaikan PPN 12 persen terhadap Daya Beli dan Investasi Daerah

Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan reformasi fiskal. Kenaikan ini berpotensi memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat dan investasi di Kota Bontang, terutama mengingat struktur ekonomi kota yang masih didominasi oleh industri migas dan manufaktur. Berdasarkan data BPS Kota Bontang (2023), tingkat inflasi di kota ini mencapai 5,12 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kalimantan Timur (4,89 persen). Kenaikan PPN dapat semakin mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, bagi dunia usaha, kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang, yang berpotensi menghambat investasi dan konsumsi domestik. Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah Kota Bontang perlu menyiapkan strategi insentif bagi pelaku UMKM, serta mendorong efisiensi rantai pasok agar kenaikan harga barang dapat ditekan.

3) Transfer Dana Pusat ke Daerah dan Kemampuan Fiskal Bontang

Perubahan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam mekanisme Transfer Dana Pemerintah Pusat ke Daerah, dapat mempengaruhi kapasitas fiskal Kota Bontang dalam membiayai program pembangunan. APBD Kota Bontang tahun 2023 masih bergantung hingga 80 persen pada Dana Transfer dari Pusat, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Namun, dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi dan penyesuaian alokasi anggaran nasional, terdapat potensi pengurangan dana transfer bagi daerah yang dinilai memiliki PAD rendah atau ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam. Jika realisasi anggaran ini terjadi, Kota Bontang perlu memperkuat sumber pendapatan asli daerah melalui peningkatan retribusi daerah, pajak daerah berbasis ekonomi digital, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat. Dengan strategi yang tepat, Kota Bontang dapat menjaga stabilitas fiskalnya di tengah dinamika kebijakan nasional.

e. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi nasional menuntut setiap daerah, termasuk Kota Bontang, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik guna

memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas. BPS Kota Bontang (2023) mencatat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik masih berada di angka 76,5 dari skala 100, menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan dalam efektivitas birokrasi. Salah satu kendala utama adalah lamanya proses perizinan usaha dan pelayanan administrasi, yang masih menghadapi hambatan teknis dan birokratis. Untuk meningkatkan efisiensi, Kota Bontang perlu mempercepat digitalisasi layanan publik, seperti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi layanan satu pintu berbasis daring. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih baik, layanan dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta menyelesaikan administrasi dengan lebih efisien.

2) Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Kasus-kasus korupsi di sektor pemerintahan, termasuk yang terjadi di BUMN seperti Pertamina, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa hingga 2023, sekitar 55 persen kasus korupsi di Indonesia terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan, yang sering kali melibatkan pejabat daerah. Kota Bontang sebagai daerah industri juga berisiko menghadapi tantangan serupa jika sistem pengawasan tidak diperkuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi pencegahan korupsi yang lebih ketat, seperti optimalisasi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran melalui sistem daring, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan tata kelola yang lebih baik, Kota Bontang dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan birokrasi yang lebih profesional serta bebas dari praktik korupsi.

f. Pembangunan Infrastruktur Nasional

1) Pengembangan Infrastruktur Dasar: Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan Layak

Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perumahan layak masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur dasar di banyak daerah, termasuk Kota Bontang. BPS Kota Bontang (2024) mencatat bahwa sekitar 11,61 persen rumah tangga masih belum memiliki akses air bersih yang memadai, terutama di daerah pesisir dan permukiman padat. Selain itu, masih terdapat 3,74 persen rumah tangga yang belum memiliki akses ke jamban sehat, yang meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. Dalam hal perumahan, pertumbuhan populasi dan urbanisasi telah meningkatkan kebutuhan akan perumahan layak, namun keterjangkauan harga rumah masih menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar yang lebih inklusif, termasuk investasi dalam sistem penyediaan air bersih, perluasan jaringan sanitasi berbasis lingkungan, serta program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna memastikan akses yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar ini.

2) Infrastruktur Digital untuk Transformasi Ekonomi dan Layanan Publik

Percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi kunci dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa pada tahun 2023, sekitar 65 persen wilayah di Indonesia masih mengalami kesenjangan akses internet, terutama di daerah luar Jawa, termasuk Kalimantan Timur. Kota Bontang sebagai salah satu pusat industri strategis membutuhkan infrastruktur digital yang lebih maju untuk meningkatkan daya saingnya. Saat ini, meskipun sebagian besar area perkotaan di Bontang telah memiliki akses internet, masih terdapat desa-desa di wilayah

pinggiran yang belum menikmati layanan internet berkualitas tinggi. Pembangunan jaringan serat optik, peningkatan kapasitas infrastruktur 5G, serta integrasi layanan digital dalam pemerintahan perlu dipercepat guna meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi digital yang lebih inklusif di Kota Bontang dan sekitarnya.

3) **Infrastruktur Irigasi dan Bangunan Air untuk Mendukung Swasembada Pangan**

Kebijakan infrastruktur irigasi dan bangunan air menjadi faktor penting dalam upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia. BPS mencatat bahwa sekitar 54 persen lahan pertanian di Indonesia masih bergantung pada air hujan, yang membuat produktivitas pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim dan musim kemarau panjang. Kota Bontang, meskipun bukan daerah agraris utama, berperan penting dalam mendukung rantai pasok pangan di Kalimantan Timur dan dapat memanfaatkan pembangunan infrastruktur air untuk mengembangkan sektor pertanian berbasis teknologi. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah pembangunan waduk dan embung untuk mendukung irigasi pertanian lokal, serta pemanfaatan teknologi irigasi tetes guna meningkatkan efisiensi penggunaan air. Dengan infrastruktur yang memadai, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan, ketahanan pangan lebih terjaga, dan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dapat dikurangi, sehingga mendukung stabilitas ekonomi regional.

2.3.2.3. Isu Regional Provinsi Kalimantan Timur

a. **Program Gratispol: Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial**

Program Gratispol, yang mencakup pendidikan gratis dari SMA hingga S3, diharapkan dapat meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kalimantan Timur. BPS Kalimantan Timur (2023) mencatat bahwa RLS di provinsi ini mencapai 9,4 tahun, yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (9,6 tahun). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, guna mendukung transformasi SDM yang lebih kompetitif. Selain itu, BPJS gratis bagi masyarakat miskin menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, program Umroh gratis bagi marbot masjid menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan apresiasi terhadap pengabdian masyarakat. Implementasi program ini harus diiringi dengan sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kalimantan Timur.

b. **Integrasi Ekonomi dengan Kawasan Industri Balikpapan dan Samarinda**

Balikpapan dan Samarinda merupakan dua pusat ekonomi utama di Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan industri dan perdagangan di wilayah ini. BPS Kalimantan Timur (2023) mencatat bahwa kontribusi Balikpapan dan Samarinda terhadap PDRB provinsi mencapai lebih dari 60 persen, dengan dominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kota Bontang memiliki potensi untuk semakin terintegrasi dengan kawasan industri ini, terutama dalam mendukung rantai pasok bahan baku dan tenaga kerja terampil. Salah satu tantangan dalam integrasi ekonomi ini adalah konektivitas infrastruktur, termasuk peningkatan jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan ketiga kota. Untuk meningkatkan daya saing regional, perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, termasuk dalam insentif investasi, penyediaan lahan industri, serta

pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri di kawasan ekonomi Kalimantan Timur.

c. Kesiapan Kota Bontang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Dengan adanya IKN dan berkembangnya kawasan industri di Kalimantan Timur, Kota Bontang memiliki peluang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional, terutama dalam sektor jasa dan industri manufaktur. BPS Kota Bontang (2024) mencatat bahwa sektor industri menyumbang lebih dari 76,33 persen terhadap PDRB kota ini, dengan dominasi sektor migas dan petrokimia. Namun, untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih beragam, Bontang perlu memperkuat sektor jasa, seperti perdagangan, logistik, dan pariwisata industri. Infrastruktur pendukung, seperti perluasan pelabuhan dan pengembangan kawasan industri baru, juga perlu dipercepat untuk meningkatkan daya saing Bontang sebagai kota industri. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, seperti industri kimia hijau dan produk berbasis bio energi, dapat memperkuat posisi Bontang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di era transformasi industri.

d. Transformasi Ekonomi dari Sektor Tambang ke Industri Berkelanjutan

Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam mentransformasi ekonominya dari ketergantungan pada pertambangan ke ekonomi berbasis industri alternatif dan energi terbarukan. BPS Kalimantan Timur (2023) mencatat bahwa sektor pertambangan masih menyumbang lebih dari 45 persen PDRB provinsi, yang membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong pemanfaatan lahan eks tambang untuk pertanian, perikanan, dan industri berbasis bio energi. Beberapa proyek percontohan, seperti pengembangan tanaman energi di lahan pasca tambang dan rehabilitasi ekosistem dengan agroforestri, telah mulai diterapkan di beberapa kabupaten. Selain itu, investasi dalam industri energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan *bio fuel*, semakin didorong untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Dengan strategi ini, Kalimantan Timur, termasuk Kota Bontang, dapat membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan.

e. Beban APBD Provinsi Kaltim: Jalan Tembus Mahakam Ulu dan Pengendalian Banjir di Samarinda-Balikpapan

Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, terutama untuk penyelesaian jalan tembus Mahakam Ulu dan pengendalian banjir di Samarinda dan Balikpapan. APBD Provinsi Kaltim tahun 2024 tercatat sebesar Rp17,7 triliun, dengan sebagian besar alokasi anggaran masih terserap untuk proyek infrastruktur strategis. Salah satu proyek utama adalah pembangunan jalan akses ke Mahakam Ulu, yang hingga kini masih terkendala medan geografis yang sulit. BPS Kaltim (2023) mencatat bahwa hanya sekitar 45 persen jalan di Mahakam Ulu yang berstatus mantap, sehingga aksesibilitas wilayah ini masih sangat terbatas. Sementara itu, Samarinda dan Balikpapan menghadapi masalah banjir kronis, dengan lebih dari 60 persen wilayah perkotaan di Samarinda masuk dalam zona rawan banjir. Oleh karena itu, anggaran besar masih dialokasikan untuk pembangunan drainase, kolam retensi, dan peningkatan kapasitas sungai, guna mengurangi risiko banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial di kedua kota tersebut.

2.3.2.4. Isu Strategis KLHS RPJMD

a. Isu Strategis kewilayahan

Permasalahan pembangunan daerah memberikan gambaran tentang kondisi aktual yang belum sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Perbedaan ini dapat diidentifikasi melalui evaluasi dan kajian terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, sehingga ditemukan kesenjangan antara kondisi masyarakat saat ini dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Isu strategis pembangunan daerah menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mencapai tujuan jangka menengah. Isu-isu ini bersifat kompleks, mencakup berbagai aspek, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan isu strategis KLHS RPJMD Kota Bontang mencakup delapan aspek utama yang mencerminkan tantangan serta prioritas pembangunan daerah. Pada dimensi lingkungan dan tata ruang, terdapat isu Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan, Pencemaran Air dan Udara, Persampahan, serta Tata Kelola Perkotaan yang membutuhkan pengelolaan lebih baik untuk mewujudkan kota yang nyaman dan berkelanjutan. Selain itu, isu Alih Fungsi Lahan, optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan kekritisian air tanah menunjukkan pentingnya pelestarian ekosistem dan pengendalian pemanfaatan lahan. Pada dimensi sosial dan ekonomi, perhatian difokuskan pada Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas, Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran. Ketiga isu ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, isu-isu strategis ini menuntut pendekatan terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Bontang yang ramah lingkungan, kompetitif, dan sejahtera.

Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bontang akan diintegrasikan ke dalam RPJMD dengan menyinkronkan arahan kebijakan KLHS RPJMD ke dalam program pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Bontang. Analisis Silang Isu Strategis Kewilayahan RPJMD ke dalam Visi dan Misi Walikota Bontang sebagai berikut:

Tabel 2.120. Analisis Isu Strategis Kewilayahan RPJMD ke dalam Visi dan Misi Walikota Bontang

Isu Strategis Wilayah	Visi dan Misi Wali Kota Bontang
	Visi: Terwujudnya Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagai Daerah Mitra IKN
1. Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Misi 4: Memperkuat infrastruktur kewilayahan yang berkualitas dan merata
2. Pencemaran Air dan Udara	Misi 5: Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup
3. Persampahan	Misi 4: Memperkuat infrastruktur kewilayahan yang berkualitas dan merata
4. Tata Kelola Perkotaan	Misi 3: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Alih Fungsi Lahan, Optimalisasi RTH, dan Kekritisian Air Tanah	Misi 5: Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup
6. Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial menuju SDM berdaya saing
7. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi yang	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi

Berkelanjutan	yang dinamis dan inklusif
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial menuju SDM berdaya saing Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

2.3.2.5. Penetapan Isu Strategis Kota Bontang

Berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu di atas, Kota Bontang perlu menetapkan beberapa isu strategis utama untuk periode pembangunan ke depan:

- a. Transformasi Ekonomi dan Diversifikasi Sektor Unggulan: Berbasis Perikanan

Kota Bontang perlu melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan industri kimia, salah satunya dengan mengembangkan industri berbasis perikanan. BPS Kota Bontang (2023) mencatat bahwa sektor perikanan hanya menyumbang 2,1 persen dari PDRB kota, meskipun wilayah ini memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan membangun sentra pengolahan hasil laut, memperkuat akuakultur berkelanjutan, serta mengembangkan ekspor *seafood* ke pasar internasional. Pemerintah Kota Bontang dapat mendorong investasi di sektor ini melalui penyediaan infrastruktur *cold storage*, pasar lelang ikan, serta peningkatan teknologi pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Selain itu, program pelatihan dan bantuan bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan perlu diperkuat agar sektor ini mampu berkembang menjadi salah satu pilar utama ekonomi Kota Bontang.

- b. Penguatan SDM dan Reformasi Pendidikan untuk Kebutuhan Industri

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Bontang masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan industri yang semakin berkembang. BPS Kota Bontang (2023) mencatat bahwa sekitar 58 persen tenaga kerja hanya berpendidikan maksimal SLTA, yang menyebabkan ketimpangan dengan tuntutan industri modern. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempercepat program pelatihan vokasi berbasis industri, bekerja sama dengan perusahaan dalam penyediaan program magang dan sertifikasi keterampilan, serta mengembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja. Sektor pendidikan juga perlu diperkuat dengan pembangunan sekolah kejuruan dan politeknik industri, terutama yang berfokus pada teknologi pengolahan perikanan dan industri kreatif. Dengan peningkatan kualitas SDM yang berorientasi pada keterampilan, Kota Bontang dapat mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja luar dan meningkatkan daya saing ekonominya di tingkat regional dan nasional.

- c. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Peningkatan Infrastruktur perkotaan di Kota Bontang sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat peran kota dalam konteks regional terutama dengan adanya Ibu Kota Nusantara.

Peningkatan ini harus menyentuh beberapa aspek, antara lain, infrastruktur konektivitas, air limbah domestik, air minum, dan persampahan. Sebagai salah satu pusat industri strategis di Provinsi Kalimantan Timur, penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai seperti akses jalan untuk

distribusi, pasokan air dan energi yang stabil dan sistem logistik yang efisien, sangat penting untuk efisiensi operasional industri dan menarik investasi baru.

Dengan posisi sebagai Kota Pesisir, Kota Bontang sangat rentan terhadap bencana banjir yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan berdampak pada kerusakan infrastruktur. Meski data menunjukkan luas wilayah banjir yang menurun dengan sangat signifikan, namun upaya mitigasi dan adaptasi tetap menjadi prioritas untuk mencapai kondisi kota yang tangguh dan bebas banjir.

Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang, peran infrastruktur perkotaan sangat penting sebagai katalisator untuk mendorong investasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, serta mendorong sektor perdagangan dagangan dan jasa.

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi isu krusial untuk mencapai visi pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Permasalahan mendasar yang perlu diatasi adalah birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, yang berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan kurang optimalnya koordinasi antar-instansi. Selain itu, pelayanan publik yang belum berkualitas optimal, sering kali masih berorientasi pada prosedur manual yang memakan waktu, serta kurangnya inovasi dalam penyediaan layanan yang mudah diakses dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi birokrasi menjadi prioritas utama dengan fokus pada pembangunan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas, kompeten, dan profesional, serta penyederhanaan struktur organisasi yang lebih ramping dan efektif. Selaras dengan itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus diwujudkan melalui transformasi digital yang komprehensif, dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, mudah, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ini termasuk pengembangan standar pelayanan yang jelas, mekanisme pengaduan yang efektif, dan peningkatan kapasitas SDM pelayan publik.

Oleh karena itu, optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi berbasis digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel merupakan isu penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Bontang. Hal ini menekankan perlunya integrasi kebijakan dan program yang sistematis untuk mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan, guna menciptakan ekosistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan modern, selaras dengan semangat *smart city* di Kota Bontang.

e. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sebagai kota industri pesisir, Kota Bontang menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, terutama terkait pencemaran industri, serta penurunan kualitas air dan udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kota Bontang mencapai 67,71 dan lebih rendah dibandingkan kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah kondisi indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan yang berada pada kategori sedang.

Industri-industri besar di Kota Bontang seperti pupuk, petrokimia, dan gas alam yang secara inheren merupakan pengguna energi tinggi dan berpotensi

menghasilkan emisi GRK signifikan terutama CO₂, CH₄, dan N₂O, baik dari proses produksi (emisi proses) maupun konsumsi energi. Optimalisasi operasional dan pertumbuhan sektor ini tanpa mitigasi yang substansial akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jejak karbon regional dan nasional. Tahun 2024, intensitas emisi GRK tahunan di Kota Bontang tercatat sebesar 39,25. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap unit *output* ekonomi yang dihasilkan di Kota Bontang, terdapat emisi GRK sebesar 39,25 CO₂ *equivalen*. Secara umum, semakin rendah intensitas emisi GRK maka semakin baik kualitas udara di sebuah daerah. Sebagai bagian dari komitmen nasional Indonesia dalam *National Determined Contribution (NDC)* di bawah perjanjian Paris, Kota Bontang memiliki mandat untuk berkontribusi pada penurunan emisi GRK dan peningkatan kapasitas adaptasi.

Kota Bontang terletak di kawasan pesisir dengan ekosistem esensial seperti *mangrove*, padang lamun dan terumbu karang yang tidak hanya berfungsi sebagai *buffer* alami terhadap abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga sebagai penyerap karbon biru (*blue carbon*) yang sangat efisien. Tekanan dari aktivitas industri, urbanisasi, alih fungsi lahan dan limbah dapat mengancam kelestarian ekosistem ini, yang dapat mempengaruhi kapasitas alami kota untuk menyerap emisi.

Dalam menyikapi isu di atas, Pemerintah Kota Bontang perlu memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri, melaksanakan konservasi dan restorasi ekosistem pesisir, menerapkan kebijakan energi hijau di sektor manufaktur, serta mempercepat program rehabilitasi hutan lindung dan hutan kota. Selain itu, penerapan konsep ekonomi sirkular, seperti daur ulang limbah industri dan pemanfaatan energi terbarukan, dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas industri. Dengan strategi ini, Kota Bontang dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang tetap selaras dengan kelestarian ekosistemnya.

f. Keberlanjutan Program Kesejahteraan Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran

Meskipun Kota Bontang memiliki pertumbuhan ekonomi migas yang mengalami kontraksi sebesar 2,51 persen, namun pertumbuhan ekonomi non migas meningkat menjadi 9,40 persen ditahun 2024. Pertumbuhan ekonomi non migas yang sangat tinggi idealnya harus diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang signifikan. Dengan TPT sebesar 7,06 persen yang masih tergolong cukup tinggi ditahun 2024, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat *jobless growth* (pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja yang cukup) atau lapangan kerja yang tercipta tidak sesuai dengan kualifikasi lapangan kerja yang tersedia.

Tingkat kemiskinan sebesar 3,74 persen ditahun 2024 tergolong baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bontang telah berhasil menurunkan kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan ekstrim, namun masih menyisakan kelompok rentan yang bergantung pada program kesejahteraan. Pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan sosial, seperti BPJS gratis bagi masyarakat miskin, bantuan pendidikan, dan program peningkatan keterampilan tenaga kerja, namun tantangan utama terletak pada keberlanjutan pendanaan dan efektivitas pelaksanaan program. Untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, diperlukan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti pengembangan UMKM, program wirausaha bagi keluarga miskin, serta insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dari kelompok berpenghasilan rendah.

g. Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN

Kota Bontang, dengan posisi strategis di pesisir Kalimantan Timur, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi superhub ekonomi dan mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN bukan hanya membuka gerbang bagi pemerataan pembangunan, tetapi juga menciptakan gelombang peluang yang bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Bontang. Terletak di antara Samarinda dan Kutim, serta memiliki akses langsung ke Selat Makassar, Bontang menjadi titik persimpangan logistik yang ideal. Keberadaan Pelabuhan Nasional Loktuan yang sudah beroperasi dan industri besar seperti PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT Badak NGL, memberikan modal awal berupa infrastruktur dan ekosistem industri yang matang. Ini adalah fondasi kuat yang siap dikembangkan untuk mendukung kebutuhan IKN, mulai dari pasokan energi hingga logistik material.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Kota Bontang termasuk kawasan superhub ekonomi IKN yang berpotensi dalam pengembangan klaster pariwisata, ekonomi kreatif, kawasan peruntukan industri, rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku industri, pengembangan pelabuhan laut, dan pengembangan transportasi berkelanjutan. Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, Kota Bontang merupakan salah satu simpul ekonomi regional yang strategis dan siap mendukung pertumbuhan IKN melalui kekuatan industri, sumber daya manusia, dan logistik.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis berjangka 5 (lima) tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang kemudian dirinci dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, serta program prioritas pembangunan. Untuk konteks Kota Bontang, penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 secara fundamental didasarkan pada visi, misi, dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029. Proses perumusan ini tidak hanya berakar pada agenda lokal, tetapi juga diselaraskan secara hierarkis dan vertikal. Penyelarasan tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2025-2045, serta secara simultan mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, RPJMD Kota Bontang juga disinkronkan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Integrasi vertikal dan horizontal ini memastikan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah.

3.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

3.1.1. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJMN tahun 2025-2045 dan mendukung Kalimantan Timur sebagai Penggerak *Superhub* Ibu Kota Nusantara yang berperan sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, maka Kota Bontang mengokohkan diri sebagai kota industri dan jasa yang menjadi ciri khas dan motor utama penggerak ekonomi Kota Bontang sejak tahun 1974. Memperhatikan hal itu, maka visi jangka panjang **Bontang Sentosa 2045** sebagai **Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan**. Bontang Sentosa merupakan cita-cita untuk membangun daerah yang aman, damai dan juga makmur dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini diwujudkan untuk menjadi kota yang nyaman dan layak huni, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim dengan hubungan sosial masyarakatnya yang harmonis serta didukung dengan keberadaan infrastruktur perkotaan yang modern dan perekonomian yang kuat serta berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan visi tersebut, Kota Bontang berupaya untuk menjadi daerah dengan perekonomian daerah yang tumbuh berbasis hilirisasi industri dan jasa, memiliki pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, daya saing dan inovasi daerah meningkat, kualitas SDM meningkat yang disertai dengan kualitas lingkungan hidup meningkat dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *nett zero emission*.

Tabel 3.1. Sasaran Visi RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045

No	Sasaran Visi	Target Tahap I Tahun 2029	Target Akhir Tahun 2045
1.	Peningkatan Pendapatan per kapita		
	a. PDRB Per Kapita (Rp juta)	604,72	1.517,98
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	79,48	82,65
	c. Kontribusi PDRB Sektor Jasa (%)	5,96	6,99
	d. Kontribusi PDRB Terhadap Provinsi (%)	7,41	7,66
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	3,50 – 3,08	0,07 – 0,30
	b. Indeks Gini	0,277-0,307	0,270 0 0,291
3.	Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah		
	a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,84	8,19
	b. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,42	4,1
4.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
	a. Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	83,94	91,69
5.	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK(%)	57,25	55,51
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	75,16	77,9

Sesuai dengan Arah Kebijakan tahap I Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD Kota Bontang 2025–2045. Pada tahap ini, arah pembangunan difokuskan pada **Penguatan Fondasi Transformasi**. Prioritas utama pada tahap ini adalah untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial merupakan bagian integral dari visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu dalam rangka memberikan landasan yang kuat pada transformasi ekonomi dilakukan melalui persiapan hilirisasi industri untuk memberikan nilai yang lebih tinggi pada suatu produk dengan mengubah produk mentah menjadi produk jadi. Hal ini lakukan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan tersebut, pada tahap I pelaksanaan RPJPD ini juga diarahkan pada penguatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur pendukung dan peningkatan akses pasar baik domestik maupun internasional. Selain itu dukungan kelembagaan yang adaptif dan responsive serta peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan transformasi tata kelola pemerintahan efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan. Sejalan dengan itu, pembangunan sosial, budaya dan ekologi juga menjadi hal yang penting sebagai landasan yang mendasari pembangunan secara keseluruhan. Adapun arah kebijakan pada setiap misi RPJPD Kota Bontang 2025-2045 untuk tahap 1 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 3.2. Fokus Arah Kebijakan RPJPD Kota Bontang 2025-2045

Misi	Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 (2025-2029)
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Produktif dan Inklusif	Persiapan hilirisasi industri dan penguatan produktivitas tenaga kerja
Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkelas Dunia	Penguatan kelembagaan yang lincah dan peningkatan kualitas ASN
Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Daerah dan Stabilitas Ekonomi Yang Tangguh	Penguatan kondusivitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi
Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berbasis Kearifan Lokal	Penguatan pembangunan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan pembangunan daerah
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan kawasan strategis daerah
Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan perkotaan
Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Penguatan pengendalian dan pembiayaan pembangunan daerah

Untuk mendukung visi Bontang Sentosa 2045, maka RPJPD Kota Bontang tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yang diturunkan menjadi 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan Tahap I

NO.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	RPJMD I (2025-2029)	
Misi 1: Transformasi Sosial Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing	1	Kesehatan untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,93	76,04	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak			
					a	Jumlah Kematian Ibu (%)	0	0
					b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20	16,94
				3	Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk			
					a	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	97,88	98,31
					b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95	95,9
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	
		2	Pendidikan berkualitas yang merata	5	Hasil Pembelajaran			
					a	Persentase siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					- Literasi Membaca		86,13	88,66
					- Numerasi		80,22	83,92
					b	Persentase siswa SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					- Numerasi		80,22	84,18
					- Literasi Membaca		86,13	88,9
					c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,02	10,79
					d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,7	14,18
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	17	17,6	
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	75,4	77,92	

NO.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	RPJMD I (2025-2029)
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	3	Perlindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	3,8	3,08
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100	100
3	Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi unggulan daerah	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	10	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	78,69	79,48
				11	Kontribusi PDRB sektor jasa (%)	4,65	5,46
				12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,81	1,79
				13	Jumlah Tamu Wisatawan mancanegara (Orang)	1.634	1.747
				14	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif (Usaha)	177	257
				15	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%)	0,024	0,092
				16	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,29	5,962
				17	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,37	0,47
				18	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-1	0,2
		19	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	61	64,8		
		5	Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,35	7,07
21	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal (%)			69,51	73,65		
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			58,26	58,946		
4	Meningkatnya taraf hidup ekonomi masyarakat yang layak dan berkeadilan	6	Transformasi digital	23	Persentase Penggunaan Internet 3 Bulan Terakhir (%)	90	91,6
		7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	24	Disparitas Harga (%)	1,25-±1%	1,25-±1%
				25	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	15,81	17,04
				26	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	73,06	74,61
8	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	27	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)*	97,71	97,98		
MISI 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelas Dunia							
5	Penguatan kelembagaan yang lincah dan peningkatan kualitas ASN	9	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	28	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,25	4,3
				29	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	3,2	3,56
				30	Indeks Integritas Nasional (indeks)	78,5	81,28
MISI 4: Mewujudkan Keamanan Daerah dan Stabilitas Ekonomi yang Tangguh							
6		10	Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,05	0,17

NO.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	RPJMD I (2025-2029)
	Meningkatnya keamanan dan stabilitas daerah			32	Indeks Perkembangan Harga (indeks)	1,1±1	1,25±1
				33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	22,42	36,52
				34	Total Kredit/PDRB (%)	12,34	27,12
		11	Ketahanan dan Kondusivitas daerah	35	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,25	3,4
				36	Jumlah kejadian tindak kriminal (kasus)	250	220
7	Meningkatnya toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama dan nilai-nilai budaya	12	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	37	Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0
				38	Persentase Benda, Bangunan , struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%)	2,08	18,75
8	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia	13	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	39	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (indeks)	74,8	78,59
				39	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,29	0,254
9	Meningkatnya pembangunan berwawasan lingkungan	14	Lingkungan hidup berkualitas	40	Kualitas Lingkungan Hidup		
					a Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	73,38	73,99
					b Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	96,82	98,93
					c Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	30	50
		15	Ketahanan Pangan	41	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,23	5,23
		16	Meningkatkan Layanan Air Baku	42	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,473	0,563
				43	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap air minum Air Minum Aman	26,89	41,51
		17	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	122,77	117,86
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%) kumulatif dan tahunan		
					a Kumulatif	0,29	3,29
					b Tahunan	-9,15	16,82

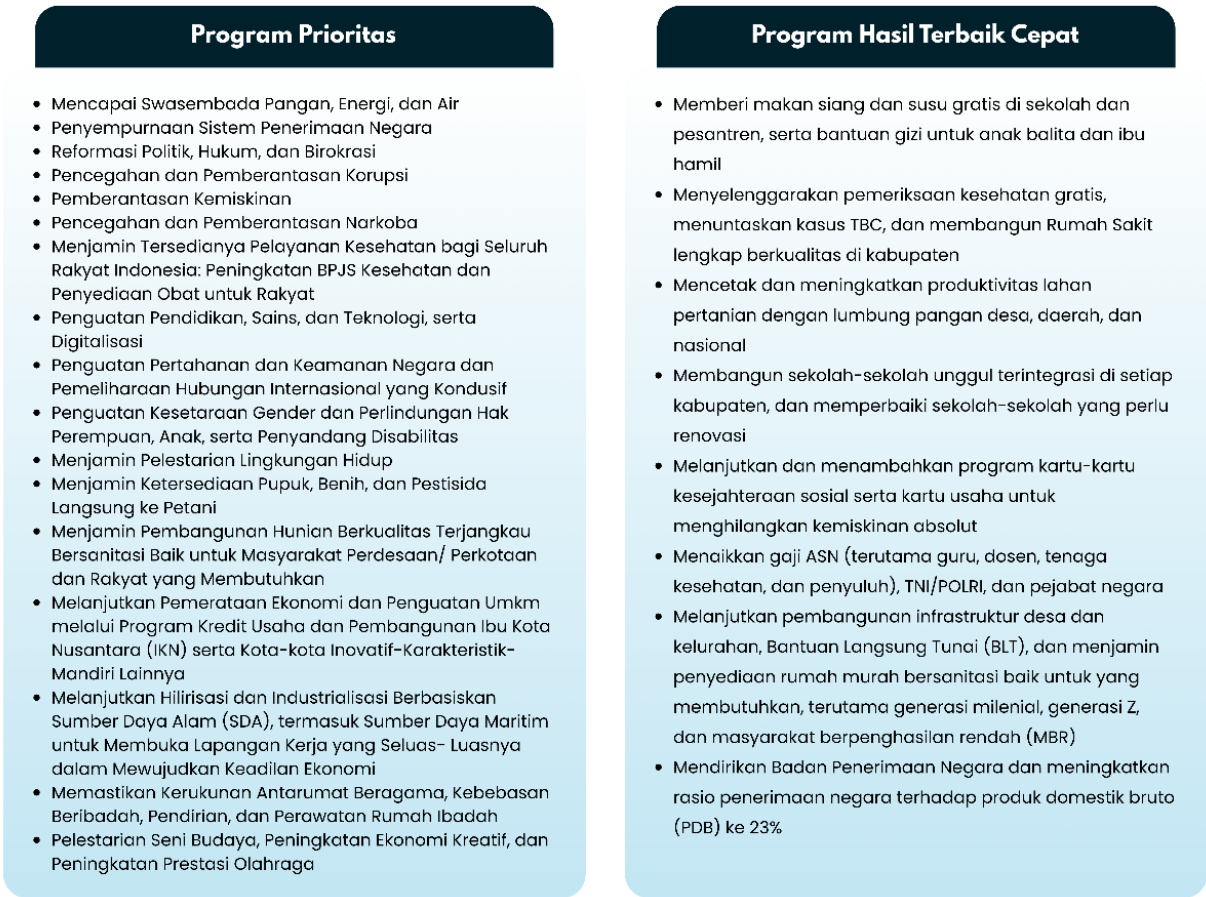
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. 2025

3.1.2. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Bagian Integral Pencapaian Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 menetapkan bahwa visi RPJM Nasional tahun 2025 - 2029 adalah **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi RPJMN tersebut merefleksikan pentingnya sinergi kolektif seluruh elemen bangsa dan pemanfaatan fondasi pembangunan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi yang disebut Asta Cita, yaitu:

- Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
- Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJM Nasional juga memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins* sebagai berikut:



Gambar 3.1. Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025

Dalam rangka pencapaian visi RPJM Nasional yang dituangkan dalam program prioritas dan PHTC, Pemerintah Kota Bontang memberikan dukungan melalui program unggulan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Dukungan Pemerintah Kota Bontang Terhadap PHTC dan Program Strategis Nasional

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Program Strategis Nasional (SEB)	Dukungan RPJMD Kota Bontang	
		Program Unggulan Daerah	Program Prioritas
Makan siang dan susu gratis di sekolah, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Makan bergizi gratis	Pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita dan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Penuntasan kasus TBC, Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas	Jaminan kesehatan nasional	Jemput bola cek kesehatan warga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Cek kesehatan darah rutin lengkap dan narkoba gratis bagi ASN, PPPK dan TKD	
		Tes kesehatan berkala dan pemberian konsultasi/terapi ke siswa dan mahasiswa yang mempunyai permasalahan kesehatan mental	
		Pembangunan/rehabilitasi rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B dan puskesmas	
		Pemenuhan SDM, sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas	
		Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat dan jaminan kesehatan bagi warga yang tidak ditanggung oleh BPJS	
		Pemberian subsidi biaya pengobatan yang tidak ditanggung BPJS untuk masyarakat yang dirawat di rumah sakit	
Peningkatan produktivitas lahan pertanian (lumbung pangan desa, daerah, nasional)	Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah	Program penyediaan cadangan pangan pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Food Bank Bontang	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Pembangunan sekolah unggul terintegrasi, renovasi sekolah	Sekolah rakyat	Dukungan lahan pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8 ha di Kelurahan Bontang Lestari	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Perluasan akses pendidikan dengan proyek kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Pengadaan sarana/prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pembangunan/peremajaan gedung-gedung sekolah negeri dan swasta	
		Penambahan dan pengadaan bus sekolah dan kapal laut angkutan sekolah	

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Program Strategis Nasional (SEB)	Dukungan RPJMD Kota Bontang	
		Program Unggulan Daerah	Program Prioritas
		Pemberian alat perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, sepatu, laptop/tablet dan tas sekolah	
		Satu guru, satu laptop	
		Insentif bantuan pendidikan bagi siswa SD dan SMP	
		Insentif guru swasta	
		Beasiswa UKT	
		Beasiswa tenaga kesehatan, warga miskin, guru, dosen, dan ASN	
		Fasilitasi kursus keterampilan bagi semua umur dan pendidikan kesetaraan usia 16-40 tahun	
		Pengembangan program vokasi Bontang melalui pembangunan Bontang Techno Park dan pengembangan program studi di perguruan tinggi	Program Riset dan Inovasi Daerah
Program kartu kesejahteraan sosial	Optimalisasi pelaksanaan pengetasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Dana stimulan untuk lansia miskin, anak berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, miskin ekstrem dan janda miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Subsidi pemasangan jaringan air PDAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Insentif untuk kader sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pinjaman 0 persen (Kredit Bontang Kreatif)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Food Bank Bontang	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Gratis biaya PLN dan air bersih bagi warga miskin ekstrem	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, BLT, penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR	Pembangunan 3 juta rumah	Program regenerasi kampung Bontang melalui pembangunan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Pengendalian inflasi		Program Kawasan Permukiman
		Gerakan Pangan Murah (GPM)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Program Strategis Nasional (SEB)	Dukungan RPJMD Kota Bontang	
		Program Unggulan Daerah	Program Prioritas
		Warung Tekan Inflasi (Warteg In) bekerja sama dengan Bulog	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Pembentukan koperasi Merah Putih di 15 kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Kemudahan perizinan di daerah	Perizinan Online (PO): Kemudahan proses perizinan berbasis online yang terintegrasi dengan OSS	Program Pelayanan Penanaman Modal

Selaras dengan visi RPJM Nasional tersebut, maka Provinsi Kalimantan Timur di dalam RPJMD tahun 2025-2029 menetapkan visi **Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas**. Visi tersebut mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa **“Semua Bisa Sukses”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan yaitu:

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
- Misi 2 : Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Komoditas Unggul Daerah;
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
- Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Misi di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 memuat Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yaitu Gratispol yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan unggulan dan Jospol yang terdiri dari 9 (sembilan) arah kebijakan unggulan, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Program Unggulan Gubernur dalam RPJMD Provinsi

Program Unggulan Gratispol	Program Unggulan Jospol
1. Gratis Bersekolah SMAK hingga S3 2. Gratis Biaya Berobat & Layanan Kesehatan 3. Gratis Makanan Bergizi 4. Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa 5. Gratis Seragam Sekolah 6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah 7. Gratis Haji dan Umroh untuk Marbot	1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan & perluasan areal tanam berbasis pertanian modern 2. Pengembangan teknologi & inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri & layanan publik 3. Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah 4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM 5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa 6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan 7. Pembangunan infrastruktur di seluruh kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional 8. Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata 9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan Kerjasama antara pemda, pusat, & swasta

3.1.3. Visi Pembangunan Daerah

RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari pencapaian visi RPJM Nasional tahun 2025-2029 dan pencapaian visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Kota Bontang untuk tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih adalah:

"TERWUJUDNYA KOTA BONTANG SEBAGAI KOTA INDUSTRI DAN JASA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DAERAH MITRA IKN"

Visi Kota Bontang tahun 2025–2029 menggambarkan tekad kuat untuk menjadikan Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Pelaksanaan Pembangunan di Kota Bontang dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis pada potensi unggul daerah sebagai kota industri dan mengembangkan sektor jasa yang diharapkan akan menjadi katalisator dalam pembangunan yang akan membawa Kota Bontang menjadi kota yang maju sebagai mitra bagi pengembangan IKN. Adapun penjelasan kata kunci visi RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

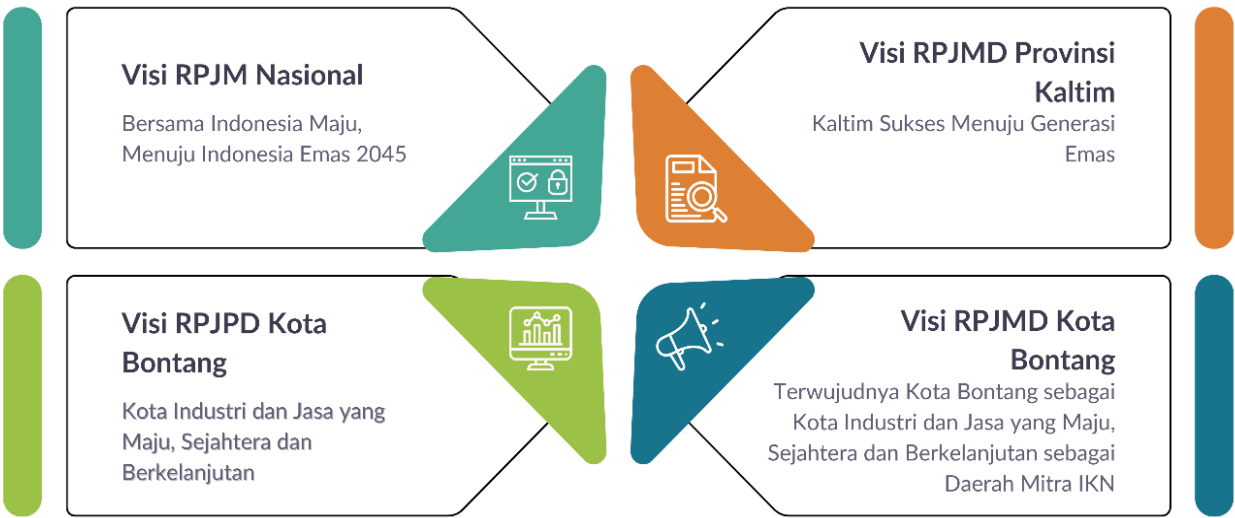
Kota Industri dan Jasa, merupakan ciri khas Kota Bontang. Sejak awal berdirinya Kota Bontang merupakan kota yang dibangun dari sektor industri. Diawali dengan berdirinya PT Badak NGL pada tahun 1974 dan PT Pupuk Kalimantan Timur pada tahun 1977 lalu diikuti dengan berdirinya industri-industri lain di Kota Bontang. Industri menjadi ciri khas sekaligus penggerak perekonomian di Kota Bontang. Kota Industri menegaskan peran Bontang sebagai pusat industri berbasis energi, petrokimia dan oleokimia, manufaktur, hilirisasi dan sektor strategis lainnya yang berdaya saing tinggi. Sedangkan Bontang sebagai kota jasa, termasuk perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan Ibu Kota Negara juga menjadi peluang bagi Kota Bontang untuk menjadi mitra dalam pembangunan IKN terutama dalam pembangunan *super hub* ekonomi IKN yang menjadi arah kebijakan pembangunan bagi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang di dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Maju dimaknai sebagai wujud keberhasilan pembangunan Kota Bontang yang tumbuh sebagai kota industri dan jasa unggulan di Kalimantan Timur. Kota Bontang yang maju dinyatakan dengan kemajuan ekonomi yang progresif, yakni pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, dan diversifikasi berbagai sektor yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi Bontang. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang maju, kualitas infrastruktur perkotaan di Kota Bontang juga ditingkatkan menjadi perkotaan yang modern, layak huni, dan berkelanjutan. Kota Bontang yang Maju tahun 2029 adalah Kota Bontang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama pada ekonomi lokal sehingga terjadi diversifikasi ekonomi yang baik pada sektor-sektor di luar industri pengolahan dan terjadinya stabilitas harga barang.

Sejahtera, dapat dipahami sebagai kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, merata dan berkeadilan. Kota Bontang yang Sejahtera tahun 2029 ditandai dengan pengentasan kemiskinan (*zero poverty*), turunnya tingkat pengangguran, menurunnya ketimpangan pendapatan penduduk, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, serta memiliki ketahanan keluarga sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonominya (materiil) maupun sosial (spiritual) secara adil dan merata.

Berkelanjutan, berkelanjutan dimaknai sebagai kota yang tumbuh dengan semangat menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengabaikan kualitas lingkungan hidup. Setiap langkah pembangunan dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem. Bontang berkomitmen menjadikan kelestarian alam sebagai bagian dari identitas kota, guna menciptakan ruang hidup yang sehat, produktif, dan harmonis bagi seluruh warganya. Kota Bontang yang berkelanjutan juga ditandai dengan meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi bencana yang komprehensif, adaptif dan tangguh.

Daerah Mitra IKN (Ibu Kota Nusantara), merupakan penegasan peran strategis Kota Bontang dalam mendukung pengembangan dan kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peran strategis Kota Bontang diperkuat dengan penetapan Kota Bontang sebagai salah satu kawasan *superhub* ekonomi di wilayah sekitar IKN, sehingga Bontang dapat berkontribusi dalam penyediaan jasa, industri, dan sumber daya, termasuk tenaga kerja, bahan baku, serta produk industri dan jasa lainnya. Posisi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan infrastruktur di Kota Bontang. Selain itu, sinergi dengan IKN memungkinkan peningkatan konektivitas, kolaborasi bisnis, serta percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan menjadi mitra IKN, Bontang dapat mengoptimalkan potensinya untuk menjadi kota yang lebih maju, kompetitif, dan berkelanjutan.



Gambar 3.2. Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kota Bontang dan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025 -2029

3.1.4. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Visi Kota Bontang 2025–2029: **"TERWUJUDNYA KOTA BONTANG SEBAGAI KOTA INDUSTRI DAN JASA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DAERAH MITRA IKN"**, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kota Bontang sebagai berikut.

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Oleh karena itu, misi ini berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan sebagai faktor utama dalam pembangunan manusia. Dengan meningkatkan indeks pendidikan, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Selain

itu, peningkatan indeks kesehatan mencerminkan upaya perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan dan perlindungan sosial menjadi aspek penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui berbagai program sosial yang berbasis inklusi dan kesejahteraan, masyarakat miskin diberikan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Upaya ini mencakup pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, fasilitasi permodalan usaha, serta program perlindungan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, tingkat kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.

Di sisi lain, peningkatan daya saing tenaga kerja menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif. Melalui peningkatan keterampilan dan penguatan sektor ketenagakerjaan, angka pengangguran terbuka dapat ditekan secara optimal. Pemerintah berperan dalam menyediakan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung pertumbuhan industri lokal. Dengan strategi ini, diharapkan sumber daya manusia di daerah mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, serta turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga juga merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Pemuda yang berdaya dan masyarakat yang aktif secara fisik cenderung lebih sehat, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, dan mampu beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih dinamis, produktif, dan berdaya saing.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif

Transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif di Kota Bontang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Peningkatan nilai investasi menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, dengan mendorong masuknya investasi di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dengan meningkatnya kontribusi sektor-sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kota Bontang dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih beragam, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Transformasi ekonomi yang inklusif juga menekankan pengembangan sektor industri pengolahan non-migas sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam struktur PDRB, Kota Bontang dapat memperkuat daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah berperan dalam memberikan kemudahan investasi, penguatan infrastruktur ekonomi, serta pelatihan bagi tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan industri modern. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Kota Bontang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan yang memastikan distribusi barang dan jasa berjalan lancar, serta mengurangi disparitas harga antar wilayah. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan menjadi prioritas dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Dengan strategi ini, Kota

Bontang dapat menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan tangguh terhadap fluktuasi harga serta perubahan kondisi global.

Misi 3: Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan landasan utama dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kota Bontang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang selaras, transparan, dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perolehan opini positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan tata kelola yang akuntabel, setiap kebijakan dan program pembangunan akan lebih efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi Kota Bontang. Digitalisasi pemerintahan terus didorong untuk mempercepat akses layanan, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik yang semakin baik mencerminkan efektivitas program transformasi digital dan kesiapan aparatur dalam memberikan layanan berbasis teknologi. Dengan demikian, pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dapat diwujudkan demi kemajuan Kota Bontang.

Inovasi daerah menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Kota Bontang terus mendorong pengembangan berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat guna meningkatkan efisiensi serta daya saing daerah. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan solusi kreatif yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang modern, inovatif, dan berbasis data, Kota Bontang siap menjadi model pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

Misi 4: Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas dan Merata

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menciptakan Kota Bontang yang layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang modern dan tangguh, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur diwujudkan melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, termasuk jalan, jembatan, sistem transportasi massal, air bersih, air limbah, pengendalian banjir, penyediaan hunian layak, pelayanan kebakaran, dan penyediaan gedung pemerintah. Upaya ini memastikan aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi layanan publik, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mempercepat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur perkotaan, pengelolaan tata ruang yang berkualitas dan merata menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kota ini yang akan berkembang secara harmonis dan mencegah urbanisasi yang tidak terkendali.

Dengan memperkuat infrastruktur kewilayahan secara merata, Kota Bontang siap menjadi kota yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

Misi 5: Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup

Misi ini berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi pencemaran, serta menerapkan konsep pembangunan hijau. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan mutu lingkungan melalui pemantauan dan peningkatan kualitas air, udara, dan lahan. Selain itu, melalui program mitigasi dan adaptasi yang terencana, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara bertahap, sejalan dengan target yang ditetapkan.

Salah satu pendekatan strategis dalam misi ini adalah mengintegrasikan promosi ekonomi hijau dan ekonomi biru guna memperkuat pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Ini diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, optimalisasi efisiensi pengelolaan persampahan dan limbah, serta pengembangan infrastruktur hijau yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam kerangka ekonomi biru, potensi sumber daya laut dan pesisir akan dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan sinergi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha, Kota Bontang bertekad mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim, sekaligus menciptakan basis ekonomi dan ekosistem yang lestari untuk keberlanjutan generasi mendatang.

Misi Pembangunan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 sebagaimana di atas telah diselaraskan dengan 6 (misi) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta 8 misi RPJPD Tahun 2025-2029, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Misi ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan.

Tabel 3.6. Keselarasan Misi RPJMD Kota Bontang dengan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJPD Kota Bontang

MISI RPJM NASIONAL	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	MISI RPJMD KOTA BONTANG	MISI RPJPD KOTA BONTANG
ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (gen-milenial dan gen-Z) dan penyandang disabilitas.	MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	MISI 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing	MISI 1: Transformasi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal		MISI 4: Mewujudkan Keamanan Daerah dan Stabilitas Ekonomi yang Tangguh
ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	MISI 2: Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah	MISI 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif	MISI 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inklusif
ASTA CITA 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			MISI 8 : Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan
ASTA CITA 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).	. MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	MISI 3 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	MISI 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkelas Dunia
ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.			
ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan	MISI 3 : Meningkatkan Pembangunan	MISI 4 : Memperkuat infrastruktur	MISI 6: Mewujudkan Pembangunan

MISI RPJM NASIONAL	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	MISI RPJMD KOTA BONTANG	MISI RPJPD KOTA BONTANG
infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Guna Menunjang Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan	kewilayahan yang berkualitas dan merata	Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			MISI 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
ASTA CITA 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	MISI 6 : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	MISI 5 : Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	MISI 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berbasis Kearifan Lokal

3.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 selanjutnya visi tersebut diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang merefleksikan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja spesifik dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara *cascading* dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang akan menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah.

Visi Kota Bontang diturunkan menjadi 3 (tiga) tujuan pembangunan yang diambil dari 3 (tiga) kata kunci yaitu maju, sejahtera dan berkelanjutan dengan didukung oleh penyelenggaraan tata kelola yang baik dan akuntabel. Perwujudan Kota Bontang Sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Mitra IKN, ditandai dengan kinerja di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan sumber daya manusia, serta peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup. Sementara itu untuk perwujudan tata kelola pemerintahan merupakan pendukung bagi terwujudnya semua tujuan pembangunan daerah. Secara *Cascading* Kinerja, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan pada gambar 3.3.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dari tahun 2025-2030. Pengukuran sampai dengan tahun 2030 dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pencapaian pembangunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan pembangunan merupakan internalisasi sebagian indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk target kinerja telah memperhatikan target indikator kinerja dalam RPJPD Kota Bontang Tahun 2025-2045 tahap pertama. Salah satu aspek penting dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengarahkan agar pemerintah daerah segera mempersiapkan diri untuk peningkatan penilaian, dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indeks Pemdi mulai tahun 2026. Dengan demikian, target Indeks SPBE yang saat ini menjadi sasaran pembangunan Kota Bontang akan disesuaikan menjadi target Indeks Pemdi mulai tahun 2026.



Gambar 3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD 1 Bontang Tahun 2025–2029

Tabel 3.7. Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Kinerja					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T1. Terwujudnya Kota Bontang yang Maju	IT1. LPE			Persen	-2,51	1,00-1,15	1,15-2,00	2,01-3,09	3,09-3,93	3,93-4,40	4,40-4,70
	IT2. LPE non-Migas			Persen	9,40	5,00	5,50	6,50	7,50	8,00	9,00
		S1. Meningkatnya Nilai Investasi	IS1. Pertumbuhan Nilai investasi	Persen	12,97	3,00	10,00	5,00	5,00	5,00	3,00
		S2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	IS2.1. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	Persen	1,21	1,36	1,51	1,66	1,81	2,05	2,10
			IS2.2. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	3,17	3,75	3,80	3,85	3,90	4,10	4,21
			IS2.3. Kontribusi PDRB Sektor Jasa	Persen	4,38	4,51	4,64	4,76	4,89	5,02	5,46
			IS2.4. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	0,67	0,72	0,77	0,83	0,88	1,05	1,08
		S3. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	IS3. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	-4,99	0,22	0,44	0,60	0,68	0,72	0,76
		S4. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	IS4. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Persen	76,38	77,00	79,64	82,55	85,48	87,53	88,56
		S5. Terwujudnya Stabilitas harga	IS5. Indeks Perkembangan Harga	Indeks	N/A	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1
		S6. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	IS6. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	88,89	89,14	89,39	89,64	89,89	90,14	90,39
	S7. Meningkatnya Daya Saing Daerah	IS7. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,62	3,65	3,71	3,79	3,90	4,01	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Kinerja					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T2. Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	IT2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	82,49	82,83 – 83,18	83,19 – 83,53	83,53 – 83,87	83,88 – 84,22	84,23 – 84,45	84,46 - 84,58
		S8.Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	IS8.1. Indeks Pendidikan	Indeks	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80
			IS8.2. Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87
	IT2.2. Tingkat Kemiskinan			Persen	3,74	3,73-3,40	3,40-3,15	3,15-2,88	2,88-2,03	2,03-1,61	1,60-0,00
		S9. Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif	IS9. Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	7,78	8,44	16,88	25,32	33,76	42,19	50,63
			S10.Meningkatnya Ketahanan Keluarga	IS10. Indeks pembangunan keluarga	Indeks	65,30 (2023)	74,80	75,60	76,50	77,40	78,59
	IT2.3. Indeks Gini			Indeks	0,330	0,330-0,300	0,323-0,310	0,310-0,300	0,300-0,290	0,290-0,286	0,286-0,281
		S11. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	IS11. Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	7,06	6,78-6,65	6,60-6,05	6,05-5,25	5,25-5,05	5,05-4,67	4,68-3,95
T3. Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan	IT3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	67,71	73,38	73,54	73,69	73,84	73,99	74,15
		S12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	IS12.1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	1,90	15,89	18,54	3,01	3,16	3,23	3,74
			IS12.2. Indeks Risiko Bencana	Indeks	116,57	115,57-114,57	113,57-112,57	111,57-110,57	109,57-108,57	107,57-106,57	105,57-104,57
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IT4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			Indeks	81,49	82,32	83,89	85,47	87,05	88,62	90,20
		S13. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	IS13.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Angka	70,04	70,90	73,00	75,00	80,10	85,00	90,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline	Target Kinerja					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintah (SAKIP)								
			IS13.2. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		S14.Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	IS14.1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,28	4,32	4,35	4,38	4,41	4,44	4,47
			IS14.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,66	90,85	91,00	91,15	91,65	92,15	92,65
			IS14.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	3,39	3,59	1,70-2,00	1,70-2,00	2,15-2,50	2,15-2,50	2,51-2,75

3.1.6. Penyelarasan Indikator Makro pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kaltim serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi esensial untuk mencapai target sasaran RPJMN yang didukung oleh sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di kedua tingkatan tersebut. Lebih lanjut, upaya ini menjamin RPJMD Kota yang harmonis dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi, menjamin sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta memastikan dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan provinsi dan nasional.

Dukungan RPJMD Kota Bontang untuk pencapaian target indikator kinerja makro pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan merumuskan target indikator kinerja makro pembangunan yang koheren dengan mempertimbangkan intervensi kebijakan serta karakteristik dan potensi daerah. Penyelarasan target indikator makro dilakukan dengan menyandingkan target indikator makro nasional dan provinsi dengan target indikator makro Kota Bontang sebagaimana yang telah diamanatkan dalam arah kebijakan wilayah RPJM Nasional Tahun 2025 untuk Kalimantan Timur dan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Bontang. Adapun indikator makro Kota Bontang yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per-Kapita, Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.8. Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD Kota Bontang terhadap Target Makro RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Indikator Makro	Target RPJM Nasional		Target RPJMD Provinsi Kaltim			Target RPJMD Kota Bontang					
	2025	2029	2025	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,8 (rata-rata)	8,60	6.4	8.6	8,75	1,00-1,15	1,15-2,00	2,01-3,09	3,09-3,93	3,93-4,40	4,40-4,70
IMM / Indeks Pembangunan Manusia	0,59	0,62	0,59	0,62	0,63	82,83 – 83,18	83,19 – 83,53	83,53 – 83,87	83,88 – 84,22	84,23 – 84,45	84,46 – 84,58
Tingkat kemiskinan (%)	4,24-5,05	2,37-3,37	4.24-5.05	2.37-3.37	1,75–2,37	3,73-3,40	3,40-3,15	3,15-2,88	2,88-2,03	2,03-1,61	1,60-0,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60-5,14	4,14-4,77	4,60-5,14	4,14-4,77	3,95–4,68	6,65-6,78	6,05-6,60	5,25-6,05	5,05-5,25	4,67-5,05	3,95-4,68
Indeks Gini	0,310-0,321	0,309-0,313	0.310-0.321	0.309-0.313	0,308-0,309	0,330-0,300	0,323-0,310	0,310-0,300	0,300-0,290	0,290-0,286	0,286-0,281
PDRB per Kapita (juta rupiah)	237,1	326,9	237.1	326.9	349,60	357.90-370,51	370,51-383,12	383,12-408,86	408,86-425,26	425,26-442,31	442,31-460,05

Selain itu, untuk mendukung komitmen nasional pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka perlu dilakukan sinkronisasi terhadap target TPB hingga tahun 2030 sebagai upaya resolusi isu-isu sosial, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan Pembangunan Hijau. Ini memastikan bahwa setiap capaian tingkat daerah berkontribusi secara koheren pada agenda pembangunan berkelanjutan global. Keselarasan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan TPB dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Sasaran RPJMD Kota Bontang 2025-2029		TPB/SDGs Terkait	
S1	Meningkatnya Nilai Investasi	T8 T9	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
S2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	T8 T9	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
S3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	T8 T9	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	T6 T9	Air Bersih dan Sanitasi Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
S5	Terwujudnya Stabilitas harga	T2	Tanpa Kelaparan
S6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	T2	Tanpa Kelaparan
S7	Meningkatnya Daya Saing Daerah	T8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
S8	Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	T3 T4	Kehidupan Sehat & Sejahtera Pendidikan Berkualitas
S9	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	T1 T10	Tanpa Kemiskinan Mengurangi Ketimpangan
S10	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	T3 T5	Kehidupan Sehat & Sejahtera Kesenjangan Gender
S11	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	T4 T8	Pendidikan Berkualitas Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	T7 T11 T12 T13 T15	Energi Bersih dan Sanitasi Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Penanganan Perubahan Iklim Ekosistem Daratan
S13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	T16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
S14	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	T16 T17	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Keselarasn tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang dengan TPB merefleksikan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pemeliharaan keberlanjutan kehidupan

sosial, serta preservasi kualitas lingkungan hidup. Lebih lanjut, hal ini mengukuhkan upaya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan menjamin peningkatan kualitas kehidupan lintas generasi.

3.1.7. Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025 - 2045

Penyelarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebuah keharusan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Proses ini fundamental untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun (RPJMD) benar-benar terintegrasi dan berkontribusi secara langsung pada pencapaian visi dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang mencakup periode 20 tahun.

Keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD 2025-2029 akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan tahapan RPJPD pada periode-periode lima tahunan berikutnya hingga 2045. Ini memastikan bahwa setiap periode RPJMD membangun di atas capaian sebelumnya, menciptakan akumulasi kemajuan yang signifikan.

Tabel 3.10. Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
T1. Terwujudnya Kota Bontang Yang Maju	
S1. Meningkatnya Nilai Investasi	AP4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	AP7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
S2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi	AP4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	AP12. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
S3. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	AP4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
S4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yang Maju dan merata	AP8. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	AP16. Meningkatkan Layanan Air Baku
S5. Terwujudnya Stabilitas Harga	S7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	S10. Stabilitas Ekonomi Makro
S6. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	S15. Ketahanan Pangan
S7. Meningkatnya Daya Saing Daerah	S11. Ketahanan dan Kondusifitas Daerah
T2. Terwujudnya Kota Bontang Yang Sejahtera	
S8. Meningkatnya Kualitas dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan	AP1. Kesehatan Untuk Semua
	AP2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata
S9. Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif	AP3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045
S10. Meningkatnya Ketahanan Keluarga	AP13. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
S11. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	AP5. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja
T3. Terwujudnya Kota Bontang Yang Berkelanjutan	
S12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kota	S14. Lingkungan Hidup Berkualitas
	S17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
S13. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	S9. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
S14. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan Yang Inovatif	S6. Transformasi Digital
	S9. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

3.1.8. Penyelarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025 – 2029

Penyelarasan sasaran dengan misi pembangunan memastikan kesinambungan antara *outcome* pembangunan yang diekspektasikan dengan inisiatif strategis yang dirancang untuk mewujudkan visi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Mengingat sasaran merupakan derivasi dari tujuan, perumusannya harus merefleksikan *deliverable* pembangunan daerah yang esensial dalam realisasi tujuan dan bagian integral dari misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, koherensi antara sasaran dan misi membentuk basis fundamental bagi perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi "Terwujudnya Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagai daerah mitra IKN."

Tabel 3.11. Keselarasan Sasaran dengan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2025 - 2029

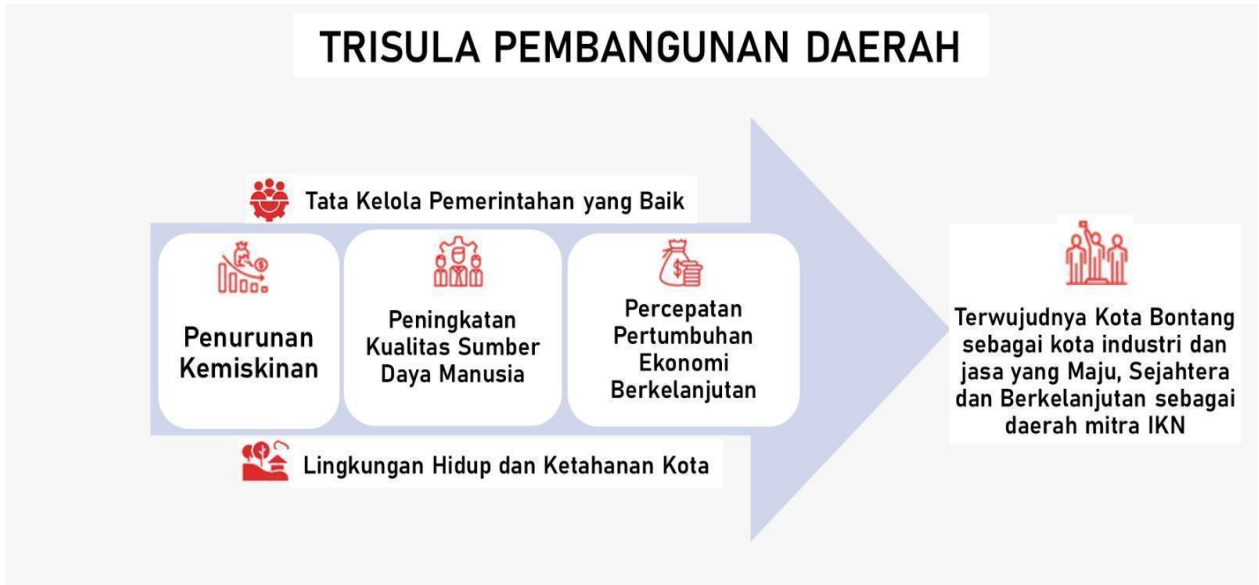
Sasaran		Misi
S7	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing
S8	Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	
S9	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	
S10	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	
S11	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	
S1	Meningkatnya Nilai Investasi	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif
S2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal	
S3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan	
S5	Terwujudnya Stabilitas harga	
S6	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	
S13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
S14	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	

Sasaran		Misi
S4	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	Misi 4 : Memperkuat infrastruktur kewilayahan yang berkualitas dan merata
S12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	Misi 5 : Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup

3.2. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi Prioritas Pembangunan

Untuk mewujudkan Kota Bontang yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, strategi prioritas pembangunan diselaraskan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029, yakni ditekankan pada penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau disebut juga dengan **Trisula Pembangunan Daerah**.



Gambar 3.4. Trisula Pembangunan Daerah

Strategi prioritas untuk menurunkan kemiskinan dilaksanakan melalui peningkatan perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin dengan memberikan bantuan langsung tunai, bantuan pendidikan, kesehatan, subsidi kebutuhan dasar dan pemenuhan prasarana dasar, serta jaminan sosial;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, bantuan modal usaha, serta peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan potensi tenaga kerja;
3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui penataan kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh maupun di luar kawasan kumuh;

Strategi prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan dengan beberapa upaya, antara lain:

1. Perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Bontang melalui pemberian insentif bantuan biaya pendidikan, peralatan dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa dan guru, transportasi sekolah gratis, dan pemenuhan prasarana pendidikan PAUD/SD/ SMP sederajat,

- serta subsidi UKT dan beasiswa bagi tenaga kesehatan, jenjang pendidikan dasar hingga S1, S2 dan S3, dan/atau pendidikan spesialis;
2. Peningkatan kompetensi masyarakat melalui pengembangan program pendidikan vokasi dan keahlian dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan formal dan non formal serta penyediaan fasilitas *co-working space* untuk meningkatkan produktivitas kerja komunitas dan masyarakat;
 3. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas untuk semua, melalui jaminan kesehatan bagi seluruh warga, cek kesehatan gratis, pembangunan/pengembangan rumah sakit tipe B, C dan D, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah singgah bagi pasien rujukan di kota lain, serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
 4. Peningkatan kesehatan rohani masyarakat melalui program *mental health*, perjalanan bagi masyarakat yang berprestasi di bidang olahraga, pendidikan, sosial, seni budaya dan agama, dan pembangunan/rehabilitasi prasarana ibadah dan olahraga.

Strategi prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dilaksanakan dengan beberapa upaya, antara lain:

1. Akselerasi peningkatan investasi pada sektor unggulan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengembangkan kawasan peruntukan industri dan infrastruktur pendukungnya ;
2. Pengembangan ekonomi hijau dan biru berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lingkungan maritim dan darat Bontang yang mencakup pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, budidaya perikanan berkelanjutan, *ecotourism*, serta pengelolaan limbah terintegrasi menjadi energi atau produk lain;
3. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM;
4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jalur distribusi dan mobilisasi antar pusat-pusat ekonomi.
5. Peningkatan kapasitas, riset dan inovasi industri berbasis teknologi cerdas dengan memperkuat ekosistem industri eksisting melalui adopsi teknologi 4.0, riset dan pengembangan yang mendorong efisiensi produksi, inovasi produk, dan daya saing global;

Agar Strategi Prioritas Pembangunan Daerah dapat secara efektif mewujudkan Trisula Pembangunan Daerah, implementasinya harus ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal, pelaksanaan program yang efisien, serta pencapaian target yang tepat sasaran. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks ini meliputi beberapa aspek kunci, yakni transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, partisipasi publik, supremasi hukum dan responsif. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan bukan hanya prasyarat, tetapi juga pemberi dukungan utama bagi keberhasilan implementasi strategi pembangunan, memastikan bahwa visi “Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan sebagai Daerah Mitra IKN” terwujud dan sekaligus berhasil mendukung keberhasilan visi Provinsi Kalimantan Timur “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” serta visi Nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dan merupakan elemen krusial yang menjembatani antara rumusan misi daerah dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih konkret. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan di dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029.

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga hingga jenjang perguruan tinggi;
2. Peningkatan kemampuan dasar literasi dan numerasi;
3. Optimalisasi kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri untuk mengembangkan program vokasi;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
5. Peningkatan kemudahan akses layanan kesehatan;
6. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
7. Peningkatan kualitas, partisipasi dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah;
8. Peningkatan pembudayaan olahraga masyarakat dan pengembangan prestasi olahraga;
9. Peningkatan akses masyarakat ke sumber daya ekonomi dan program permodalan usaha;
10. Perluasan dan penguatan perlindungan sosial;
11. Peningkatan sistem penyaluran tenaga kerja dan kesempatan kerja;
12. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
13. Peningkatan pengarusutamaan gender, pemuda, penyandang disabilitas dan perlindungan anak;
14. Pengendalian jumlah penduduk;

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif

Arah Kebijakan:

1. Penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
2. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas melalui intensifikasi dan diversifikasi;
3. Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor perikanan melalui modernisasi dan industrialisasi;
4. Peningkatan nilai perdagangan dan jasa melalui peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
5. Peningkatan nilai usaha koperasi dan BUMDes;
6. Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis kearifan lokal;
7. Peningkatan pelestarian kebudayaan berbasis kearifan lokal;
8. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan-non migas;
9. Pengembangan kawasan industri strategis;
10. Optimalisasi pasokan bahan pokok penting;
11. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan serta penganekaragaman pangan dan pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman).
12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Misi 3: Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengawasan;
2. Peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan di setiap Perangkat Daerah;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah;
5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah;
6. Peningkatan tata kelola arsip;
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
8. Peningkatan kualitas produk hukum daerah;

9. Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa;
10. Peningkatan kualitas tata kelola kebijakan administrasi pembangunan;
11. Peningkatan implementasi manajemen kepegawaian;
12. Peningkatan tata kelola administrasi pengurusan perizinan/ non perizinan;
13. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
14. Peningkatan kualitas pelayanan publik ke masyarakat di Kecamatan;
15. Peningkatan kualitas pelayanan DPRD;
16. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
17. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan *smart government*;
18. Peningkatan kinerja penyelenggaraan informasi geospasial;
19. Optimalisasi penanganan potensi konflik.

Misi 4: Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas dan Merata.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan upaya penanggulangan banjir;
2. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal;
4. Penguatan kerja sama antara pusat, provinsi dan swasta dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas perumahan dan penataan kawasan permukiman yang inklusif dan layak huni;
6. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan yang berkelanjutan;
7. Peningkatan kualitas bangunan pemerintah;
8. Peningkatan kualitas layanan kebakaran dan penyelamatan di lingkungan pemukiman dan di luar permukiman;

Misi 5: Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim

Tabel 3.12. Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi
T1. Terwujudnya Kota Bontang yang Maju	S1. Meningkatnya nilai investasi	a. Penciptaan stabilitas keamanan daerah; b. Pemenuhan perencanaan dan kebijakan investasi; c. Penguatan kebijakan dan harmonisasi regulasi penanaman modal untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi serta pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang kompetitif dan terarah pada sektor-sektor prioritas atau sektor-sektor baru yang memiliki dampak ekonomi besar; d. Penguatan data dan informasi perizinan serta peningkatan pengawasan terkait kepatuhan perizinan; e. Peningkatan promosi investasi yang inovatif.
	S2. Meningkatnya produktivitas sektor ekonomi lokal	a. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dengan lokus prioritas pada kawasan pertanian produktif; b. Pendampingan dan peningkatan kapasitas petani; c. Pengembangan hilirisasi produk-produk hasil pertanian yang inovatif; d. Fasilitasi kemudahan akses permodalan; e. Pengendalian bencana pertanian; f. Penguatan kerja sama antar daerah, swasta, dan masyarakat; g. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan berupa pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional dan modern, sentra UMKM, sentra produk unggulan, rumah produksi bersama dan sentra kuliner; h. Pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM; i. Mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha dan wirausaha baru; j. Peningkatan fasilitasi akses pemasaran produk UMKM; k. Digitalisasi manajemen dan pemasaran UMKM; l. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal; m. Penguatan kemitraan pasar modern dengan UMKM lokal; n. Peningkatan kerja sama antar daerah; o. Pembangunan sentra industri kecil dan menengah; p. Pendirian dan pengembangan koperasi simpan pinjam, usaha simpan pinjam, dan koperasi jasa, serta Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan; q. Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang telah beroperasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas; r. Penguatan kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas pengurus koperasi; s. Pembentukan dan pengembangan BUMDes yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		t. Penguatan ekosistem industri halal dan rantai industri halal; u. Penguatan kewirausahaan dan UMKM halal; v. Perluasan infrastruktur dan ekonomi syariah; w. Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM; x. Penguatan daya tarik wisata yang unik dan beragam dan pengembangan destinasi wisata tematik; y. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta aksesibilitas antar destinasi; z. Peningkatan promosi pariwisata; - aa. Peningkatan kapasitas SDM pelaku industri pariwisata; - bb. Penyelenggaraan <i>event</i> berskala regional dan nasional; - cc. Penguatan kelembagaan dan tata kelola kelompok sadar wisata; - dd. Penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata; - ee. Peningkatan peran lembaga keuangan mikro, BUMDes dan koperasi dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat terutama masyarakat miskin; - ff. Pemberian pendampingan usaha, akses pasar, dan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi usaha; - gg. Fasilitasi bantuan permodalan dan peralatan bagi pelaku usaha, pelaku usaha (startup UMKM), dan pelaku ekonomi kreatif; - hh. Perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.
	S3. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan dengan menitik beratkan pada lokus prioritas di kawasan pesisir; b. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya melalui pasokan benih unggul berkelanjutan, serta pemantauan kualitas air dan kesehatan ikan; c. Pendampingan dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya; d. Pengembangan hilirisasi sektor perikanan; e. Penguatan transisi ekonomi menuju <i>blue economy</i>; f. Penguatan inovasi dan penggunaan teknologi pada sektor perikanan; g. Penguatan kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat; h. Fasilitasi produk hilirisasi industri non-migas dengan mengedepankan <i>branding</i> daerah; i. Peningkatan prasarana penunjang sektor industri; j. Pengendalian usaha industri dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. k. Pengembangan kawasan peruntukan industri Bontang lestari; l. Peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan utilitas dasar untuk menunjang infrastruktur kawasan industri yang terintegrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S4. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata	a. Peningkatan kapasitas tampungan sungai/ waduk/danau melalui normalisasi dan perkuatan tebing; b. Penataan sistem jaringan drainase perkotaan; c. Penataan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau dan jalur inspeksi; d. Pembangunan bangunan pengendali banjir berupa polder dan kolam depresi; e. Pengembangan infrastruktur pengendali banjir yang adaptif seperti <i>ecodrainase</i>; f. Pengembangan sistem peringatan dini yang responsif dan dapat diakses oleh masyarakat dan semua <i>stakeholder</i>; g. Penguatan kerja sama dengan provinsi dan Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan banjir; h. Peningkatan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam penanggulangan banjir melalui pembuatan lubang biopori, sumur resapan, kerja bakti dan pembuangan sampah sesuai ketentuan yang berlaku; i. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang yang responsif terhadap dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan; j. Optimalisasi upaya implementasi pemanfaatan ruang; k. Peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melibatkan peran serta masyarakat; l. Optimalisasi penatagunaan tanah; m. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang mantap dan tangguh; n. Pengembangan sistem jaringan jalan dan jembatan; o. Pemenuhan dan peningkatan kualitas perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis dan operasional; p. Penyediaan sistem transportasi umum yang terintegrasi untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas/pertumbuhan ekonomi dan seluruh wilayah; q. Penyediaan angkutan umum gratis dan peningkatan aksesibilitas serta kenyamanan pengguna transportasi darat; r. Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan pelabuhan umum nasional dan pengusulan rute pelayaran baru dari dan ke Kota Bontang; s. Penguatan fasilitasi dan kerja sama pemanfaatan bandara khusus PT Badak untuk bandara umum; t. Penguatan kerja sama pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum di Kawasan Industri Bontang Lestari. u. Mendorong dan mendukung pembangunan SPAM Regional untuk meningkatkan kapasitas air minum;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		v. Peningkatan kualitas dan cakupan air minum yang layak dan aman; w. Pengendalian penggunaan air baku dari air tanah untuk air minum; x. Peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman; y. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau; z. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; aa. Penataan kawasan permukiman kumuh; bb. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas permukiman;
		cc. Pembangunan dan peningkatan kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS; dd. Peningkatan upaya pengurangan sampah melalui optimalisasi bank sampah dan pemilahan sampah dari sumbernya, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat; ee. Peningkatan upaya penanganan sampah; ff. Optimalisasi pengelolaan sampah spesifik dan limbah B3; gg. Penguatan kerja sama regional dan internasional dalam upaya pengelolaan sampah; hh. Pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah; ii. Pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran, rumah ibadah, rumah negara dan bangunan pemerintah lainnya; jj. Pengembangan konsep bangunan <i>green building</i> sebagai salah satu upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan; kk. Penguatan aspek pencegahan dan mitigasi kebakaran; ll. Peningkatan kesiapsiagaan melalui SDM dan sarana prasarana; mm. Peningkatan efektivitas respons darurat.
	S5. Terwujudnya Stabilitas harga	a. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan; b. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang; c. Peningkatan kerja sama antar daerah untuk menyediakan <i>supply</i> bahan pokok penting; d. Pemantauan ketersediaan bahan pokok penting; e. Peningkatan kesadaran masyarakat khususnya untuk mengurangi <i>food waste</i> melalui program <i>food bank</i> .
	S6. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan; b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang berkualitas; c. Peningkatan pengawasan pangan aman; d. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pangan lokal yang kreatif; e. Edukasi dan sosialisasi pola konsumsi B2SA; f. Penguatan kelembagaan dan kemitraan; g. Dukungan infrastruktur dan aksesibilitas pangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
	S7. Meningkatkan Daya Saing Daerah	a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kebudayaan; b. Meningkatkan promosi seni dan budaya; c. Meningkatkan kapasitas pelaku seni dan budaya; d. Peningkatan indikasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan berbasis kearifan lokal; e. Penetapan dan pelestarian cagar budaya dan warisan benda tak benda; f. Peningkatan penyelenggaraan <i>event</i> seni dan budaya seperti pesta laut, erau dan pesta budaya lainnya; g. Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam Pembangunan; h. Pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda; i. Peningkatan kapasitas pemuda berbasis teknologi dan inovasi; j. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan olahraga; k. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga; l. Pengembangan olahraga Pendidikan; m. Pembinaan olahraga prestasi; n. Pembudayaan olahraga Masyarakat.
T2. Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	S8. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan	a. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan; b. Peningkatan kualitas dan kompetensi serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan Pendidikan; c. Pengembangan sistem manajemen layanan pendidikan melalui penguatan implementasi muatan dan kurikulum pembelajaran; d. Percepatan wajib belajar 13 tahun melalui pemenuhan akses 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah; e. Pemenuhan pembiayaan pendidikan melalui pemberian insentif biaya pendidikan bagi masyarakat Bontang dan peningkatan insentif bagi tenaga pendidik; f. Pengembangan bahan ajar kontekstual dan media pembelajaran inovatif; g. Kampanye literasi dan numerasi daerah; h. Peningkatan kerja sama antara sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan industri dalam penyelarasan kurikulum dan program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja; i. Pengembangan program pelatihan bersertifikasi bekerja sama dengan industri, BUMN, dan perguruan tinggi; j. Pengembangan program vokasi melalui pembangunan Bontang <i>Techno Park</i>;

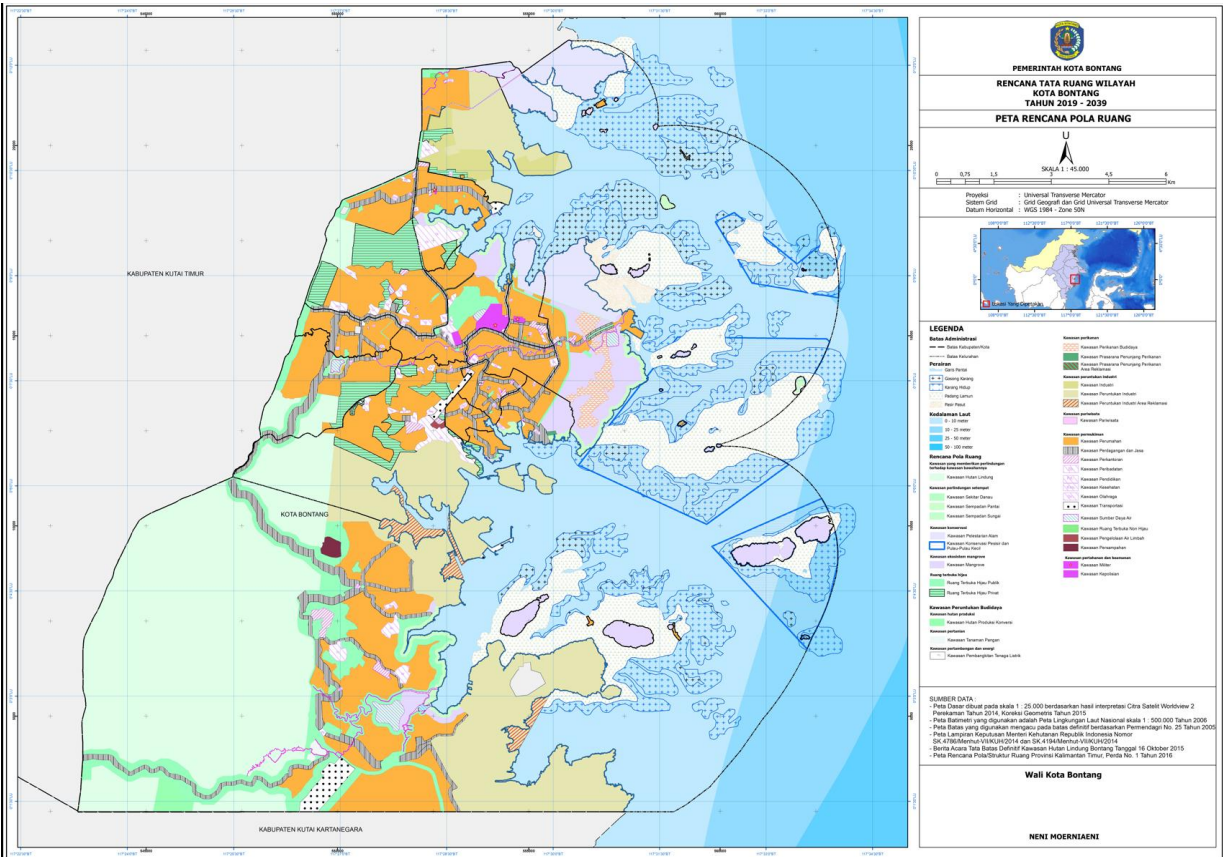
Tujuan	Sasaran	Strategi
		k. Peningkatan kemudahan akses kesehatan bagi seluruh warga terutama warga pesisir dan pulau-pulau kecil; l. Peningkatan upaya kesehatan Masyarakat; m. Penyediaan pembiayaan kesehatan gratis melalui <i>universal health coverage</i>; n. Pengembangan sistem manajemen layanan Kesehatan; o. Keterjangkauan layanan kesehatan ibu dan anak, terutama pada wilayah prevalensi <i>stunting</i> tinggi; p. Penguatan aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>; q. Pengembangan rumah sakit tipe B dan pembangunan rumah sakit tipe C, tipe D dan rumah sakit ibu dan anak; r. Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan; s. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar; t. Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat; u. Penyediaan layanan kesehatan sesuai standar; v. Penguatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan melalui advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan KIE.
	S9. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	a. Pemberian bantuan layanan dasar bidang sosial bagi PPKS; b. Pemberian keterampilan dan bimbingan bagi warga miskin; c. Penguatan kerja sama multipihak dalam pengendalian judi dan penyalahgunaan narkoba; d. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, penguatan kelembagaan PUG, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan kelompok rentan.
	S10. Meningkatnya Ketahanan Keluarga	a. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), keterampilan dan akses pembiayaan; b. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak; c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan mengendalikan kuantitas (fertilitas) dan kualitas penduduk serta pengarahannya (migrasi) penduduk; d. Penguatan Program Keluarga Berencana Komprehensif.
	S11. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	a. Peningkatan pelatihan, keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar; b. Pembuatan MoU/kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan/balai latihan kerja bagi pencari kerja yang tersertifikasi; c. Fasilitasi akses peluang kerja bagi warga miskin dan pekerja rentan; d. Perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
T3. Terwujudnya Kota Bontang yang Berkelanjutan	S12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan kota	a. Penguatan Perencanaan Lingkungan Hidup; b. Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan; c. Optimalisasi pelestarian keanekaragaman hayati termasuk ekosistem <i>mangrove</i>; a. Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup yang berfokus pada kualitas air, tanah dan udara; b. Peningkatan kapasitas masyarakat yang berwawasan lingkungan; c. pemerataan akses terhadap ruang terbuka hijau publik berkualitas melalui pembangunan ‘Satu Kelurahan Satu Taman’, untuk peningkatan kualitas hidup, interaksi sosial, dan ketahanan ekologis masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan; d. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; e. Penguatan kebijakan dan implementasi penggunaan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan pada berbagai sektor; f. Penguatan kolaborasi, kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap bencana dan ancaman perubahan iklim.
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S13. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Peningkatan kapabilitas APIP; b. Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peningkatan kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan; d. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah; e. Peningkatan fasilitasi dukungan inovasi serta pemanfaatan hasil kajian dan budaya inovasi; f. Peningkatan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap perundang-undangan keuangan; g. Penguatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi untuk peningkatan bantuan pendanaan; h. Peningkatan peluang pembiayaan lainnya bagi pemerintah; i. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); j. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan, informasi dan akses layanan arsip; k. Peningkatan capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; l. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah; m. Peningkatan harmonisasi produk hukum daerah; n. Penguatan Perencanaan Pembentukan dan Produk Hukum Daerah; o. Meningkatkan pemenuhan standar ketepatan waktu dan tingkat layanan pengadaan barang/jasa;

Tujuan	Sasaran	Strategi
		p. Penguatan penyusunan program, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan capaian kebijakan daerah; q. Penerapan NSPK manajemen ASN; r. Peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur; s. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum kemasyarakatan dan penguatan sistem keamanan lingkungan; t. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat; u. Sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif; v. Penyediaan materi informasi yang mudah diakses; w. Transparansi dan keterbukaan informasi publik; x. Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi; y. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; z. Penguatan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; - aa. Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
	S14. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif	a. Pengembangan budaya pelayanan prima; b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; d. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan integrasi layanan yang cepat, mudah dan transparan; e. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui inovasi dan aksesibilitas pelayanan meliputi; layanan jemput bola, kerja sama dengan pihak ketiga, dan layanan mandiri; f. Peningkatan pelayanan terhadap anggota DPRD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); g. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahan diantaranya dengan membangun <i>SuperApps</i>, sistem informasi pelayanan publik, MPP digital, satu data, <i>smart map</i>, dan digitalisasi layanan usulan dan aduan Masyarakat; h. Penguatan infrastruktur pendukung teknologi informasi yang berfokus pada pembangunan jaringan fiber optik mandiri, pemenuhan jaringan wifi di kantor pemerintahan dan ruang publik, data center terpadu, dan integrasi CCTV di setiap kelurahan; i. Penguatan kebijakan satu peta; j. Penyediaan data dan informasi geospasial di semua sektor/urusan; k. Pengembangan simpul jaringan daerah; l. Peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial.

3.2.3. **Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan**

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2019-2039 menjadi landasan dalam penyelarasan arah kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan. Keselarasan ini untuk menjamin kebijakan dan program pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 mendukung pencapaian struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.



Gambar 3.5. Rencana Pola Ruang RTRW Kota Bontang 2019-2039
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025

Arah kebijakan juga mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan Kota Bontang. Secara internal, kota dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan komprehensif, antara lain pengendalian banjir, keterbatasan air baku, pengurangan angka pengangguran, percepatan penurunan angka *stunting*, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Di sisi eksternal, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan peluang maupun tantangan, yang perlu diantisipasi dan diintegrasikan secara cermat ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Revisi RTRW Kota Bontang saat ini sedang berjalan, yang salah satu tujuannya adalah mengintegrasikan pembangunan IKN, memperkuat peran Kota Bontang sebagai pusat industri dan jasa, serta mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Proses revisi RTRW yang berjalan paralel dengan penyusunan RPJMD 2025-2029 membuat arah kebijakan pembangunan kewilayahan dilakukan dengan pendekatan yang adaptif, menyesuaikan terhadap kemungkinan perubahan substansial dalam arahan tata ruang, terutama yang berkaitan dengan keberadaan IKN dan penguatan sektor industri-jasa.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Kota Bontang disusun berdasarkan prinsip keterpaduan antara pemanfaatan ruang dan pengendalian

lingkungan. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan strategi pembangunan jangka menengah sudah selaras dan mendukung implementasi kerangka spasial jangka panjang. Kebijakan penataan ruang tersebut meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah kota secara hierarkis dan proporsional;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kota yang merata dan terpadu;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung di ruang darat dan ruang laut;
- d. Peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budidaya;
- e. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kota (KSK) berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan perekonomian kota yang produktif dan kompetitif; dan
- f. Pelestarian dan peningkatan fungsi KSK berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana.

Ada pun arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.13. Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur dengan Arah Kebijakan/Strategi, Program unggulan/Prioritas dan Indikasi Program RTRW Kota Bontang

Highlight Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi	Arah Kebijakan/Strategi	Program Unggulan/Prioritas	Indikasi Program RTRW	Lokasi
1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi 2. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional	1. Optimalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi dan industri untuk pengembangan program vokasi 2. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga hingga jenjang pendidikan tinggi	1. Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri Vokasi; 2. Pembangunan Bontang Techno Park 3. Pembangunan/ peremajaan gedung dan fasilitas pendukung Pendidikan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan	Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat
1. Peningkatan akses layanan kesehatan 2. Penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan	1. Peningkatan kemudahan akses layanan Kesehatan 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	1. Pembangunan/ pengembangan Rumah Sakit (Tipe B, C dan D) 2. Pembangunan/ pengembangan Puskesmas Rawat Inap yang beroperasi 24 jam dan puskesmas pembantu 3. Pembangunan depo farmasi	Pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan	Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat
Pengendalian banjir	Peningkatan upaya penanggulangan banjir: 1. Peningkatan kapasitas tampungan sungai/ waduk/danau melalui normalisasi dan perkuatan tebing 2. Penataan sistem jaringan drainase perkotaan 3. Penataan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau dan jalur inspeksi sungai 4. Pembangunan bangunan pengendali banjir berupa polder dan kolam depresi	1. Bontang bebas banjir rob 2. Pembangunan polder 3. Penataan bantaran sungai	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air: 1. Normalisasi Sungai 2. Pengembangan dan pemeliharaan Danau Kanaan 3. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelimpah banjir (polder)	Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat

Highlight Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi	Arah Kebijakan/Strategi	Program Unggulan/Prioritas	Indikasi Program RTRW	Lokasi
Pelestarian seni, budaya dan kearifan lokal	Peningkatan Pembudayaan Olahraga Masyarakat dan Pengembangan Prestasi Olahraga	1. Pembangunan lapangan mini soccer di setiap kelurahan 2. Pembangunan Sirkuit 3. Pembangunan Sarana Wisma Atlet di Bontang Lestari	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga 2. Pembangunan sirkuit balap	Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri bontang 2. Pengembangan sentra IKM berbasis teknologi	Pengembangan kawasan industri strategis	Klaster industri bontang: Pembangunan sentra industri kecil dan menengah	Pengembangan Kawasan peruntukan industri	Bontang Selatan
1. Pengembangan ekonomi maritim 2. Pengembangan destinasi wisata & creative hub	Peningkatan daya tarik pariwisata berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan wisata Bahari 2. Pembangunan kawasan wisata Waduk Kanaan	1. Pengembangan Kawasan pariwisata 2. Pengembangan dan pemeliharaan Danau Kanaan	Bontang Utara, Bontang Selatan, Bontang Barat
1. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan 2. Penghijauan lingkungan	pemerataan akses terhadap ruang terbuka hijau publik berkualitas melalui pembangunan 'Satu Kelurahan Satu Taman', untuk peningkatan kualitas hidup, interaksi sosial, dan ketahanan ekologis masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan	1. Pembangunan alun-alun 2. Pembangunan satu kelurahan satu taman	Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik	Kota Bontang
Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan berupa pembangunan/ rehabilitasi pasar tradisional dan modern,	Pembangunan/rehabilitasi pasar modern dan pasar basah dan operasional pasar murah	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Bontang Selatan

Highlight Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi	Arah Kebijakan/Strategi	Program Unggulan/Prioritas	Indikasi Program RTRW	Lokasi
	sentra UMKM, sentra produk unggulan dan rumah-rumah produksi			
1. Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang 2. Penyelenggaraan jalan provinsi di Kota Bontang 3. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan 4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal	Pembangunan jalan lingkar	Pembangunan jalan arteri sekunder ruas lingkar pesisir	Bontang Utara, Bontang Selatan
Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	Peningkatan pelestarian kebudayaan berbasis kearifan lokal	1. Pembangunan DOME 2. Pembangunan Gedung Budaya 3. Ruang Bersama bontang (penyediaan coworking space dan ruang pertemuan untuk kegiatan seni dan budaya)	Pembangunan perkantoran pemerintahan beserta fasilitas pendukung dan pelayanan publik lainnya	Bontang Utara, Bontang Selatan
Penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat		Pembangunan/renovasi sarana prasarana Masjid Terapung	Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan	Bontang Utara
Peningkatan produktivitas hasil pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dengan lokus prioritas pada kawasan pertanian produktif	Pembangunan Lahan terpadu ternak babi, potong babi dan jual babi		Bontang Barat

3.2.4. Strategi Penahapan Pembangunan

Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk membangun kota yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan melalui perencanaan yang sistematis dan berbasis data. Dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029, pembangunan diarahkan pada penciptaan fondasi yang kuat di tahun pertama, diikuti dengan implementasi program strategis, perluasan dan penguatan kebijakan, serta evaluasi dan penyempurnaan hingga tahap finalisasi. Setiap tahapan pembangunan dirancang untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang terukur dan partisipatif, pembangunan Kota Bontang diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, investasi, serta kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga.

Melalui lima tahap pembangunan ini, berbagai sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan akan dikembangkan secara progresif. Tahun 2026 menjadi tahun penguatan terjadinya transformasi pembangunan. Tahun 2027 menjadi tahun terjadinya akselerasi pembangunan. Pada tahun 2028, fokus akan bergeser ke perluasan program dan penguatan kapasitas, sebelum akhirnya dievaluasi dan disempurnakan pada tahun 2029 menjadi Bontang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Tahun 2030 akan menjadi momentum finalisasi, memastikan keberlanjutan program serta menciptakan landasan yang kokoh bagi pemerintahan berikutnya. Dengan strategi ini, Kota Bontang akan semakin siap menjadi kota modern yang maju, berdaya saing, dan ramah lingkungan.



Gambar 3.6. Penahapan Pembangunan RPJMD 2025-2029

Berikut ini adalah rincian penahapan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025 – 2029 menuju Kota Bontang yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan:

- 1) **Tahap I (Tahun 2026) – Pengembangan kapasitas SDM dan ekonomi kerakyatan, pemenuhan infrastruktur dasar serta persiapan hilirisasi industri yang inklusif dan berkeadilan sebagai fondasi menuju Kota Bontang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan**

Tahun pertama, 2026, dicanangkan sebagai tahun **Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ekonomi Kerakyatan**. Fokus utama adalah pada peningkatan kualitas dan kompetensi masyarakat serta pemberdayaan ekonomi skala kecil dan menengah.

Bersamaan dengan itu, dilakukan **Pemenuhan Infrastruktur Dasar** yang merata dan berkualitas, seperti akses air bersih, sanitasi, dan konektivitas. Tidak kalah penting, tahun ini juga menjadi momentum **Persiapan Hilirisasi Industri yang Inklusif dan Berkeadilan**. Langkah-langkah awal akan diambil untuk mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, dengan memastikan prosesnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memberikan manfaat yang adil. Tahapan ini menjadi fondasi dalam perjalanan menuju Kota Bontang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

2) Tahap II (Tahun 2027) – Penguatan daya saing SDM, ekonomi kerakyatan, infrastruktur kewilayahan dan investasi dan stabilitas wilayah sebagai upaya akselerasi pembangunan menuju Kota Bontang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Memasuki tahun kedua, 2027, upaya pembangunan diakselerasi dengan fokus pada **Penguatan Daya Saing SDM, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur Kewilayahan, dan Investasi**. Peningkatan kualitas SDM akan terus dilanjutkan agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Ekonomi kerakyatan akan diperkuat melalui berbagai program pendampingan dan akses permodalan. Pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan sentra-sentra ekonomi. Selain itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan **stabilitas wilayah** menjadi penting untuk menarik minat investor dan menjamin kelancaran proses pembangunan. Langkah-langkah ini merupakan upaya percepatan menuju Kota Bontang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

3) Tahap III (Tahun 2028) – Peningkatan kualitas perkotaan dan sistem transportasi yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis serta penguatan industrialisasi dan produktivitas tenaga kerja menuju Kota Bontang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Pada tahun 2028, pembangunan fokus pada **Peningkatan Kualitas Perkotaan dan Sistem Transportasi yang Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Strategis**. Penataan ruang kota akan dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien akan mempermudah mobilitas barang dan jasa dari dan keluar Kota Bontang melalui moda darat, air dan udara yang mendukung aktivitas di pusat-pusat ekonomi dan kawasan strategis kota. Seiring dengan itu, dilakukan **Penguatan Industrialisasi dan Produktivitas Tenaga Kerja**. Upaya hilirisasi industri yang telah dirintis akan semakin ditingkatkan, didukung oleh tenaga kerja yang semakin produktif dan kompeten, sebagai langkah nyata menuju Kota Bontang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

4) Tahap IV (Tahun 2029) – SDM unggul, ekonomi inklusif, perkotaan yang berketahanan, lingkungan yang lestari dan tata kelola yang baik sebagai perwujudan Kota Bontang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Tahun keempat, 2029, menjadi tahun perwujudan berbagai aspek fundamental untuk mencapai visi kota. Fokusnya adalah pada **SDM Unggul, Ekonomi Inklusif, Perkotaan yang Berketahanan, Lingkungan yang Lestari, dan Tata Kelola yang Baik**. SDM yang unggul dan berdaya

saing tinggi menjadi motor penggerak utama. Ekonomi yang inklusif memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. Perkotaan yang berketahanan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim dan bencana. Kelestarian lingkungan menjadi prioritas untuk menjamin kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Semua ini didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sebagai manifestasi konkret Kota Bontang yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

5) Tahap V (Tahun 2030) – Keberlanjutan dan Kestinambungan Pembangunan sebagai Kota Bontang yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Di penghujung periode RPJMD, tahun 2030, fokus utama adalah pada **Keberlanjutan dan Kestinambungan Pembangunan**. Capaian-capaian yang telah diraih selama empat tahun sebelumnya akan dievaluasi dan diperkuat. Berbagai program dan kebijakan akan dipastikan memiliki dampak jangka panjang dan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tahun ini menjadi penegasan komitmen untuk terus bergerak maju sebagai Kota yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, meletakkan dasar yang kuat untuk periode pembangunan selanjutnya

3.2.5. Program Prioritas

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* kinerja. Berikut program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025 – 2029.

Tabel 3.14. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
T1 Terwujudnya Kota Bontang yang Maju											
S1. Meningkatnya Nilai Investasi											
Urusan Penanaman Modal											
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya realisasi investasi	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Persen	7,5	9	8	7	8	8,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Terlayannya pelaku usaha yang mengurus izin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
S2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Lokal											
Urusan Kelautan dan Perikanan											
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	23.028,86	23.491,74	23.975,67	24.481,56	25.010,36	25.563,09	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	3.736,24	3.797,14	3.864,73	3.939,32	4.021,26	4.110,93	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Persen	43,00	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Urusan Pertanian											
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi pertanian	Ton	3.163,84	3.205,98	3.254,75	3.310,43	3.373,33	3.441,16	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
			Produksi peternakan	Ton	3.418	3.428,25	3.440,25	3.454,01	3.469,56	3.486,90	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
9	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Urusan Perdagangan											
10	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya nilai perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		ditingkatkan kualitasnya								
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya daya saing produk ekspor	Persentase Peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	Persen	25	20	16,67	14,29	12,50	11,11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
12	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Memberikan kepastian hukum	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	10	10	10	10	10	10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase usaha mikro yang diperdagangkan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemilik kepentingan	Persen	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
15	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro	Persen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Pariwisata											
16	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	3	3	3	3	3	3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
17	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	100	50	33,30	25	20	16,7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	5	5,10	5,20	5,30	5,50	5,60	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
19	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	pariwisata dan ekonomi kreatif									
Urusan Kebudayaan											
20	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	2,50	3	3,50	4	4,50	5	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
21	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	50	55	60	65	70	75	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
S3. Meningkatkan Produktifitas Sektor Industri Pengolahan											
Urusan Perindustrian											
22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatkan daya saing industri	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	Persen	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
S4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang maju dan merata											
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Persentase cakupan pengelolaan sumber daya air	Persen	74,01	76,10	77,30	79,10	80,38	82,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum perpipaan	Persentase penduduk berakses air minum perpipaan	Persen	89,93	91,61	93,26	94,83	96,35	97,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persen	28,10	21,96	55,70	52,47	49,24	46,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik aman	Persentase penduduk terlayani pengolahan air limbah domestik aman	Persen	6,30	7,72	9,11	10,52	11,91	13,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	74,78	75,52	77,81	80,14	82,50	84,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terwujudnya bangunan gedung daerah dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis	Persen	63,51	64,00	67,11	68,35	68,75	69,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	22,51	22,95	23,26	23,49	23,67	23,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Persen	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya konektivitas jalan yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa	Persentase kemantapan jalan	Persen	89,26	89,42	89,58	89,75	89,92	90,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi	Persen	84,58	85,07	85,82	86,52	87,18	87,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang	Persentase tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang	Persen	85,83	86,67	87,50	88,33	89,17	90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
33	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	7,63	11,02	16,95	22,88	28,81	34,75	
34	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya penanganan dan penataan kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	0	0	31,58	56,82	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Persentase rumah tidak layak huni di permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	Persen	8,70	11,59	18,36	23,19	28,02	32,85	
35	PROGRAM PERUMAHAN DAN	Meningkatnya kualitas rumah milik masyarakat	Persentase rumah layak huni	Persen	97,71	97,78	97,85	97,92	97,98	98,05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH										
36	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas PSU Perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Urusan Pertanahan											
37	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	27,27	45,45	63,64	81,82	90,91	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Urusan Perhubungan											
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jalan yang layak	Persen	45,64	53,46	71,29	76,66	94,14	98,89	Dinas Perhubungan
39	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi standar teknis	Persen	61,11	68,42	78,95	89,47	100	100	Dinas Perhubungan
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
40	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebaran	Persen	100	100	100	100	100	100	
S5. Terwujudnya Stabilitas Harga											
Urusan Perdagangan											
41	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	70,50	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S6. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat											
Urusan Pangan											
42	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90	90	90	90	90	90	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
43	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentaase Daerah Bebas Rawan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
S7. Meningkatnya Daya Saing Daerah											
Unsur Penelitian dan Pengembangan											
44	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Riset yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase Riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	83,3	83,40	83,50	83,60	83,70	83,80	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
45	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	persentase inovasi yang berkelanjutan	Persen	50	52,50	55	57,50	60	62,50	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Urusan Kepemudaan dan Olahraga											
46	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Rasio	0,51	0,52	0,54	0,56	0,57	0,59	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
47	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlit yang berprestasi	Persen	30	27,90	35	30,30	30	27,50	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
T2. Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera											
S8. Meningkatnya Kualitas dan Akses Terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan											
Urusan Pendidikan											
48	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	67,59	70,09	72,59	75,09	77,59	80,09	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Persen	80,77	81,87	82,97	84,07	85,17	86,27	
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	56,49	59,39	62,29	65,19	68,09	70,99	

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Persen	68,09	69,59	71,09	72,59	74,09	75,59	
			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	64,08	65,08	66,08	67,08	68,08	69,08	
49	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
50	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Rasio guru/murid	Rasio	1 ; 30	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	67,25	61,65	61,31	62,17	62,43	62,70	
Urusan Perpustakaan											
51	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan yang menerapkan SNP	Persen	46,59	57	60	63	66	69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kesehatan											
52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah kematian ibu	Orang	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit	Persen	72,52	73	73,5	74	74,5	75	Dinas Kesehatan
			Jumlah kematian balita	Orang	45	43	41	39	37	36	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting	Persen	18	17	16	15	14	13	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	36	40	45	50	60	70	Dinas Kesehatan
			Angka Mortalitas Penyakit	Rasio / 1000 Penduduk	2,6	2,5	2,4	2,3	3,1	2,0	Dinas Kesehatan
			Capaian fasyankes terakreditasi paripurna	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
53	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase fasyankes dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
54	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana distribusi obat dan produksi makanan yang berizin	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya masyarakat hidup sehat	Cakupan Perilaku hidup sehat	Persen	17	19	21	23	25	27	Dinas Kesehatan
S09. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif											
Urusan Sosial											
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
57	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
58	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase validitas data kemiskinan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			Persentase penerimaan manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
S10. Meningkatnya Ketahanan Keluarga											
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
60	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	15	15	25	40	45	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	52	52	52	52	53	53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
61	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	70	75	80	85	90	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
59	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak.	Rasio layanan peningkatan kualitas hidup keluarga (per 1000 jumlah keluarga)	Persen	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
62	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Indeks	805	805	820	820	850	850	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
63	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Nilai	11,88	12,10 - 12	11,90 - 11,84	12,10 - 12	11,90 - 11,80	11,85 - 11,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
64	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderna/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	57	58	59	60	61	62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	7	8	9	10	11	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
S11 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja											
Urusan Ketenagakerjaan											
66	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	15,15	3,41	7,06	14,39	14,65	14,92	Dinas Ketenagakerjaan
67	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja sektor formal	Persen	21	21,50	22	23	24	25	Dinas Ketenagakerjaan
T3. Terwujudnya Kota Bontang yang berkelanjutan											
S12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Ketahanan Kota											
Urusan Lingkungan Hidup											
68	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Indeks	71,34	71,49	71,64	71,79	71,94	72,09	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara	Indeks	83,51	83,71	83,91	84,11	84,31	84,51	Dinas Lingkungan Hidup
69	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persen	54,44	54,45	54,46	54,48	54,49	54,50	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas lahan	Indeks	58,16	58,23	58,30	58,37	58,44	58,51	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan dan/atau Izin Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	100	96	96	100	96	96	Dinas Lingkungan Hidup
71	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Sampah yang terkelola	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
72	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya ketangguhan dalam menghadapi bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Indeks	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Indeks	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase penanganan pasca bencana	Indeks	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
T4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											
S13. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan											
Unsur Sekretariat Daerah											
73	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kegiatan sosial yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Kecamatan dan Kelurahan dengan Capaian Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
74	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Tingkat Pelaksanaan Pembangunan melalui Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Persentase capaian pelaksanaan program strategis	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Total dana pihak ketiga di bandingkan dengan PDRB dan nilai kredit di bandingkan PDRB	Persentase / Indeks	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Unsur Perencanaan											
75	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah antar level pemerintahan	Tingkat kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah antar level pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah antar periode perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
76	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Urusan Keuangan											
77	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Kesesuaian APBD terhadap RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realiasi Belanja terhadap APBD	Persen	90	90	90	90	90	90	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
78	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Rata-rata Capaian Realisasi Pajak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Persentase validasi data perpajakan daerah	Persen	70	75	80	85	90	95	Badan Pendapatan Daerah

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penurunan Piutang Pajak Daerah	Persen	-20	5	5	5	5	5	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Capaian Realisasi PAD selain Pajak Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi PAD selain Pajak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
Urusan Kepegawaian											
79	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase kinerja layanan kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik	Persen	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Urusan Pendidikan dan Pelatihan											
80	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	30	60	61	62	63	64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Unsur Pengawasan											
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	rata-rata evaluasi SAKIP Perangkat Daerah T-1	Nilai	79,08	78,80	79,30	79,10	79,20	79,50	Inspektorat Daerah
			Persentase penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
			Nilai Manajemen Risiko (MR)	Level	3253	3270	3275	3280	3290	3300	Inspektorat Daerah
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	79,08	78,80	79	79,10	79,20	79,50	Inspektorat Daerah
S14. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Digitalisasi Pemerintahan yang Inovatif											
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
82	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase personil Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	50	60	70	80	90	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase satuan perlindungan masyarakat kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Kearsipan											
83	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	Persen	83	87	90	93	97	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
84	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	20	43	57	71	86	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
85	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
86	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
87	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan pemanfaatan informasi kependudukan	Peningkatan Cakupan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Perjanjian kerjasama pemanfaatan data	OPD	15	15	18	18	20	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unsur Sekretariat DPRD											
88	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Propemperda	Persentase Fungsi Fasilitas Pembahasan Propemperda	Persen	55	60	65	70	70	70	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Penganggaran	Persentase Fungsi Fasilitas Pembahasan Penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Fasilitas Pengawasan	Persentase Fungsi Fasilitas Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Unsur Pemerintahan Umum											

Tujuan/Sasaran/Urusan/ Program Prioritas		Outcome Kinerja	Indikator	Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
89	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya konflik yang diselesaikan	persentase konflik yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unsur Kewilayahan											
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
			persentase sarana dan prasarana yang terdata	Persen	100	100	100	100	100	100	
91	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rupiah	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
92	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase pemenuhan layanan teknologi informasi dan komunikasi	Persen	34,53	34,81	35,40	35,99	36,58	38,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,20	2,60	2,60	3,50	3,50	4,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya kualitas keamanan informasi pemerintah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	47,32	54,59	60,04	65,50	70,96	73,14	Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2.6. Program Unggulan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bontang, Kepala Daerah telah menetapkan Program Unggulan sebagai bagian dari janji politik dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Beberapa program unggulan yang menjadi prioritas antara lain peningkatan kualitas pendidikan melalui beasiswa dan subsidi biaya pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan dengan penciptaan wirausaha baru serta klaster industri berbasis UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, program inovatif seperti digitalisasi layanan publik dalam konsep *Smart City*, pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui program pengolahan limbah dan energi terbarukan, serta percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bontang.

Terdapat 7 (Tujuh) program unggulan Daerah tahun 2025-2029 yang dilaksanakan dalam rangka percepatan perwujudan Kota Bontang sebagai Kota Industri yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Tujuh program ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan unggulan. Adapun program unggulan daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Bontang Sehat (Transformasi Sosial)

Program Bontang Sehat merupakan upaya untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas untuk seluruh warga, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Program ini mengadopsi pendekatan holistic yang mencakup aspek promotif (peningkatan Kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui transformasi layanan kesehatan, peningkatan akses, penguatan tenaga Kesehatan, penerapan pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.

Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan unggulan, antara lain; pemberian makanan tambahan, Gercep Zero Stunting (GZS) yang mengintegrasikan pelayanan, penyuluhan, dan pendampingan keluarga berisiko stunting, serta layanan pemeriksaan kesehatan door-to-door dan di sekolah. Peningkatan akses dan kualitas fasilitas kesehatan dilakukan melalui penambahan puskesmas rawat inap, pembangunan/renovasi rumah sakit berbagai tipe, penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan di luar kota, dan pembangunan instalasi farmasi. Selain itu, program ini juga berfokus pada penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, jaminan kesehatan dan subsidi biaya pengobatan bagi warga yang tidak ditanggung BPJS, serta inisiatif pencegahan penyakit menular. Aspek kesehatan mental juga menjadi perhatian dengan adanya program Mental Health Bontang, didukung oleh sistem informasi kesehatan digital (SIMKAP) dan penyediaan layanan ambulans siaga darat dan laut. Program ini dilaksanakan melalui 24 (dua puluh empat) kegiatan unggulan.

2. Program Bontang Pintar (Transformasi Pendidikan Berkualitas yang Merata)

Program Bontang Pintar merupakan inisiatif strategis yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Kota Bontang. Program ini mengintegrasikan serangkaian kegiatan unggulan yang dirancang untuk mendukung ekosistem

pendidikan yang berkualitas, mulai dari penyediaan bantuan finansial hingga pengembangan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia pendidikan. Intervensi kunci program ini mencakup pemberian insentif dan bantuan pendidikan bagi siswa SD & SMP, termasuk beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa, serta beasiswa khusus untuk pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru juga menjadi prioritas melalui penyediaan laptop bagi guru negeri dan swasta, serta peningkatan insentif bulanan.

Untuk mendukung kualitas pembelajaran, program ini menyediakan alat perlengkapan sekolah lengkap, pengadaan papan tulis interaktif di setiap kelas, dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan modern dan ergonomis, termasuk penyediaan tablet untuk peserta didik SMP. Aspek aksesibilitas diperkuat dengan penambahan dan pengadaan bus sekolah serta kapal laut angkutan sekolah. Selain itu, terdapat fokus pada pengembangan pendidikan vokasi melalui pembangunan Bontang Techno Park dan pengembangan program studi di Perguruan Tinggi, serta fasilitasi kursus keterampilan dan pendidikan kesetaraan. Program ini juga secara spesifik menargetkan pendidikan gratis bagi warga miskin untuk menghasilkan sarjana dari keluarga prasejahtera. Secara keseluruhan, Program Bontang Pintar berupaya menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing melalui ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Program ini dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan unggulan.

3. Program Gerakan Ekonomi Bontang

Program Gerakan Ekonomi Bontang merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan tangguh, memanfaatkan potensi lokal, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Inisiatif ini berfokus pada pengembangan kawasan industri strategis, dan pengembangan keterkaitan (*linkage*) antara industri besar yang ada dengan potensi industri baru maupun industri kecil dan UMKM melalui transisi ekonomi yang berorientasi pada pengembangan ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru, hilirisasi komoditi unggulan lokal, serta pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.

Kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang jasa untuk meningkatkan ekonomi didukung oleh program gerakan ekonomi Bontang melalui peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana berupa pembangunan/peningkatan jalan, peningkatan kualitas pelabuhan kewenangan kota dan mendorong pembukaan jalur-jalur baru antar kota baik melalui moda udara, laut dan darat. Dalam mendukung peningkatan kapabilitas ekonomi, program ini juga mengafirmasi prioritas tenaga kerja lokal melalui upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi yang terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Program ini dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan unggulan.

4. Program Pelayanan Publik yang Prima

Program Pelayanan Publik yang Prima merupakan program yang bertujuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang tangguh dan transparan melalui penguatan kapasitas ASN, kemitraan strategis, serta sistem kesiapsiagaan yang responsif terhadap krisis dengan berlandaskan prinsip *good governance*. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan transformasi digital yang menyeluruh dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan unggulan yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Ketersediaan platform digital menjadi prioritas, meliputi digitalisasi administrasi kependudukan, perizinan usaha, satu data Bontang serta peta digital potensi investasi dan promosi daerah yang dilengkapi informasi

pendukung. Untuk meningkatkan partisipasi dan responsivitas, dikembangkan pula layanan daring bagi masyarakat untuk mengusulkan program, pengaduan publik, serta rembuk warga berbasis geospasial.

Akuntabilitas dan pengawasan diperkuat dengan adanya dashboard Bontang yang memungkinkan Walikota dan masyarakat memantau perkembangan laporan dan pelaksanaan program secara transparan dan terkini. Upaya peningkatan akses layanan secara fisik diwujudkan melalui Mall Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan terintegrasi dan terpusat. Selain itu, program ini juga berupaya pada penyelenggaraan pelayanan publik secara umum di seluruh Perangkat Daerah, melanjutkan reformasi birokrasi yang berintegritas, serta mendorong Kolaborasi Bontang yang melibatkan berbagai unsur pentahelix.

Aspek pengelolaan fiskal juga ditingkatkan melalui Perluasan PAD dan Transparansi APBD untuk akuntabilitas anggaran. Inovasi dalam respons darurat diwujudkan melalui Bontang Crisis Center yang melibatkan tim lintas dinas/instansi dan penguatan call center 112. Secara keseluruhan, program ini bertujuan menciptakan layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan partisipatif, sesuai dengan semangat kota cerdas dan pemerintahan yang akuntabel. Program ini dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) kegiatan unggulan.

5. Program Menata Bontang

Program Menata Bontang merupakan inisiatif strategis yang berfokus pada pembangunan dan pembenahan infrastruktur kota, penataan ruang publik, serta pengelolaan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas perkotaan. Program ini mencakup

Aspek keamanan dan pengawasan kota ditingkatkan melalui pemasangan Mata Bontang (CCTV Kota) di seluruh wilayah. Penataan dan estetika kota, permukiman dan fasilitas umum, yang berfokus pada perbaikan jalan, perbaikan lingkungan permukiman, pengelolaan persampahan yang berfokus pada pengurangan sampah dari sumbernya, pemenuhan layanan air bersih, penerangan jalan umum, dan jaringan gas.

Isu mitigasi bencana diatasi dengan 3BR: Bontang Bebas Banjir Rob, sebuah program percepatan penanggulangan banjir dan rob melalui pendekatan kolaboratif dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan berupa pembangunan polder, revitalisasi waduk, penurapan sungai dan peningkatan sistem drainase perkotaan.

Peningkatan fasilitas publik dan ruang interaksi direalisasikan melalui penyediaan wifi gratis, penyediaan *co-working space* dan ruang pertemuan, taman-taman interaktif, serta sarana dan prasarana olah raga, budaya dan tempat ibadah. Dukungan terhadap sektor perdagangan tercermin dalam pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional dan sentra kuliner.

Secara keseluruhan, Program Menata Bontang merupakan upaya komprehensif untuk menciptakan kota yang tertata, fungsional, estetik, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui 31 (tiga puluh satu) kegiatan unggulan.

6. Program Komitmen Bontang

Program Komitmen Bontang mencerminkan pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada rakyat. Program ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas, serta mendorong kemandirian ekonomi dan inklusi sosial secara menyeluruh di Kota Bontang. Program ini mencakup berbagai intervensi yang memberikan dukungan *financial* dan *non financial*, seperti pemberian tunjangan apresiasi bagi tenaga kesehatan dan penyuluh, penambahan dana stimulan untuk RT dan

kelurahan berbasis kinerja, fasilitasi perjalanan bagi masyarakat berprestasi di bidang olahraga, pendidikan, sosial, seni, budaya dan agama serta insentif bagi rumah ibadah dan perempuan kepala keluarga. Selain itu, program ini juga fokus pada perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia miskin, anak berkebutuhan khusus, dan janda miskin melalui dana stimulan dan penyediaan jaminan kesehatan, subsidi pemasangan jaringan air bersih dan pemberian layanan gratis biaya PLN dan air bersih bagi warga miskin ekstrim Kota Bontang. Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat diwujudkan melalui pengembangan usaha kolektif, pengarusutamaan produk lokal dan bantuan rutin bagi kelompok nelayan, tani, dan ternak, dan inisiasi *food bank* sebagai bagian dari peningkatan ketahanan pangan.

Secara holistik, program ini bertujuan memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan yang merata, dan membangun kapasitas masyarakat dari tingkat paling bawah untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif di Kota Bontang. Program ini dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan unggulan

7. Program Inovasi Bontang

Program Inovasi Bontang merupakan program yang dirancang untuk mendorong budaya, ekosistem inovasi dan pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan berbasis riset dan pengembangan.

Program ini berfokus pada pemberian dukungan finansial bagi inovasi disediakan melalui penyaluran dana hibah untuk pembelian hak cipta dan riset, serta pengadaan peralatan produksi bersama bagi pelaku usaha. Selain itu, program ini secara spesifik mendorong pengolahan limbah hasil laut dan limbah industri menjadi produk bernilai tambah, memfasilitasi pengembangan usaha yang berfokus pada daur ulang dan pemanfaatan limbah. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan unggulan.

Kegiatan unggulan diarahkan untuk menyasar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029. Adapun rincian program unggulan dan kegiatan unggulan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15. Rincian Program dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I	PROGRAM BONTANG SEHAT UNTUK SEMUA (TRANSFORMASI SOSIAL)				
1	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bontang	Jumlah Balita dan Ibu Hamil yang diberi PMT	Pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, Ibu hamil di Posyandu (Pemulihan yang diberikan secara <i>door to door</i>)	11.000 Orang	DINKES, KECAMATAN
2	GZS – <i>Gercep Zero Stunting</i>	Jumlah sasaran intervensi yang diberikan layanan spesifik	Pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan dan pemberian suplemen	59.165 Orang (Balita, Ibu Hamil, Bayi Baru Lahir Rendah, Ibu Bersalin, Remaja Usia 10-19 Tahun, Bayi Baru Lahir Hidup)	DINKES
		Jumlah sasaran intervensi yang diberikan layanan sensitif	Pelatihan, <i>workshop</i> dan edukasi lapangan serta pendampingan kepada keluarga berisiko <i>stunting</i> , kelompok kegiatan bina keluarga dan bina keluarga remaja, kader KB, penyuluh KB, penyuluh kampung keluarga berkualitas dan DASHAT	1) 514 Orang Kader KB 2) 3 Orang Penyuluh KB 3) 15 Kelurahan Kampung keluarga berkualitas 4) 15 Kelurahan DASHAT 5) 213 Orang Tim Pendamping Keluarga 6) 41 Kelompok POKTAN 7) 33 Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja	DP3AKB
			Pendampingan dan kampanye perubahan perilaku	2.757 Orang (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Masyarakat)	DP3AKB
			Pendataan dan validasi keluarga berisiko <i>stunting</i>	21.703 Keluarga Berisiko <i>stunting</i>	DP3AKB
			Sosialisasi dan edukasi bagi calon pengantin dan pasangan pasca menikah	1.000 Pasangan Calon Pengantin	DP3AKB
			Sosialisasi Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan	11.100 Remaja Usia 10-24 Tahun	DP3AKB
			Sosialisasi peran ayah terhadap pola asuh bagi anak (Gerakan Ayah Teladan Indonesia)	500 Keluarga	DP3AKB

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak, pemberdayaan Perempuan, layanan pusat keluarga dan pembentukan KRPPA	200 Anak Usia Sekolah (SMP dan SMA) dan Masyarakat (Orang Tua Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak), Kelurahan	DP3AKB
3	Jemput bola cek kesehatan warga	Jumlah warga yang diberikan cek kesehatan	Pemeriksaan kesehatan ke rumah warga	1) 3.615 Ibu Hamil 2) 3.615 Ibu Bersalin 3) 1.010 Bayi Baru Lahir 4) 1.247 Balita 5) 16.600 Anak Sekolah 6) 625 Penduduk Usia Produktif 7) 3.265 Lansia 8) 1.800 Penderita Hipertensi 9) 600 Penderita Diabetes Melitus 10) 216 Penderita Gangguan Jiwa 11) 530 Penderita Tuberkulosis 12) 800 Orang Berisiko HIV	DINKES
4	Cek kesehatan darah rutin lengkap dan narkoba gratis bagi ASN, P3K dan TKD	Jumlah ASN, PPPK dan TKD yang diberikan cek kesehatan dan narkoba	Pemeriksaan rutin kesehatan darah dan narkoba secara gratis bagi ASN, P3K dan TKD	5.165 Orang	DINKES, BADAN KESBANGPOL
5	Menambah puskesmas rawat Inap (puskesmas yang beroperasi 24 jam / 7 hari)	Jumlah puskesmas rawat inap yang beroperasi 24 jam	Pengembangan puskesmas Bontang Utara 2 menjadi puskesmas rawat inap beroperasi 24 jam	1 Puskesmas	DINKES
6	Dana pelatihan untuk tenaga kesehatan (perawat dan bidan)	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan	Pelatihan Teknis wajib tenaga kesehatan untuk mendapatkan SIP (surat izin Praktik)	220 Orang Tenaga Kesehatan	DINKES
7	RSB: Rumah Singgah Bontang	Jumlah rumah singgah yang disediakan	Penyediaan fasilitas rumah singgah bagi pasien dan Keluarga Pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan Tingkat lanjut di Kota Samarinda, Balikpapan, dan Jakarta	3 Rumah Singgah	SETDA

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Farmasi Bontang	Jumlah instalasi farmasi dan depo farmasi yang dibangun	Pembangunan tambahan instalasi farmasi Bontang dan penambahan ruang depo farmasi di 6 puskesmas.	7 Unit	DINKES
9	Puskesmas go to school	Jumlah sekolah yang diberikan pemeriksaan kesehatan berkala	Pemeriksaan kesehatan berkala untuk siswa sekolah (SD, SMP dan SMA) edukasi	137 Sekolah	DINKES
10	Mental health Bontang	Jumlah siswa dan mahasiswa yang menerima terapi kesehatan mental	Tes kesehatan berkala dan pemberian konsultasi/terapi ke siswa dan mahasiswa yang mempunyai permasalahan Kesehatan mental	140 + 1 Lembaga Pendidikan	DINKES
			Pelatihan, pembinaan, <i>assessment</i> dan konseling kepada mahasiswa	17 lembaga (4 Perguruan Tinggi dan 13 Asrama Mahasiswa)	SETDA
11	Aliansi RS tangani penyakit	Jumlah rumah sakit yang melakukan kerja sama	Kerja sama antar dokter dari rumah sakit yang berbeda untuk menangani penyakit tertentu	5 Rumah Sakit	DINKES
12	SIMKAP	Jumlah aplikasi monitoring kesehatan anak posyandu	Monitoring Kesehatan anak di posyandu melalui aplikasi	1 Aplikasi	DINKES
13	Ambulan siaga darat dan laut	Jumlah ambulan siaga yang disediakan	Penyediaan ambulan siaga yang dapat digunakan untuk penjemputan pasien yang membutuhkan pertolongan secepatnya	6 Unit	DINKES
14	Jemput pasien	Jumlah kendaraan yang disediakan	Penyediaan kendaraan yang melayani pengantaran dan penjemputan pasien BPJS yang melakukan kontrol rutin ke rumah sakit	3 Unit	DINKES
15	Bantuan mobil ambulan/jenazah	Jumlah mobil ambulan jenazah yang disediakan	Pengadaan mobil jenazah	5 Unit	SETDA
16	Membangun/menambah/merevitalisasi/merenovasi rumah sakit tipe B, tipe C dan tipe D serta rumah sakit khusus	Jumlah rumah sakit yang dibangun/ direhabilitasi	Pembangunan rumah sakit taman sehat (Tipe D)	1 Unit	DINKES
			Pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada	1 Unit	RSUD

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rehabilitasi Gedung A dan Gedung B RSUD Taman Husada	2 Unit	RSUD
17	Menyiapkan/menambah sapras rumah sakit tipe B, tipe C dan tipe D serta rumah sakit khusus	Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarananya	Pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana rumah sakit	3 Paket	DINKES, RSUD
18	Menyiapkan SDM rumah sakit tipe B, tipe C dan tipe D serta rumah sakit khusus	Jumlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi	Pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan standar tenaga kesehatan yang berlaku di Indonesia dengan program pelatihan bersertifikasi	547 Orang	RSUD
19	Menambah Puskesmas, SDM, sarpras (di setiap kelurahan yang tidak ada Puskesmas) dan Puskesmas Ranap/Rumah Sakit Tipe D/C di Bontang Lestari	Jumlah rumah sakit tipe C dan puskesmas yang dibangun	Pembangunan rumah sakit tipe C Bontang Lestari dan pembangunan Puskesmas di Gunung Elai	1) 1 Rumah Sakit Tipe C 2) 1 Puskesmas	DINKES
20	Membangun/ Menambah/ Merevitalisasi/ Puskesmas Pembantu dan Posyandu di Kelurahan	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun/direhabilitasi	Pembangunan puskesmas pembantu di 6 kelurahan (Bontang baru, Gunung Telihan, Belimbing, Berbas Pantai, Tanjung Laut dan Satimpo)	6 Unit	DINKES
21	Jaminan kesehatan kota bagi warga yang tidak ditanggung BPJS	Jumlah warga yang menerima jaminan kesehatan	Pemberian Jaminan kesehatan kota bagi warga yang tidak ditanggung BPJS	Menyesuaikan kebutuhan per tahun	DINKES BPKAD
22	Subsidi biaya pengobatan untuk masyarakat Bontang yang dirawat di rumah sakit	Jumlah warga yang menerima subsidi pengobatan	Pemberian Subsidi biaya pengobatan yang tidak ditanggung BPJS untuk masyarakat Bontang yang dirawat di rumah sakit	Menyesuaikan kebutuhan per tahun	DINKES BPKAD
23	Penanganan vektor nyamuk dengan fogging dan abatesasi	Jumlah pelaksanaan fogging dan abatesasi yang dilakukan	Melakukan fogging dan abatesasi untuk pemberantasan nyamuk terutama Aedes Aegypti yang menjadi pembawa DBD	260 Kali (seminggu sekali dalam 5 tahun)	DINKES
24	Pelaksanaan Pekan Olahraga Kota dan PORSENI Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Olahraga dan PORSENI	Kegiatan Pekan Olahraga Kota dan PORSENI Kota Bontang bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan seni, serta menjadi platform bagi potensi lokal untuk mencetak prestasi	500 Peserta	DISPOPAPAR, DISDIKBUD

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
II	PROGRAM BONTANG PINTAR (TRANSFORMASI PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA)				
1	Insentif bantuan pendidikan bagi siswa SD & SMP Rp. 1 sd 2 juta / orang/ tahun	Jumlah siswa yang menerima beasiswa	Pemberian beasiswa kepada siswa SD/MI dan SMP/MTS	29.269 Siswa	DISDIKBUD
2	Beasiswa UKT Bontang	Jumlah mahasiswa yang menerima pembiayaan	Pembiayaan UKT untuk mahasiswa dan pendidikan kedokteran gratis dan mahasiswa Bontang	2.058 Mahasiswa	SETDA
3	Pemberian beasiswa tenaga kesehatan, warga miskin, guru, dosen, ASN	Jumlah tenaga kesehatan yang menerima beasiswa	Pemberian beasiswa tugas belajar dokter dan nakes	9 Orang (Dokter Spesialis dan Sub Spesialis)	BKPSDM
			Pemberian beasiswa dokter dan nakes	30 Orang (Dokter Spesialis dan Sub Spesialis)	SETDA
		Jumlah warga miskin yang diberikan pendidikan gratis	Pendidikan gratis bagi warga miskin dengan menghasilkan 2 sarjana untuk 1 keluarga miskin*	10 Orang	DISDIKBUD, SETDA
		Jumlah warga/profesi guru dan dosen/ASN/ P3K yang menerima beasiswa	Pemberian beasiswa D4, S1, S2 dan S3 bagi warga/profesi guru dan dosen/ASN/P3K*	20 Orang	BKPSDM, SETDA
		Jumlah ASN yang menerima beasiswa	Meningkatkan kompetensi ASN dengan pemberian beasiswa tugas belajar dan UKT untuk meningkatkan kualifikasi dan integritas ASN	17 ASN Non Kesehatan	BKPSDM, SETDA
4	Satu guru, satu laptop negeri dan swasta	Jumlah guru yang menerima bantuan laptop	Penyediaan laptop untuk guru negeri dan swasta	1.782 Guru	DISDIKBUD
5	Insentif guru swasta menjadi 2 juta/bulan	Jumlah guru yang menerima insentif	Insentif guru swasta SD/MI, SMP/MTs dan PAUD sebesar 2 juta/bulan, termasuk untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan	1.486 Guru	DISDIKBUD
6	Pemberian alat perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, sepatu, laptop/tablet dan tas sekolah	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan sekolah	Pemberian alat perlengkapan sekolah bagi siswa SD, SMP, PAUD	37.369 Siswa	DISDIKBUD
7	Penambahan dan pengadaan bus sekolah dan kapal laut angkutan sekolah	Jumlah bus dan kapal yang diadakan	Pengadaan bus dan kapal angkutan sekolah	10 Unit	DISHUB

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	Pengadaan papan tulis interaktif setiap Kelas Negeri dan Swasta	Jumlah papan tulis interaktif yang diadakan	Pengadaan papan tulis interaktif untuk ruang kelas sekolah negeri dan swasta	600 Buah	DISDIKBUD
9	Pembangunan/peremajaan gedung-gedung sekolah negeri dan swasta	Jumlah gedung sekolah yang dibangun/direhabilitasi	Pembangunan/revitalisasi gedung-gedung sekolah negeri dan swasta	188 Unit	DISDIKBUD
10	Pengadaan sarana/prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang disediakan	Pengembangan sarana prasarana pendidikan	29.950 Buah	DISDIKBUD
			Penyediaan tablet untuk peserta didik SMP mendukung program belajar di sekolah	13.000 Buah	DISDIKBUD
			Penyediaan rumah singgah untuk siswa pesisir dan pulau-pulau	1 Unit	DISDIKBUD
11	Vokasi Bontang	Jumlah vokasi yang dibangun	Pembangunan Bontang Techno Park	1 Unit	DPUPR, BAPPERIDA
			Pengembangan program studi di Perguruan Tinggi	1 Perguruan Tinggi	SETDA
12	Ruang belajar Bontang	Jumlah warga yang diberikan fasilitasi kursus keterampilan	Fasilitasi kursus keterampilan secara kelas dan online bagi semua umur dan Pendidikan kesetaraan usia 16-40 tahun	100 Orang	DISDIK
III	PROGRAM GERAKAN EKONOMI BONTANG				
1	Klaster Industri Bontang	Jumlah klaster industri yang dibangun/ dikembangkan	Mengembangkan keterkaitan antara industri besar yang sudah ada dengan industri-industri yang sudah atau akan didirikan	2 Klaster Industri, Melalui Pembangunan 2 Sentra Industri Kecil & Menengah (IKM)	DKUMPP, DISPOPAP, SETDA, DPMPTSP, BAPPERIDA
			Pembangunan/peningkatan jalan menuju kawasan industri	3 Ruas Jalan	DPUPRK
2	Inkubator Bontang	Kolaborasi dengan lembaga inkubator	Berkolaborasi dengan lembaga inkubator untuk pengembangan usaha (manajemen ataupun teknologi) untuk UKM	10 pelaku usaha/UMKM	DKUMPP
3	Transisi Menuju Ekonomi Baru Bontang	Jumlah pelaku usaha perikanan	Pengembangan ekosistem bisnis perikanan berbasis blue economy dengan meningkatkan daya saing pelaku usaha perikanan mulai dari	1) 6.600 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	DKP3

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			hulu (perikanan tangkap dan budidaya) hingga hilir (usaha pengolahan dan pemasaran perikanan)	2) 1.560 Unit Sarana Prasarana Usaha Perikanan 2 Unit Pengolahan Ikan	
4	Bontang Techno Park	Jumlah kawasan technopark yang dibangun	Pengembangan Kawasan terpadu yang melibatkan industri, pusat riset, keuangan, pelatihan, perguruan tinggi di satu Kawasan yang sama untuk mendorong aliran informasi dan teknologi yang efektif dan efisien	1 Unit	DPUPRK, BAPPERIDA
5	Biduk Siap Kerja	Jumlah balai edukasi yang terbentuk	Terbentuknya komunitas perusahaan/pelaku usaha dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tingkat Kota Bontang sebagai wadah dalam menyinkronkan kebutuhan kompetensi dan perusahaan	1 Balai Edukasi Komunitas (Biduk)	DISNAKER
6	75 Persen Bontangers	Jumlah perusahaan yang mempekerjakan minimal 75 persen tenaga kerja Bontang	Penguatan Kerja sama Pemerintah Kota Bontang dengan Perusahaan untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal	66 Perusahaan	DISNAKER
7	Pendanaan untuk start-up UMKM	Jumlah pelaku usaha yang diberikan pendanaan	Penyediaan pendanaan (pinjaman) untuk <i>start up</i> dan UMKM	550 Pelaku UMKM	DKUMPP
8	Penciptaan 500 wirausaha baru (WUB) / Startup/tahun	Jumlah wirausaha baru yang diberikan permodalan	Berupa pemberian bantuan modal dan peralatan bagi wirausaha baru/ <i>start up</i> khususnya UMKM berbasis <i>home</i> industri	2.500 Pelaku UMKM	KECAMATAN dan DKUMPP
9	Hilirisasi perikanan	Jumlah kelompok nelayan yang diberikan pelatihan	Peningkatan kapasitas nelayan dalam kegiatan penangkapan dan pengembangan industri pengolahan hasil tangkapan maupun budidaya perikanan seperti rumput laut.	50 Kelompok Nelayan	DKP3
10	Penangkapan Ikan (Peningkatan Produktivitas Perikanan Ramah Lingkungan) Ramah Lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang menerima peningkatan	Peningkatan kapasitas nelayan beserta sarana prasarana dalam	900 Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	DKP3

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		kapasitas dan bantuan sarana prasarana	kegiatan penangkapan ramah lingkungan		
11	Pengembangan wisata bahari	Jumlah objek daya tarik wisata yang dikembangkan	Peningkatan kualitas destinasi yang sudah ada dan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas (wisata) kemaritiman	5 Obyek Daya Tarik Wisata	DISPOPAPAR
12	Meningkatkan kualitas dan akses transportasi laut	Jumlah pelabuhan dan jalur transportasi yang dikembangkan	Peningkatan kualitas pelabuhan kewenangan kota dan mendorong pembukaan jalur-jalur baru untuk orang maupun barang	10 Pelabuhan	DISHUB
13	Penyelenggaraan pesta budaya kota Bontang	Jumlah penyelenggaraan pesta budaya	Dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Laut di Bontang Kuala yang bertujuan memperkuat identitas budaya lokal, mempererat komunitas pesisir, serta mendorong daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat	1 Event	DISDIKBUD
			Dukungan terhadap pelaksanaan Festival Erau di Guntung yang bertujuan memperkuat identitas budaya lokal, mempererat komunitas adat Kutai, serta mendorong daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat	1 Event	DISDIKBUD
			Dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Budaya yang mengangkat budaya lokal dan mempererat persatuan dari keberagaman budaya penduduk, serta mendorong daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat	1 Event	DISDIKBUD
14	Penyediaan fasilitas pendukung pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang disediakan	Fasilitasi Pembangunan hotel dan sarana prasarana penunjang pariwisata lainnya	- 1 Unit - 10 Unit Sarana Prasarana Lainnya	- DISPOPAPAR / DPMPTSP - SWASTA
IV	PROGRAM PELAYANAN PUBLIK PRIMA				

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	SIP (Sistem Informasi Penduduk) Bontang	Jumlah aplikasi yang dibangun	Layanan secara online (web-based, aplikasi, dan media sosial) untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Aplikasi	DISDUKCAPIL
2	PO (Perizinan Online) Bontang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi layanan daring (web-based dan aplikasi) untuk mendapatkan berbagai perizinan usaha, izin praktik, pennebangan pohon, dll	1 Aplikasi	DPMPTSP
3	Bontang Smart Map	Jumlah aplikasi yang dibangun	Peta digital jalan di kota Bontang yang dilengkapi berbagai informasi pendukung dan Peta Evakuasi	1 Aplikasi	BAPPERIDA, DPUPRK, BPBD, DISKOMINFO
4	Komunitas Bontang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Layanan online (web based) yang mengajak warga mengajukan proposal program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Proposal yang disetujui akan didanai oleh Pemkot Bontang melalui dana hibah	1 Aplikasi	DISKOMINFO
5	Lapor Bontang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Layanan pengaduan online (web-based/aplikasi) terkait pelayanan publik, keadaan kota (jalan rusak, lampu jalan mati dll), kasus rawan pangan, pertolongan segera, KDRT ataupun penganiayaan terhadap anak	1 Aplikasi (SP4N LAPOR)	DISKOMINFO
6	Rembuk Bontang	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Layanan online (web-based/aplikasi) yang membuka partisipasi warga untuk mengajukan usulan program dan atau keberatan terhadap rencana pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD	1 Aplikasi (ASMARA BANG SIGE)	BAPPERIDA
7	Dashboard Bontang	Jumlah aplikasi yang dibangun	Sistem monitoring berbasis web-based (aplikasi yang memungkinkan walikota dan Masyarakat melihat perkembangan	1 Aplikasi 1 Paket Peningkatan Infrastruktur Jaringan dan Data Center	DISKOMINFO

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			laporan, aduan, layanan, program di lingkungan Pemkot Bontang)		
8	Peta Digitalisasi Potensi Investasi	Jumlah peta digital yang dibangun	Penyusunan peta digital yang memuat data dan informasi potensi investasi di berbagai sektor dan wilayah, guna mendukung promosi, perencanaan, dan pengambilan keputusan investasi yang tepat sasaran	1 Peta Digital Potensi Investasi	DISKOMINFO, BAPPERIDA, DPMPTSP
9	Mall Pelayanan Publik	Jumlah mal pelayanan publik yang dibangun/ dikembangkan	Pembangunan/peningkatan layanan Mall Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dan terpusat bagi masyarakat.	1 Unit	DPMPTSP, DISKOMINFO
10	Menuju <i>Smart City</i> (Bontang Satu Data)	Persentase pemanfaatan satu data Bontang	Penguatan sistem tata kelola kota berbasis digital melalui integrasi data sektoral dalam satu platform “Bontang Satu Data”, guna mendukung perencanaan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data	1) 100 persen Pemanfaatan Portal Satu Data dalam Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 2) Minimal 15 Perencana Melakukan Analisis Preskriptif 3) 2 Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti 4) 100 persen kegiatan statistik mendapatkan rekomendasi BPS	DISKOMINFO, BAPPERIDA
11	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik yang prima	Penyiapan kebijakan dan program untuk mendorong peningkatan pelayanan publik	53 Perangkat Daerah/Unit Kerja	Seluruh PERANGKAT DAERAH
12	Melanjutkan Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Penyiapan kebijakan dan program untuk mendorong birokrasi pemerintahan yang tangkas, kompeten, berorientasi pada publik dan berintegritas	31 Perangkat Daerah	SETDA

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
13	Kolaborasi Bontang	Jumlah Kerja sama dan kolaborasi pentahelix	Pelibatan unsur pemerintah akademisi, pengusaha, komunitas, media dalam melaksanakan Pembangunan kota Bontang	1 Kerja sama pentahelix	SETDA
14	Perluasan PAD	Jumlah aplikasi layanan pajak dan retribusi	Mengintensifkan sumber pendapatan daerah saat ini dan mengembangkan saluran baru melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi, nasional, perusahaan dan juga Lembaga filantropis lainnya	1) 48.295 NOP tervalidasi 2) 1 Aplikasi Layanan Pajak dan Retribusi Secara Digital 3) Tersedianya tapping box	BAPENDA
15	Transparansi APBD	Ketersediaan informasi APBD yang transparan	Penyediaan informasi dan partisipasi publik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengusulan pengawasan dan pertanggungjawaban APBD	1) Tersedianya informasi APBD yang jelas dan mudah dipahami 2) Tersedianya kemudahan akses terhadap penyusunan dan pertanggungjawaban APBD 3) Ketersediaan informasi penyusunan dan pertanggungjawaban APBD 4) Kemudahan akses terhadap penyusunan dan pertanggungjawaban APBD	BPKAD
16	Bontang Crisis Center	Jumlah tim <i>crisis center</i> yang dibentuk	Pembentukan tim lintas dinas/instansi dan penguatan call center 112 yang melakukan aksi cepat tanggap memitigasi laporan adanya bencana, kerawanan pangan, kasus stunting, ODGJ, penanganan medis pertama, KDRT, penganiayaan anak	1 Tim <i>crisis center</i>	BPBD, DISKOMINFO, DINKES, DP3AKB, KECAMATAN
17	Pembentukan badan pengelola CSR	1 badan badan pengelola CSR	Pembentukan badan pengelola CSR	1 badan/forum CSR	SETDA

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
V	PROGRAM MENATA BONTANG				
1	Mata Bontang (CCTV Kota)	Jumlah RT yang terlayani CCTV terintegrasi	Pemasangan CCTV di seluruh wilayah kota Bontang	499 RT	DISKOMINFO
2	RekaB – Regenerasi kampung Bontang	Jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	Program percepatan Regenerasi Kelurahan Bontang; meliputi perbaikan dan peningkatan lingkungan permukiman, rehabilitasi rumah dan fasilitas umum	1) 250 RTLH 2) 3 kawasan Kumuh 3) Pengembangan PSU Permukiman di seluruh kelurahan	DPKPP, KECAMATAN
3	ABUS – Air Bersih Untuk Semua	Cakupan penduduk yang terlayani air bersih perpipaan	Percepatan program penyediaan air bersih yang berkelanjutan untuk warga kota Bontang	96,35 persen	DPUPRK
4	3BR: Bontang Bebas Banjir Rob	Jumlah infrastruktur penanggulangan banjir rob yang dibangun	Program percepatan untuk menanggulangi banjir dan rob dengan pendekatan kolaborasi	1) 1 Ruas Jalan 2) Penurapan Sungai	DPUPRK
		Jumlah polder yang dibangun	Pembangunan polder	2 Polder	DPUPRK
		Jumlah waduk yang dibangun dan dikembangkan	Pembangunan Waduk Kanaan menjadi kawasan wisata	1 Kawasan Waduk	DPUPRK
			Pembangunan/revitalisasi waduk	1) 1 Waduk 2) 1 Kolam Depresi	DPUPRK
5	Gas Bontang	Jumlah kelurahan teraliri jaringan gas	Program percepatan agar 100 persen rumah di Bontang tersambung dengan jaringan gas kota	14 Kelurahan	SETDA
6	Pilah dan Olah Sampah dari Sumber	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang disediakan	Pilah sampah dari rumah, pengembangan bank sampah dan pengembangan daur ulang sampah berbasis komunitas, pengadaan motor pengangkut sampah dan petugas sampah tiap RT, dan pengadaan sarana pengambilan sampah dilaut	3) 499 Bank Sampah beserta kelengkapannya 4) 499 Motor Pengangkut Sampah 5) 5 Kapal Pengangkut Sampah 6) 10 TPS 3R Beserta Kelengkapannya	DLH, DPUPRK
7	Ruang Bersama Bontang	Jumlah prasarana pertemuan yang disediakan	Penyediaan coworking space dan ruang pertemuan untuk kegiatan seni, budaya dan akademis	3 Lokasi	DISPOPAPAR

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	1 Kelurahan 1 Taman	Jumlah taman yang dibangun	Taman yang menyediakan tempat bermain, berolahraga, bersantai, perpustakaan mini, dilengkapi fasilitas internet gratis dan CCTV. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pencegahan kebakaran	15 Taman	DLH
9	Semua Ada di Bontang	Jumlah fasilitas perkotaan yang dikembangkan	Mengembangkan fasilitas perkotaan premium yang sekaligus dapat dijadikan penggerak turisme perkotaan baik untuk penduduk maupun pengunjung. Fasilitas meliputi pusat perbelanjaan dan kuliner, rumah sakit dan klinik, sekolah dan universitas, serta hotel		DKUKMP, DISPOPAP, DINKES, DISDIKBUD, SETDA, DISNAKER, DISKOMINFO
10	Bontang Terang Terus	Jumlah lampu penerangan umum dan lingkungan yang diadakan	Meningkatkan jumlah lampu penerangan jalan, taman, rumah ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan berbasis energi surya atau hemat energi (LED) di seluruh wilayah Bontang. Meningkatkan konversi ke listrik berbasis energi baru dan terbarukan di bangunan milik pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah.	1) 634 Titik Lampu 2) 1 Bangunan Gedung	DISHUB, DPUPRK
11	Bontang Zero Blankspot	Jumlah RT yang disediakan akses internet gratis	Pemasangan akses internet di ruang publik yang dapat diakses secara gratis oleh warga	499 RT	DISKOMINFO
12	Bontang Berhias	Jumlah pedestrian jalan yang ditata	Program penataan kota berupa penambahan instalasi seni di ruang publik dan perapihan pedestrian	Penataan pedestrian di 6 Ruas Jalan	DPUPRK
13	Merenovasi pasar tradisional	Jumlah pasar tradisional yang dibangun/ direhabilitasi	Pembangunan/rehabilitasi pasar modern dan pasar basah dan operasional pasar murah.	4 Pasar	DKUMPP
14	Pembangunan/rehabilitasi sentra kuliner	Jumlah sentra kuliner yang dibangun/ direhabilitasi	Pembangunan/rehabilitasi destinasi wisata kuliner yang	3 Lokai	DKUMPP

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			terpusat dan dikelola secara terencana		
15	Event Bontang	Jumlah event skala regional dan nasional yang diselenggarakan	Inisiasi seminar, workshop, pelatihan skala regional hingga internasional bekerja sama dengan industri di Bontang	10 event skala regional dan nasional per tahun	DISPOPAR, DKUMPP, DISKOMINFO
16	1 Kelurahan 1 Minisoccer	Jumlah lapangan olahraga yang dibangun	Pembangunan 1 lapangan minisoccer pada setiap kelurahan sebagai sarana rekreasi dan olahraga bagi masyarakat	15 Unit Minisoccer	DISPOPAR
17	Pembangunan sirkuit	Jumlah lintasan balap yang dibangun	Membangun lintasan balap yang aman dan representatif	1 Sirkuit	DISPOPAR
18	Pembangunan jalan lingkar	Jumlah ruas jalan yang dibangun	Pembangunan jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan menambah aksesibilitas antar wilayah	2 Ruas Jalan	DPUPRK
19	Pembangunan DOM	Jumlah Gedung yang dibangun	Membangun gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan masyarakat, seni, budaya, dan mendorong promosi MICE di Kota Bontang	1 DOM	DPUPRK
20	Pembangunan Alun-Alun	Jumlah kawasan yang dibangun	Membangun ruang terbuka hijau yang nyaman sebagai pusat kegiatan warga	1 Alun-Alun	DPUPRK
21	Pembangunan Gedung Budaya	Jumlah Gedung yang dibangun	Pembangunan gedung fasilitas pelestarian, pengembangan dan eksibisi karya seni dan budaya Bontang	1 Gedung	DISDIKBUD
22	Pembangunan/Merenovasi Kantor-kantor Pemerintahan	Jumlah Gedung pemerintahan yang dibangun/ direhabilitasi	Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor pemerintah untuk mendukung pelayanan publik	2 Gedung	DPUPRK
23	Pembangunan/renovasi dan penyediaan sarana prasarana Masjid	Jumlah rumah ibadah yang dibangun/ direhabilitasi	Perbaikan fasilitas pendukung Masjid Terapung sebagai ikon religi dan wisata Kota Bontang.	1 Masjid	DPUPRK
24	Pembangunan Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota di Bontang Lestari	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	Pembangunan rumah dinas yang layak bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pendukung	2 Rumah Jabatan	DPUPRK

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah.		
25	Pembangunan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	Pembangunan rumah dinas bagi Sekretaris Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris Daerah	1 Rumah Jabatan	DPUPRK
26	Penyelesaian/Revitalisasi Stadion Bessai Berinta	Jumlah prasarana olahraga yang dibangun/ direhabilitasi	Pemugaran Stadion Bessai Berinta agar dapat menjadi fasilitas olahraga yang modern dan pusat aktivitas olahraga masyarakat Bontang	1 Stadion	DISPOPAR
27	Pembangunan/renovasi Stadion Taman Prestasi dan GOR Taman Lestari	Jumlah prasarana olahraga yang dibangun/ direhabilitasi	Pemugaran Stadion Taman Prestasi dan GOR Taman Lestari agar dapat menjadi fasilitas olahraga yang modern dan pusat pengembangan atlet berprestasi Kota Bontang. Serta optimalisasi Stadion Taman Prestasi untuk wisma atlet	1 Stadion dan 1 GOR	DISPOPAR
28	Pembangunan Lahan terpadu ternak babi, potong babi dan jual babi (Lokasi Bontang Barat)	Jumlah kawasan peternakan terpadu yang dibangun	Pembuatan dan penataan kawasan terpadu bagi peternakan babi, dan pusat jual beli babi	1 Unit	DKP3
29	Pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga yang dibangun/direhabilitasi	Rehabilitasi Lapangan Berbas Pantai sebagai sarana olahraga dan rekreasi	1 Lapangan	DISPOPAR
			Pembangunan Lapangan Berbas Pantai sebagai sarana olahraga dan rekreasi	1 Lapangan	DISPOPAR
30	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah Pemerintah	Jumlah rumah ibadah yang dibangun/ direhabilitasi	Pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah beserta prasarana pendukung	3 Unit	DPUPRK
VI	PROGRAM KOMITMEN BONTANG				
1	TunaAp: Tunjangan Apresiasi untuk tendik, nakes/penyuluh	Jumlah tenaga kesehatan, penggiat agama, penyuluh pertanian/ perikanan yang	Pemberian tunjangan untuk nakes, penggiat agama, penyuluh pertanian/perikanan	1) 6 Orang Penyuluh Pertanian 2) 4 Penyuluh Perikanan 3) 1.050 Penggiat Agama	SETDA

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		menerima tunjangan apresiasi		4) 462 Guru Sekolah Minggu 5) 10 Guru Hindu	
2	Program percepatan pembangunan RT Kota Bontang (P3RTB)	Jumlah RT penerima program pro RT	Program Pro RT dengan alokasi sebesar 200 juta sampai dengan 300 juta/RT/tahun	499 RT	KECAMATAN, SETDA
3	Dana stimulan kelurahan berbasis kinerja	Jumlah kelurahan yang menerima dana stimulan	Dana stimulan untuk kelurahan berbasis kinerja mulai dari Rp 1,5 milyar	15 Kelurahan	KECAMATAN
4	Dana insentif untuk rumah ibadah	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan dana insentif	Pemberian dana insentif rutin untuk rumah ibadah	296 Unit	SETDA
5	Premi BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT	Jumlah ketua RT yang menerima BPJS ketenagakerjaan	Pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan untuk ketua RT	499 Ketua RT	KECAMATAN, SETDA
6	Insentif untuk Perempuan yang jadi kepala keluarga	Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga yang menerima dana insentif	Pemberian dana insentif untuk Perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga	11.633 Kepala Keluarga	DP3AKB, DSPM, SETDA
7	Dana stimulan untuk lansia miskin, anak berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, miskin ekstrim, janda miskin	Jumlah lansia miskin, anak berkebutuhan khusus, anak yatim piatu, miskin ekstrim dan janda miskin yang menerima dana insentif	Bantuan sosial berupa dana stimulan yang disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan untuk memperkuat perlindungan sosial dan mendukung pemerataan akses terhadap layanan dasar	7.110 Orang	DSPM
8	Insentif untuk kader sosial (kader posyandu, kader lansia, kader PPKBK dan Kader sub PPKBK, kader PKK, marbot/ penjaga rumah ibadah)	Jumlah kader sosial yang menerima dan insentif	Insentif untuk kader PKK, marbot (penjaga rumah ibadah) Pengelola makam	948 Orang kader posyandu dan lansia 296 Orang Marbot 2.737 Orang Kader PKK	KECAMATAN, SETDA
9	Pinjaman Anti-Rentenir	Jumlah pelaku usaha mikro yang menerima pinjaman	Pinjaman yang diberikan bagi pelaku usaha dengan tujuan menghapuskan ketergantungan terhadap Rentenir	5.000 Pelaku Usaha Mikro	SETDA, KECAMATAN
10	1 kampung 1 usaha (1 Kelurahan 1 Unggulan)	Jumlah kelurahan yang memiliki usaha kolektif produk unggulan	Pengembangan usaha kolektif berbasis kelurahan 1 Produk Unggulan	15 Kelurahan	KECAMATAN, DKUMPP
11	Buatan Bontang (Produk Lokal Bontang)	Jumlah produk lokal Bontang yang dikembangkan	Pengarusutamaan penggunaan produk Bontang	3 Produk Lokal Bontang	DKUMPP

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
12	Bontang Berbagi	Jumlah alat kesehatan yang dipinjam pakaikan	Program bantuan pakai alat-alat kesehatan seperti kursi roda, kruk, tempat tidur pasien, kereta dorong bayi dll. Pada program ini. Masyarakat juga dapat menghibahkan alat-alat tersebut untuk dipinjam- pakai oleh warga masyarakat lain yang membutuhkan	Menyesuaikan i	DINKES
13	Tengok Tetangga	Jumlah kunjungan rumah tangga di lingkungan RT yang didatangi oleh kader/warga	Monitoring keadaan rumah tangga yang dilakukan warga atau kader PKK, khususnya yang berkaitan dengan: rumah tangga yang rawan pangan, anggota keluarganya ada yang sakit tapi terkendala dibawa ke fasilitas kesehatan, KDRT atau penganiayaan terhadap anak.	499 RT	KECAMATAN
14	Food Bank Bontang	Jumlah pangan surplus yang disalurkan kepada kelompok rentan/prasejahtera	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat prasejahtera secara berkelanjutan dan mengurangi makanan terbuang (<i>food waste</i>) dari makanan berlebih (<i>food surplus</i>) dalam rantai pasok pangan	5 Lembaga	DKP3
15	Dana Operasional/Peningkatan Dana Operasional bagi PKK, Karang taruna, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Posyandu	Jumlah kelembagaan kemasyarakatan Kelurahan/ Lembaga sosial di kelurahan yang menerima dukungan operasional	Dana operasional untuk memperkuat peran kelembagaan sosial dan aparat di tingkat kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pemberdayaan, pelayanan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat	15 Kelurahan	KECAMATAN
16	Memfasilitasi Perjalanan (Dalam/Luar Negeri) Bagi Masyarakat yang berprestasi (Olahraga, Pendidikan, Sosial, Seni, Budaya dan Agama)	Jumlah peserta /masyarakat yang berprestasi yang difasilitasi perjalanan dinas	Pemberian bantuan perjalanan bagi individu atau kelompok berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan pembinaan, sekaligus mendorong peningkatan	150 Masyarakat Berprestasi	SETDA, DISPOPAP, DISDIKBUD

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kualitas dan daya saing masyarakat di berbagai bidang		
17	Bantuan Kelompok Perikanan, Pertanian, Peternakan setiap Tahunnya	Jumlah kelompok tani/perikanan/peternak penerima bantuan	Pemberian bantuan rutin tahunan kepada kelompok perikanan, tani, dan ternak dalam bentuk sarana, prasarana, atau pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha.	1) 400 Kelompok Perikanan 2) 360 Pembudidaya Perikanan 3) 800 Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan 4) 30 Kelompok Petani 5) 20 Kelompok Peternak	DKP3
18	Subsidi pemasangan jaringan air PDAM bagi MBR	Jumlah Masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat subsidi pemasangan jaringan	Pemberian bantuan biaya pemasangan jaringan PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.500 Sambungan Rumah	DPUPRK
19	Gratis Biaya PLN dan Air Bersih bagi warga Miskin Ekstrim Kota Bontang	Jumlah warga miskin ekstrim yang memperoleh layanan gratis biaya PLN dan air bersih	Subsidi biaya bulanan PLN dan air bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum bagi warga miskin ekstrim Kota Bontang	20 Sambungan Rumah	SETDA
VII	PROGRAM INOVASI BONTANG				
1	Peta Jalan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah	Tersusunnya dokumen Peta Jalan SIDA	Menyiapkan peta jalan penyusunan dan implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah	1 Dokumen	BAPPERIDA
2	Dasi (Dukungan Inovasi) Bontang	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan dana hibah untuk pembelian hak cipta dan riset	Penyediaan dana hibah untuk pembelian hak cipta dan riset yang dapat digunakan secara bebas oleh pelaku usaha untuk mengembangkan produknya dan pembelian peralatan produksi yang bisa dipakai bersama oleh pelaku usaha	3 pelaku usaha	BAPPERIDA
3	Pengolahan limbah hasil laut menjadi produk	Jumlah produk hasil pengolahan limbah laut yang dikembangkan	Fasilitasi pengembangan usaha yang berfokus pada pengolahan limbah laut (ikan, kepiting, ranjungan dll) menjadi produk yang berguna	1) 2 Usaha 2) 2 Unit Pengolahan Limbah Perikanan	BAPPERIDA, DKUMPP, DKP3, DLH

No	Program/ Kegiatan Unggulan	Indikator Kinerja	Penjelasan Kegiatan Unggulan	Sasaran Program Selama Masa RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	Pengolahan limbah industri menjadi produk	Jumlah usaha pengolahan limbah industri yang difasilitasi	Memfasilitasi pengembangan usaha yang berfokus pada pengolahan limbah industri, bekerjasama dengan pelaku industri di Bontang	8 Kelurahan	BAPPERIDA, DKUMPP, DKP3, DLH

3.1.1. Dukungan Program Unggulan Kota Bontang terhadap Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan sinkronisasi dengan program Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2030 guna memastikan keterpaduan dan keselarasan dukungan program Kota Bontang terhadap program unggulan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.16. Penyelarasan Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan Unggulan Provinsi	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2030	Program/Kegiatan Unggulan Kota Bontang	Sasaran Program Selama Masa RPJMD
	PROGRAM GRATISPOL				
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK Hingga S3	208.370 siswa/ mahasiswa	342.530 siswa	Insentif bantuan pendidikan bagi siswa SD & SMP, subsidi UKT untuk mahasiswa Universitas Terbuka, beasiswa D4, S1, S2 dan S3 bagi warga/ profesi guru dan dosen/ tenaga kesehatan/ ASN	29.269 siswa
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	90 persen	100 persen	Bontang Sehat Untuk Semua, melalui pemberian makanan tambahan (PMT), Gercep Zero Stunting, Jemput bola cek kesehatan warga, dana pelatihan, puskesmas <i>goes to school</i> , <i>mental health</i> Bontang, SIMKAP, dan jemput pasien, jaminan kesehatan kota bagi warga yang tidak ditanggung BPJS, dan subsidi biaya pengobatan untuk masyarakat Bontang yang dirawat di rumah sakit.	1) 11.000 orang 2) 93.448 (Ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia, anak sekolah, penduduk produktif, penderita hipertensi, diabetes, ODGJ, HIV)
				Penambahan puskesmas, Farmasi Bontang, ambulan siaga (darat dan laut), dan bantuan mobil ambulan.	1) 1 Puskesmas 2) 7 unit farmasi 3) 6 ambulan siaga darat dan laut 4) 5 ambulan
3	Gratis Makanan Bergizi	39.300 orang	46.000 orang	Dana stimulan untuk lansia Miskin, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Yatim Piatu, Miskin Ekstrim, Janda Miskin serta pembangunan food bank	1) 499 RT 2) 5 lembaga
4	Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa;	841 desa	841 desa	Bontang zero blankspot	499 RT
5	Gratis Seragam Sekolah	61.500 orang	23.0800 orang	Pemberian alat perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, sepatu, laptop/tablet dan tas sekolah	37.369 Siswa

No	Program/ Kegiatan Unggulan Provinsi	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2030	Program/Kegiatan Unggulan Kota Bontang	Sasaran Program Selama Masa RPJMD
6	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	1.000 orang	5.000 orang	Subsidi pemasangan jaringan air PDAM bagi MBR	1.500 Sambungan Rumah
7	Gratis Haji dan Umroh untuk Marbot	750 orang	1.515 orang	Memfasilitasi Perjalanan (Dalam/Luar Negeri) Bagi Masyarakat yang berprestasi (Olahraga, Pendidikan, Sosial, Seni, Budaya dan Agama)	150 Masyarakat Berprestasi
	PROGRAM JOSPOL				
1	Hilirisasi industri pertanian yang didukung dengan peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern			Pengembangan sumber daya maritim melalui hilirisasi perikanan dan Klaster Industri Bontang	1) 50 kelompok nelayan 2) 2 kluster industri
2	Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik			Pembangunan Bontang Technopark dan Bantuan Kelompok Nelayan, Pertanian, Peternakan setiap Tahunnya	1) unit 2) 1.560 nelayan dan pembudidaya perikanan 3) 50 kelompok petani dan peternak
3	Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah			Insentif guru swasta menjadi 2 Juta/Bulan	1.486 Guru
4	Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM			Inkubator Bontang, Pendanaan untuk start-up UMKM serta Penciptaan 500 wirausaha baru/ startup/ tahun	1) 1 lembaga 2) 3.050 wirausaha/startup
5	Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa			Pengembangan Wisata Bahari	5 Obyek Daya Tarik Wisata
6	Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan			Menyiapkan/Membangun/Menambah/Merevitalisasi/Merenovasi Rumah Sakit Tipe B, Tipe C dan Tipe D, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Puskesmas, Puskesmas pembantu, posyandu, SDM, Saprasi	1) 4 unit 2) 1 Rumah sakit tipe c 3) 1 puskesmas

No	Program/ Kegiatan Unggulan Provinsi	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2030	Program/Kegiatan Unggulan Kota Bontang	Sasaran Program Selama Masa RPJMD
	pendidikan dan kesehatan			Pembangunan/peremajaan gedung-gedung sekolah negeri dan swasta serta pengadaan sapsras pendidikan modern dan ergonomis	188 unit
7	Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional			Pembangunan jalan lingkar serta peningkatan kualitas	2 Ruas Jalan
8	Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;			Pengembangan akses transportasi laut	10 Pelabuhan
9	Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerja sama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta			PO (Perizinan Online) Bontang serta penyediaan peta digitalisasi potensi investasi, dan MPP	1) 1 aplikasi 2) 1 peta digital 3) 1 MPP

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana di dalam RPJMD yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Setiap program yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terukur, terarah, dan terpadu. Program perangkat daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta dikoordinasikan secara lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Setiap program diakomodir dalam indikator kinerja utama dan target capaian yang selaras dengan indikator kinerja sasaran RPJMD, sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran kinerja secara sistematis.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari capaian terhadap indikator kinerja program prioritas, realisasi anggaran, serta *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pembangunan. Evaluasi kinerja ini menjadi bagian penting dalam menjamin akuntabilitas publik dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Dalam lima tahun ke depan, program-program strategis akan difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Pelaksanaan program perangkat daerah juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi, dengan dukungan sistem penganggaran berbasis kinerja.

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dukungan kinerja yang optimal dari setiap perangkat daerah diharapkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi Masyarakat, serta mampu mewujudkan Pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan holistik sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan dalam RPJMD. Fokus utama dari pembiayaan pembangunan daerah ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Dalam dokumen RPJMD, penyajian data APBD kini disusun secara terpisah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengalokasian anggaran disusun dalam bentuk pagu program dari perangkat daerah yang merujuk pada nomenklatur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang memuat hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi dan nomenklatur tersebut.

Program-program perangkat daerah tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu program perencanaan strategis dan program perencanaan operasional. Jika suatu program dikategorikan sebagai program strategis, maka intervensi kegiatan sebagai strategis, maka intensitas kegiatan perencanaannya, pengendaliannya, dan evaluasinya dilakukan secara lebih fokus dibandingkan program operasional. Konsekuensinya, dari segi penganggaran, program strategis mendapatkan prioritas lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena program strategis umumnya memiliki tema-tema penting yang memberikan dampak luas serta memiliki urgensi yang tinggi untuk segera direalisasikan, sehingga disebut sebagai program atau kegiatan pembangunan daerah.

Penyusunan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dilakukan merujuk pada identifikasi permasalahan

pembangunan daerah di setiap urusan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan. Urusan-urusan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, program yang dirancang harus mencerminkan solusi terhadap permasalahan yang relevan dan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di setiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta
 - f. Sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Perdagangan;
 - e. Perindustrian; dan
- 4) Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan meliputi:
 - a. Kesekretariatan Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD.
- 5) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Penelitian dan Pengembangan; dan
- 6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan meliputi:
 - a. Inspektorat Daerah.

- 7) Unsur Kewilayahan
 - a. Kecamatan
- 8) Unsur Pemerintahan Umum meliputi:
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berbagai program yang disajikan dalam bab ini berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab dengan rincian program pembangunan pada masing-masing bidang urusan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Program, Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				380.696.794.592		384.500.108.213		469.945.328.035		583.544.937.401		436.819.056.711
URUSAN PENDIDIKAN				379.955.289.592		375.580.291.179		460.241.367.116		569.390.743.159		426.376.328.501
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	84,5	85,9	194.774.321.982	86,6	160.641.382.762	87,3	164.622.669.619	88	168.342.898.107	88,7	173.044.648.484
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	99,63	100	184.469.239.600	100	187.420.365.269	100	267.421.143.200	100	372.210.000.000	100	223.688.405.389
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	72,69	78,77		81,81		84,78		87,75		90,72	
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	30,96	40,91		45,89		50,87		55,84		60,82	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	66,45	96,21		100		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	6.353.010	100	178.127.276	100	182.541.928	100	186.667.105	100	191.880.644
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV (%)	92,25	93,18	701.075.000	93,34	27.087.023.650	93,49	27.755.340.152	93,65	28.385.637.523	93,81	29.178.437.121
	Rasio Guru/Murid (Rasio)	0:0	1:20		1:20		1:20		1:20			
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	67,2	61,65		61,91		62,17		62,43		62,7	
	Persentase Kebutuhan Guru Terpenuhi per Sekolah (Negeri) (%)	0	17,95		23,08		28,21		33,33		38,46	
	Persentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (%)	0	30,4		31,14		31,87		32,6		33,33	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi Usulan Perizinan satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/ diperbarui	100	100	4.300.000	100	253.392.222	100	259.672.217	100	265.540.424	100	272.956.863
	Persentase Rekomendasi Usulan Perizinan satuan PAUD yang diterbitkan/ diperbarui	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Rekomendasi Usulan Perizinan Satuan Pendidikan Non Formal/	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
	Kesetaraan yang diterbitkan/ diperbarui											
URUSAN KEBUDAYAAN				741.505.000		8.919.817.034		9.703.960.919		14.154.194.242		10.442.728.210
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	0	3,00	739.355.000	3,50	7.875.705.395	4,00	8.133.972.337	4,50	13.060.025.503	5,00	8.717.999.772
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	0	55	2.150.000	60	1.044.111.639	65	1.069.988.582	70	1.094.168.739	75	1.124.728.438
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	0	100	0	100	0	100	500.000.000	0	0	100	600.000.000
Dinas Kesehatan				411.557.359.038		521.098.711.758		460.405.606.987		378.776.225.047		389.355.294.785
URUSAN KESEHATAN				411.557.359.038		521.098.711.758		460.405.606.987		378.776.225.047		389.355.294.785
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	0	82	208.596.331.076	84	177.845.506.456	86	182.253.175.048	88	186.371.826.844	90	191.577.118.050
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah kematian ibu (Orang)	3	0	201.588.687.600	0	340.197.083.950	0	275.020.568.612	0	189.201.759.404	0	194.486.089.504
	Jumlah Kematian Balita (Orang)	45	43		41		39		37		36	
	Cakupan Penemuan dan Pengendalian Penyakit (%)	72,01	73		73,5		74		74,5		75	
	Prevalensi Stunting (%)	20,54	17		16		15		14		13	
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	40		45		50		60		70	
	Capaian Fasyankes Terakreditasi Paripurna (%)	100	100		100		100		100		100	
	Angka Mortalitas Penyakit (Rasio)	2,63	2,5		2,4		2,3		2,1		2	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasyankes dengan SDM kesehatan sesuai standar	100	100	495.720.000	100	655.883.719	100	672.138.940	100	687.328.284	100	706.525.091
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yang berizin	100	100	155.000.000	100	313.478.454	100	321.247.608	100	328.507.328	100	337.682.407
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Perilaku hidup sehat	0	19	721.620.362	21	2.086.759.179	23	2.138.476.779	25	2.186.803.187	27	2.247.879.733

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota				712.211.031.931		710.638.061.895		1.040.344.499.588		1.156.714.082.046		1.382.742.386.004
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				712.211.031.931		710.638.061.895		1.040.344.499.588		1.156.714.082.046		1.382.742.386.004
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	40.853.324.368	100	31.905.682.914	100	32.696.423.592	100	33.513.769.813	100	34.369.149.432
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase cakupan pengelolaan sumber daya air	73,19	76,1	390.986.860.660	77,3	130.000.000.000	79,1	301.980.119.585	80,38	271.168.231.924	82,46	481.250.053.802
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum perpipaan (%)	88,39	91,61	10.470.109.646	93,26	32.880.428.713	94,83	32.952.895.010	96,35	113.390.802.075	97,68	34.323.393.934
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sampah dikelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	34,24	21,96	506.000.000	55,70	2.652.624.523	52,47	2.718.366.351	49,24	2.779.797.410	46	2.857.436.049
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk terlayani pengolahan air limbah domestik aman (%)	4,68	7,72	6.312.295.151	9,11	5.408.555.484	10,52	5.545.599.467	11,91	5.667.854.005	13,42	5.826.154.920
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	72,82	75,52	115.238.478.143	77,81	221.582.881.564	80,14	232.819.136.316	82,50	238.081.293.097	84,13	244.729.997.985
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis	61,64	64,00	39.173.564.215	67,11	75.500.000.000	68,35	153.500.000.000	68,75	186.060.000.000	69,88	399.000.000.000
	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	21,82	22,95		23,26		23,49		23,67		23,80	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	6,67	33,33	49.833.000	40,00	406.716.742	46,67	416.796.685	53,33	426.215.673	60,00	438.119.708
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemandapan jalan (%)	89,23	89,42	106.799.296.920	89,58	207.442.000.000	89,75	274.400.000.000	89,92	302.258.636.222	90,12	176.514.475.519
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi	83,12	85,07	821.269.828	85,82	1.256.137.083	86,52	1.287.268.800	87,18	1.316.359.168	87,80	1.353.124.557
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang (%)	85,03	86,67	1.000.000.000	87,5	1.603.034.872	88,33	2.027.893.782	89,17	2.051.122.659	90	2.080.480.098
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				62.824.340.156		63.970.277.895		64.306.677.771		65.759.913.435		67.596.561.736

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				61.924.340.156		63.131.587.179		63.447.201.202		64.881.013.969		66.693.114.956
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	19.112.369.944	100	15.558.258.997	100	15.943.850.125	100	16.304.157.521	100	16.759.526.174
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	4.872.952.000,00	100	6.350.498.327	100	6.507.887.134	100	6.654.955.743	100	6.840.826.018
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	7.63	11,02		16,95		22,88		28,81		34,75	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	0	0	1.315.000.000	31,58	7.328.383.949	56,82	7.510.008.374	100	7.679.723.439	100	7.894.215.069
	Persentase rumah tidak layak huni di permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	0	11,59		18,36		23,19		28,02		32,85	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	97,64	97,78	2.030.000.000	97,85	3.200.000.000	97,92	2.030.287.912	97,98	2.076.169.411	98,05	2.134.155.999
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20	28	34.594.018.212	32	30.694.445.906	36	31.455.167.658	40	32.166.007.854	44	33.064.391.696
URUSAN PERTANAHAN				900.000.000		838.690.716		859.476.569		878.899.466		903.446.780
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	200.000.000	100	325.380.641	100	338.401.514	100	350.568.590	100	365.945.753
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	45,45	125.000.000	63,64	84.108.882	81,82	86.193.410	90,91	88.141.254	100	90.603.004
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	50,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tanah pemerintah yang tersertifikasi	58,00	64,50	325.000.000	67,00	215.369.535	69,50	215.750.449	72,00	216.106.386	74,50	216.556.231

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	33,33	100	250.000.000	100	213.831.658	100	219.131.196	100	224.083.236	100	230.341.792
Satuan Polisi Pamong Praja				20.710.554.104		14.968.254.232		15.339.222.863		15.685.866.579		16.123.966.611
URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20.710.554.104		14.968.254.232		15.339.222.863		15.685.866.579		16.123.966.611
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	19.154.414.618	100	14.411.950.946	100	14.769.132.327	100	15.102.892.841	100	15.524.710.648
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%	1.556.139.486	100%	556.303.286	100%	570.090.536	100%	582.973.738	100%	599.255.963
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100	100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase satuan perlindungan masyarakat kelurahan yang aktif	0	100%		100%		100%		100%		100%	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	14.726.684.143		12.602.739.802		12.915.082.247		13.206.943.975		13.575.808.683
URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.726.684.143		12.602.739.802		12.915.082.247		13.206.943.975		13.575.808.683
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	11.471.089.429	100	10.453.321.760	100	10.712.393.687	100	10.954.477.916	100	11.260.432.140
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	3.255.594.714	100	2.149.418.042	100	2.202.688.560	100	2.252.466.059	100	2.315.376.543
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100		100		100		100		100	
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100		100		100		100		100	
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				39.016.639.323		54.893.311.123		56.262.001.184		57.627.106.594		59.119.485.735
URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				39.016.639.323		54.893.311.123		56.262.001.184		57.627.106.594		59.119.485.735
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	34.121.947.893	100	38.052.742.586	100	39.004.061.151	100	39.979.162.679	100	40.978.641.746
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi	100	100	4.894.691.430	100	16.840.568.537	100	17.257.940.033	100	17.647.943.915	100	18.140.843.989

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	rawan kebakaran dan non kebakaran											
	persentase capaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebaran	100	100		100		100		100		100	
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				41.582.264.431		21.266.486.700		21.793.548.796		22.286.050.718		22.908.491.275
URUSAN SOSIAL				40.109.228.527		19.829.613.658		20.321.064.733		20.780.290.696		21.360.675.973
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	16.692.268.024	100	13.394.365.975	100	13.726.327.841	100	14.036.522.518	100	14.428.557.025
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial (%)	100	100	248.964.916	100	889.107.364	100	911.142.729	100	931.733.205	100	957.756.144
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial (%)	100	100	892.758.952	100	3.482.541.124	100	3.568.851.357	100	3.649.502.112	100	3.751.431.258
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase validitas data kemiskinan (%)	100	100	21.953.526.560	100	1.415.678.936	100	1.450.764.689	100	1.483.549.822	100	1.524.984.780
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)											
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	321.710.075	100	647.920.259	100	663.978.117	100	678.983.039	100	697.946.766
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.473.035.904		1.436.873.042		1.472.484.063		1.505.760.022		1.547.815.302
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif (%)	100	100	1.473.035.904	100	1.436.873.042	100	1.472.484.063	100	1.505.760.022	100	1.547.815.302
Dinas Ketenagakerjaan				24.337.879.969		25.885.212.997		36.695.718.840		36.599.722.974		37.163.290.522
URUSAN TENAGA KERJA				24.337.879.969		25.885.212.997		36.695.718.840		36.599.722.974		37.163.290.522
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	90	91	12.149.109.563	91,5	10.970.509.149	92	13.682.800.515	92,5	13.217.191.359	93	13.032.733.687

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	75	93.958.308	80	150.000.000	85	100.000.000	0	0	100	100.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14,56	3,41	3.523.953.389	7,06	6.529.983.683	14,39	13.677.180.064	14,65	14.389.994.715	14,92	14.930.717.630
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja sektor formal	20	21,5	376.479.175	22	360.003.847	23	939.474.243	24	680.461.812	25	800.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun	18.83	16,47	8.194.379.534	15.29	7.874.716.318	14,11	8.296.264.018,00	12,94	8.312.075.088,00	11.76	8.299.839.205,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana				17.609.251.656		23.274.856.692		24.132.694.904		25.230.096.324		21.012.587.229
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				17.200.264.095		15.660.328.633		16.080.303.530		16.479.752.051		16.976.956.385
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	65	70	16.658.088.384	75	12.642.935.805	80	12.956.274.456	85	13.249.067.067	90	13.619.108.256
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0,63	15	104.283.211	25	610.836.249	40	625.975.028	45	640.121.136	50	657.999.466
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	50,72	51		52		52		53		53	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	66	75	99.869.360	80	933.806.442	85	956.949.615	90	978.575.259	95	1.005.906.478
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	66	75		80		85		90		95	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	rasio layanan peningkatan kualitas hidup keluarga (per 1000 jumlah keluarga)	1,6	1,4	61.502.000	1,3	195.619.554	1,2	200.467.729	1,1	204.998.003	1	210.723.516
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	15	25	24.179.892	30	5.601.321	35	5.740.142	40	5.869.861	45	6.033.804
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	790	805	124.955.800	820	423.500.000	820	465.850.000	850	512.435.000	850	563.678.500

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	3	7	127.385.448	8	848.029.262	9	869.046.560	10	888.685.725	11	913.506.365
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				408.987.561		7.614.528.059		8.052.391.374		8.750.344.273		4.035.630.844
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR 15-19)	11,90	11,88	122.745.000	11,84	587.952.210	11,82	602.523.838	11,8	616.139.984	11,78	633.348.530
	Indeks Pembangunan Berencana Kependudukan	75,70	75,9		76		76,1		76,2		76,3	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	17,2	17	226.492.561	16	5.297.586.829	15	5.678.027.781	14	6.322.323.580	13	1.539.796.496
	Persentase Kehamilan tidak direncanakan	18,00	16,7		15,9		15		14		12,7	
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	6,15	8		9		10		11		12	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks lansia berdaya	57,9	58,2	59.750.000	58,4	1.728.989.020	58,6	1.771.839.755	58,8	1.811.880.709	60	1.862.485.818
	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	90,1	90,25		90,5		90,5		90,75		90,75	
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian				34.063.323.736		60.821.065.151		44.785.355.244		42.461.142.511		40.812.183.847
URUSAN PANGAN				28.209.407.071		33.310.318.723		31.456.830.230		31.083.377.889		31.084.878.742
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85	85	27.159.776.568	85	30.739.718.742	85	28.661.768.742	85	28.027.808.742	85	28.259.878.742
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	86,5	90	799.687.266	90	2.073.500.000	90	2.257.250.000	90	2.464.975.000	90	2.225.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Bebas Rawan Pangan	100	100	99.979.373	100	207.115.071	100	227.826.578	100	250.609.237	100	250.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100	100	149.963.864	100	189.984.910	100	209.984.910	100	239.984.910	100	250.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kedaulatan Pangan	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.724.908.092		7.260.000.000		5.481.000.000		5.503.050.000		4.840.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	22.586,17	23.491,74	1.539.997.358	23.975,67	2.735.000.000	24.481,56	2.135.000.000	25.010,36	2.135.000.000	25.563,09	1.885.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.681,75	3.797,14	1.679.911.614	3.864,73	3.095.000.000	3.939,32	1.916.000.000	4.021,26	1.938.050.000	4.110,93	1.675.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	41,77	45	504.999.120	47	1.430.000.000	49	1.430.000.000	51	1.430.000.000	53	1.280.000.000
URUSAN PERTANIAN				2.129.008.573		20.250.746.428		7.847.525.014		5.874.714.622		4.887.305.105
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian	3.128,09	3.205,98	1.164.999.134	3.254,75	1.280.000.000	3.310,43	1.435.000.000	3.373,33	1.540.000.000	3.441,16	1.500.000.000
	Produksi peternakan	2.829	3.428,25		3.440,25		3.454,01		3.469,56		3.486,9	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100	100	161.172.028	100	16.988.346.428	100	4.251.885.014	100	2.140.510.622	100	1.212.305.105
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100	100	402.918.589	100	1.150.000.000	100	1.225.000.000	100	1.150.000.000	100	1.100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100	100	199.996.990	100	334.400.000	100	367.840.000	100	404.624.000	100	425.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100	100	199.921.832	100	498.000.000	100	567.800.000	100	639.580.000	100	650.000.000
Dinas Lingkungan Hidup				0	63.724.554.627	0	100.445.662.337	89.520.133.131		94.660.622.844		81.240.373.003
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					63.724.554.627		100.445.662.337	89.520.133.131		94.660.622.844		81.240.373.003
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	44.978.559.372	100	61.936.877.328	100	63.485.299.261,00	100	65.072.431.742,71	100	66.699.242.536,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	29.777.000	100	264.873.895	100	271.438.448	100	277.572.555	100	285.325.046
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	91	93,74	969.385.244	93,97	806.194.974	95,14	826.175.463	95,37	844.845.805	93,97	868.442.014

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	hidup (%)											
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	0	53.94	7.370.223.000	53.95	7.000.000.000	53.96	7.000.000.000	53.97	10.500.000.000	53.97	6.186.926.883
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	100	100	17.043.814	100	8.954.521	100	9.176.447	100	9.383.821	100	9.645.907
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	96	96	9.700.000	96	6.339.524	100	6.496.641	96	6.643.455	96	6.829.004
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kompetensi masyarakat	0	22	190.865.639	46	230.425.041	72	236.135.825	100	241.472.145	100	248.216.366
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	53.33	206.410.000	60	306.756.094	66.67	314.358.643	73,33	321.462.682	80	330.441.008
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100	100	28.516.000	100	32.740.961	100	33.552.403	100	34.310.638	100	35.268.920
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	0	100	9.924.074.558	100	29.852.500.000	100	17.337.500.000	100	17.352.500.000	100	6.570.035.319
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16.716.260.201		13.331.797.462		13.662.208.649		13.970.954.328		14.361.157.553
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				16.716.260.201		13.331.797.462		13.662.208.649		13.970.954.328		14.361.157.553
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	90	90	15.389.622.171	90	11.220.720.206,68	90	11.498.811.102,00	90	11.758.667.199,98	90	12.087.082.121,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan indentitas kependudukan	100	100	804.695.734	100	553.636.697,68	100	567.357.860,00	100	580.179.307,37	100	596.383.486,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan layanan pencatatan sipil	100	100	149.999.800	100	512.654.296,68	100	525.359.764,00	100	537.232.116,32	100	552.236.797,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Databse Kependudukan yang Akurat	100	100	365.631.756	100	1.042.234.344,28	100	1.068.064.761,00	100	1.092.201.442,78	100	1.122.706.197,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100	100	6.310.740	100	2.551.916	100	2.615.162	100	2.674.261	100	2.748.952
Dinas Perhubungan				57.897.214.044		48.746.072.490		49.954.180.229		51.083.070.709		52.509.800.656
URUSAN PERHUBUNGAN				57.897.214.044		48.746.072.490		49.954.180.229		51.083.070.709		52.509.800.656,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	16.336.107.116	100	17.746.302.663,00	100	18.186.121.596	100	18.597.101.006,00	100	19.116.510.676,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jalan yang layak	41,57	53,46	40.502.384.532	71,29	27.142.718.921,00	76,66	27.815.415.758,00	94,14	28.444.002.953,00	98,89	29.238.432.699,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi standar teknis	61,11	68,42	1.058.722.396	78,95	3.857.050.906,00	89,47	3.952.642.875,00	94,74	4.041.966.750,00	100	4.154.857.281,00
Dinas Komunikasi dan Informatika				53.201.052.765		52.611.422.854		53.720.065.495		54.761.106.202		56.430.823.035
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				51.658.676.215		49.512.256.311		50.012.789.549		50.603.626.727		52.170.801.554
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	4,2	4,4	20.425.781.779	4,6	22.396.972.057,0	4,8	20.800.495.915	5	20.764.754.063,00	5	21.765.257.707,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	48	65	9.322.485.350	70	4.680.864.350,0	75		80		85	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota (%)	48	53		56			4.807.481.637	60	4.723.101.934	63	5.040.021.683
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,39	3,77	21.910.409.086	3,95	22.434.419.904,0	4,12	24.404.811.997	4,3	25.115.770.730	4,48	25.365.522.164
	Persentase Penggunaan Internet 3 Bulan Terakhir (%)	90,58	90,4		90,8		91,2		91,6		92	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara	25	32,14		35,71		39,29		42,86		46,43	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
	online dan terintegrasi (%)											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	86,67	93,33		96,67		100		100		100	
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	66,67	100		100		100		100		100	
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	0	100		100		100		100		100	
URUSAN STATISTIK				804.417.550		1.573.679.050		2.113.278.703		2.376.243.131		2.429.723.320
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks pembangunan statistik (IPS)	2,02	2,6	804.417.550	2,6	1.573.679.050	3,5	2.113.278.703	3,5	2.376.243.131	4,2	2.429.723.320
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	85,15		88,88		92,59		96,29		100	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	85,15		88,88		92,59		96,29		100	
URUSAN PERSANDIAN				737.959.000		1.525.487.493		1.593.997.243		1.781.236.344		1.830.298.161
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	43,57	54,59	737.959.000	60,04	1.525.487.493	65,5	1.593.997.243	70,96	1.781.236.344	73,14	1.830.298.161
	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	43,57	54,59		60,04		65,5		70,96		73,14	
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan				49.851.104.928		144.361.041.069		104.035.603.789		54.075.428.291		45.105.687.305
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				39.887.446.693		49.794.887.638		47.890.537.953		45.995.861.404		36.817.221.775
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	0	86	34.534.188.588	87	28.080.923.044	88	28.776.872.045	89	29.496.237.193	90	30.249.076.407
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan volume usaha koperasi	13.07	10	10.964.000	10	13.403.552	11,76	13.735.741	11,76	14.079.108	10	14.438.452

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSANAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35.29	100	22.077.595	100	9.945.190	35	10.191.668	35	10.446.440	100	10.713.067
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Dinilai Sehatannya	43.48	38,55	15.230.800	40,96	340.306.218	41,17	348.740.263	41,17	357.458.083	48,19	366.581.568
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	52	70	70.125.290	79	340.306.218	88	400.000.000	97	400.000.000	100	400.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100	100	15.779.000	100	3.772.501.708	100	560.000.000	100	590.000.000	100	620.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diperdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemilik kepentingan	13.23	13.23	5.199.104.420	13.23	3.772.501.708	13,23	3.865.998.236	13,23	3.962.640.581	13,23	4.063.779.963,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	11.32	2.5	19.977.000	2.5	13.465.000.000	2.5	13.915.000.000,00	2.5	11.165.000.000,00	2.5	1.092.632.318
URUSAN PERDAGANGAN				7.655.102.402		73.029.614.075		55.055.131.715		6.959.853.337		7.137.491.268
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100	100	77.034.000	100	53.484.202	100	54.809.738	100	56.179.873	100	57.613.765
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	100%	100%	7.066.048.376	100%	72.000.000.000	100%	54.000.000.000	100%	5.878.345.408	100%	6.028.379.763
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	70,5	71,5	220.059.026	72,5	222.272.493	73,5	227.781.227	74,5	233.475.309	75,5	239.434.353
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	4 pelaku usaha	20	238.771.000	16,67	175.683.786	14,29	180.037.879	12,5	184.538.471	11,11	189.248.489
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen	87,56%	100	47.958.000	100	465.751.399	100	477.294.439	100,0	489.225.860	100,0	501.712.484
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	10	12	5.232.000	14	112.422.195	16	115.208.432	18,0	118.088.416	20,0	121.102.414
URUSAN PERINDUSTRIAN				2.308.555.833		21.536.539.357		1.089.934.122		1.119.713.550		1.150.974.262
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	1,13	1,5	1.983.197.027	1,5	21.450.000.000	1,5	1.001.250.000	1,5	1.028.812.500	1,5	1.057.753.125

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100	24.562.510	100	27.081.068	100	27.752.237	100	28.445.988	100	29.172.021
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata dalam SINas	2,5	2,5	300.796.296	2,5	59.458.288	2,5	60.931.884	2,5	62.455.062	2,5	64.049.116
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				19.281.586.723		25.426.176.162	449	26.056.330.729	451	26.707.687.700	353	27.397.626.179
URUSAN PENANAMAN MODAL				19.281.586.723		25.426.176.162	449	26.056.330.729	451	26.707.687.700	353	27.397.626.179
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	14.515.573.666	100	15.618.501.612	100	16.005.585.775	100	16.405.693.909		16.832.692.243
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi	135,53	100	452.292.640	100	847.688.853	100	868.697.714	100	890.413.446	100	913.139.672
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	12	5	2.839.812.636	5	5.175.537.130	5	5.303.806.058	5	5.436.390.768	5	5.575.145.014
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100	100	496.282.320	100	901.033.189	100	923.364.120	100	946.446.405	100	970.602.773
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM	36,87	40	623.705.403	42	499.653.986	44	512.037.257	46	524.837.181	48	538.232.720
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	353.920.058	100	2.383.761.393	100	2.442.839.806	100	2.503.905.992	100	2.567.813.757
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata				105.441.729.519		291.312.918.318		91.528.239.237		100.866.339.838		101.266.705.989
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				79.868.196.864		200.691.701.624		27.029.449.848		27.705.132.883		28.412.257.331
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	0,5	0,52	889.389.685	0,54	3.088.829.117	0,56	3.165.381.712	0,57	3.244.510.024	0,59	3.327.320.396
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit yang Berprestasi	45,8	27,9	78.937.027.757	35,0	196.000.000.000	30,5	22.221.470.528	30,0	22.776.963.544	27,5	23.358.305.198
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100	100	41.779.422	100,0	1.602.872.507	100,0	1.642.597.608	100,0	1.683.659.315	100,0	1.726.631.737
URUSAN PARIWISATA				25.573.532.655		90.621.216.694		64.498.789.389		73.161.206.955		72.854.448.658
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	0	70,50	22.180.262.284	70,75	17.644.026.190	71,00	18.081.310.335	71,50	18.533.307.496	71,75	19.006.337.346

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
DAERAH KABUPATEN/KOTA												
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	2,3	3	2.000.935.899	3	59.000.000.000	3	38.000.000.000	3	46.000.000.000	3	45.000.000.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media pemasaran pariwisata	100	50	135.613.014	33,3	7.000.000.000	25,0	1.267.367.997	20,0	1.299.049.702	16,7	1.332.205.645
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	2	5,1	120.536.081	5,2	1.674.719.596	5,3	1.716.225.333	5,5	1.759.127.588	5,6	1.804.026.204
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	100	1.136.185.377	100	5.302.470.908	100	5.433.885.724	100	5.569.722.169	100	5.711.879.463
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				17.707.011.836		17.174.437.182		17.599.083.176		18.040.050.608		18.500.490.949
URUSAN PERPUSTAKAAN				16.405.195.853		16.219.188.601		16.621.160.007		17.036.656.286		17.471.486.764
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	15.205.226.799	100	13.289.619.009	100	13.618.984.859	100	13.959.432.669	100	14.315.722.464
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang menerapkan SNP	50	57	1.199.969.054	60	2.929.569.592	63	3.002.175.148	66	3.077.223.617	69	3.155.764.300
URUSAN KEARSIPAN			25	1.301.815.983		955.248.581		977.923.169		1.003.394.322		1.029.004.185
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	80	87	1.282.415.983	90	951.680.653	93	974.266.815	97	999.646.566	100	1.025.160.774
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	23	43	19.400.000	57	3.567.928	71	3.656.354	86	3.747.756	100	3.843.411
Sekretariat Daerah				187.220.500.182		121.709.539.637		124.725.951.611		127.843.854.855		131.106.842.827
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH				187.220.500.182		121.709.539.637		124.725.951.611		127.843.854.855		131.106.842.827
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Layanan Komunikasi Pimpinan dan Protokol	0	100	117.005.913.083	100	73.886.195.546	100	75.717.368.399	100	77.610.153.545	100	79.591.015.260
	Indeks kualitas layanan kesekretariata	0	82		85		88		90		92	
	Tingkat Pencapaian Indikator Birokrasi Daerah	0	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase kegiatan sosial yang difasilitasi	0	100	70.071.783.099	100	44.115.877.293	100	45.209.231.692	100	46.339.373.482	100	47.522.103.918

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
KESEJAHTERAAN RAKYAT												
	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	0	100		100		100		100		100	
	Persentase Kecamatan dan Kelurahan dengan Capaian Baik	0	100		100		100		100		100	
	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	0	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Pelaksanaan Pembangunan melalui Pengadaan Barang dan Jasa	0	100	142.804.000		3.707.466.798		3.799.351.520		3.894.327.828		3.993.723.649
	Persentase capaian pelaksanaan program strategis	0	100		100		100		100		100	
	Persentase capaian rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam (%)	0	100		100		100		100		100	
Sekretariat DPRD				74.947.694.299		70.069.303.866		71.805.880.044		73.600.885.681		75.479.417.935
URUSAN SEKRETARIAT DPRD				74.947.694.299		70.069.303.866		71.805.880.044		73.600.885.681		75.479.417.935
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	91	49.083.665.839	92	52.093.200.000	93	54.319.040.000	94	55.920.840.000	95	56.920.840.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fungsi Fasilitasi Pembahasan Propemperda	50	60	25.864.028.460	65	17.976.103.866	70	17.486.840.044	70	17.680.045.681	70	18.558.577.935
	Persentase Fungsi Fasilitasi Pembahasan Penganggaran	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Fungsi Fasilitasi Pengawasan	100	100		100		100		100		100	
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				27.762.080.942		18.269.045.145		18.721.819.566		19.189.828.199		19.679.614.579
URUSAN PERENCANAAN				20.084.293.656		16.253.334.711		16.656.152.384		17.072.523.403		17.508.269.325
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	3,60	3,7	16.033.439.369	3,8	11.467.373.001	3,8	11.751.576.863	3,85	12.045.343.150	3,9	12.352.779.200
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah antara level pemerintahan	100	100	1.650.256.516	100	3.138.767.918	100	3.216.558.182	100	3.296.965.804	100	3.381.115.017
	Tingkat kesesuaian dokumen rencana pembangunan daerah	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
	antara periode perencanaan											
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	2.400.597.771	100	1.647.193.792	100	1.688.017.339	100	1.730.214.449	100	1.774.375.108
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				7.677.787.286		2.015.710.434		2.065.667.182		2.117.304.796		2.171.345.254
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	81,43	83,4	7.377.855.013	83,5	1.769.488.436	83,6	1.769.777.441	83,7	1.784.920.567	83,8	1.823.377.036
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase inovasi yang berkelanjutan	0	52,5	299.932.273	55	246.221.998	57,5	295.889.741	60	332.384.229	62,5	347.968.218
Badan Pendapatan Daerah				26.012.963.265		21.526.543.469		22.060.050.733		22.611.508.572		23.188.627.281
URUSAN KEUANGAN				26.012.963.265		21.526.543.469		22.060.050.733		22.611.508.572		23.188.627.281
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kualitas layanan kesekretariatan	100	100	23.004.584.800	100	17.979.565.960	100	18.425.166.019	100	18.885.758.896	100	19.367.784.444
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rata-rata capaian realisasi pajak daerah	100	100	3.008.378.465	100	3.546.977.509	100	3.634.884.714	100	3.725.749.676	100	3.820.842.838
	Persentase validasi data perpajakan daerah	70	75		80		85		90		95	
	Persentase penurunan piutang pajak daerah	-20	5		5		5		5		5	
	Rata-rata Capaian Realisasi PAD selain Pajak Daerah	100	100		100		100		100		100	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				29.233.380.719		23.197.008.468		23.771.916.025		24.366.167.126		24.988.070.388
URUSAN KEUANGAN				29.233.380.719		23.197.008.468		23.771.916.025		24.366.167.126		24.988.070.388
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kualitas layanan kesekretariatan	0	3,75	18.657.173.591	3,80	17.979.565.960	3,85	18.425.166.019	3,90	18.885.758.896	3,95	19.367.784.444
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian APBD Terhadap RKPD	99,28	100	9.026.670.328	100	3.546.977.509	100	3.634.884.714	100	3.725.749.676	100	3.820.842.838
	Persentase Realiasi Belanja terhadap APBD	92,74	90		90		90		90		90	
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian data rincian BMD dengan neraca aktiva tetap milik daerah	100	100	1.549.536.800	100	1.670.464.999	100	1.711.865.292	100	1.754.658.554	100	1.799.443.106
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				22.014.812.293		39.790.075.689		40.198.790.290		40.986.356.647		41.428.476.377

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
URUSAN KEPEGAWAIAN				17.487.848.329		30.145.234.174		31.273.708.775		31.713.575.132		32.113.234.862
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	0	90,5	14.605.866.803	91	18.726.705.938	91,5	18.545.860.328	92	18.611.357.376	92,5	18.836.537.916
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kinerja layanan kepegawaian	100	100	2.881.981.526	100	11.418.528.236	100	12.727.848.447	100	13.102.217.756	100	13.276.696.946
	Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik (%)	99,94	99,94		99,94		99,94		99,94		99,94	
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.526.963.964		9.644.841.515		8.925.081.515		9.272.781.515		9.315.241.515
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi ASN	51	60	4.526.963.964	61	9.644.841.515	62	8.925.081.515	63	9.272.781.515	64	9.315.241.515
Inspektorat Daerah				25.573.179.254		17.697.235.027		18.135.837.883		18.589.198.126		19.063.654.486
URUSAN INSPEKTORAT DAERAH				25.573.179.254		17.697.235.027		18.135.837.883		18.589.198.126		19.063.654.486
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	21.623.773.620		15.960.465.720		16.356.025.016		16.764.893.442		17.192.787.655
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah T-1 (Nilai)	78,5	78,80	2.016.392.626	79,00	792.487.822	79,10	812.128.598	79,20	832.430.214	79,50	853.676.521
	Persentase penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah (ZI, MR, Aksi Pencegahan Korupsi/MCP)	100	100	1.933.013.008	100	944.281.485	100	967.684.269	100	991.874.470	100	1.017.190.310
	Nilai kapabilitas aparat pengawasan intern Pemerintah (Level)	3,03	3,05		3,06		3,07		3,08		3,1	
Kecamatan Bontang Utara				114.969.352.654		85.022.766.290		86.113.813.054		87.241.569.566		88.421.803.731
KECAMATAN				114.969.352.654		85.022.766.290		86.113.813.054		87.241.569.566		88.421.803.731
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	40.753.352.654	100	41.371.410.747	100	42.396.747.127	100	43.456.582.340	100	44.565.734.638
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan publik tata pemerintahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	98	100	630.000.000	100	1.669.292.985	100	1.710.664.231	100	1.753.427.469	100	1.798.180.600

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
	persentase sarana dan prasarana yang terdata	98	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	tingkat pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	100	72.468.000.000	100	41.000.000.000	100	41.000.000.000	100	41.000.000.000	100	41.000.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan kasus gangguan kemanan dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	100	100	988.000.000	100	712.774.099	100	730.439.274	100	748.698.817	100	767.808.029
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100	100	130.000.000	100	269.288.459	100	275.962.422	100	282.860.940	100	290.080.464
Kecamatan Bontang Selatan				115.692.330.829		77.114.609.699		78.029.490.086		78.975.152.864		79.964.819.966
KECAMATAN				115.692.330.829		77.114.609.699		78.029.490.086		78.975.152.864		79.964.819.966
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100		36.493.330.829		34.021.655.381		34.864.837.674		35.736.389.978		36.648.498.040
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan publik tata pemerintahan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	100	100	1.046.062.000	100	1.420.101.330	100	1.455.296.686	100	1.491.676.238	100	1.529.748.632
	Persentase sarana dan prasarana yang terdata	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	tingkat pemberdayaan masyarakat kelurahan	100	100	76.971.438.000	100	40.200.000.000	100	40.200.000.000	100	40.200.000.000	100	40.200.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan kasus gangguan kemanan dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	100	100	340.500.000	100	180.162.905	100	184.628.007	100	189.243.344	100	194.073.445
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100	100	841.000.000	100	1.292.690.083	100	1.324.727.719	100	1.357.843.304	100	1.392.499.849
Kecamatan Bontang Barat				55.909.859.043		38.488.232.508		38.931.136.373		39.490.624.658		40.023.820.854
KECAMATAN				55.909.859.043		38.488.232.508		38.931.136.373		39.490.624.658		40.023.820.854
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	23.502.317.349	100	18.824.453.847	100	19.240.993.348	100	19.773.230.204	100	20.277.906.885
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	279.964.229	100	514.988.072	100	527.751.379	100	540.944.124	100	554.750.765

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
	sesuai SOP (Bontang Barat)											
	persentase sarana dan prasarana yang terdata	100										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	31.815.409.465	100	18.600.000.000	100	18.600.000.000	100	18.600.000.000	100	18.600.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Bontang Barat)	100	100	206.373.000	100	434.353.943	100	445.118.838	100	456.245.932	100	467.890.802
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dikoordinasikan (%)	100	100	105.795.000	100	114.436.646	100	117.272.808	100	120.204.398	100	123.272.402
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				55.730.631.684		36.299.775.544		37.199.418.069		38.129.330.286		39.102.513.912
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				55.730.631.684		36.299.775.544		37.199.418.069		38.129.330.286		39.102.513.912
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100	100	10.691.509.513	100	9.239.259.956	100	9.468.242.947	100	9.704.930.380	100	9.952.631.540
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	1.335.433.120	100	2.820.648.059	100	2.890.554.137	100	2.962.812.300	100	3.038.432.836
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik (	100	100	905.178.010	100	807.391.581	100	827.401.727	100	848.085.141	100	869.731.013
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	583.196.255	100	1.480.858.008	100	1.517.559.139	100	1.555.495.130	100	1.595.196.388
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	100	100	40.645.267.256	100	21.237.450.682	100	21.763.793.158	100	22.307.845.141	100	22.877.213.379

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU 2026	TARGET	PAGU 2027	TARGET	PAGU 2028	TARGET	PAGU 2029	TARGET	PAGU 2030
	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan											
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase konflik yang diselesaikan	100	100	1.570.047.530	100	714.167.258	100	731.866.961	100	750.162.194	100	769.308.756
				2.878.223.422.886		3.136.512.749.674		3.252.695.684.628		3.383.081.824.704		3.466.489.440.144

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja pembangunan daerah merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, maupun sasaran, yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan berbagai sumber daya pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang untuk periode 2025–2029 disusun untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III dokumen RPJMD ini. Pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut ditargetkan untuk mampu mewujudkan capaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dinilai melalui sejumlah alat ukur yang disebut sebagai indikator kinerja. Indikator kinerja sendiri merupakan alat pengukur keberhasilan suatu sub kegiatan, kegiatan, program, ataupun sasaran dan tujuan, yang dinyatakan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak (*impact*).

Istilah kinerja seperti yang dijelaskan di atas mengacu pada pengertian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Di sisi lain, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 menggunakan istilah yang berbeda, namun memiliki struktur dan jenjang kinerja yang serupa. Penyesuaian dan pemetaan jenjang kinerja dari kedua regulasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Tujuan dan sasaran dalam RPJMD dipetakan pada jenjang kinerja Dampak (*impact*), yang setara dengan *Ultimate Outcome*.
- 2) Tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dikategorikan sebagai kinerja Dampak (*impact*), yang setara dengan *Intermediate Outcome* pada tingkat urusan.
- 3) Program dalam Renstra Perangkat Daerah diklasifikasikan sebagai kinerja Hasil (*outcome*), yang setara dengan *Intermediate Outcome* pada tingkat sub urusan.
- 4) Kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah memiliki kinerja Keluaran (*output*), yang sesuai dengan *Immediate Outcome*.
- 5) Sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah juga dikategorikan sebagai kinerja Keluaran (*output*), yang sepadan dengan *Output*.

Indikator kinerja yang menjadi bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2025 hingga 2029 dengan rincian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut.

4.2.1.Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama dalam menilai pencapaian kinerja pemerintah daerah pada level tertinggi, yang merefleksikan dampak akhir (*impact*) atau *ultimate outcome* dari seluruh proses pembangunan. Dalam konteks RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029, indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai IKU. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan strategis secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Bontang Tahun 2025–2029

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	LPE	Persen	1,00-1,15	1,15-2,00	2,01-3,09	3,09-3,93	3,93-4,40	4,40-4,70
2	LPE non-Migas	Persen	5,00	5,50	6,50	7,50	8,00	9,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,83 - 83,18	83,19 - 83,53	83,53 - 83,87	83,88 - 84,22	84,23 - 84,45	84,46 - 84,58

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,73-3,40	3,40-3,15	3,15-2,88	2,88-2,03	2,03-1,61	1,60-0,00
5	Indeks Gini	Indeks	0,330-0,300	0,323-0,310	0,310-0,300	0,300-0,290	0,290-0,286	0,286-0,281
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,38	73,54	73,69	73,84	73,99	74,15
7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	82,32	83,89	85,47	87,05	88,62	90,20
8	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	3,00	10,00	5,00	5,00	5,00	3,00
9	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	Persen	1,36	1,51	1,66	1,81	2,05	2,10
10	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	3,75	3,80	3,85	3,90	4,10	4,21
11	Kontribusi PDRB Sektor Jasa	Persen	4,51	4,64	4,76	4,89	5,02	5,46
12	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	Persen	0,72	0,77	0,83	0,88	1,05	1,08
13	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	0,22	0,44	0,60	0,68	0,72	0,76
14	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Persen	77,00	79,64	82,55	85,48	87,53	88,56
15	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1	1,1± 1
16	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	89,14	89,39	89,64	89,89	90,14	90,39
17	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,62	3,65	3,71	3,79	3,90	4,01
18	Indeks Pendidikan	Indeks	0,76	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80
19	Indeks Kesehatan	Indeks	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87
20	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	8,44	16,88	25,32	33,76	42,19	50,63
21	Indeks pembangunan keluarga	Indeks	74,80	75,60	76,50	77,40	78,59	81,71
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,78-6,65	6,60-6,05	6,05-5,25	5,25-5,05	5,05-4,67	4,67-3,95
23	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	15,89	18,54	3,01	3,16	3,23	3,74
24	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	115,57 - 114,57	113,57 - 112,57	111,57 - 110,57	109,57 - 108,57	107,57 - 106,57	105,57 - 104,57
25	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Angka	70,90	73,00	75,00	80,10	85,00	90,00

No.	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintah (SAKIP)							
26	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,32	4,35	4,38	4,41	4,44	4,47
28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,85	91,00	91,15	91,65	92,15	92,65
29	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	3,59	1,70-2,00	1,70-2,00	2,15-2,50	2,15-2,50	2,51-2,75
30	Indeks Keamanan Informasi	Skor	400	500	550	647	660	670

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD), merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan daerah. IKD berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. IKD memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2025–2029, indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku. IKD Kota Bontang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyusunan IKD juga merujuk pada indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman dalam evaluasi daerah.

Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan. IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan dan evaluasi, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Adanya IKD mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengukur capaian hasil pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang 2025–2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	88,39	89,93	91,61	93,26	94,83	96,35	97,68
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	4,68	6,30	7,72	9,11	10,52	11,91	13,42
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)								
	a. Kumulatif	Persen	1,01	0,29	0,95	1,67	2,45	3,29	4,2
	b. Tahunan	Persen	6,36	-9,15	10,18	12,22	14,51	16,82	19,51
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,97	1,18	0,98	0,97	1,01	1,01	1,17
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,03	75,23	75,43	75,64	75,84	76,04	76,25
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	0	0	0	0	0	0
3	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	93	97,88	98	98	98,5	98,5	100
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	87,4	87	88	88	89	90	90
5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca	Persen	65,07	67,59	70,09	72,59	75,09	77,59	80,09
7	Persentase siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Numerasi	Persen	53,59	56,49	59,37	62,29	65,19	68,09	70,99
8	Persentase siswa SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi Membaca	Persen	79,67	80,77	81,87	82,97	84,07	85,17	86,27

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase siswa SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Numerasi	Persen	66,59	68,09	69,59	71,09	72,59	74,09	75,59
10	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,97	11,02	11,07	11,12	11,17	11,22	11,27
11	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	17	17	17,1	17,20	17,30	17,40	17,50
12	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persen	75	75,4	75,6	75,8	76	76,2	76,4
13	Prevalensi Stunting	Persen	20,54	18	17	16	15	14	13
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,43	13,75	13,78	13,80	13,82	13,84	13,86
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,7	85,5	86	86,5	87	87,5	88
16	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	98,47	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Perlindungan Anak	Angka	1	65,52	66,23	66,94	67,65	68,36	69,07
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBANGGA)	Angka	64,62	74,8	75,6	76,5	77,4	78,59	81,71
19	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,313	0,311	0,309	0,307	0,305	0,303	0,301
20	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,85	89,31	89,81	90,31	90,81	91,31	91,81
21	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,33	60,06	63,11	64,37	65,98	67,96	67,96
22	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	6,12	6,14	6,15	6,16	6,17	6,18	6,18
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	Persen	42,4	42,8	43,3	43,9	44,6	45,3	45,9
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	76,33	76,33 - 76,50	76,67 - 77,10	77,00 - 77,69	77,34 - 78,29	77,67 - 78,88	78,01 - 79,48
3	Jumlah Tamu Wisatawan mancanegara	Orang	115	118	122	126	129	133	137
4	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Usaha	348	352	357	363	370	378	387

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	N/A	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	10	11	12	13	14	15	16
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,48	0,50
8	Return on Aset (ROA) BUMD*	Persen	-	-1	-0,5	0,5	0,7	0,9	1
9	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	63,23	69,51	70,55	71,59	72,63	73,65	74,69
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	50,72	51	51	52	52	53	53
11	Persentase Penggunaan Internet 3 Bulan Terakhir	Persen	90,58	90,00	90,40	90,80	91,20	91,60	92,00
12	Disparitas Harga	Persen	0,24	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
13	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	15,75	16.365	16,98	17.595	18,21	18.825	19,44
14	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	52	53	55	58	60	70	73,35
15	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan*	Persen	97,64	97,71	97,78	97,85	97,92	97,98	98,05
16	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	18,9	22,42	25,94	29,46	32,98	36,52	40,04
17	Total Kredit/PDRB	Persen	8,65	12,34	16,03	19,72	23,41	27,12	30,81
18	Jumlah Kejadian Tindak Kriminal	Kasus	254	225	215	206	197	188	179
19	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Konflik	1	0	0	0	0	0	0
20	Persentase Benda, Bangunan , struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	1,90	1,92	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
21	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	7,73	7,23	6,73	6,23	5,73	5,23	5,23
22	Kapasitas Air Baku*	M3/detik	0,457	0,473	0,496	0,518	0,541	0,563	0,586
23	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap air minum aman	Persen	14,77	26,89	30,55	34,20	37,86	41,51	45,17

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	76,33	76,33 - 76,50	76,67 - 77,10	77,00 - 77,69	77,34 - 78,29	77,67 - 78,88	78,01 - 79,48
25	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,67	0,72 - 0,78	0,77 - 0,83	0,83 - 0,89	0,88 - 0,94	1,05 - 1,11	1,08 - 1,14
26	Rasio Kewirausahaan	Persen	10	11	12	13	14	15	16
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,75	70,07	70,93	71,79	72,65	73,51	74,37
28	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63,91	64,11	64,31	64,51	64,71	64,91	65,10
29	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.	10.777,80	11.622,70	12.467,61	13.312,51	14.157,41	15.002,31	15.847,22
30	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	47.568,51	49.258,49	50.948,47	52.638,45	54.328,43	56.018,41	57.708,39
31	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	96,26	96,82	97,36	97,89	98,42	98,93	99,43
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,3423	0,3608	0,3793	0,3978	0,4163	0,4348	0,4533
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai / Predikat	97,72	AA (97,80)	AA (98,00)	AA (98,30)	AA (98,60)	AA (98,90)	AA (99,00)
2	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	0	71,30	75,70	76,30	78,35	79,60	80,10
3	Persentase Penegakan Perda	Persen	n/a	70	71,4	72,9	74,3	75,7	77,1
4	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	96	96,5	97	97,5	98	99	100
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan Wajib. Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	72,69	75,73	78,77	81,81	84,78	87,75	90,72
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	99,63	99,91	100	100	100	100	100
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	30,96	35,94	40,91	45,89	50,87	55,84	60,82
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,09	67,59	70,09	72,59	75,09	77,59	80,09
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,59	56,49	59,39	62,29	65,19	68,09	70,99

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	79,67	80,77	81,87	82,97	84,07	85,17	86,27
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,59	68,09	69,59	71,09	72,59	74,09	75,59
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	63,08	64,08	65,08	66,08	67,08	68,08	69,08
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	89,15	89,35	89,55	89,75	89,95	90,15	90,39
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	74,37	75,27	76,17	77,07	77,97	78,87	79,77
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	71,38	72,88	74,38	75,88	77,38	78,88	80,38
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	71,07	72,07	73,07	74,07	75,07	76,07	77,07
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	71,41	72,41	73,41	74,41	75,41	76,41	77,41
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	57,91	60,41	62,91	65,41	67,91	70,41	72,91
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	60,86	63,26	65,66	68,06	70,46	72,86	75,26
Urusan Wajib. Kesehatan									
1	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	100,4	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	100,08	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	92,01	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	89,07	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	81,33	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	84	100	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,47	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	59,73	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	90,23	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	102,86	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	97,19	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	136,83	100	100	100	100	100	100
13	Jumlah kematian ibu	Orang	3	0	0	0	0	0	0
14	Cakupan penemuan dan pengendalian penyakit	Persen	72,01	72,52	73	73,5	74	74,5	75
15	Jumlah kematian balita	Orang	45	45	43	41	39	37	36
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	0	36	40	45	50	60	70
17	Angka Mortalitas Penyakit	Rasio / 1000 Penduduk	2,63	2,6	2,5	2,4	2,3	3,1	2,0
18	Capaian fasyankes terakreditasi paripurna	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Wajib. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	97,33	97,60	97,87	98,13	98,40	98,67	99,03
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	3,51	3,51	3,51	15,14	20,61	21,52	22,42

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	88,39	89,93	91,61	93,26	94,83	96,35	97,68
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	4,68	6,30	7,72	9,11	10,52	11,91	13,42
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	21,82	22,51	22,95	23,26	23,49	23,67	23,80
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	89,23	89,26	89,42	89,58	89,75	89,92	90,12
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	83,12	84,58	85,07	85,82	86,52	87,18	87,80
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	46,67	55,56	60,00	66,67	70,00	73,91	76,00
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	20	20	20	20	20	20	20
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Urusan Wajib. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	7,42	7,42	10,38	16,31	22,88	28,81	34,75
3	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	0	0	0	31,58	56,82	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Persen	0	4,99	8,42	12,16	15,59	19,02	22,45
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00
Urusan Wajib. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	2	1	1	1	1	1	1
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	30	36	45	46	47	48	49
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	12	16	35	51	67	83	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	91,67	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	76,93	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Wajib. Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	persen	100	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	7,78	8,44	16,88	25,32	33,76	42,19	50,63
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikessos)	Persen	54,08	54,15	54,65	55,15	55,65	56,15	56,65
Urusan Wajib. Tenaga Kerja									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	70	75	80	85	90	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	12,2	16	16,57	17,16	17,74	18,32	18,9
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	rupiah/orang	476.109.807	474.746.093	476.525.635	475.370.232	472.084.822	469.663.249	466.198.961
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	18,99	21	24	27,84	30,38	32,91	35,44
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	36,15	36,76	37,92	38,50	39,10	39,78	40,94
Urusan Wajib. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase ARG Daerah	Persen	0,63	15	25	35	40	45	50
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	3	5	7	8	9	10	11
3	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	66	70	75	80	85	90	95
Urusan Wajib. Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 1-100	86,50	90	90	90	90	90	90
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	0	0	0	0	0	0	0
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan Wajib. Pertanian									
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	58,00	62,00	64,50	67,00	69,50	72,00	74,50
Urusan Wajib. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persen	77	78	79	81	83	85	86
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	96	96	96	96	96	96	98
Urusan Wajib. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00
2	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100,00	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	78.41	90	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen	5	6	7	8	9	10	15
Urusan Wajib. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Fasilitas Penataan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Fasilitas Kerjasama Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Wajib. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Orang	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	56,4	57	58	59	60	61	62
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,2	18	17	16	15	14	13
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	11,90	11,88	11,86	11,84	11,82	11,80	11,78
6	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Persen	76,11	76,25	76,25	76,50	76,50	76,75	76,75
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	75,7	75,8	75,9	76	76,1	76,2	76,3
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	18	17,4	16,7	15,9	15,0	14,0	12,7
9	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Nilai	N/A	90,25	90,25	90,5	90,5	90,75	90,75
10	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	N/A	58	58,2	58,4	58,6	58,8	60
11	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	27	53	60	67	73	80	87
Urusan Wajib. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	46,67	56,67	70,00	83,33	96,67	98,33	100,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	65,06	73,20	82,45	86,73	91,09	94,66	97,78
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	0,00	0,00	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
Urusan Wajib. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	83.87	83.87	100	100	100	100	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	83.87	83.87	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	0	100	100	100	100	100	100
Urusan Wajib. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	14	7	10	13,5	14,5	19	24
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	11,31	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8
Urusan Wajib. Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kota	Persen	9,94	3	10	5	5	5	3
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Wajib. Kepemudaan & Olahraga									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	N/A	11,5	12,6	13,1	14,4	15,8	17,4
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	N/A	50	50	50	50	53	53
3	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	0,50	0,51	0,52	0,54	0,56	0,57	0,59
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Wajib. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,02	2,02	2,6	2,6	3,5	3,5	4,2
Urusan Wajib. Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	43,57	43,67	54,59	60,04	65,5	70,96	73,14
Urusan Wajib. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	N/A	20	30	40	50	60	70
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	N/A	0	20	40	60	80	100
Urusan Wajib. Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75,83	76,8	77	77,5	78	78,5	79
Urusan Wajib. Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	71,38	75	78	80	82	84	86
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PILIHAN									
Urusan Pilihan. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1,91	1,96	2,01	2,06	2,11	2,16	2,21
2	Produksi perikanan budidaya	Persen	1,33	1,48	1,63	1,78	1,93	2,08	2,23

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Urusan Pilihan. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	2,3	3	3	3	3	3	3
2	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	2	5	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6
Urusan Pilihan. Pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	-19,24	1,3	1,45	1,6	1,75	1,9	2,05
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	-10	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Persen	-3,97	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persen	99	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persen	N/A	N/A	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persen	26,45	5	5,5	6	6,5	7	8
Urusan Pilihan. Perdagangan									
1	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	87,56	88	89,5	92	93,5	95	96
2	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Persen	32,7	37,7	42,7	47,7	52,7	57,7	62,7
Urusan Pilihan. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	24	27	30	30	30	30	30

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	Persen	27	27,2	27,3	27,6	27,7	27,8	30
3	c. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	N/A	9	12	14	15	15	15
4	d. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	N/A	2,5	3	4	4,5	5	5
5	e. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	20	16	18	18,5	20	20	20
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	32,09	31	31,4	31,5	33	33,5	35
7	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	Persen	NA	40	45	50	55	60	65
8	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	Persen	6,47	10,46	15,97	19,96	29,47	35,86	41,77
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100	100
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	28,54%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8,75%	12,35%	12,76%	15,52%	15,65%	15,79%	15,79%
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	93,05%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	14,53%	14,59%	12,37%	11,41%	10,80%	10,35%	9,59%
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	51,34%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	53,38%	-29,12%	-25%	0%	0%	0%	0%
Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	75,02	76	76,5	77	78	79	80
Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	5:6	17:20	09:11	19:22	20:23	7:8	11:12
Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	LEVEL 3 (3,224)	LEVEL 3 (3,250)	LEVEL 3 (3,275)	LEVEL 3 (3,300)	LEVEL 3 (3,325)	LEVEL 3 (3,350)	LEVEL 3 (3,375)
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	LEVEL 3 (3,030)	LEVEL 3 (3,040)	LEVEL 3 (3,050)	LEVEL 3 (3,060)	LEVEL 3 (3,070)	LEVEL 3 (3,080)	LEVEL 3 (3,100)
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	LEVEL 3 (3,253)	LEVEL 3 (3,265)	LEVEL 3 (3,270)	LEVEL 3 (3,275)	LEVEL 3 (3,280)	LEVEL 3 (3,290)	LEVEL 3 (3,300)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Tindakan lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	97,16	97,2	97,25	97,3	97,35	97,4	97,5
6	Indeks Integritas Pemerintahan Daerah	Persen	77,69	77,8	78	78,2	78,4	78,6	79
Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	19,64	19,85	20,05	20,27	20,48	20,69	20,91
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	17,65	18,53	18,72	18,92	19,12	19,32	19,52
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40
Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	TEPAT: 2 Des 2024	TEPAT: 2; TIDAK TEPAT: 0	TEPAT: 2; TIDAK TEPAT: 0	TEPAT: 2; TIDAK TEPAT: 0	TEPAT: 2; TIDAK TEPAT: 0	TEPAT: 2; TIDAK TEPAT: 0	TEPAT: 2 Des 2030
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persen	94,44	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,13	4,32	4,35	4,38	4,41	4,44	4,47

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang tahun 2025-2045. Dokumen ini sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Kota/Wakil Wali Kota yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pendekatan politis dilaksanakan melalui pembahasan visi, misi, program pembangunan bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyelarasan kebijakan dan program nasional serta program provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam program-program pembangunan, serta gambaran kerangka pendanaannya. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Sedangkan untuk penjabaran dalam pelaksanaan tahunan, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra PD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

5.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut.

- 1) Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun masih berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 karena dokumen RPJMD tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Dikarenakan RKPD Tahun 2025 harus menjadi kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 2) Dikarenakan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 belum ditetapkan menjadi peraturan daerah maka Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mempedomani rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, sedangkan untuk penyusunan RKPD Tahun 2027 sampai dengan RKPD Tahun 2029 mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ;
- 3) Penyusunan RKPD Tahun 2030 disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, serta memperhatikan rancangan RPJMN Tahun 2029-2034.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- 1) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
- 3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029, Bapperida Kota Bontang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- 5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran, serta capaian kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bapperida Kota Bontang serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota;
- 6) Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD Tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 7) Terhadap Perangkat Daerah baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program baru yang ditindaklanjuti dengan penambahan kegiatan dan sub kegiatan di Renstra perangkat daerah terkait, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Peraturan Daerah tentang RPJMD ini disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau non elektronik.

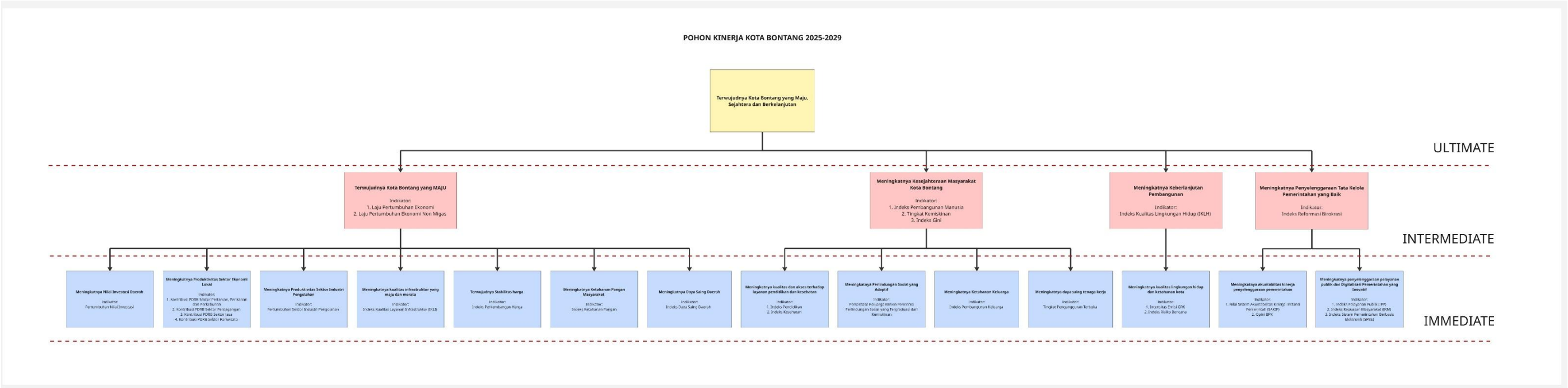
WALI KOTA BONTANG



NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN

Lampiran I (Pohon Kinerja Kota Bontang)



Lampiran II (Metadata Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional	Kegiatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional adalah total kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau tenaga kerja yang menduduki jabatan fungsional dalam suatu periode tertentu. Diklat ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan fungsional mereka (misalnya analis, auditor, perencana, dan lain-lain).	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional= $\sum$ Kegiatan Diklat yang Diikuti oleh Pegawai Fungsional
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi menunjukkan seberapa banyak posisi jabatan struktural dalam suatu organisasi yang sudah diisi oleh pegawai dibandingkan dengan total jabatan struktural yang tersedia.	Persentase Jabatan Struktural Terisi =
											Jumlah Jabatan Struktural Terisi / Jumlah Total Jabatan Struktural
											$\times 100\%$
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah ukuran persentase pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dan telah memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan total PNS yang berstatus jabatan fungsional, tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%)= Jumlah PNS Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi / Total PNS Jabatan Fungsional (kecuali guru dan tenaga kesehatan)
											$\times 100\%$
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio ini menunjukkan persentase pegawai PNS yang berstatus fungsional (misalnya analis, auditor, perencana) dibandingkan dengan total pegawai PNS, tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.	Rasio Pegawai PNS Fungsional =Jumlah Pegawai PNS Fungsional / Total Pegawai PNS (kecuali guru dan tenaga kesehatan $\times 100\%$
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah perbandingan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di sektor pendidikan tingkat tinggi, menengah, dan dasar namun bukan berstatus guru atau tenaga kesehatan, terhadap total pegawai di sektor pendidikan atau sebagai indikator tertentu.	Rasio Pegawai Non-Guru dan Non-Kesehatan = Jumlah PNS Pendidikan (Tinggi, Menengah, Dasar) yang bukan guru dan tenaga kesehatan / Total PNS Pendidikan (Tinggi, Menengah, Dasar) $\times 100\%$
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sistem Merit	Skor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Sistem merit adalah kebijakan dan praktik manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bebas dari intervensi politik dan praktik KKN.	Nilai Sistem Merit = $(\sum(\text{Skor per aspek} \times \text{bobot}) / \text{Total bobot}) \times 100$
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Permendagri 19 2024			Tahunan			Kategori penilaian : A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka kriminalitas	Kasus	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio jumlah kasus kejahatan yang terjadi dan tercatat oleh aparat penegak hukum terhadap jumlah penduduk pada wilayah dan waktu tertentu, biasanya dinyatakan per 100.000 penduduk	Angka Kriminalitas = (Jumlah Kejahatan Tercatat/Jumlah Penduduk) $\times 100.000$
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kejadian konflik SARA	Kali	Kepolisian Resor	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua Kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam Waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang Menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan	Jumlah
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kejadian tindak kriminal	Kasus	Kepolisian Resor	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah perbuatan yang melanggar hukum, baik pidana maupun perdata	Jumlah
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kegiatan pembinaan politik daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, serta menjaga stabilitas politik di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan demokrasi, hubungan antar partai politik, dan pemeliharaan ketentraman.	Jumlah kegiatan pembinaan politik
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kebutuhan data tahun 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proses pengembangan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa LSM, Ormas, dan OKP menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat.	Persentase Pembinaan = (Jumlah LSM, Ormas, dan OKP yang telah dibina / Jumlah Total LSM, Ormas, dan OKP) * 100%
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase kriminalitas yang tertangani	Persen	Kepolisian Resor	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi kasus kriminal yang berhasil ditangani oleh aparat	(Jumlah kasus tertangani / jumlah kasus masuk) $\times 100\%$
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Bencana Banjir	Kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah	Statistik	RT	Tahunan	Februari (n+1)	Frekuensi bencana banjir yang terjadi dalam satu tahun	Frekuensi Kejadian
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Bencana Kebakaran	Kali	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah	Statistik	Kelurahan	Tahunan	Februari (n+1)	Frekuensi bencana kebakaran yang terjadi dalam satu tahun	Frekuensi Kejadian
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana merupakan indikator penting dalam penanggulangan bencana.	Jumlah
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah orang yang mendapatkan dukungan dan bantuan dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.	Jumlah
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Luas wilayah banjir	ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 86 2017	Geospasial	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Luas wilayah yang terdampak banjir dalam periode tertentu (misalnya 1 tahun), baik banjir genangan maupun luapan sungai	Luas Wilayah Kebanjiran = Total luas area terdampak banjir
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	penyelamatan, evakuasi, penanganan medis, pengungsi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	(Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Kebencanaan / Jumlah Total Warga Negara yang Terkena Bencana) x 100%
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan Kota adalah suatu indikator yang menunjukkan persentase atau luas area permukiman yang rawan banjir	Rasio = (Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi / Luas Total Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kota) x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
		pengendalian banjir di WS kewenangan Kota								namun dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100%
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana x 100%
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga yang menjadi korban bencana x 100%
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n / Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n x 100%
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase penanganan pra bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n / Jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n x 100%
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n / Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P x 100%
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n / Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n x 100%
28	Badan Pendapatan Daerah	Persentase PAD sektor Pariwisata	persen	Badan Pendapatan Daerah	Permendagri 86 2017	Keuangan	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	kontribusi pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, terutama yang berasal dari pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi tempat rekreasi	PAD sektor pariwisata/Total PAD x 100%
29	Badan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	Badan Pendapatan Daerah	Permendagri 86 2017	Keuangan	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	(PAD / Total Pendapatan) × 100%
30	Badan Pendapatan Daerah	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah	Rasio Pajak Daerah = (Penerimaan Pajak Daerah / PDRB) x 100%
31	Badan Pendapatan Daerah	Total dana pihak ketiga/PDRB	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu	(Total Dana Pihak Ketiga / PDRB) x 100%
32	Badan Pendapatan Daerah	Total kredit/PDRB	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu	(Total Kredit / PDRB) x 100%
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Assets management	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	"Assets management" atau manajemen aset adalah proses pengelolaan aset organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnis atau operasional. Aset di sini bisa berupa aset fisik (seperti gedung, kendaraan, peralatan), aset keuangan, hingga aset digital.	Depresiasi Tahunan= (Harga Perolehan Aset–Nilai Residu) / Umur Ekonomis Aset x 100%
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Total dalam APBD adalah ukuran perbedaan antara realisasi belanja yang terjadi dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).	Deviasi Realisasi Belanja (%) = (Realisasi Belanja–Belanja Total dalam APBD) / Belanja Total dalam APBD ×100%
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD adalah ukuran perbedaan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dengan anggaran PAD yang telah ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).	Deviasi Realisasi PAD (%) = (Realisasi PAD–Anggaran PAD) / Anggaran PAD
											x100%
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah (Barang Milik Daerah), mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan penghapusan.	Indeks Kinerja BMD = (Σ(Capaian indikator pengelolaan BMD)/Jumlah indikator)×100
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Tahunan			
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kontribusi PDRB pembentukan modal tetap bruto/ Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Besar investasi dalam aset-aset produksi (seperti bangunan, mesin, peralatan) berkontribusi terhadap total nilai ekonomi suatu wilayah atau negara	Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%) = (PMTB / PDRB) * 100%
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rupiah	Badan Pusat Statistik	Inmendagri 2 2025			Tahunan			
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penurunan SILPA	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) mengukur berapa besar persentase penurunan SILPA suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. SILPA adalah sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran.	(SILPA Tahun Sebelumnya–SILPA Tahun Berjalan) / SILPA Tahun Sebelumnya ×100%
41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penurunan SILPA	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1 / Nilai SILPA Tahun N - 1 x 100%
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan uru yang dialokasikan Melalui TKD / Anggaran Belanja dalam APBD x 100%
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah x 100%
44	Badan Pengelolaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	Badan Pengelolaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N / Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
	Keuangan dan Aset Daerah			Keuangan dan Aset Daerah							
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N – 1 / Nilai Aset Tetap Tahun N-1 x 100%
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Alokasi Belanja Infrastruktru Pelayanan Publik / Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa x 100%
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar mengukur seberapa besar realisasi belanja yang digunakan untuk urusan pelayanan dasar dibandingkan dengan anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan tersebut dalam APBD.	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar / Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar ×100%
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pertambahan Nilai Aset Tetap	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pertambahan Nilai Aset Tetap menunjukkan peningkatan nilai aset tetap yang dimiliki oleh suatu organisasi atau daerah dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran.	Pertambahan Nilai Aset Tetap = Nilai Aset Tetap Akhir Periode–Nilai Aset Tetap Awal Periode+Pengurangan Nilai Aset Tetap
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya menunjukkan persentase anggaran yang tidak terpakai (sisa) dibandingkan dengan total anggaran belanja yang telah dialokasikan pada APBD tahun sebelumnya.	Rasio Anggaran Sisa (%) = Anggaran Sisa / Total Belanja APBD Tahun Sebelumnya ×100%
50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perangkat Daerah	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah perbandingan antara jumlah belanja pegawai yang bukan termasuk guru dan tenaga kesehatan terhadap total belanja pegawai atau terhadap indikator tertentu (misalnya anggaran keseluruhan), yang digunakan untuk mengukur alokasi anggaran pada pegawai di sektor-sektor selain pendidikan dan kesehatan.	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan = Belanja Pegawai selain Guru dan Tenaga Kesehatan / Total Belanja Pegawai x 100%
51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) adalah perbandingan antara belanja yang dikeluarkan untuk urusan pemerintahan umum setelah dikurangi belanja transfer kepada pihak lain, terhadap total belanja daerah atau anggaran tertentu. Rasio ini menunjukkan proporsi alokasi belanja yang digunakan langsung untuk operasional pemerintahan umum tanpa termasuk dana transfer.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (neto) = Belanja Urusan Pemerintahan Umum–Belanja Transfer / Total Belanja x 100%
52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah atau total anggaran daerah dalam suatu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan penerimaan daerah.	Rasio PAD = Total Pendapatan Daerah / Pendapatan Asli Daerah (PAD) x 100%
53	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Individu	Tahunan	Februari (n+1)	Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022).	Tingkat kemiskinan ekstrem = Jumlah penduduk miskin ekstrem/Jumlah seluruh penduduk
54	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Gini	Indeks	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan (0 = adil, 1 = timpang)	Rumus Gini Koefisien
55	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran komposit kesejahteraan berbasis pendidikan, kesehatan, dan daya beli	Skor komposit dari 3 dimensi
56	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, termasuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	Skor Indeks=Σ(Bobot Aspek×Skor Penilaian per Aspek)
57	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Laju Inflasi	Persen	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kenaikan rata-rata harga barang dan jasa dalam periode tertentu	(IHK akhir tahun - awal tahun)/awal tahun × 100%
58	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai PDRB per-Kapita	juta rp.	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Nilai rata-rata PDRB per penduduk (umum, tidak dibedakan migas)	PDRB / Jumlah Penduduk
59	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai PDRB perkapita dengan MIGAS	juta rp.	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Nilai tambah barang dan jasa per penduduk termasuk sektor migas	PDRB ADHB / Jumlah Penduduk
60	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai PDRB perkapita non MIGAS	juta rp.	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Nilai tambah per penduduk tanpa sektor migas	PDRB Non-Migas / Jumlah Penduduk
61	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RenstraPD	%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD adalah ukuran seberapa besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejalan atau selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Ini penting untuk memastikan kebijakan dan program perangkat daerah mendukung tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.	Jumlah Elemen Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD / Total Elemen dalam Renstra PD ×100%
62	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Program Prioritas yang di dukung Program Daerah / Jumlah Program Prioritas Nasional x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
63	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah / Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah x 100%
64	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah / Jumlah produk inovasi yang dihasilkan
65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	OPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di suatu wilayah yang sudah melakukan pemanfaatan data kependudukan resmi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi pengelola data kependudukan	jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di suatu wilayah yang sudah melakukan pemanfaatan data kependudukan resmi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan instansi pengelola data kependudukan / Total Jumlah OPD x 100%
66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran mengukur proporsi penduduk anak-anak (umumnya usia 0-17 tahun) yang memiliki dokumen resmi akta kelahiran sebagai bukti identitas dan status kelahiran yang sah	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran = Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran / Jumlah Total Anak (0-17 tahun) x 100%
67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	BPS	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	indikator yang menunjukkan persentase peningkatan atau penurunan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun, sebagai hasil dari proses kelahiran, kematian, dan migrasi.	LPP = ((Jumlah penduduk pada akhir periode - Jumlah penduduk pada awal periode) / Jumlah penduduk pada awal periode) × (1/t) × 100%
68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perekaman KTP -el	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Perekaman KTP-el adalah ukuran yang menunjukkan progres dan cakupan penduduk yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik (KTP-el) dibandingkan dengan total penduduk yang wajib KTP (usia ≥17 tahun atau sudah menikah)	Persentase Perekaman KTP-el = Jumlah Total Penduduk Wajib KTP / Jumlah Penduduk Wajib KTP yang Telah Merekam Data KTP-el x 100%
69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator Kinerja	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	cakupan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan dan aktif terhadap total rencana atau potensi kerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan. Hal ini mencerminkan tingkat keterbukaan, kemitraan, dan pemanfaatan data oleh pihak-pihak yang membutuhkan.	Persentase Kerja Sama = (Jumlah dokumen kerja sama aktif / Jumlah potensi kerja sama yang direncanakan) x 100%
70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan proporsi anak-anak dalam rentang usia tersebut yang sudah memiliki KIA sebagai dokumen identitas resmi.	Persentase Anak yang Memiliki KIA = Jumlah Total Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari / Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang Memiliki KIA x 100
71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator Kinerja	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil adalah rasio antara jumlah dokumen pencatatan sipil yang berhasil diterbitkan terhadap jumlah permohonan atau target populasi yang seharusnya memiliki dokumen tersebut, dalam satu tahun	Persentase Cakupan = (Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / Jumlah target penduduk atau permohonan sah) x 100%
72	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Cakupan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator Kinerja	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	perkembangan cakupan penduduk yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu bentuk digital dari KTP-el yang diakses melalui perangkat telepon genggam. IKD merupakan inovasi dalam sistem administrasi kependudukan untuk mempermudah akses layanan publik dan mempercepat transformasi digital. Persentase peningkatan cakupan aktivasi IKD adalah rasio pertumbuhan jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD pada suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam satuan persen.	Persentase Peningkatan IKD = ((Jumlah aktivasi IKD tahun berjalan - Jumlah aktivasi tahun sebelumnya) / Jumlah aktivasi tahun sebelumnya) x 100%
73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Wajib KTP yang Sudah Melakukan Perekaman	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator Kinerja	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase peningkatan jumlah penduduk wajib KTP (Usia 17 Tahun keatas atau sudah menikah) yang sudah melakukan perekaman (adalah rasio pertumbuhan jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP-el pada suatu tahun terhadap jumlah perekaman pada tahun sebelumnya, dalam bentuk persen. Indikator ini mencerminkan efektivitas kinerja pencatatan sipil secara tahunan.	Persentase Peningkatan = ((Jumlah perekaman tahun ini - Jumlah perekaman tahun lalu) / Jumlah perekaman tahun lalu) x 100%
74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital / Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP x 100%
75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Akta kematian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan x 100%
76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Akta perkawinan yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan x 100%
77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Akta perceraian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan x 100%
78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Akta kelahiran yang diterbitkan dibagi / Jumlah anak usia 0 – 17 tahun x 100%
79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Anak yang Memiliki KIA / Jumlah anak wajib KIA x 100%
80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun / 2 Dokumen x 100%
81	Dinas Kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis	Persen	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap	(Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan / semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan)x100%
82	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi	Rasio / 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah bayi meninggal sebelum usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.	(Jumlah kematian bayi <1 tahun/Jumlah kelahiran hidup)×1.000
83	Dinas Kesehatan	Angka Kematian ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.	(Jumlah kematian ibu/Jumlah kelahiran hidup)×100.000

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
84	Dinas Kesehatan	Angka kesembuhan TB	Rasio	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi pasien TB yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil laboratorium dari jumlah pasien TB yang menjalani pengobatan.	(Jumlah Pasien TB Sembuh/Jumlah Pasien TB yang Diobati)×100%
85	Dinas Kesehatan	Cakupan Kepesertaan BPJS	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penduduk yang menjadi peserta aktif JKN.	(Jumlah peserta aktif JKN/Jumlah total penduduk)× 100%
86	Dinas Kesehatan	Cakupan kepesertaan JKN	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penduduk yang menjadi peserta aktif JKN.	(Jumlah peserta aktif JKN/Jumlah total penduduk)× 100%
87	Dinas Kesehatan	Cakupan penemuan kasus tuberkolosis	Persen	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dalam periode tertentu	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis = (Jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan / Perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu)x100%
88	Dinas Kesehatan	IR DBD	Rasio/100 ribu Pdd.	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah kasus baru DBD per 100.000 penduduk dalam periode tertentu.	(Jumlah Kasus DBD/Jumlah Penduduk)×100.000
89	Dinas Kesehatan	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	FKTP	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah FKTP yang memiliki jumlah, jenis, dan kompetensi tenaga kesehatan sesuai ketentuan Permenkes.	Data agregat
90	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	RS	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah RS yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar akreditasi dan regulasi (jenis, jumlah, kompetensi).	Data agregat
91	Dinas Kesehatan	Ketersediaan obat esensial (%)	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase FKTP yang memiliki daftar lengkap obat esensial sesuai standar dalam ketersediaan minimum.	(Jumlah FKTP dengan ketersediaan obat esensial lengkap/Jumlah total FKTP)×100%
92	Dinas Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi anak usia 7–12 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan melalui UKS atau pemeriksaan berkala di sekolah.	(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan / Jumlah anak usia pendidikan dasar) x 100%
93	Dinas Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah semua anak yang sedang bersekolah di tingkat SD dan SMP, serta anak yang berusia 7-15 tahun di luar sekolah. Standar pelayanan kesehatan ini meliputi skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining, dan pemeriksaan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.	(Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah total anak usia pendidikan dasar) * 100%
94	Dinas Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi bayi usia 0–28 hari yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar seperti pemeriksaan neonatal 1–3 (KN1–KN3).	(Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pemeriksaan KN1–KN3 / Jumlah total bayi lahir) x 100%
95	Dinas Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah serangkaian tindakan dan intervensi yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari untuk memastikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang optimal.	Persentase = (Jumlah Bayi Mendapatkan Pelayanan / Jumlah Total Bayi Baru Lahir) x 100%
96	Dinas Kesehatan	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai Permenkes tentang Standar Pelayanan.	(Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar/Total Fasyankes)×100%
97	Dinas Kesehatan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi FKTP milik pemerintah yang memiliki sertifikat akreditasi.	(Jumlah FKTP terakreditasi/Jumlah total FKTP milik pemerintah)×100%
98	Dinas Kesehatan	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penderita hipertensi yang tekanan darahnya terkendali sesuai standar (<140/90 mmHg) setelah pengobatan rutin.	(Jumlah penderita hipertensi terkontrol/Jumlah Penderita hipertensi)×100%
99	Dinas Kesehatan	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase ibu yang melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.	(Jumlah ibu bersalin dilayani di fasilitas kesehatan oleh tenaga terlatih / Jumlah total ibu bersalin) x 100%
100	Dinas Kesehatan	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan dan jajarannya) untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Persentase = (Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapat Pelayanan Persalinan / Jumlah Total Ibu Bersalin) x 100%
101	Dinas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi ibu hamil yang memperoleh layanan antenatal (ANC) sesuai standar minimal 6 kali, termasuk satu kali oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.	(Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC lengkap / Jumlah ibu hamil) x 100%
102	Dinas Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (skizofrenia, psikotik berat) yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	(Jumlah ODGJ Berat yang mendapat pelayanan sesuai standar / Jumlah ODGJ Bera) x 100%
103	Dinas Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah penderita skizofrenia dan psikosis akut yang mendapatkan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit Umum (RSU) dengan layanan kesehatan jiwa, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ).	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar = (Jumlah ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar / Total Jumlah ODGJ Berat) x 100%
104	Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi populasi kunci (ODHA, ibu hamil, WPS, Waria, LSL, dll.) yang menjalani pemeriksaan HIV secara berkala sesuai standar.	(Jumlah orang beresiko HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar / Jumlah orang beresiko HIV) x 100%
105	Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, yaitu dengan menjalani tes HIV yang akurat dan sesuai dengan standar kesehatan	Persentase = (Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar / Jumlah total orang dengan risiko terinfeksi HIV) x 100%
106	Dinas Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar jika mendapatkan pemeriksaan bakteriologis (misalnya melalui pemeriksaan sputum atau tes cepat molekuler (TCM)) atau pemeriksaan klinis, serta pemeriksaan penunjang lainnya jika diperlukan, kemudian dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai jika diperlukan.	Persentase = (Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah total orang terduga TBC) * 100%
107	Dinas Kesehatan	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase populasi usia produktif yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala (misalnya tekanan darah, kolesterol, gula darah).	(Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang disaring kesehatannya / Jumlah penduduk usia 15–59 tahun) x 100%
108	Dinas Kesehatan	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Orang usia 15-59 tahun, yang disebut usia produktif, berhak mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal sekali dalam setahun.	Persentase = (Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah total orang usia 15-59 tahun) x 100%
109	Dinas Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penderita diabetes melitus (DM) yang memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan standar pengelolaan DM.	(Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar / Jumlah Penderita DM) x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
		pelayanan kesehatan sesuai standa									
110	Dinas Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah semua penderita DM yang mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan, pemeriksaan, dan edukasi yang sesuai dengan standar medis.	Persentase = (Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar / Total penderita DM) x 100%
111	Dinas Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan pedoman tata laksana hipertensi di fasilitas kesehatan.	(Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar / Jumlah Penderita Hipertensi) x 100%
112	Dinas Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita yang menerima pemeriksaan tekanan darah minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta mendapatkan edukasi tentang perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat.	Persentase = (Jumlah Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan / Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi) x 100%
113	Dinas Kesehatan	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penduduk yang memenuhi indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), seperti cuci tangan, tidak merokok, dan konsumsi buah-sayur.	(Jumlah penduduk dengan PHBS baik/Total penduduk)×100%
114	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah sakit pemerinah terakreditasi paripurna	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase rumah sakit milik pemerintah yang memperoleh status akreditasi tertinggi (paripurna).	(Jumlah RS Pemerintah Terakreditasi Paripurna/ Total RS Pemerintah)×100%
115	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase RS rujukan tingkat kota yang telah memperoleh akreditasi resmi (minimal madya).	(Jumlah RS Rujukan Kota Terakreditasi/Total RS Rujukan Kotak)×100%
116	Dinas Kesehatan	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase SDM Kesehatan yang memperoleh pelatihan terkait kompetensi pelayanan kesehatan	(Jumlah SDMK dilatih/Total SDMK)×100%\
117	Dinas Kesehatan	Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase aplikasi atau sistem informasi lokal yang telah terhubung ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNas).	(Jumlah sistem informasi terintegrasi/ Jumlah total sistem informasi yang digunakan) ×100%
118	Dinas Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase individu terduga TBC yang menjalani pemeriksaan dan/atau pengobatan sesuai standar nasional program pengendalian TBC.	(Jumlah terduga TBC yang mendapat pelayanan sesuai standar / Jumlah terduga TBC) x 100%
119	Dinas Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase lansia yang menerima skrining atau deteksi dini masalah kesehatan melalui Posyandu Lansia atau faskes.	(Jumlah lansia yang disaring kesehatannya/Jumlah total lansia) x 100%
120	Dinas Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Warga negara usia 60 tahun ke atas, yang dikenal sebagai lansia, harus mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam setahun.	[(Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar) / (Total jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas)] x 100%
121	Dinas Kesehatan	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang dikenal dengan istilah "Antenatal Care" (ANC) atau pelayanan pemeriksaan kehamilan. ANC adalah perawatan kehamilan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk memantau kesehatan ibu dan janin, serta mendeteksi dini potensi komplikasi atau kelainan.	Persentase = (Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan / Jumlah Total Ibu Hamil) x 100%
122	Dinas Kesehatan	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kecamatan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi balita yang memperoleh pelayanan seperti pemantauan tumbuh kembang, imunisasi lengkap, dan deteksi dini gangguan.	(Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan lengkap / Jumlah total balita) x 100%
123	Dinas Kesehatan	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan, yang meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan sakit, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019.	(Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah balita total) x 100%.
124	Dinas Kesehatan	Presentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	RS rujukan tingkat kota yang terakreditasi adalah rumah sakit yang memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi nasional atau internasional.	Persentase = (Jumlah RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi / Total Jumlah RS Rujukan Tingkat Kota) * 100%
125	Dinas Kesehatan	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi balita yang memiliki berat badan menurut umur kurang dari -2 SD (indikator wasting) berdasarkan WHO.	(Jumlah balita gizi kurang/Jumlah total balita)×100%
126	Dinas Kesehatan	Prevalensi balita Gizi kurus	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi balita dengan berat badan menurut tinggi badan < -2 SD (indikator wasting).	(Jumlah balita wasting/Jumlah total balita)×100%
127	Dinas Kesehatan	Prevalensi HIV	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi jumlah kasus HIV positif terhadap total populasi tertentu dalam satu wilayah.	(Jumlah Kasus HIV/Jumlah Penduduk)×100%
128	Dinas Kesehatan	Prevalensi Baduta Stunting	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi anak usia <2 tahun dengan tinggi badan menurut umur di bawah -2 SD (indikator wasting).	(Jumlah baduta stunting/Jumlah total baduta)×100%
129	Dinas Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perbandingan antara kapasitas tempat tidur RS rujukan dengan jumlah penduduk.	(Jumlah tempat tidur RS Rujukan/Jumlah Penduduk)×100.000
130	Dinas Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Daya tampung Rumah Sakit Rujukan (referral hospital) adalah jumlah pasien yang bisa ditampung dan dirawat di rumah sakit tersebut dalam waktu tertentu.	Rasio Daya Tampung = (Jumlah Tempat Tidur di RS Rujukan / Jumlah Penduduk) x 100
131	Dinas Kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	Rasio	Dinas Kesehatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah FKTP (puskesmas, klinik, praktik mandiri) per jumlah penduduk tertentu.	Rasio FKTP = (Jumlah FKTP/Jumlah Penduduk)×100.000
132	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	BPS	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
133	Dinas Kesehatan	Prevalensi Stunting	Persen	Dinas Kesehatan	Inmendagri 2 2025			Tahunan			
134	Dinas Kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD			Tahunan			
135	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
136	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
137	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
138	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 / Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
139	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama x 100%
140	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun x 100%
141	Dinas Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) x 100%
142	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
143	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
144	Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
145	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
146	Dinas Kesehatan	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
147	Dinas Kesehatan	Jumlah kematian ibu	Orang	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD			Tahunan			
148	Dinas Kesehatan	Cakupan penemuan dan pengendaian penyakit	Persen	Dinas Kesehatan				Tahunan			
149	Dinas Kesehatan	Jumlah kematian balita	Orang	Dinas Kesehatan				Tahunan			
150	Dinas Kesehatan	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	Dinas Kesehatan				Tahunan			
151	Dinas Kesehatan	Angka Mortalitas Penyakit	Rasio / 1000 Penduduk	Dinas Kesehatan				Tahunan			
152	Dinas Kesehatan	Capaian fasyankes terakreditasi paripurna	Persen	Dinas Kesehatan				Tahunan			
153	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Jumlah produksi Perikanan tangkap dan budidaya	Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	jumlah produksi perikanan tangkap adalah jumlah ikan dan biota laut lainnya yang ditangkap secara langsung dari perairan alami	Jumlah
154	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota	Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah total produksi perikanan adalah keseluruhan volume hasil perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan usaha pembudidayaan ikan (perikanan budidaya) di wilayah kota dalam satu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.	Jumlah Total Produksi Perikanan = Produksi Perikanan Tangkap + Produksi Perikanan Budidaya
155	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Konsumsi ikan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) / Target Daerah (Kg) x 100%
156	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Nilai	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebuah skor yang menggambarkan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat dalam suatu wilayah	presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot dikali setiap kelompok pangan yang telah ditetapkan
157	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan jumlah energi (dalam kilokalori) dan protein (dalam gram) dari bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu periode waktu tertentu	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD per 100
158	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase ketersediaan pangan adalah proporsi kecukupan cadangan pangan utama (beras dan/atau jagung) yang tersedia di suatu wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan kebutuhan pangan yang diperkirakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat selama periode tersebut	Persentase Ketersediaan Pangan = Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia / Kebutuhan Pangan Periode Tersebut x 100%
159	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase kinerja realisasi pupuk adalah ukuran perbandingan antara jumlah pupuk bersubsidi atau non-subsidi yang telah disalurkan/didistribusikan kepada petani dengan jumlah alokasi atau rencana kebutuhan pupuk dalam periode tertentu.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk = Jumlah Pupuk yang Terealisasi / Jumlah Pupuk yang Dialokasikan x 100%
160	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa pangan segar yang berasal dari tumbuhan aman untuk dikonsumsi, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan	

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
161	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular adalah ukuran penurunan jumlah kasus atau kejadian penyakit menular pada hewan (seperti anthrax, rabies, avian influenza, dll.) dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dibandingkan secara tahunan.	Persentase Penurunan = (Jumlah Kasus Tahun Lalu–Jumlah Kasus Tahun Ini) / Jumlah Kasus Tahun Lalu x 100%
162	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalance of undernourishment)	persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment atau PoU) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami asupan energi harian dari makanan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi agar kehidupan berjalan normal	(Jumlah Penduduk dengan Asupan Kalori < 1400 kkal / Jumlah Penduduk Total) * 100%
163	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Produksi perikanan budidaya	Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Produksi perikanan budidaya (akuakultur) adalah kegiatan menghasilkan biota air, seperti ikan, udang, moluska, atau rumput laut, dalam lingkungan terkendali dengan tujuan mendapatkan keuntungan.	Jumlah
164	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Produksi perikanan tangkap	Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Produksi perikanan tangkap mengacu pada hasil penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, seperti laut, sungai, danau, dan badan air lainnya.	Jumlah
165	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Produksi perikanan budidaya	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Produksi Perikanan Budi Daya / Target Produksi Perikanan Budi Daya x 100%
166	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Produksi perikanan tangkap	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Produksi Perikanan Tangkap / Target Produksi Perikanan Tangkap x 100%
167	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun adalah ukuran jumlah hasil panen (produksi) yang diperoleh dari setiap hektar lahan pertanian dalam satu tahun. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan lahan dalam menghasilkan komoditas pertanian.	Produktivitas = Total Produksi Tahunan (ton atau kg) / Luas Lahan yang Digunakan (hektar) x 100%
168	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu.	PoU = (Jumlah Penduduk dengan Asupan Kalori < 1400 kkal / Jumlah Penduduk Total) * 100%
169	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Regulasi ketahanan pangan merujuk pada peraturan dan undang-undang yang mengatur aspek-aspek terkait ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Jumlah
170	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan keragaman & keseimbangan	Skor 0–100 dari konsumsi 9 kelompok pangan
171	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota / Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023) x 100%
172	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai 1-100	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			1. Pengelompokkan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhdap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan
173	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah desa dan/atau kelurahan rentan rawan pangan / Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten x 100%
174	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kemandirian pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilans) sebesar 40%
175	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Produksi Tanaman Pangan Tahun ini - Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin / Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin x 100%
176	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Produksi Holtikultura Tahun ini- Produksi hortikultura Tahun Kemarin / Produksi hortikultura tahun kemarin x 100%
177	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Produksi komoditas Peternakan Tahun ini - Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin / Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin) x 100%
178	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Produksi Tanaman Pangan Tahun N – Produksi PerkebunanTahun N-1 / Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin-Produksi Perkebunan tahun N-1 x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
179	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikulturadan Perkebunan	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Luas terkena DPIyang ditangani tahun ini /Di bagi luas terkena DPI total x 100%
180	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	Persen	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Permendagri 19 2024			Tahunan			Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini / Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis x 100%
181	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Kasus	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah kasus perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang tercatat dalam satu tahun kalender, mencakup berbagai jenis perselisihan hubungan industrial.	Jumlah kasus perselisihan antara pengusaha dan pekerja
182	Dinas Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Angka	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun adalah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang tercatat secara resmi dalam satu tahun antara pengusaha dan pekerja/buruh, baik yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja maupun yang diteruskan ke lembaga penyelesaian seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	Jumlah kasus sengketa yang tercatat dalam satu tahun
183	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja, yang mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap kerja (attitude) sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.	(Jumlah tenaga kerja yang dilatih/jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi)x100%
184	Dinas Ketenagakerjaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah tenaga kerja, baik pekerja formal maupun informal, yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sesuai standar yang diakui dalam satu periode waktu tertentu.	Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi / Total Jumlah Pekerja x 100%
185	Dinas Ketenagakerjaan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja	Persen	BPJS Ketenagakerjaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program JaminanKecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM)BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	Cakupan Kepesertaan = (Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah penduduk bekerja)x100%
186	Dinas Ketenagakerjaan	Angka Ketergantungan	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Inmendagri 2 2025						
187	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Pencari kerja yang ditempatkan adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, yang berhasil ditempatkan sesuai dengan pilihan masing-masing pencari kerja	Persentase Penempatan=(Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan/Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar)x100%
188	Dinas Ketenagakerjaan	Pencari kerja yang ditempatkan	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan / Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar
189	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Kasus perselisihan yang terjadi antara buruh dan pengusaha yang disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah	Jumlah kasus perselisihan
190	Dinas Ketenagakerjaan	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah jumlah atau frekuensi konflik, penolakan, atau keberatan yang disampaikan oleh serikat pekerja/buruh atau asosiasi pengusaha terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Perselisihan ini dapat berkaitan dengan upah minimum, struktur skala upah, pengawasan ketenagakerjaan, perizinan tenaga kerja asing, atau kebijakan lainnya yang berdampak pada hubungan industrial.	Jumlah keberatan resmi atau konflik yang terdokumentasi
191	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana tenaga kerja adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana realisasi kegiatan ketenagakerjaan (pelatihan, penempatan, pemberdayaan, dll.) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya dalam periode tertentu	Persentase Kegiatan Terealisasi = Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan / Jumlah Kegiatan yang Direncanakan x 100%
192	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana tenaga kerja adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana realisasi kegiatan ketenagakerjaan (pelatihan, penempatan, pemberdayaan, dll.) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya dalam periode tertentu	Persentase Kegiatan Terealisasi = Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan / Jumlah Kegiatan yang Direncanakan x 100%
193	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase penduduk bekerja 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal digunakan untuk mengetahui banyaknya jumlah pekerja yang terserap disektor formal	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal/Jumlah Angkatan Kerja)x100%
194	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pproporsi tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi kompetensi resmi, biasanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diakui oleh BNSP atau instansi lain.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%) = Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat / Total Jumlah Tenaga Kerja ×100%
195	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota adalah ukuran yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang berhasil ditempatkan oleh pemerintah daerah melalui sistem pelayanan penempatan tenaga kerja (seperti AK1/Kartu Kuning, job fair, sistem online, atau kerja sama antar perusahaan), dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan dilayani dalam periode tertentu	Persentase Penempatan Tenaga Kerja = Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar x 100%
196	Dinas Ketenagakerjaan	Persentasi Perusahaan yang menetapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase perusahaan yang menetapkan tata kelola ketenagakerjaan yang layak adalah ukuran yang menunjukkan proporsi perusahaan yang telah memenuhi empat aspek utama dalam hubungan industrial yang adil dan sesuai peraturan	Persentase Perusahaan dengan Tata Kelola Layak = Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Semua Komponen / Jumlah Total Perusahaan x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
197	Dinas Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tri Wulan		Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja terhadap total penduduk usia kerja.	$(\text{Jumlah penduduk yang bekerja} / \text{Total penduduk usia kerja}) \times 100\%$
198	Dinas Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tri Wulan		Persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).	$(\text{Angkatan kerja} / \text{Penduduk usia kerja}) \times 100\%$
199	Dinas Ketenagakerjaan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Orang	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan (PYB – Penggunaan Yang Bersumber dari Belanja), baik oleh individu maupun kelompok, dalam satuan waktu tertentu. Rasio ini mencerminkan besarnya kontribusi tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi di suatu lapangan usaha, baik secara nasional maupun regional	$\text{Produktivitas Tenaga Kerja} = \text{PDRB} / \text{Jumlah Tenaga Kerja}$
200	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			$\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD} / \text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten} \times 100\%$
201	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			$\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} / \text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan} \times 100\%$
202	Dinas Ketenagakerjaan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	rupiah/orang	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			$\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)} / \text{Jumlah tenaga kerja}$
203	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			$\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} / \text{Jumlah Perusahaan} \times 100\%$
204	Dinas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	Dinas Ketenagakerjaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			$\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan} / \text{Jumlah pencaker yang terdaftar} \times 100\%$
205	Dinas Komunikasi dan Informatika	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access to Fiscal Information) adalah tingkat kemudahan dan keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan data atau informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup transparansi tentang anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, laporan keuangan, dan kebijakan fiskal daerah.	$\text{Jumlah Informasi Keuangan yang Tersedia untuk Publik} / \text{Jumlah Total Informasi Keuangan yang Seharusnya Disediakan} \times 100\%$
206	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)*	%	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units) adalah data atau gambaran lengkap mengenai semua jenis sumber daya yang bisa digunakan oleh unit-unit pelayanan langsung (seperti kantor pelayanan, puskesmas, sekolah, atau unit administrasi lainnya) untuk menjalankan tugas dan memberikan layanan kepada masyarakat.	$\text{Jumlah informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan} / \text{total sumber daya yang tersedia untuk pelayanan} \times 100\%$
207	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah proporsi dari total layanan publik yang telah dapat diakses secara digital (online) dan terintegrasi antar sistem atau platform pelayanan, terhadap seluruh layanan publik yang tersedia di lingkungan pemerintah daerah.	$\text{Persentase Layanan Online Terintegrasi} = \text{Jumlah layanan publik yang online dan terintegrasi} / \text{Jumlah total layanan publik} \times 100\%$
208	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggrakan secara online dan terintegrasi	persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase dari total jenis layanan publik yang telah dapat diakses secara daring (online) dan terintegrasi dengan sistem layanan lain di dalam satu instansi atau antar instansi pemerintah (melalui portal bersama, API, SSO, atau sistem interoperabilitas lainnya).	$\text{Persentase Layanan Online dan Terintegrasi} = (\text{Jumlah Layanan Publik Online dan Terintegrasi} / \text{Jumlah Total Jenis Layanan Publik}) \times 100\%$
209	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase masyarakat dari kelompok sasaran (berdasarkan wilayah, usia, pekerjaan, atau kriteria strategis lainnya) yang mengetahui isi kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat maupun daerah yang disampaikan melalui media informasi publik resmi.	$\text{Persentase pengetahuan masyarakat} = (\text{Jumlah responden yang mengetahui kebijakan dan program Pemerintah} / \text{Jumlah total responden Sasaran}) \times 100\%$
210	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan memahami kebijakan serta program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kota adalah proporsi warga yang terpapar informasi resmi dan mengetahui substansi program/kebijakan dibandingkan dengan total masyarakat sasaran	$\text{Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi kebijakan dan program} / \text{Jumlah total masyarakat sasaran} \times 100\%$
211	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah OPD yang memiliki tugas terkait perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik} / \text{Total Jumlah OPD}) \times 100\%$
212	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dibandingkan dengan total jumlah OPD. Penggunaan data statistik ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja, efektivitas program, dan dampak kebijakan secara objektif dan terukur.	$\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi} / \text{Jumlah total OPD} \times 100$
213	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sangat bergantung pada data statistik yang akurat dan relevan.	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik} / \text{Total jumlah OPD}) \times 100\%$
214	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 19 2024	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase jumlah OPD yang telah terhubung ke jaringan internet yang difasilitasi atau dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari total jumlah OPD di lingkungan pemerintah daerah.	$\text{Persentase OPD Terkoneksi} = (\text{Jumlah OPD yang Terhubung ke Internet Kominfo} / \text{Jumlah Total OPD}) \times 100\%$

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
215	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet Dinas Kominfo adalah perbandingan antara jumlah OPD yang telah menggunakan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan total jumlah OPD yang ada di wilayah tersebut	Persentase OPD Terkoneksi = Jumlah OPD yang terhubung ke internet Kominfo / Jumlah total OPD x 100%
216	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah / Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota x 100%
217	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD / Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah x 100%
218	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 19 2024			Tahunan			5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator
219	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi / Nilai Optimal Indeks KAMI (918) x 100%
220	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Penggunaan Internet 3 Bulan Terakhir	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tri Wulan		Jumlah penduduk berusia 5 tahun keatas yang menggunakan internet selama 3 bulan terakhir termasuk penggunaan Facebook, Twitter, Youtube, Instagram dan Whatsapp	Jumlah Penduduk berusia 5 tahun keatas menggunakan internet selama 3 bulan terakhir DIBAGI Jumlah Penduduk berusia 5 tahun keatas DIKALI 100%
221	Dinas Komunikasi dan Informatika	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase OPD yang secara aktif menggunakan data statistik (seperti data demografi, ekonomi, sosial, lingkungan) sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah dibandingkan dengan total jumlah OPD. Penggunaan data statistik ini mencakup pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi untuk membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik / Jumlah total OPD x 100%
222	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat keamanan informasi pemerintah*	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah adalah ukuran seberapa efektif pemerintah daerah melindungi data dan informasi digitalnya dari ancaman seperti akses tidak sah, kebocoran data, serangan siber, dan kerusakan sistem. Indikator ini menilai kesiapan teknis, kebijakan, dan prosedur keamanan informasi yang diterapkan di lingkungan pemerintahan.	Jumlah item keamanan terpenuhi / Jumlah total item yang diuji x 100%
223	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat Kematangan dan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat kematangan dan implementasi sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) adalah pengukuran sejauh mana sebuah organisasi telah mengimplementasikan dan memelihara SMKI yang efektif.	
224	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Disparitas harga	Rupiah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perbedaan harga suatu komoditas yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya	Selisih
225	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	juta \$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ekspor Bersih Perdagangan (Net Exports) adalah selisih antara nilai total ekspor dan nilai total impor suatu negara dalam periode tertentu (nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor)	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
226	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengacu pada total unit BPR yang memiliki izin usaha aktif dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran	Jumlah BPR aktif terdaftar di OJK
227	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	umlah UKM Non BPR/LKM (KSP/USP) mengacu pada jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak termasuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta tidak beroperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Indikator ini mencerminkan jumlah UKM yang bergerak di sektor non-keuangan.	Jumlah UKM Non BPR/LKM (KSP/USP)=Total UKM Terdaftar-(Jumlah BPR+Jumlah LKM+Jumlah KSP+Jumlah USP)
228	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi PDRB net ekspor barang dan jasa/ Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Besar ekspor bersih (ekspor - impor) berkontribusi terhadap total nilai ekonomi suatu wilayah	Kontribusi PDRB net ekspor barang dan jasa/ Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)
229	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Ekspor Barang dan Jasa	Rupiah	Badan Pusat Statistik	Inmendagri 2 2025						
230	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	Badan Pusat Statistik	Inmendagri 2 2026						
231	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	Kontribusi Sektor Perdagangan = (Nilai Tambah Sektor Perdagangan / PDRB Total dengan Migas) * 100%
232	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa MIGAS	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa MIGAS	Kontribusi Sektor Perdagangan = (Nilai Tambah Sektor Perdagangan / PDRB Total Tanpa Migas) * 100%
233	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	Kontribusi Sektor Industri = (Nilai Produksi Sektor Industri / Total PDRB) x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
	dan Perdagangan			dan Perdagangan							
234	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang memenuhi kriteria sehat secara kelembagaan, usaha, dan keuangan, serta aktif menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan terdaftar serta terverifikasi oleh Dinas Koperasi setempat.	Persentase Koperasi Berkualitas = Jumlah koperasi berkualitas / Jumlah total koperasi x 100%
235	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro (baik individu maupun kelompok) yang bertransformasi menjadi wirausaha mandiri dan produktif, ditandai dengan kemampuan menjalankan usaha secara berkelanjutan, inovatif, serta memiliki legalitas, akses pasar, dan pembukuan dasar.	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun berjalan~Jumlah pada tahun sebelumnya / Jumlah pada tahun sebelumnya x 100%
236	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	Unit	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penambahan jumlah industri kecil dan menengah adalah selisih antara jumlah unit IKM yang terdaftar pada periode berjalan dengan periode sebelumnya dalam wilayah kota	Penambahan Jumlah IKM = Jumlah IKM Tahun Ini~Jumlah IKM Tahun Lalu
237	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	kenaikan jumlah atau persentase UMKM yang mengalami peningkatan kapasitas usaha melalui kegiatan pemberdayaan dalam periode tertentu	(Jumlah UMKM yang mendapatkan intervensi pemberdayaan/jumlah total UMKM sasaran periode yang sama)x100%
238	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan , Sekretariat Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah upaya dalam mencapai dalam memperbesar proporsi pemanfaatan produk yang diproduksi oleh industri dalam negeri serta produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri = Nilai Pengadaan Produk Dalam Negeri / Total Nilai Pengadaan x100%Persentase Penggunaan Produk UMKM = Nilai Pengadaan Produk UMKM / Total Nilai Pengadaan x100%
239	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku adalah ukuran proporsi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dilakukan pengujian dan penandaan tera ulang resmi serta masih dalam masa berlaku, dibandingkan dengan total jumlah UTTP yang digunakan dalam kegiatan perdagangan atau layanan publik.	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah = Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku / Total UTTP yang Digunakan x 100%
240	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Realisasi Jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) / Target jumlah nilai penjualan barang ke kab/kota lain dalam 1 tahun (dalam juta rupiah) x 100%
241	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase eksportir yang aktif menggunakan SKA	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Eksportir yang aktif menggunakan SKA (Surat Keterangan Asal) adalah perusahaan yang terdaftar dan menggunakan sistem e-SKA untuk mendapatkan dokumen SKA sebagai bukti asal barang ekspor.	Persentase Eksportir Aktif Menggunakan SKA = (Jumlah Eksportir Aktif Menggunakan SKA / Jumlah Total Eksportir) * 100%.
242	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	IKM (Industri Kecil Menengah) yang memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah IKM yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan daya saing, mendapatkan informasi pasar, dan mengakses berbagai layanan pemerintah seperti sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN-IK).	Persentase IKM yang Menggunakan SIINAS = (Jumlah IKM yang Menggunakan SIINAS / Total Jumlah IKM) x 100%
243	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang memiliki izin usaha adalah UUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) dan IUI-IKM (Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah)	Persentase IKM dengan izin usaha = (Jumlah IKM dengan izin usaha / Total jumlah IKM) x 100
244	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase ini menunjukkan proporsi jumlah hasil pemantauan atau inspeksi terhadap industri kecil dan menengah (IKM) yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI), dibandingkan dengan total jumlah IUI yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam periode tertentu.	Jumlah Hasil Pemantauan IKM dengan IUI / Jumlah IUI yang Dikeluarkan x 100%
245	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kegiatan pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait terhadap keseluruhan izin yang telah diterbitkan untuk Perluasan Industri Kecil dan Industri Menengah (IPUI).	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan / Jumlah IPUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan x 100%
246	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kegiatan pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait terhadap total izin yang diberikan	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan atas IUKI dan IPKI di daerah / Jumlah IUKI dan IPKI yang diterbitkan di daerah x 100%
247	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	proporsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang telah menjalani proses penilaian kesehatan sesuai dengan pedoman resmi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti permodalan, kualitas aktiva, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan jatidiri koperasi.	Persentase KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya = ((Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya)/Jumlah Total KSP/USP)x100%
248	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase kapasitas kelembagaan koperasi	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	proporsi koperasi yang memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh instansi terkait (misalnya Dinas Koperasi atau lembaga pengawas koperasi)	Persentase kapasitas kelembagaan koperasi = (jumlah koperasi dengan kapasitas kelembagaan memadai/jumlah total koperasi yang dinilai)X100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
249	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase koperasi aktif	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi koperasi yang aktif beroperasi dibandingkan dengan total jumlah koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah. Koperasi dianggap aktif jika secara rutin melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggota	Persentase koperasi aktif = (Jumlah koperasi aktif/Jumlah seluruh koperasi)x100%
250	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi koperasi yang memenuhi kewajiban hukum dan administratif sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kepatuhan ini mencakup pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.	Persentase Koperasi Patuh = (Jumlah Koperasi Patuh/Jumlah Seluruh Koperasi)×100%
251	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan adalah proporsi jumlah pelaku usaha di sektor pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memiliki izin usaha resmi seperti IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan), SIUP Pusat Perbelanjaan, IUTM (Izin Usaha Toko Modern), IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan), atau SIUP Toko Swalayan, terhadap total jumlah pelaku usaha di sektor tersebut.	Persentase Kepatuhan Perizinan = Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin Resmi / Total Pelaku Usaha yang Beroperasi x 100%
252	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Pemberdayaan koperasi merupakan Koperasi yang secara aktif mengikuti atau menerima program, pelatihan, pendampingan, atau fasilitas yang bertujuan meningkatkan kemampuan kelembagaan dan operasional sedangkan Perlindungan koperasi adalah Koperasi yang mendapat pengawasan, bantuan hukum, konsultasi, atau perlindungan lain yang mendukung kelangsungan usaha dan perlindungan hak anggota. Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan dihitung sebagai perbandingan jumlah koperasi yang menerima kedua layanan tersebut dengan total koperasi yang terdata dalam periode pengukuran.	Persentase = (Jumlah koperasi yang menerima kedua layanan /jumlah total koperasi yang terdata)x100%
253	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pembinaan terhadap pengelola pasar	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pembinaan terhadap pengelola pasar adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kualitas pengelolaan pasar.	(Jumlah pengelola pasar yang dibina / Jumlah total pengelola pasar) x 100%.
254	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penataan sarana distribusi perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, mengembangkan, dan mengoptimalkan berbagai tempat yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen.	Persentase Penataan = (Jumlah Sarana Ditata / Total Sarana) x 100%
255	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota)	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri adalah ukuran seberapa besar capaian target pembangunan industri (termasuk indikator turunan) yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu, dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) yang mengacu pada RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional).	Capaian Aktual Indikator Pembangunan Industri / Target Sasaran Indikator dalam RPIK x 100%
256	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) merujuk pada peningkatan jumlah, skala, dan daya saing usaha kecil dan menengah di suatu wilayah atau negara.	((Jumlah IKM tahun ini - Jumlah IKM tahun lalu) / Jumlah IKM tahun lalu) * 100%
257	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase perusahaan yang terdaftar	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perusahaan yang terdaftar (listed company) adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham (stock exchange)	Persentase = (Jumlah Perusahaan yang Terdaftar / Jumlah Total Perusahaan) x 100%
258	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	persentase Perubahan jumlah pelaku usaha mikro dalam periode waktu tertentu (misalnya per tahun)	Pertumbuhan = ((jumlah pelaku usaha mikro pada tahun sekarang-jumlah pelaku usaha mikro pada tahun sebelumnya)/(Jumlah pelaku usaha mikro pada tahun sebelumnya)x100%
259	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Pertumbuhan KSP/USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam mengukur peningkatan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam dari instansi yang berwenang.	Pertumbuhan KSP/USP Berizin = ((Jumlah KSP/USP Berizin Tahun T-Jumlah KSP/USP Berizin Tahun T-1)/Jumlah KSP/USP Berizin Tahun T-1)×100%
260	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Bermitra dihitung sebagai persentase kenaikan jumlah pelaku usaha mikro yang bermitra pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya (misalnya tahun berjalan vs tahun sebelumnya).	pertumbuhan = ((jumlah pelaku usaha mikro bermitra tahun sekarang-jumlah pelaku usaha mikro bermitra tahun sebelumnya)/jumlah pelaku usaha mikro bermitra tahun sebelumnya)X100%
261	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	mengukur tingkat peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti program pelatihan dalam kurun waktu tertentu (misalnya tahunan). Pelatihan yang dimaksud mencakup kegiatan peningkatan kapasitas yang bersifat formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta, LSM, atau institusi pendidikan	Pertumbuhan = ((jumlah pelaku usaha mikro yang megikuti pelatihan pada tahun sekarang-jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya)/jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan pada tahun sebelumnya)X100%
262	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Σ Volume usaha Koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya / Σ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya x 100%
263	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Σ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) / Σ Jumlah UMKM x 100%
264	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			(Σ Wirausaha tahun berjalan - Σ Wirausaha tahun sebelumnya) / Σ Wirausaha tahun sebelumnya x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
265	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: a. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% dan seterusnya
266	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya:- Capaian 100% --> Bobot maksimal 30%- Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27%- Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24%dan seterusnya
267	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	c. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% dan seterusnya
268	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	d. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% dan seterusnya
269	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	e. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% dan seterusnya Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%
270	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%
271	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibagi dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan dikali 100%
272	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibagi seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan dikali 100%
273	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Informasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini berarti ketersediaan data dan informasi yang menyangkut berbagai aspek industri—seperti jumlah dan jenis industri, kapasitas produksi, izin usaha, lokasi, perkembangan investasi, dan kinerja industri—yang terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan selalu diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi terbaru.	Jumlah Informasi Industri
274	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%
275	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kompetensi masyarakat	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase individu masyarakat yang mengalami peningkatan kapasitas/kompetensi setelah mengikuti pelatihan, diklat, atau penyuluhan tertentu. Peserta yang setelah mengikuti diklat/penyuluhan dinyatakan mengalami peningkatan kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan. Dapat dinilai melalui pre-test/post-test, observasi, atau evaluasi instruktural.	Persentase Peningkatan Kompetensi = (Jumlah peserta yang kompetensinya meningkat/Jumlah total peserta pelatihan/penyuluhan)×100%
276	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase dari total pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup (pencemaran, kerusakan, konflik) yang telah ditindaklanjuti dan/atau diselesaikan sesuai prosedur oleh instansi terkait.	Persentase Penanganan = (Jumlah pengaduan yang ditangani/ Jumlah total pengaduan yang teregistrasi/masuk)×100%
277	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan Kehati (PERSENTASE RTH)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik publik maupun privat, yang tersedia dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk tujuan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (Kehati), dibandingkan dengan luas wilayah administrasi suatu daerah (kota/kabupaten).	Persentase RTH = (Luas RTH yang Mendukung Kehati/Luas Wilayah Administratif Daerah)×100%
278	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Cakupan wilayah, sektor, atau jumlah kegiatan/usaha yang telah dilakukan upaya pengendalian pencemaran (air, udara, tanah) dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan program atau kebijakan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Cakupan Pengendalian = (Jumlah Lokasi atau Kegiatan yang Telah Dilakukan Pengendalian/Jumlah Total Lokasi atau Kegiatan yang Perlu Dikendalikan)×100%
279	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi kelompok/individu masyarakat yang aktif berperan dalam kegiatan atau program lingkungan hidup seperti	Persentase Partisipasi = (Jumlah masyarakat atau kelompok yang aktif dalam PPLH/Jumlah total masyarakat atau kelompok sasaran)×100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
		Pengelolaan Lingkungan Hidup								pelestarian, pengawasan, dan inovasi lingkungan terhadap total kelompok masyarakat di wilayah tersebut.	
280	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tidak dapat ditentukan		Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Persentase total (akumulatif) pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berhasil dicapai dalam kurun waktu tertentu (misalnya sejak tahun dasar hingga tahun berjalan), dibandingkan dengan total emisi yang diperkirakan terjadi tanpa intervensi (business as usual/BAU).	Penurunan Kumulatif = ((Total Emisi Baseline (akumulatif) – Total Emisi Tahun Berjalan(akumulatif)) / Total Emisi Baseline (akumulatif)) × 100%
281	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Kep.Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,No.129/2024 tentang Indeks kualitas lingkungan	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indeks Kualitas Air adalah angka yang menunjukkan kondisi kualitas air berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi dari sampel badan air (sungai, danau, atau air tanah)	IKA = f(Parameter Fisika+Parameter Kimia+Parameter Biologi)
282	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Kep.Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,No.129/2024 tentang Indeks kualitas lingkungan	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indeks yang menunjukkan tingkat kerusakan atau keberlanjutan lahan berdasarkan erosi, pencemaran, kandungan organik tanah, dan parameter kesuburan lainnya	IKL = f(Tingkat Erosi,pH Tanah,C-Organik,Kerapatan Massa,Lainnya)
283	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	Dinas Lingkungan Hidup		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dalam satu nilai indeks (skor 0–100), yang mencakup tiga komponen utama yaitu ; Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan (ITL)	IKLH = (IKU+IKA+ITL) / 3 x 100%
284	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Kep.Dirjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,No.129/2024 tentang Indeks kualitas lingkungan	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indeks Kualitas Udara merupakan nilai yang menunjukkan tingkat pencemaran udara berdasarkan konsentrasi parameter polutan (PM2.5, PM10, SO ₂ , NO ₂ , CO, O ₃) di atmosfer	IKU = f(PM2.5, PM10, SO ₂ , NO ₂ , CO, O ₃)
285	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pengukuran terhadap tingkat kepatuhan para pelaku usaha atau kegiatan (industri, jasa, proyek, dll.) terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku di tingkat daerah kota	Persentase Ketaatan = Kegiatan yang Taat terhadap Izin dan PUU LH / Total Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Jumlah Usaha x 100%
286	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 19 2024			Tahunan			1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH 2. SDM PENGELOLA SAMPAH 3.SARANA DAN PRASARANA (PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH) 4. ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH 5. SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PENGELOLAAN SAMPAH 6. ACCEPTABILITY & iMPLEMENTASI 7. CAPAIAN TERHADAP TARGET DAN KAPASITAS 8. EFISIENSI ANGGARAN (RASIO INCREMENTAL CAPAIAN DAN TARGET PER KELAS ANGGARAN) 9. KOTA BERSIH (PENILAIAN ADIPURA) 10. NILAI IKA (INDEKS KUALITAS AIR), KOMPONEN DARI IKLH
287	Dinas Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota / Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung x 100%
288	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dapat bervariasi tergantung pada skala sistem yang digunakan dan daerah yang dilayani. Sistem yang lebih kecil dapat melayani 2-5 rumah tangga, sedangkan sistem komunal dapat melayani hingga ratusan rumah tangga.	Persentase = [(Jumlah Rumah Tangga dengan Layanan Pengolahan) / (Total Jumlah Rumah Tangga)] * 100%
289	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah	persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	persentase jumlah sampah yang berhasil dikelola melalui seluruh tahapan pengelolaan (3R, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir) dengan jumlah total sampah yang dihasilkan.	Persentase Pengelolaan sampah = (Jumlah sampah yang dikelola/jumlah total timbunan sampah)X100%
290	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	proporsi limbah B3 yang dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan dari total limbah B3 yang dihasilkan dalam satu periode pelaporan tertentu. Pengelolaan dimaksud mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan akhir oleh pihak yang memiliki izin resmi	Persentase Limbah B3 yang Terkelola = (Jumlah Limbah B3 yang Dikelola Sesuai Ketentuan/Jumlah Total Limbah B3 yang Dihasilkan)×100%
291	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi GRK (%) kumulatif	persen	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.	Persentase penurunan emisi GRK daerah Kumulatif = (Akumulasi penurunan emisi GRK total selama periode base year hingga tahun t/akumulasi emisi GRK total baseline selama periode base year hingga tahun t)X100%
292	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase penurunan emisi GRK (%) tahunan	persen	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.	Persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t = (penurunan emisi GRK total sektoral tahun t/emisi GRK total sektoral baseline tahun t)X100%
293	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase jumlah rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diakomodasi atau ditindaklanjuti ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (misalnya RPJMD, Renstra, RTRW, Rencana Tata Bangunan, dll), dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari KLHS tersebut.	Persentase Tindak Lanjut KLHS = (Jumlah Rekomendasi KLHS yang Ditindaklanjuti/ Jumlah Total Rekomendasi KLHS)×100%
294	Dinas Lingkungan Hidup	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kelurahan	Semesteran		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara penuh (minimal 2–3 kali per minggu) oleh petugas resmi atau penyedia layanan sampah yang terorganisasi.	(Persentase Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah = (Jumlah Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan / Total Rumah Tangga) × 100%
295	Dinas Lingkungan Hidup	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Semesteran		Persentase volume atau berat timbunan sampah yang masuk dan diproses di fasilitas pengolahan sampah (seperti TPA, TPS 3R, incinerator, komposter, dll) dibandingkan dengan total timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.	Persentase Timbunan Sampah yang Terolah = (Jumlah Sampah yang diolah di fasilitas pengolahan / Total Timbunan Sampah) × 100%
296	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi usaha/kegiatan yang mematuhi ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dari total usaha/kegiatan yang diawasi	Persentase Ketaatan = (Jumlah usaha atau kegiatan yang mematuhi izin lingkungan dan peraturan/Jumlah total usaha/kegiatan yang diawasi)×100%
297	Dinas Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	Dinas Lingkungan Hidup		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kota mengacu pada sejauh mana sistem pengelolaan sampah (dari sumber hingga pemrosesan akhir) telah dilaksanakan secara	Persentase Sampah Terkelola = Jumlah Sampah yang Dikelola /Total Sampah yang Dihasilkan Volume x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
										menyeluruh dan sesuai standar oleh pemerintah kota, swasta, dan masyarakat, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan	
298	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	proporsi jumlah sampah yang berhasil diolah oleh fasilitas resmi terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Fasilitas pengolahan yang dimaksud dapat mencakup Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), bank sampah, dan unit pengolahan berbasis masyarakat (3R: Reduce, Reuse, Recycle).	Persentase Timbulan Sampah terolah = (Jumlah sampah terolah di fasilitas/jumlah total timbulan sampah)x100%
299	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Persentase pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satu tahun berjalan dibandingkan dengan emisi pada tahun dasar (baseline), sebagai hasil dari implementasi kebijakan, program, atau aksi mitigasi perubahan iklim.	Penurunan Tahunan = ((Emisi Baseline – Emisi Tahun Berjalan) / Emisi Baseline) × 100%
300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan perkotaan terhadap air minum air aman	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Aman adalah penduduk di perkotaan yang mendapatkan akses air minum perpipaan di wilayah layanan minimal 12 jam/hari dengan kualitas air kran rumah sesuai standar air minum Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan	Cakupan layanan = (Jumlah Penduduk Perkotaan yang menerima akses air minum aman/seluruh Jumlah Penduduk Perkotaan) x 100
301	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kapasitas air baku	m3/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
302	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 86 2017	Statistik	Kelurahan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penduduk yang menggunakan sumber air minum layak untuk kebutuhan sehari-hari.	Persentase Penduduk akses air minum layak = (Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Layak / Total Penduduk) × 100%
303	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kecamatan	Semesteran		Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi layak (seperti jamban leher angsa) dan aman, yaitu limbah tinja diolah di tempat atau dialirkan ke sistem pengolahan yang sesuai standar sanitasi.	(Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman) = (Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman / Total Rumah Tangga) × 100%
304	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 18 2020	Statistik	Kelurahan	Semesteran		Persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang memperoleh air minum dari sistem perpipaan resmi (PDAM atau penyedia sejenis) sebagai sumber utama air minum di rumah.	Persentase Rumah Tangga Perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan = (Jumlah Rumah Tangga Perkotaan yang memiliki akses air minum perpipaan / Total Rumah Tangga Perkotaan) × 100%
305	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Inmendagri 2 2025						
306	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Akses Sanitasi Layak adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat	Persentase rumah tangga sanitasi layak = (Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL) atau Sistem Terpusat /Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya) x 100
307	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kawasan rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.	Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota / Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota x 100%
308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai.	Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota / Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota x 100%
309	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Irigasi yang berfungsi untuk mengairi dan memenuhi kebutuhan air dari berbagai jenis tanaman atau komoditas yang ditanam dalam satu area atau wilayah.	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dioperasikan dan dipelihara / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota x 100%
310	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jaringan irigasi meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya dalam kondisi baik untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.	Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota x 100%
311	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penduduk yang telah mendapatkan akses terhadap air minum, baik melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N / Jumlah total penduduk kabupaten/kota x 100%
312	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Penduduk yang memiliki fasilitas berupa kloset yang menggunakan leher angsa, dan bangunan bawah berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir atau berupa Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	(Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N) / Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100%
313	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diproses sesuai peraturan dan prosedur serta dikeluarkan oleh instansi berwenang.	Permohonan PBG & SLF yang diproses terhadap permohonan PBG & SLF yang masuk / Peningkatan jumlah permohonan PBG & SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG & SLF yang telah diterbitkan x 100%
314	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Panjang jalan kewenangan Kota dalam kondisi baik dan sedang.	(Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km) / Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km) x 100%
315	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja pada tahun berjalan / Jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota x 100%
316	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi pengawasan tertib usaha terhadap badan usaha jasa konstruksi, pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengawasan pemanfaatan produk	(rasio pengawasan tertib usaha + rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi + rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk) / 3

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
		peraturan perundang-undangan								penyelenggaraan jasa konstruksi oleh pengguna jasa konstruksi.	
317	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha yang terbit sesuai dengan Peraturan Kepala ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBK KKPR-nya oleh pemohon
318	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang adalah setiap aktivitas atau tindakan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dan membutuhkan penegakan hukum oleh pihak berwenang.	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun / Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun x 100%
319	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah indikator penting yang menunjukkan efektivitas penanggulangan bencana.	Jumlah
320	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Capaian layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran merujuk pada keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) dalam menangani kebakaran, menyelamatkan korban, dan melakukan evakuasi secara efektif dan efisien.	Persentase Capaian = (Jumlah Layanan yang Diberikan / Total Layanan yang Harus Diberikan) x 100%
321	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran	Persentase = (Jumlah Korban yang Dievakuasi / Jumlah Total Korban yang Terdampak) x 100%
322	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap / Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%
323	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Waktu tanggap (response time) dalam penanganan kebakaran adalah waktu yang dibutuhkan dari saat menerima informasi atau laporan hingga tiba di lokasi kebakaran dan siap memberikan layanan pemadaman	Jumlah
323	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	TFR = Total Fertility Rate	bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu
										Jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15–49 tahun) dalam suatu periode waktu tertentu.	pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama
											i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49
											K = bilangan kontanta biasanya 1000
324	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15–49 tahun) yang sedang menggunakan, atau pasangannya sedang menggunakan, setidaknya satu metode kontrasepsi modern pada saat pengumpulan data dilakukan. Meliputi sterilisasi perempuan (MOW), sterilisasi pria (MOP), pil, IUD (spiral), suntik, implan, kondom pria, kondom wanita, metode amenore laktasi (MAL), dan metode modern lainnya yang diakui secara medis.	mCPR=(Jumlah perempuan usia 15–49 tahun yang menggunakan metode kontrasepsi modern/Jumlah total perempuan usia 15–49 tahun)×100%
325	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase capaian indikator Kota Layak Anak (KLA) yang telah dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan total indikator yang ditetapkan.	Capaian KLA = (Jumlah Indikator yang Tercapai/Jumlah Total Indikator)×100%
326	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	IKG mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAKperempuan.	
327	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Badan Pusat Statistik	Inmendagri 2 2025			Tahunan			IPM= $\sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})}$ x 100 IPG=(IPM Perempuan)/(IPM Laki-laki) x 100
328	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait di Kota adalah proporsi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan mendapatkan penanganan resmi dari instansi terkait (seperti Dinas Sosial, P2TP2A, kepolisian, dinas kesehatan) dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan total jumlah anak korban kekerasan yang dilaporkan di wilayah Kota tersebut.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani = Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi / Total Anak Korban Kekerasan yang Dilaporkan x 100%
329	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anak yang tergolong dalam kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan telah menerima layanan komprehensif dari lembaga pemerintah dan/atau non-pemerintah.	Persentase Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif = (Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif/ Jumlah Total AMPK)×100%
330	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anggaran responsif gender adalah proporsi belanja langsung yang telah dianalisis dan dikategorikan sebagai responsif gender terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikator ini menunjukkan sejauh mana pengalokasian anggaran pada belanja langsung dalam APBD telah memasukkan perspektif	Persentase Anggaran Responsif Gender = (Jumlah anggaran belanja langsung responsif gender / Total belanja langsung APBD) x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
	Keluarga Berencana			Keluarga Berencana						gender, yaitu memperhatikan kebutuhan, peran, dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.	
331	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD adalah proporsi anggaran dalam belanja langsung pemerintah daerah yang dialokasikan secara khusus untuk program atau kegiatan yang mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Persentase ARG = Jumlah Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung / Total Belanja Langsung APBD x 100%
332	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase wanita kawin usia 15–49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran, namun tidak menggunakan kontrasepsi	Unmet Need (%)=(Jumlah PUS dengan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Jumlah total PUS)×100%
333	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase unmet need mengukur proporsi wanita usia subur (15-49 tahun) yang ingin menunda, menghentikan kehamilan, atau tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi baik modern maupun tradisional	Unmet Need = Jumlah wanita usia 15-49 tahun yang ingin menunda/menghentikan kehamilan tetapi tidak menggunakan KB / Jumlah total wanita usia 15-49 tahun yang membutuhkan KB x 100%
334	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase keluarga yang aktif berpartisipasi dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	Persentase=(Jumlah keluarga yang aktif dalam kelompok kegiatan/Jumlah total keluarga sasaran)×100%
335	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern adalah proporsi wanita usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada suatu waktu tertentu dibandingkan dengan total wanita usia subur di wilayah tersebut.	mCPR = Jumlah wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern / Jumlah total wanita usia 15-49 tahun x 100%
336	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	ersentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif adalah rasio antara jumlah perempuan korban yang menerima minimal 3 dari 4 jenis layanan utama dengan total jumlah perempuan korban yang terdata. Hal ini mengukur cakupan pelayanan komprehensif yang diterima oleh perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang mencakup layanan medis, psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial.	Persentase Layanan Komprehensif = (Jumlah perempuan korban yang menerima layanan komprehensif / Jumlah total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terdata) x 100%
337	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan adalah angka yang menunjukkan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dalam satu tahun, diukur per 100.000 perempuan di wilayah tertentu.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan = Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan / Jumlah Penduduk Perempuan x 100%
338	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Rasio layanan peningkatan kualitas hidup keluarga (per 1000 jumlah keluarga)	Rasio	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Rasio layanan peningkatan kualitas hidup keluarga (per 1.000 jumlah keluarga) merupakan indikator yang mengukur seberapa banyak keluarga yang menerima layanan peningkatan kualitas hidup dibandingkan dengan total jumlah keluarga dalam suatu wilayah. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas program-program kesejahteraan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.	Rasio=(Jumlah Keluarga Penerima Layanan/Total Jumlah Keluarga)×1.000
339	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	TFR (Total Fertility Rate) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang masa reproduksinya (biasanya usia 15-49 tahun) jika tingkat kelahiran pada periode tertentu tetap konstan	TFR dihitung dengan menjumlahkan angka kelahiran spesifik umur (ASFR) wanita usia reproduksi (biasanya dalam kelompok usia 5 tahun), kemudian dikalikan dengan interval usia (biasanya 5 tahun)
340	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	TPAK = (Jumlah angkatan kerja perempuan/jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas)×100%
341	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase instansi pemerintah (pusat/daerah) yang menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia anak dalam proses perencanaan, evaluasi program, dan/atau penyusunan kebijakan publik.	Tingkat Pemanfaatan (%)=(Jumlah instansi yang memanfaatkan data gender dan/atau anak / Total instansi yang disurvei)×100%
342	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase ARG Daerah	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 19 2024			Tahunan			% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG
343	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus x 100%
344	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
	Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif		Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana							
345	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 19 2024			Tahunan			Total Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota / Target Fertility Rate/TFR Kabaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%
346	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 19 2024			Tahunan			Banyaknya Peserta KB aktif modern / Banyaknya pasangan usia subur x 100% (PUS) PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun
347	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 19 2024			Tahunan			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota / Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%
348	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Permendagri 19 2024			Tahunan			$\left[\text{ASFR} \right] (15-19) = \frac{K_{(15-19)}}{P_{(15-19)}} \times 1000$
349	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah			Tahunan			Pemakaian alat/cara KB saat ini (alat/cara modern) / Kebutuhan berKB yang belum terpenuhi + Pemakaian alat/ cara KB saat ini (suatu cara)
350	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah			Tahunan			
351	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah			Tahunan			
352	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah			Tahunan		Indeks Pengasuhan Remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/ anggota keluarga yang berumur remaja	
353	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah			Tahunan			
354	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah			Tahunan			
355	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Perlindungan Anak	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Inmendagri 2 2025			Tahunan			
356	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBANGGA)	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Inmendagri 2 2026			Tahunan			
357	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah gedung olahraga/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah sarana atau gedung olahraga per 10.000 penduduk.	$\left(\text{Jumlah gedung olahraga} / \text{Total penduduk} \right) \times 10.000$
358	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah gedung/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah gedung publik (misalnya gedung pertemuan, komunitas) per 10.000 penduduk.	$\left(\text{Jumlah gedung} / \text{Total penduduk} \right) \times 10.000$
359	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah grup kesenian/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah kelompok/grup kesenian yang ada per 10.000 penduduk.	$\left(\text{Jumlah grup kesenian} / \text{Total penduduk} \right) \times 10.000$

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
360	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kegiatan kepemudaan adalah segala bentuk aktivitas yang ditujukan untuk mengembangkan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita para pemuda, yang biasanya berusia 16 hingga 30 tahun.	Jumlah
361	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	segala bentuk gerakan tubuh yang dilakukan secara teratur dan terencana untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan, dan keterampilan fisik.	Jumlah
362	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang ke suatu tempat atau objek wisata tertentu untuk tujuan rekreasi, liburan, atau pengalaman pribadi lainnya	Jumlah
363	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	Klub	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pengkot adalah singkatan dari Pengurus Kota. Ini adalah struktur organisasi olahraga di tingkat kota atau kabupaten di Indonesia, yang merupakan bagian dari organisasi induk cabang olahraga (cabor) nasional.	Jumlah
364	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Organisasi pemuda, atau dalam konteks lain bisa disebut organisasi kepemudaan (OKP), adalah wadah bagi pemuda untuk berkumpul, berorganisasi, dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang	Jumlah
365	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (wisman) adalah jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari negara lain ke suatu wilayah atau negara.	Jumlah
366	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Inmendagri 2 2025						
367	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Badan Pusat Statistik	Inmendagri 2 2026						
368	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	Badan Pusat Statistik		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari aktivitas sektor pariwisata, dibandingkan dengan total PAD daerah dalam satu periode	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD = PAD dari sektor pariwisata / Total PAD x 100%
369	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	PDRB (Sektor Pariwisata) = (Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata / PDRB Total) * 100%
370	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	Badan Pusat Statistik		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku adalah persentase nilai tambah bruto (NTB) dari seluruh kegiatan ekonomi yang terkait pariwisata terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di suatu wilayah (kota/kabupaten) dalam periode waktu tertentu (biasanya per tahun).	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku = PDRB Sektor Pariwisata (harga berlaku) / Total PDRB Semua Sektor (harga berlaku) x 100%
371	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Peningkatan prestasi olah raga	Orang	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan prestasi olahraga adalah indikator yang mengukur kemajuan atau peningkatan capaian atlet atau tim olahraga dalam kompetisi lokal, regional, nasional, atau internasional dibandingkan periode sebelumnya.	Jumlah Atlet prestasi tahun berjalan – Jumlah Atlet prestasi tahun sebelumnya
372	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase atlit yang berprestasi	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Atlet yang telah meraih berbagai keberhasilan dan penghargaan dalam bidang olahraga yang mereka geluti	Persentase Atlet Berprestasi = (Jumlah Atlet Berprestasi / Total Jumlah Atlet) x 100%
373	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proses peningkatan kualitas dan efektivitas Gerakan Pramuka melalui berbagai kegiatan, termasuk pembinaan anggota dewasa, pembinaan anggota muda, pengembangan kurikulum, peningkatan infrastruktur, dan kerjasama dengan berbagai pihak	Persentase = (Jumlah Siswa/Anggota yang Memenuhi Kriteria / Total Jumlah Siswa/Anggota) x 100%
374	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif dapat dihitung dengan membandingkan perubahan jumlah atau nilai yang terkait dengan ekonomi kreatif	Persentase = ((Nilai Saat Ini - Nilai Awal) / Nilai Awal) x 100%
375	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 19 2024			Tahunan			(Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang dan Non Bintang Tahun N) - (Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun N-1) / (Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang Tahun N-1) x 100%
376	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 19 2024			Tahunan			Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham / Jumlah pelaku ekonomi kreatif x 100%
377	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara adalah ukuran pertumbuhan jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan domestik (WNI) dari berbagai daerah di Indonesia ke suatu kota dalam periode tertentu (biasanya tahunan).	(Jumlah Wisatawan Tahun Ini–Jumlah Wisatawan Tahun Lalu) / Jumlah Wisatawan Tahun Lalu x 100%
378	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan adalah ukuran perubahan (peningkatan atau penurunan) jumlah wisatawan asing dari masing-masing negara (kebangsaan) yang berkunjung ke suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya tahun ke tahun	(Jumlah Wisatawan Tahun Ini–Jumlah Wisatawan Tahun Lalu) / Jumlah Wisatawan Tahun Lalu x 100%
379	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Sumber daya pariwisata yang dikembangkan mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat alam maupun buatan manusia.	Presentase = (Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Dikembangkan / Total Sumber Daya Pariwisata) x 100%
380	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat Hunian Akomodasi (Occupancy Rate) adalah persentase penggunaan kamar/ruang yang tersedia di tempat akomodasi (hotel, penginapan, homestay, dll.) dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan total kamar yang tersedia.	Tingkat Hunian Akomodasi = Jumlah Kamar yang Terpakai / Jumlah Kamar yang Tersedia x 100%
381	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri adalah persentase pemuda yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis wirausaha, UMKM, atau usaha produktif lainnya yang dikelola secara mandiri, dibandingkan dengan total pemuda usia produktif di wilayah tersebut.	Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri / Jumlah total pemuda usia produktif x 100%
382	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah persentase pemuda yang secara aktif menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, komunitas pemuda, OSIS, organisasi mahasiswa, dll.) dan organisasi sosial kemasyarakatan (seperti LPM, Posyandu remaja, relawan sosial, komunitas lingkungan, dll.), dibandingkan dengan total pemuda di wilayah tersebut.	Jumlah pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan/sosial / Jumlah total pemuda usia produktif x 100%
383	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat / Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
384	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi / Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor) x 100%
385	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Perangkat Daerah			Tahunan			
386	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Perangkat Daerah			Tahunan			
387	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks inovasi daerah	Indeks	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran danpenilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraanpemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteridalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadikewenangan daerah (Permendagri 108/208). Maksud dalamkegiatan ini adalah mendorong kompetisi positif antarpemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat danpeningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraananakrakyat.	Indeks Inovasi Daerah = *Skor Total/Skor Total Maksimum) x 100%
388	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah investor berskala nasional PMA	investor	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Investor berskala nasional PMA adalah investor asing yang telah terdaftar dan diakui oleh lembaga resmi (misalnya BKPM) dan memenuhi kriteria cakupan nasional	Jumlah investor
389	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah investor berskala nasional PMDN	Investor	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Investor Berskala Nasional PMDN adalah investor yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan memenuhi kriteria skala nasional. Jumlah investor ini dihitung berdasarkan data registrasi dan laporan resmi investor PMDN yang memenuhi kriteria tersebut dalam periode waktu tertentu.	Jumlah Investor
390	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	0\$	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah nilai investasi PMA adalah total dana/modal asing yang telah ditanamkan dan terealisasi dalam bentuk aset tetap, modal kerja, dan investasi lainnya yang tercatat secara resmi dan dilaporkan melalui sistem OSS-RBA, BKPM, atau instansi terkait selama periode pelaporan.	Total nilai investasi
391	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Juta Rp	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Nilai investasi berskala nasional PMDN adalah jumlah total modal dalam bentuk uang yang diinvestasikan oleh seluruh investor PMDN yang memenuhi kriteria cakupan nasional dalam periode pelaporan tertentu (biasanya tahunan).	Jumlah nilai investasi dari investor PMDN yang memenuhi kriteria nasiola
392	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah usaha ekonomi kreatif	Usaha	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	umlah usaha yang bergerak dibidang aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor	Data jumlah usaha ekonomi kreatif
393	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	%	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi , Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah indikator yang menunjukkan apakah suatu daerah telah memiliki fasilitas terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat fisik. MPP bertujuan meningkatkan akses, efisiensi, transparansi, dan kenyamanan layanan publik bagi masyarakat.	Ada / Tidak ada
394	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Kontribusi PDRB industri pengolahan / Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.	Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan = (Nilai tambah sektro industri pengolahan)/Nilai PDRB Provinsi)x100%
395	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah nilai investasi yang benar-benar direalisasikan dalam periode tertentu (bukan hanya komitmen atau rencana investasi)	jumlah seluruh investasi yang sudah direalisasikan
396	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Investor	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan jumlah investor adalah selisih atau pertumbuhan jumlah investor baru yang terealisasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Investor dihitung berdasarkan entitas yang telah melakukan penanaman modal secara nyata, dan terdaftar di lembaga resmi seperti BKPM	Jumlah investor tahun ini-jumlah investor tahun lalu
397	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ketersediaan data perizinan	Persen	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase jumlah data perizinan yang tersedia dan tercatat lengkap dalam sistem terhadap seluruh data perizinan yang seharusnya ada.	Persentase Ketersediaan Data Perizinan=(Jumlah Data Perizinan yang Tercatat Lengkap/Jumlah Total Data Perizinan)×100%
398	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase peningkatan investasi di kota adalah ukuran pertumbuhan nilai realisasi investasi yang masuk ke wilayah kota (baik Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN maupun	(Jumlah nilai investasi tahun n- jumlah nilai investasi tahun n-1) di kab/kota / Jumlah nilai investasi tahun n-1 di kab/kota x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Pelayanan Terpadu Satu Pintu						Penanaman Modal Asing/PMA), dibandingkan dengan periode sebelumnya	
399	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 19 2024			Tahunan			Total Realisasi Investasi Kab/Kota Target Investasi Kap/Kota yang ditetapkan oleh BKPM / Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan x 100%
400	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Proporsi jumlah usaha mikro naik kelas	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun t terhadap total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 x 100 , dalam satuan persen	Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas = (Jumlah Usaha Mikro yang naik menjadi Usaha Kecil / Total Jumlah Usaha Mikro DIKALI)1 x 00%
401	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	persen	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	tingkat kepatuhan perusahaan penanam modal (baik Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN maupun Penanaman Modal Asing/PMA) dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah	Persentase Ketaatan=(Jumlah Perusahaan yang Taat/Jumlah Perusahaan yang Wajib Lapor)*100%
402	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	Persen	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kepatuhan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di tingkat kabupaten/kota mengacu pada jumlah bangunan yang memiliki IMB sah dibandingkan dengan total bangunan yang ada di daerah tersebut.	Rasio Kepatuhan IMB = (Jumlah Bangunan dengan IMB Sah / Total Jumlah Bangunan) x 100
403	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Rasio Kewirausahaan Daerah = (Berusaha dibantu buruh tetap daerah/Total angkatan kerja daerah) x 100%
404	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum / Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap PDRB (%)	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata	PDRB Penyedia mamin = (nilai tambah penyedia akmamin)/(nilai PDRB Provinsi) x 100%
405	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.	Volume usaha koperasi terhadap PDRB = (Volume usaha koperasi daerah/PDRB ADHB) x 100%
406	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lama proses perijinan	hari	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Lama Proses Perizinan adalah ukuran waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan proses penerbitan suatu izin, mulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon hingga diterbitkannya dokumen izin oleh instansi yang berwenang.	Lama Proses Perizinan = Tanggal Izin Terbit – Tanggal Permohonan Lengkap Diterima Rata-rata Lama Proses Perizinan = Total Lama Proses Perizinan / Banyak Permohonan Perizinan dalam satuan Waktu
407	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.	Return On Aset (ROA)= (laba bersih/total aset) x 100%
408	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase siswa yang lulus ujian akhir dari total siswa kelas akhir.	(Jumlah siswa SD/MI lulus DIBAGI Jumlah siswa kelas akhir) x 100%
409	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase siswa yang lulus ujian akhir dari total siswa kelas akhir.	(Jumlah siswa SMP/MTs lulus DIBAGI Jumlah siswa kelas akhir) x 100%
410	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs.	(Jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs DIBAGI Jumlah lulusan SD/MI)×100%
411	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka melek huruf	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.	(Jumlah penduduk usia 15+ yang melek huruf / Total penduduk usia 15+) × 100%
412	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase siswa SD/MI yang tidak menyelesaikan pendidikan.	(Jumlah siswa SD/MI putus sekolah DIBAGI Jumlah siswa tahun sebelumnya) x 100%
413	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase siswa SMP/MTs yang tidak menyelesaikan pendidikan.	(Jumlah siswa SMP/MTs putus sekolah DIBAGI Jumlah siswa tahun sebelumnya) x 100%
414	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	APK SD (Paket setara SD)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan SD terhadap total penduduk usia 7–12 tahun.	(Peserta didik paket A / Jumlah anak usia 7-12 tahun) x 100%
415	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/Paket A)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase peserta didik pada jenjang SD/MI/Paket A terhadap penduduk usia 7–12 tahun.	(Jumlah siswa SD/MI/Paket A / Jumlah penduduk usia 7–12 tahun) × 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
416	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	APK SMP (Paket setara SMP)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penduduk yang mengikuti pendidikan kesetaraan SMP terhadap total penduduk usia 13-15 tahun.	$(\text{Peserta didik paket B} / \text{Jumlah anak usia 13-15 tahun}) \times 100\%$
417	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Partisipasi Kasar (SMP/MTs/Paket B)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase peserta didik pada jenjang SMP/MTs/Paket B terhadap penduduk usia 13–15 tahun.	$(\text{Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B} / \text{Jumlah penduduk usia 13–15 tahun}) \times 100\%$
418	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Partisipasi Murni (PAUD)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anak usia 3–6 tahun yang sedang mengikuti PAUD.	$(\text{Jumlah anak usia 3–6 tahun di PAUD} / \text{Jumlah anak usia 3–6 tahun}) \times 100\%$
419	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anak usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di SD/MI/Paket A sesuai usianya.	$(\text{Jumlah anak usia 7–12 tahun di SD/MI/Paket A} / \text{Total penduduk usia 7–12 tahun}) \times 100\%$
420	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Partisipasi Murni (SMP/MTs/Paket B)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anak usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah di SMP/MTs/Paket B sesuai usianya.	$(\text{Jumlah anak usia 13–15 tahun di SMP/MTs/Paket B} / \text{Total penduduk usia 13–15 tahun}) \times 100\%$
421	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah x 100%	Jumlah
422	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Merupakan cakupan siswa SD/Sederajat yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	Jumlah peserta didik SD/Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
423	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase siswa SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Merupakan cakupan siswa SMP/Sederajat yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	Jumlah peserta didik SMP/Sederajat dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
424	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase siswa SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Merupakan cakupan siswa SD/Sederajat yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	Jumlah peserta didik SD/Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
425	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase siswa SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Merupakan cakupan siswa SMP/Sederajat yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	Jumlah peserta didik SMP/Sederajat dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%
426	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Harapan lama sekolah	tahun	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	$\text{HLS} = \text{Total Tingkat Partisipasi Sekolah pada masing-masing jenjang usia}$
427	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang mencerminkan tingkat kemampuan, akses, dan kebiasaan literasi masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menggabungkan berbagai aspek literasi seperti kemampuan membaca dan menulis, akses terhadap bahan bacaan, serta aktivitas dan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari.	$\text{IPLM} = (\text{K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}) / 4$
428	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah
429	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rasio guru/murid	Rasio	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Guru/Murid adalah ukuran perbandingan antara jumlah murid (peserta didik) dengan jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan tertentu dalam suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan tenaga pengajar dan potensi beban kerja guru, serta kualitas pembelajaran.	Jumlah Murid / Jumlah Guru
430	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Jumlah museum	unit	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Museum adalah lembaga nirlaba dan permanen yang berfungsi untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, menafsirkan, dan memamerkan warisan budaya, baik berwujud maupun tak berwujud, kepada masyarakat.	Jumlah
431	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah adalah perbandingan antara jumlah satuan pendidikan (sekolah) dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengukur kecukupan fasilitas pendidikan formal terhadap jumlah penduduk usia sekolah.	$\text{Ketersediaan Sekolah} = (\text{Jumlah Sekolah} / \text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah}) \times 10.000$
432	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase anak usia 5–6 tahun yang mengikuti layanan pendidikan anak usia dini.	$(\text{Anak usia 5–6 tahun di PAUD} / \text{Total anak usia 5–6 tahun}) \times 100\%$
433	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio jumlah peserta didik PAUD terhadap jumlah penduduk usia 3–6 tahun.	$(\text{Jumlah peserta PAUD} / \text{Jumlah anak usia 3-6 tahun}) \times 100\%$
434	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (SD/MI/Paket A)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SD/MI/Paket A terhadap total penduduk.	$(\text{Jumlah lulusan SD/MI/Paket A} / \text{Total penduduk}) \times 100\%$
435	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (SMP/MTs/Paket B)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTs/Paket B terhadap total penduduk.	$(\text{Jumlah lulusan SMP/MTs/Paket B} / \text{Total penduduk}) \times 100\%$
436	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	bentuk seni dan budaya, termasuk tari, musik, seni rupa, seni tradisi, dan berbagai kegiatan lain yang memperkaya pengalaman budaya masyarakat	Jumlah
437	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan DIBAGI Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang didaftarkan DIKALI 100%	Jumlah
438	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase guru yang memiliki ijazah minimal S1 atau D-IV sesuai standar nasional.	$(\text{Jumlah guru S1/D-IV DIBAGI Jumlah total guru}) \times 100\%$

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
439	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja DIBAGI Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah dan tinggi DIKALI 100%
440	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase pelestarian budaya	persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	upaya untuk menjaga nilai-nilai seni budaya dan tradisi agar tetap lestari, bahkan dengan perkembangan zaman	(Jumlah kebudayaan yang dilestarikan / Jumlah total kebudayaan) x 100%
441	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya	persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pelestarian cagar budaya adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan warisan budaya agar tetap lestari, sedangkan pemanfaatan cagar budaya adalah penggunaan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan atau dimanfaatkan / Jumlah total cagar budaya) x 100%
442	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian berarti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kesenian, termasuk pertunjukan, pameran, workshop, dan kegiatan seni lainnya.	Persentase Peningkatan = [(Jumlah Kegiatan Kesenian Baru - Jumlah Kegiatan Kesenian Lama) / Jumlah Kegiatan Kesenian Lama] x 100%
443	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi lembaga pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal yang telah mendapatkan izin operasional dari dinas pendidikan.	(Jumlah lembaga dengan izin / Total lembaga) x 100%
444	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	BPS	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan, dan S3.	(Jumlah Penduduk 15 tahun keatas yang berijazah pendidikan tinggi / Jumlah penduduk 15 tahun keatas) x 100%
445	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rasio guru/murid per kelas rata- rata	Rasio	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata murid yang dilayani oleh satu guru di setiap kelas. Indikator ini memberikan gambaran tentang beban mengajar guru sekaligus efektivitas pembelajaran di dalam kelas.	Jumlah murid/Jumlah guru x banyak kelas
446	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan Tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.	RLS = Total (Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan terakhir × bobot tahun pendidikan) / Jumlah total penduduk usia 15 tahun keatas
447	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dengan kondisi fisik bangunan kategori "baik".	(Jumlah SD/MI kondisi bangunan baik DIBAGI Jumlah total SD/MI)×100%
448	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase sekolah menengah (pertama & atas) yang memiliki bangunan fisik dalam kondisi baik.	(Jumlah SMP/MTs/SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik DIBAGI Jumlah total SMP/MTs/SMA/SMK/MA)×100%
449	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Terlestarikannya Cagar Budaya adalah tingkat keberhasilan dalam menjaga, memelihara, dan melindungi situs, bangunan, benda, atau warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, seni, ilmu pengetahuan, atau keunikan khas daerah agar tetap utuh dan lestari untuk generasi sekarang dan mendatang.	Jumlah cagar budaya yang terawat/terjaga / Jumlah total cagar budaya yang terdata x 100%
450	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama (SMP) adalah indikator penting untuk melihat akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah	Tingkat Partisipasi = (Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah total warga negara usia 13-15 tahun) x 100
451	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD mengukur proporsi anak-anak usia tersebut yang terlibat dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat Partisipasi = (Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun total) x 100%
452	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar mengacu pada persentase anak-anak pada usia tersebut yang secara aktif terlibat dalam sistem pendidikan dasar (sekolah dasar).	Tingkat Partisipasi = (Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun / Total Populasi Usia 7-12 Tahun) * 100
453	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	Badan Pusat Statistik	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah indikator yang mengukur jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal, tetapi mengikuti program pendidikan non-formal seperti paket A, B, atau C	Tingkat Partisipasi = (Jumlah siswa usia 7-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / Jumlah siswa usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah) x 100%
454	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan / jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan x 100%
455	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan / jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan x 100%
456	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah x 100%
457	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
458	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
459	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
460	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
461	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
462	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten
463	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
464	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
465	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
466	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
467	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
468	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
469	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan / Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan x 100%
470	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WB Tb / Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WB Tb x 100%
471	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Persen	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi / Jumlah Tenaga Kebudayaan x 100%
472	Dinas Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	Dinas Perhubungan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Konektivitas Kabupaten/Kota meliputi ketersediaan trayek angkutan untuk konektivitas transportasi darat dan ketersediaan lintas penyeberangan untuk konektivitas transportasi laut.	Konektivitas Kabupaten/Kota (KT Daerah) = (Konektivitas Transportasi Darat (KTD) x Bobot Konektivitas Transportasi Darat (WTD)) + ((Konektivitas Transportasi Laut (KTL) x Bobot Konektivitas Transportasi Laut (WTL))
473	Dinas Perhubungan	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Perhubungan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kelengkapan jalan terpasang di sepanjang jalan sesuai dengan ketentuan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelancaran semua pengguna jalan.	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang / Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan x 100%
474	Dinas Perhubungan	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	Dinas Perhubungan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perusahaan angkutan umum tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan / Jumlah perusahaan angkutan umum x 100%
475	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Koleksi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Buku di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah dibagi Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
476	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah pemustaka perpustakaan	Pemustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Pemustaka Perpustakaan (Perpustakaan Daerah) adalah pengguna perpustakaan daerah, yaitu setiap orang atau kelompok yang memanfaatkan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh perpustakaan tersebut	Jumlah pengunjung perpustakaan
477	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	jumlah perseorangan, kelompok, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan layanan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun dibagi Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
478	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah perpustakaan Sekolah, perpustakaan umum, perguruan tinggi, Perpustakaan Khusus (OPD/BUMD),Taman Baca Masyarakat (TBM)	Jumlah perpustakaan Sekolah, perpustakaan umum, perguruan tinggi, Perpustakaan Khusus (OPD/BUMD),Taman Baca Masyarakat (TBM)
479	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah ukuran seberapa besar minat dan kebiasaan masyarakat dalam membaca buku, majalah, koran, atau bahan bacaan lainnya dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan budaya literasi dan akses informasi di suatu wilayah.	Jumlah responden yang aktif membaca / Jumlah total responden x 100%
480	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Permendagri 19 2024			Tahunan			IHPKpd = 0,6 NHPe+0,4 NHPi IHPKpd = Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah, NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal, NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
481	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan SDM pengelola kearsipan adalah proses pengembangan kompetensi dan kemampuan individu yang terlibat dalam pengelolaan arsip, baik secara kuantitas maupun kualitas	Jumlah
482	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dengan baik umumnya memiliki unit kearsipan yang terstruktur, mengikuti prinsip-prinsip kearsipan, dan memiliki sumber daya yang memadai.	Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik/Total seluruh perangkat daerah x 100%
483	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah arsip yang diselamatkan dan dilindungi	Persentase = (Jumlah Arsip yang Dilindungi/Diselamatkan / Total Jumlah Arsip) * 100%
484	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip adalah ukuran sejauh mana arsip yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tersedia lengkap dan utuh sebagai bahan pertanggungjawaban untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip =Jumlah arsip yang lengkap dan utuh sesuai standar / Jumlah arsip yang wajib tersedia x 100%
485	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Psl 40 dan 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tingkat ketersediaan arsip adalah ukuran seberapa lengkap dan terkelolanya arsip yang dimiliki oleh instansi pemerintahan sebagai bahan pendukung akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah secara hukum, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi nasional sesuai ketentuan Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tingkat Ketersediaan Arsip = Jumlah arsip yang lengkap, terkelola, dan terdokumentasi sesuai standar / Jumlah arsip yang seharusnya tersedia x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
486	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan yang memenuhi kriteria persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum lusa bangunn serta kesehatan penghuni, mampu dijangkau seluruh lapisan masyarakat serta memenuhi prasyarat tata ruang, ketersediaan PSU, dan kesesuaian hak atas tanah dan rumah	Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan / Jumlah rumah tangga x 100
487	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Warga negara korban bencana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni maupun rehabilitasi rumah	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N / Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N x 100%
488	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Kota mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N / Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N x 100%
489	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kawasan kumuh di bawah 10 Hektar merupakan kewenangan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) / Target luas kawasan kumuh dibawah10 Ha pada tahun N x 100%
490	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak memenuhi standar minimal keselamatan, keamanan dan kenyamanan penghuninya, yang ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan rehabilitasi sehingga menjadi Rumah Layak Huni (RLH)	Jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N / Jumlah RTLH pada Tahun-N x 100%
491	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perumahan yang memiliki kelengkapan dasar fisik, fasilitas serta sarana penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan lingkungan perumahan	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N / Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N x 100%
492	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tanah garapan didefinisikan sebagai sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak, yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berhak, dan dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.	Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani / Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat x 100%
493	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Kelurahan lengkap berkualitas merupakan kelurahan yang telah dilakukan pemutakhiran basis data pertanahan yang valid, akurat, dan dapat dipercaya untuk mendukung pembangunan	Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas / Jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota x 100%
494	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Permendagri 19 2024	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah.	Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah / Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah x 100%
495	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	BPS	Indikator Makro	Statistik	Kelurahan	Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi atau persentase dari jumlah penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Persentase penduduk miskin = Jumlah penduduk miskin/Jumlah seluruh penduduk
496	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase LPM aktif	%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase LPM aktif adalah proporsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara rutin menjalankan fungsi dan kegiatannya di wilayah tertentu dibandingkan dengan total LPM yang terdaftar	Persentase LPM Aktif = Jumlah LPM yang Aktif / Jumlah Total LPM Terdaftar x 100%
497	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	persentase korban bencana yang menerima layanan perlindungan dan jaminan sosial, termasuk kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, tempat penampungan, dukungan psikososial, serta layanan khusus bagi kelompok rentan, selama fase tanggap darurat dan pasca bencana.	Persentase = (Total korban bencana yang membutuhkan layanan/Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya)×100%
498	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase LKK dan LAK yang aktif	%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	persentase LKK dan LAK yang aktif beroperasi dan melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah total LKK dan LAK yang terdaftar	Persentase LKK dan LAK yang Aktif = Jumlah LKK dan LAK yang Aktif / Jumlah Total LKK dan LAK Terdaftar x 100%
499	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	(Jumlah penduduk miskin / total penduduk) × 100%
500	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Persentase PSKS, baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan, yang aktif melaksanakan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam suatu periode tertentu	Persentase = (Jumlah PSKS yang Melaksanakan Pelayanan Sosial/Total PSKS yang Terdaftar)×100%
501	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase validitas data kemiskinan	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	persentase data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi (verivali) secara akurat, mencakup identitas dan kondisi sosial ekonomi individu atau rumah tangga, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.	Persentase Validitas=(umlah Data Kemiskinan yang Valid/Total Data Kemiskinan yang TerdaftarJ)×100%
502	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PKK aktif	%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase PKK yang aktif mengukur proporsi kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang secara rutin menjalankan kegiatan, program, dan fungsinya di wilayah tertentu dibandingkan dengan total PKK yang terdaftar.	Persentase PKK yang Aktif = Jumlah PKK yang Aktif / Jumlah Total PKK Terdaftar x 100%
503	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu aktif	%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Posyandu aktif adalah ukuran proporsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang rutin melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai jadwal di wilayah tertentu dibandingkan dengan total Posyandu yang terdaftar	Persentase Posyandu Aktif = Jumlah Total Posyandu Terdaftar / Jumlah Posyandu yang Aktif Melaksanakan Kegiatan x 100%
504	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyantek aktif	%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat , Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Posyantek aktif adalah proporsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang secara rutin melaksanakan kegiatan, pelatihan, atau layanan teknologi tepat guna di komunitas dibandingkan dengan total Posyantek yang terdaftar	Persentase Posyantek Aktif = Jumlah Posyantek yang Aktif / Jumlah Total Posyantek Terdaftar x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
505	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Indikator ini mengukur persentase anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial selama satu tahun anggaran	Persentase = (Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti/Total Populasi Anak Terlantar yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti)×100%
506	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial selama satu tahun anggaran	Persentase = (Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti/Total Populasi Lanjut Usia Terlantar yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti)×100%
507	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Indikator ini mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Persentase = (Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti/Total Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti)×100%
508	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Proporsi dari total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti, yang telah terpenuhi kebutuhannya selama satu tahun anggaran	Persentase = (Jumlah Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti/Total Populasi Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) yang Membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti)×100%
509	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penduduk miskin	Persen	Badan Pusat Statistik	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	persentase penduduk miskin =(jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan/jumlah penduduk)X100%
510	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
511	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
512	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
513	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
514	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar / Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan x 100%
515	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar / Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti x 100%
516	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota x 100%
517	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar / Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana x 100%
518	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar /Jumlah pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana x 100%
519	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti x 100%
520	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar / Populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan x 100%
521	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar / Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota x 100%
522	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi / Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi x 100%
523	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
		dilakukan selama satu tahun									
524	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikessos)	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah			Tahunan			
525	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitas Penataan Kelurahan	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Desa yang telah terfasilitasi / Jumlah Desa x 100%
526	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kerjasama Kelurahan	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Kerjasama Desa yang telah ditetapkan dan berlaku / Jumlah Kerjasama Desa yang ditangani x 100%
527	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah LKD yang terfasilitasi / Jumlah LKD x 100%
528	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah LAD dan LMHA yang terfasilitas Jumlah LAD dan LMHA x 100%
529	Inspektorat Daerah	Indeks Integritas Nasional	Indeks	KPK	Indikator Utama Pembangunan (IUP) - RPJPD	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
530	Inspektorat Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	Inspektorat Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kedewasaan atau kematangan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu entitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengendalian terhadap kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Skor Maturitas SPIP= ΣSkor Sub-Dimensi SPIP / Jumlah Sub-Dimensi yang Dinilai
531	Inspektorat Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	Inspektorat Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Tingkatan Maturitas SPIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1;- Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2;- Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3;- Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan- Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5.Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah
532	Inspektorat Daerah	Monitoring Center for Prevention	%	Inspektorat Daerah , KPK		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah platform pengawasan dan pemantauan pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP menjadi alat bantu KPK untuk menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pencegahan korupsi secara terukur dan sistematis.	Nilai MCP = Total Nilai dari 8 Area / 8 x 100%
533	Inspektorat Daerah	Opini BPK	Predikat	Inspektorat Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Opini BPK adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil audit.	Skor
534	Inspektorat Daerah	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	Inspektorat Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1; - Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI
535	Inspektorat Daerah	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	Inspektorat Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 / Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 x 100%
536	Inspektorat Daerah	Indeks Integritas Pemerintahan Daerah	Persen	Inspektorat Daerah							
537	Inspektorat Daerah	Opini Laporan Keuangan	%	Inspektorat Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Opini Laporan Keuangan adalah pendapat profesional yang diberikan oleh auditor independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas, apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencerminkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas secara wajar.	hasil penilaian kualitatif dari auditor berdasarkan pemeriksaan dan audit atas laporan keuangan.
538	Inspektorat Daerah	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/Opini	Inspektorat Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			
539	Inspektorat Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	angka	Inspektorat Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peningkatan Kapabilitas APIP adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, audit, dan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan.	Indeks Kapabilitas APIP= Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan/sertifikasi dalam periode tertentu / Total APIP yang ada x 100%
540	Inspektorat Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (2-5)	Inspektorat Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah
541	Inspektorat Daerah	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	Inspektorat Daerah	Permendagri 19 2024			Tahunan			Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N
542	Inspektorat Daerah	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	%	Inspektorat Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK mengacu pada proses dan tingkat penyelesaian atas rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah atau instansi terkait setelah pemeriksaan laporan keuangan atau kinerja.	Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti / Jumlah Total Rekomendasi BPK ×100%
543	Kecamatan	LPM aktif (%)	Persen	Kecamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan desa atau kelurahan, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan	Jumlah LPM aktif/jumlah seluruh LPM x 100%
544	Kecamatan	Persentase LKK dan LAK yang aktif	Persen	Kecamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) yang aktif adalah lembaga-lembaga yang berperan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) yang aktif / Total seluruh LKK dan LAK x 100%

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
545	Kecamatan	Persentase satuan perlindungan masyarakat kelurahan yang aktif	persen	Kecamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kelurahan yang aktif adalah organisasi yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa, beranggotakan warga masyarakat, dan bertugas untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan gangguan ketertiban umum.	(Jumlah Linmas Aktif / Total Linmas) x 100
546	Kecamatan	PKK aktif (%)	Persen	Kecamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	kader atau anggota PKK yang secara aktif terlibat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan PKK di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional	Jumlah PKK aktif/jumlah seluruh PKK x 100%
547	Kecamatan	Posyandu aktif (%)	Persen	Kecamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	posyandu yang mampu menjalankan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan, dengan cakupan minimal lebih dari 50% untuk kegiatan-kegiatan utama seperti KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), gizi, imunisasi, KB, dan pencegahan diare	Jumlah Posyandu aktif/jumlah seluruh Posyandu x 100%
548	Kecamatan	Posyantek aktif %)	Persen	Kecamatan	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Posyantek aktif adalah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang secara aktif menjalankan fungsinya, memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat.	Jumlah Posyantek aktif/jumlah seluruh Posyantek x 100%
549	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Penyelenggaraan Tibumtranmas	Indeks	Satuan Polisi Pamong Praja	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Indeks yang mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat berdasarkan standar layanan minimal serta indikator penilaian kinerja Satpol PP.	Indeks Tibumtranmas = (Σ(SkorKomponen Penilaian × Bobot)/Skor Maksimum) × 100
550	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	gangguan yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum	(Jumlah Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan / Total Jumlah Gangguan Trantibum) x 100%
551	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Inmendagri 2 2024						
552	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penegakan Perda	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan atau penegakan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, baik melalui penindakan pelanggaran, sosialisasi, maupun penerapan sanksi administratif oleh pemerintah daerah dan aparat terkait. Indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan dan pelaksanaan hukum di tingkat daerah.	Persentase Penegakan Perda = (Jumlah Perda yang Ditegakkan/Jumlah Perda yang Berlaku) x 100%
553	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan adalah aturan hukum yang berlaku di daerah, yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah.	Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan = (Jumlah Perda/Perkada yang Ditegakkan / Jumlah Total Perda/Perkada) x 100%
554	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur wilayah tertentu. Penegakan Perda dan Perkada bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi hak-hak masyarakat	(Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan / Jumlah total Perda/Perkada yang harus ditegakkan) x 100%
555	Satuan Polisi Pamong Praja	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 18 2020	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Gangguan Trantibum (Ketenteraman dan Ketertiban Umum) yang dapat diselesaikan adalah gangguan yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.	Persentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan = (Jumlah Gangguan Trantibum yang Diselesaikan / Total Gangguan Trantibum) * 100%
556	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani / Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan x 100%
557	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%
558	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS
559	Satuan Polisi Pamong Praja	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah SOP yang tersedia / Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10 x 100%
560	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah sarana prasarana yang tersedia / Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan = 4 x 100%
561	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar / Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP x 100%
562	Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Nilai / Predikat	Kementerian Hukum dan HAM	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan suatu wilayah atau institusi dalam melaksanakan reformasi hukum. Reformasi hukum mencakup pembenahan regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	IRH = Total (skor masing-masing indikator x bobot masing-masing indikator) / Total bobot masing-masing indikator
563	Sekretariat Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerja sama	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Kerja Sama Daerah adalah indikator yang menunjukkan seberapa aktif suatu pemerintah daerah menjalin kemitraan atau kolaborasi, baik dengan sesama daerah lain, pihak swasta, maupun lembaga lain, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah
564	Sekretariat Daerah	Jumlah Penanganan Konflik	Konflik	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah Penanganan Konflik adalah indikator yang menunjukkan berapa banyak kasus konflik yang berhasil diidentifikasi, dimediasi, dan/atau diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (biasanya tahunan).	Jumlah
565	Sekretariat Daerah	Ketepatan Penetapan Perda APBD		Sekretariat Daerah Bagian Hukum , Sekretariat DPRD		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ketepatan Penetapan Perda APBD mengukur seberapa tepat waktu dan sesuai prosedur penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh pemerintah daerah.	Waktu Penetapan
566	Sekretariat Daerah	Nilai IKM	Nilai	Sekretariat Daerah	Permendagri 86 2017	Statistik		Tahunan	Februari (n+1)	IKM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang	IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsor / Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang

No	Instansi Produsen Data	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Institusi Sumber Perolehan Data	Sumber Referensi	Jenis Data	Tingkat Kedalaman Data	Jadwal Pemutakhiran	Bulan Pemutakhiran	Konsep dan Definisi	Metode Perhitungan
										diberikan oleh instansi pemerintah. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan, kinerja aparatur, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	
567	Sekretariat Daerah	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non-pangan (seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dsb.) per individu dalam satu tahun.	Pengeluaran Non-Pangan per Kapita = Total Pengeluaran Non-Pangan Rumah Tangga / Jumlah Penduduk
568	Sekretariat Daerah	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	BPS	Permendagri 86 2017	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Jumlah rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan konsumsi (baik makanan maupun non-makanan) per individu dalam satu tahun	Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita = Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / Jumlah Penduduk
569	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	Kementrian Hukum dan HAM	Inmendagri 2 2025	Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah atau aksi nyata yang telah direncanakan dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.	Persentase Capaian Aksi HAM = (Jumlah Aksi HAM yang Telah Dilaksanakan/Jumlah Aksi HAM yang Direncanakan) x 100%
570	Sekretariat Daerah	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	Sekretariat Daerah Bagian ULP		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase ini menunjukkan proporsi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan metode pengadaan kompetitif dibandingkan dengan total pengadaan yang dilakukan dalam periode tertentu.	Persentase Pengadaan Kompetitif= Jumlah pengadaan dengan metode kompetitif / Jumlah total pengadaan ×100%
571	Sekretariat Daerah	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	Sekretariat Daerah Bagian ULP	Permendagri 19 2024			Tahunan			Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan
572	Sekretariat Daerah	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	Sekretariat Daerah Bagian ULP	Permendagri 19 2024			Tahunan			Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
573	Sekretariat Daerah	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	Sekretariat Daerah Bagian ULP	Permendagri 19 2024			Tahunan			Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ
574	Sekretariat Daerah	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	Sekretariat Daerah Bagian ULP		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase ini mengukur proporsi dari proyek konstruksi yang nilai kontraknya sudah ditandatangani pada kuartal pertama suatu tahun anggaran, tetapi pelaksanaannya atau penyelesaiannya dibawa atau berlanjut ke tahun berikutnya.	Persentase Proyek Dibawa ke Tahun Berikutnya= Jumlah nilai kontrak proyek konstruksi yang ditandatangani di kuartal 1 dan berlanjut ke tahun berikutnya / Jumlah total nilai kontrak proyek konstruksi yang ditandatangani di kuartal 1 x 100%
575	Sekretariat Daerah	Persentase Penetapan RanPerda	%	Sekretariat Daerah Bagian Hukum , Sekretariat DPRD		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	Persentase Penetapan RanPerda mengukur seberapa banyak Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total RanPerda yang diajukan.	Jumlah RanPerda yang Ditetapan / Jumlah Total RanPerda yang Diajukannya ×100%
576	Sekretariat Daerah	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	Sekretariat Daerah Bagian ULP , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Statistik	Kota	Tahunan	Februari (n+1)	proporsi nilai belanja pemerintah (daerah atau pusat) yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan resmi dibandingkan dengan total nilai belanja yang dikeluarkan dalam periode tertentu.	Rasio Nilai Belanja melalui Pengadaan= Nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan / Total nilai belanja ×100%
577	Sekretariat DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Sekretariat DPRD	Permendagri 19 2024			Tahunan			1. Tepat 2. Tidak Tepat
578	Sekretariat DPRD	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Persen	Sekretariat DPRD	Permendagri 19 2024			Tahunan			Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N / Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N x 100%



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bontang



Terwujudnya Kota Bontang
Sebagai Kota Industri dan
Jasa Yang Maju, Sejahtera
dan Berkelanjutan Sebagai
Daerah Mitra IKN



RPJMD

